Danantara Indonesia

BNI
Melayani Negeri, Keberanggan Bangsa

VALUE CREATION
for Greater Impacts



2025
Laporan Keberlanjutan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk



Value Creation for Greater Impacts

BNI menciptakan nilai yang berkelanjutan dengan memastikan pertumbuhan usaha berjalan seiring dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terukur serta dikelola secara bertanggung jawab dalam jangka panjang. Kebertanjutan diposisikan sebagai penggerak nilai untuk memperkuat daya saing, ketahanan bisnis, dan kepercayaan pemangku kepentingan di tengah dinamika ekonomi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Melalui pembiayaan berkelanjutan dan peran *ESG advisory*, BNI mendukung nasabah dalam mengelola risiko dan peluang ESG, menyusun *transition roadmap* yang kredibel, serta meningkatkan kesiapan terhadap ekspektasi regulator dan investor. Dengan memperkuat kemitraan di seluruh rantai nilai, BNI mengoptimalkan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan bagi perekonomian dan masyarakat.

Pernyataan Mengenai Masa Depan

Dalam dokumen ini mungkin terdapat rencana, proyeksi, strategi, dan tujuan Perseroan, yang bukan merupakan pernyataan fakta historis dan perlu dipahami sebagai pernyataan mengenai masa depan berdasarkan hukum yang berlaku. Pernyataan mengenai masa depan tergantung pada risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan keadaan dan hasil aktual Perseroan di masa depan berbeda dari yang diharapkan atau diindikasikan. Tidak ada jaminan bahwa hasil-hasil yang diantisipasi oleh Perseroan, atau diindikasikan oleh pernyataan-pernyataan mengenai masa depan, akan tercapai.

Daftar Isi



Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan	10
Ringkasan Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	14
Pesan Direksi	18
Sekilas tentang BNI	24
Tata Kelola Keberlanjutan	31
Komitmen dan Strategi Keberlanjutan BNI	38
Sekilas Laporan Keberlanjutan	60



Sustainable Finance	67
Pencapaian Kinerja Ekonomi	68
Portofolio Keuangan Berkelanjutan	61
Obligasi Berwawasan Lingkungan	70
Pengelolaan Risiko LST pada Aktivitas Pembiayaan	72
Mitigasi dan Resiliensi Perubahan Iklim	84



Corporate Sustainability 89

Upaya Mencapai Ketahanan Iklim 90

Upaya Mencapai Ketahanan Operasional 95

Pelayanan Prima untuk Nasabah 123

Perlindungan Konsumen 139

Penagihan Kredit Beretika 141

Kebijakan Pemasaran yang Bertanggung Jawab 144

Inovasi dan Pengembangan Layanan Perbankan 146

Etika Bisnis dan Kepatuhan 162



Inclusion and Resilience 169

Penguatan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan 181

Penguatan Inklusi dan Literasi 182

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): Mewujudkan Nilai melalui BNI Berbagi 171



Verifikasi Pihak Independen 190

Lembar Pertanggungjawaban atas Laporan Keberlanjutan 194

Referensi POJK, SEOJK, dan Indeks Standar GRI, SASB, SUSBA 196

Lembar Umpan Balik 210

Lampiran: Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan

Pencapaian Kinerja 2025

Rp65,0 triliun
Pendapatan Operasional

Rp20,0 triliun
Laba Tahun Berjalan

BNI Agen46 menjangkau lebih dari
6.174 kecamatan
di Indonesia (sekitar 13% berada di wilayah 3T)
dengan **21,4 juta**
rekening nasabah



35%
Tingkat Engagement Pegawai
(Net Promoter Score/NPS)

4,43 (skala 1-5)
Indeks Kepuasan Nasabah

146,7 jam
Rerata jam pelatihan per pegawai per tahun

27.201 orang
pegawai BNI

52,2%
merupakan perempuan

6.908 mitra
Jumlah Mitra Binaan UMKM dari Rumah BUMN

Rp116,8 miliar
Realisasi Dana Program TJSL

338,9 ton CO_2eq
Emisi yang dihindarkan dari pengelolaan limbah dengan konsep Zero Waste to Landfill

6,7%
Penurunan emisi GRK cakupan 1 & 2 dari baseline tahun 2023

13,6 GJ/Rp miliar
Intensitas Energi per Pendapatan

689,8 ton CO_2eq/Rp miliar
Intensitas Emisi GRK per Pendapatan

Produk Ramah Lingkungan

Rp5,0 triliun
Realisasi *Green Bond* di 2025
Telah berpotensi menurunkan
2.534.594 ton CO_2e
Emisi GRK



USD397 juta
atau ekuivalen Rp6,6 triliun BNI
telah menyalurkan *Sustainability Linked Loan* (SLL)

Rp7.064,5 miliar
Portofolio Investasi Hijau
(*Sustainable Bond* & Surat Berharga)

Penerbitan *Sustainability Bond*
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025
sebesar **Rp5 triliun**

Rp641,0 miliar
Volume Penjualan Kartu Kredit WWF
yang Berkontribusi terhadap Pelestarian
Lingkungan

Rp196,7 triliun
Pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha
Berkelanjutan (KKUB) 22,3% dari total kredit
(Bank only)

terdiri dari:

Rp78,0 triliun
(8,8% dari total kredit bank) adalah Kegiatan
Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan

Rp118,8 triliun (13,4% dari total
kredit bank) adalah Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)

Rp74,9 miliar
Realisasi Pembiayaan BNI Jejak Kopi Khatulistiwa

Rp39 miliar
kepada 157 UMKM Penyaluran pembiayaan
kepada UMKM sektor fesyen dan kerajinan
BNI UMKM Ramah Lingkungan

196.163 rekening
dari program Ayo Menabung dengan Sampah

Kartu Kredit Amex Vibes
menggunakan **80%** berbahan
material ramah lingkungan

Penghargaan

ASRA

Silver Award
Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2026

Investing in Climate

Best Literacy for Climate Resilience
Kategori Best Social Impact
Kategori BEST Innovative Conservation
Investing on Climate Editors Choice Award 2026

investortrust

Kategori Platinum Star Awards - Green Bond Issuer
Kategori Platinum Star Awards - Big Cap
Kategori Impact Excellence Awards
Datatrust | Investortrust

Olahkarsa

Best Economic in Local Community
Indonesia Corporate Sustainability Award 2026, Olahkarsa & ACEXI

REPUBLIKA

Sustainability Reporting
Kategori Governance
Republika

BGK FOUNDATION

Leadership AA -
Excellence Leader in ESG Transparency
Indonesia ESG Leadership Awards 2026, Bumi Global Karbon (BGK) Foundation

Peringkat ESG

MSCI

MSCI A

SUSTAINALYTICS

Sustainalytics
21,3 Medium Risk

Corporate Governance Perception Index (CGPI)
92,6/100

IDX

IDX ESG Leaders

Konstituen Indeks IDX ESG Leaders

BNI termasuk dalam indeks yang mengukur kinerja saham perusahaan dengan penilaian ESG yang baik, tidak terlibat dalam kontroversi signifikan, serta memiliki likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik.

Periode Efektif: Desember 2026 – Mei 2026

Platinum Alignment - Top 100 Indonesia 2025

La Tofi ESG Rating & Sustainibility Communication Awards 2026, La Tofi School of Social Responsibility

Appreciated Diversity Inclusivity ESG Report
Appreciated Circular Economy ESG Report
Most Appreciated ESG Report

Investor Daily Indonesia

Finance Bank Sector: Governance Winner

Katadata ESG Index Awards 2026

Kategori Best Greenship Performance Award - New Building Peringkat Platinum untuk Gedung Plaza BNI

Greenship Award 2026, Green Building Council Indonesia

KEHATI

IDX KEHATI

Konstituen Indeks ESG Sector Leaders

BNI termasuk dalam indeks yang berisi saham-saham perusahaan dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata industrinya, serta didukung oleh likuiditas saham yang baik.

Indeks ESG Quality 45

BNI termasuk dalam 45 saham terbaik berdasarkan penilaian kinerja keberlanjutan, kualitas keuangan, serta tingkat likuiditas perusahaan yang baik.

Konstituen Indeks SRI-KEHATI

BNI termasuk dalam 25 saham perusahaan publik yang menerapkan prinsip *Sustainable Responsible Investment* (SRI) serta prinsip ESG.

Periode Efektif: Desember 2026 – Mei 2026

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Ekonomi

KINERJA INTERNAL

2023 2024 2025

Pendapatan operasional (Rp triliun)

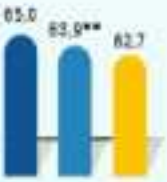

Laba bersih (Rp triliun)



Current Account Saving Account (CASA) (Rp triliun)



Penyaluran kredit - total (Rp triliun)



Penyaluran kredit - UMKM (Rp triliun)



Dana pihak ketiga (Rp triliun)



KINERJA ASPEK EKONOMI TERKAIT KEBERLANJUTAN (PRODUK RAMAH LINGKUNGAN)

Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB)

(Rp triliun)

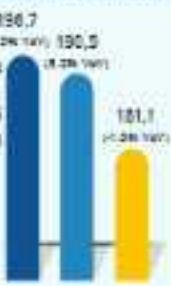

Nominal produk dan/atau jasa yang memenuhi kriteria kategori kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL)

(Rp triliun)



Persentase total portofolio pembiayaan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) terhadap total portofolio kredit

(%)



KINERJA KEUANGAN INKLUSIF

Jumlah BNI Agen46



Jumlah rekening (Juta rekening)



Jumlah dana nasabah (Rp triliun)



Keterangan:
*) Peningkatan signifikan karena BNI Agen46 sudah dapat melakukan cash in by BNI di tahun 2025.
**) Penyajian kembali (informasi keuangan restatement) Tahun 2024

Sosial

KINERJA INTERNAL

2025 2024 2023

Pegawai perempuan dibandingkan total pegawai
(%)



Perempuan yang menduduki posisi manager ke atas
(%)



Rerata jam pelatihan
(Jam)



Biaya pelatihan dan pendidikan karyawan
(Rp miliar)



Indeks kepuasan nasabah
(Skala 1-5)



Tingkat engagement pegawai NPS (%)



Tingkat penyelesaian keluhan nasabah
(%)



Pelibatan pemasok/pihak lokal
(%)



INVESTASI SOSIAL UNTUK EKSTERNAL

Realisasi dana kegiatan tanggung jawab sosial
(Rp miliar)



Penerima manfaat Rumah BUMN BNI
(UMKM)

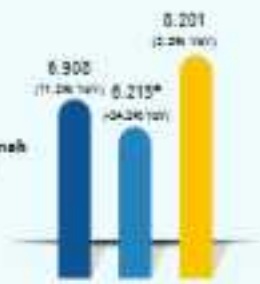

Keterangan:
*) Penurunan disebabkan oleh adanya penutupan Rumah BUMN yang tidak potensial.

INISIATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN INTERNAL

2025 2024 2023

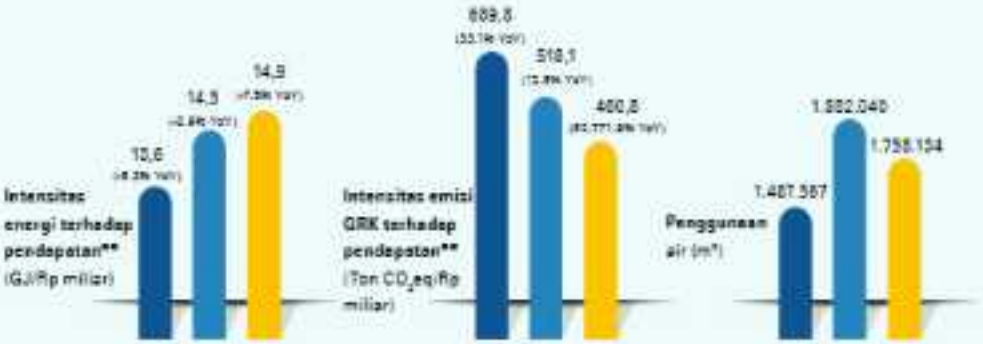



Volume limbah padat yang dihasilkan dari 5 gedung Kantor Pusat (ton)

	Organik	Anorganik	Residu
2025	91,5	169,2	372,4
2024	10,8***	91,5***	-

Pengurangan emisi GRK cakupan 1 & 2 dibandingkan *baseline* 2023* (Ton CO_2eq)

2025	2024
12.744,8 (8,7%)	2.818,8 (1,9%)

Keterangan:

*) Eki memperbarui metode perhitungan emisi sejak 2023 sehingga pengurangan emisi tahun 2023 tidak dapat ditunjukkan.

**) Perubahan angka disebabkan oleh penyesuaian satuan metrik menjadi Rp miliar.

***) Data dari Desember 2024

Eki memperbarui metode perhitungan limbah dengan metode Zero Waste to Landfill sejak Desember 2024 sehingga jumlah pengurangan limbah belum dapat dibandingkan.

****) Peningkatan emisi GRK karena perluasan perhitungan emisi GRK cakupan 3 dari 70,3% menjadi 90,9% dari total portofolio kredit.

PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI



Ringkasan Dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), BNI mengintegrasikan pengelolaan aspek ekonomi dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) ke dalam seluruh aktivitas bisnis. Upaya ini ditujukan untuk memastikan peran perbankan tidak hanya mendorong kinerja usaha, tetapi juga menghasilkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, BNI memfokuskan kontribusinya pada pencapaian TPB yang memberikan manfaat nyata, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Total kredit UMKM per akhir 2025, yaitu Rp118,8 triliun. **TARGET 2026** Target kredit UMKM di 2026 sebesar Rp131,2 triliun.	• Ekspansi kredit yang berkualitas untuk peningkatan market share, dengan fokus target market pada nasabah eksisting, optimalisasi *Supply Chain financing*, perluasan akuisisi linkage bisnis, serta UMKM berorientasi ekspor. • Alignment kebijakan maupun produk pembiayaan untuk mendukung UMKM. • Akselerasi pertumbuhan melalui inisiatif digital dan program unggulan, dengan fokus pada peningkatan efektivitas referral, kualitas *lead*, dan kecepatan eksekusi pembiayaan secara terukur dan sesuai prinsip manajemen risiko.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per akhir 2025 yaitu Rp11,9 triliun kepada 92.685 debitur. • Realisasi penyaluran BNI Wirausaha (BWU) per akhir 2025 yaitu Rp5,3 triliun kepada 19.598 debitur. **TARGET 2026** • Target gross ekspansi KUR di 2026 sebesar Rp11,1 triliun. • Target gross ekspansi BWU di 2026 sebesar Rp10,0 triliun.	• Penguatan ekspansi bisnis yang berkelanjutan melalui fokus pada target market prioritas dan pengembangan ekosistem usaha pada sektor agri dan non-agri. • Optimalisasi pemanfaatan basis nasabah dan ekosistem digital guna mendorong penyaluran pembiayaan yang inklusif dan bertanggung jawab. • Penguatan kapabilitas internal melalui peningkatan kompetensi SDM, penataan peran dan fungsi, serta penyelarasan kebijakan dan produk pembiayaan yang mendukung UMKM. • Peningkatan efektivitas proses, sistem, dan tata kelola melalui pemanfaatan teknologi informasi, monitoring kinerja penyaluran, serta optimalisasi program pemasaran yang berkelanjutan.



REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Akumulasi penerima beasiswa mencapai 796 hingga akhir tahun 2025. • Melakukan pembangunan infrastruktur untuk 127 sekolah atau instansi pendidikan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah BNI. **TARGET 2026** • 840 orang penerima beasiswa BNI Berbagi. • 130 bantuan infrastruktur dunia pendidikan.	• Membuat inisiasi program beasiswa dengan unit terkait. • Membuat inisiasi program bantuan infrastruktur dunia pendidikan dengan unit terkait.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Persentase jumlah pegawai perempuan yang menduduki posisi manager ke atas meningkat menjadi 31,8% **TARGET 2026** > 30 % pegawai perempuan yang menduduki posisi di atas manajerial (AVP ke atas).	• Memberikan kesempatan yang sama untuk pegawai laki-laki dan pegawai perempuan dalam menempati posisi yang sama. • Mekanisme penilaian kinerja dengan memperhatikan pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) yang dilakukan terhadap semua pegawai. • Memberikan dukungan fasilitas bagi pegawai perempuan melalui kebijakan yang setara seperti cuti haid, fasilitas penitipan anak, cuti melahirkan, *Employee Assistance Program* (EAP) untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan finansial pegawai, serta ruang menyusui di setiap gedung. • Membangun komunitas Srikandi BNI untuk meningkatkan kapasitas seluruh pegawai, khususnya perempuan.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Jumlah pengguna *digital channel* BNI tahun 2025 sebesar 15.026.533 atau tumbuh 39,8 dari target 2024. • Peningkatan jumlah pengguna wondr by BNI sebanyak 128% (YoY). **TARGET 2026** • Target jumlah pengguna *digital channel* BNI sebesar 20.343.804 atau tumbuh 32,8 (YoY). • Target jumlah pengguna wondr by BNI meningkat sebanyak 49% (YoY) atau 17,5 juta user.	Fokus pada peningkatan *new user* dari nasabah baru (*new to bank*) melalui pembukaan rekening secara langsung dari wondr by BNI. Selain itu, peningkatan *new user* wondr by BNI juga ditargetkan kepada nasabah *existing to bank* melalui migrasi nasabah aktif pengguna BNI Mobile Banking, pengguna *channel* lain (ATM, *Internet Banking*, SMS *Banking*) dan *non-digital* khususnya pada segmen prioritas. *Enabler* yang dilakukan untuk mendorong peningkatan user adalah berfokus pada awareness dan pelaksanaan berbagai promo. Sekaligus menjaga kualitas layanan untuk memberikan *good experience* terhadap nasabah dalam bertransaksi menggunakan wondr by BNI.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Peningkatan portofolio hijau (KUBL) sebesar 6,3%. • Total emisi GRK terhindarkan dari *green bonds* sebesar 2.534.594 ton CO_2eq. **TARGET 2026** Peningkatan Portofolio Hijau sebesar 5% per tahun.	• Memperkuat kapabilitas internal dan digitalisasi transaksi melalui BNI Direct untuk akselerasi pembiayaan hijau. • Memposisikan sebagai mitra debitur dalam mendampingi transisi menuju bisnis berkelanjutan dengan upaya sebagai berikut: a. Mempersiapkan program ESG *Advisory* termasuk penilaian maturitas ESG debitur. b. Memberikan *technical assistance* Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk mendukung debitur meningkatkan penerapan ESG.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Intensitas energi per pendapatan sebesar 13,6 GJ/ Rp miliar. • Intensitas emisi per pendapatan sebesar 669,8 ton CO_2eq/Rp miliar.	• Melaksanakan program efisiensi energi di seluruh kantor BNI. • Menetapkan target *net zero emission* (NZE) Operasional pada tahun 2026. • Memperkuat infrastruktur data emisi operasional BNI dengan pengembangan *Emission Management Platform*.

TARGET 2026

Meminimalkan peningkatan intensitas energi dan emisi GRK.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Realisasi penyaluran *Sustainability Linked Loan* (SLL) sebesar Rp6,8 triliun.	• Sosialisasi program pembiayaan *Sustainability Linked Loan* (SLL) untuk *Relationship Manager* (RM). • Melakukan *campaign* program *Sustainability Linked Loan* (SLL) BNI melalui *event-event* ESG yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

TARGET 2026

Pengembangan eksposur portofolio *Sustainability Linked Loan* (SLL).

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Program penanaman 175.450 pohon. • Total 4 fauna endemik dan dilindungi yang dikonservasi.	• Bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

TARGET 2026

- Penanaman pohon pada 10 hektare lahan gambut dan 10 hektare lahan darat kritis.
- Adopsi 6 Orang Utan Kalimantan (dukungan rehabilitasi & nutrisi minimal 12 bulan).
- Pelepasliaran 1 Orang Utan Kalimantan (dengan *post-release monitoring*).
- Restorasi habitat: penanaman pohon pada 10 hektare ekosistem Orang Utan Kalimantan dan melakukan pemeliharaan selama 3 tahun.
- Restorasi 10 hektare mangrove dan melakukan pemeliharaan selama 3 tahun.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• *Cyber Security Zero Incident* : 0 *Mayor Incident* dengan nilai kerugian ≥ Rp20 miliar)*	• Penerapan *multi-layer defense* pada tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai inisiatif dalam *Project Stream IT Hygiene*, meliputi implementasi Next Gen SOC, EDR, NAC, DLP, *Enhancement Cyber Threat Intelligence*, dan *Vulnerability Management*, serta *project* penguatan keamanan lainnya. • Sejumlah inisiatif strategis saat ini berada dalam tahap pengembangan dan akan menjadi fokus keberlanjutan pada tahun 2026, antara lain pengembangan *Next-Generation Operations* (SecOps), implementasi SASE, dan *project* penguatan keamanan lainnya.
TARGET 2026 • Target *Cyber Security Zero Incident* : 0 *Mayor Incident* dengan kerugian ≥ Rp20 miliar)*	

* Adapun insiden yang tidak masuk dalam kriteria tersebut tetap dicatat, ditangani, dan diselesaikan sesuai dengan prosedur internal yang berlaku melalui *Security Incident Response*.

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
• Pencapaian *Index Good Corporate Governance* (GCG) BNI berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebesar 92,60. • Pencapaian *Index* GCG BNI berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) sebesar 118,24.	• BNI senantiasa melakukan perbaikan atas penerapan tata kelola antara lain dengan penerapan *Internal Controls Over Financial Reporting* (ICOFR), penyempurnaan kebijakan tata kelola, dan penguatan pengungkapan praktik tata kelola BNI.
TARGET 2026 • Target *Index* GCG BNI berdasarkan CGPI sebesar 92,60. • Target *Index* GCG BNI berdasarkan ACGS sebesar 118,24.	

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Mencapai persentase pengaduan terhadap total frekuensi transaksi sebesar 0,019%.	• Memanfaatkan pembelajaran dari pengaduan dan memperkuat koordinasi antar rantai nilai untuk melakukan perbaikan sehingga jumlah komplain mengalami penurunan. • Memanfaatkan data *voice of customer* untuk mendeteksi potensi isu agar seluruh rantai nilai dapat melakukan tindakan perbaikan.
TARGET 2026 Target persentase pengaduan terhadap total frekuensi transaksi sebesar 0,023%.	

REALISASI DUKUNGAN DI 2025	STRATEGI PENCAPAIAN TARGET
Meningkatkan tingkat kepuasan nasabah melalui pengukuran *Customer Satisfaction Survey* (CSS) dengan *Index Score* 4,43.	• Menjaga kualitas layanan dengan menjalankan prosedur kerja berbasis timeline dan memastikan seluruh aktivitas memenuhi standar penyelenggaraan. • Mempercepat pencapaian target yang ditetapkan melalui review menyeluruh dan penyederhanaan proses kerja, termasuk simplifikasi SOP. • Memberikan edukasi *customer protection* dan penanganan keluhan nasabah bagi seluruh rantai nilai. • Melakukan pemantauan implementasi strategi perbaikan bisnis proses sekaligus melakukan evaluasi melalui agenda *weekly* dan *biweekly meeting*. • Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang telah disusun melalui LNA (*Learning Need Analysis*).
TARGET 2026 Target tingkat kepuasan nasabah melalui pengukuran *Customer Satisfaction Survey* (CSS) dengan *Index Score* 4,07.	

Pesan Direksi



Putrama Wahju Setyawan
Direktur Utama

Pemangku kepentingan yang terhormat,

Tahun 2026 menjadi periode yang penting bagi BNI dalam memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja, tetapi juga pada ketahanan jangka panjang dan penciptaan nilai berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi global, percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon, serta meningkatnya ekspektasi pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab, BNI menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi dan operasional Perusahaan.

Keberlanjutan bagi BNI merupakan bagian integral dari cara kami mengelola risiko, menangkap peluang pertumbuhan, dan memastikan relevansi bisnis di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional Indonesia dalam mendorong keuangan berkelanjutan, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta komitmen Pemerintah untuk mencapai *net zero emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Integrasi Keberlanjutan dalam Strategi dan Tata Kelola

BNI memandang bahwa tantangan keberlanjutan, khususnya perubahan iklim, transisi energi, dan ketimpangan sosial memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas dan kinerja sektor perbankan. Oleh karena itu, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) terus diintegrasikan dalam pengambilan keputusan strategis, pengelolaan risiko, serta pengembangan produk dan layanan.

Dalam rangka memperkuat implementasi strategi tersebut, BNI melakukan pembaruan terhadap Pilar Keberlanjutan pada tahun 2026. Transformasi keberlanjutan ini ditandai dengan penyusunan ESG *Blueprint* sebagai panduan strategis yang memastikan integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola secara menyeluruh dalam aktivitas bisnis, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan Perseroan. Pilar Keberlanjutan BNI terdiri atas tiga fokus utama, yaitu *Sustainable Finance*, *Corporate Sustainability*, dan *Inclusion & Resilience*, yang dirancang untuk merespons risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan, termasuk risiko terkait perubahan iklim, sekaligus mendukung kontribusi BNI terhadap prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola keberlanjutan, Direksi melakukan pengelolaan dan evaluasi atas implementasi strategi LST melalui mekanisme tata kelola internal, termasuk forum Sub Komite ESG yang diselenggarakan secara berkala, setidaknya 4 kali setahun. Forum ini menjadi wadah untuk membahas perkembangan keuangan

berkelanjutan, tren risiko dan peluang LST, serta efektivitas penerapan strategi keberlanjutan di seluruh lini bisnis BNI. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, termasuk untuk pengelolaan risiko iklim.

Pengelolaan isu keberlanjutan dalam tata kelola internal BNI dilakukan melalui Sub Komite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud yang terdiri dari perwakilan lintas fungsi berdasarkan SK Direksi No. KP/484/DIR/I tanggal 10 September 2025. Sejalan dengan penguatan tata kelola keberlanjutan, pada tahun 2026 BNI mengembangkan Departemen Manajemen LST di bawah Divisi ERM menjadi Divisi Environmental, Social & Governance.

Strategi dan Kebijakan dalam Merespons Tantangan Keberlanjutan

Respons terhadap Perubahan Iklim dan Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon

Perubahan iklim semakin dipahami sebagai faktor signifikan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan operasional perbankan, baik melalui risiko fisik maupun risiko transisi. Menyadari hal tersebut, BNI terus memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui pengembangan kerangka manajemen risiko iklim yang terintegrasi dengan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan.

Sejalan dengan arahan regulator dan perkembangan kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia, BNI melanjutkan pengembangan *climate risk management system* (CRMS), termasuk melakukan *climate risk stress test* (CRST) pada seluruh portofolio untuk menilai potensi dampak risiko iklim terhadap portofolio pembiayaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain itu, BNI juga terus menyelaraskan proses penilaian debitur dengan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya pada 4 sektor utama, yaitu *Energy, Construction & Real Estate (CRE), Transportation & Storage (T&S)*, dan sebagian *Agriculture, Forestry and Other Land Uses* (AFOLU) dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.

Di sisi operasional, BNI menjalankan berbagai inisiatif untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan efisiensi, antara lain melalui pengelolaan konsumsi energi, digitalisasi proses bisnis, pengurangan penggunaan kertas, serta pengelolaan limbah operasional. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk mencapai target NZE operasional pada 2025 dan mendukung target NZE pembiayaan pada 2060.

Pengembangan Keuangan Berkelanjutan dan Portofolio Pembiayaan

BNI terus memperluas peran sebagai katalis menuju ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan produk dan layanan keuangan untuk tetap menjadi kebanggaan Bangsa. Portofolio pembiayaan berkelanjutan, mencakup antara lain pembiayaan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB), *Sustainability Linked Loan (SLL)*, serta pengelolaan *green bond* dan *sustainability bond* untuk mendukung proyek-proyek sektor prioritas yang membantu mempercepat transisi energi, efisiensi sumber daya, dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui pendekatan ini, BNI tidak hanya mendorong pertumbuhan pembiayaan hijau, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis bagi debitur dalam melakukan perubahan menuju praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Sepanjang 2025, BNI secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi, pendampingan teknis, dan forum transisi bagi debitur, termasuk terkait implementasi TKBI dan penerbitan *advisory playbook* untuk subsektor dengan intensitas emisi tinggi dan risiko transisi signifikan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong debitur untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan usaha jangka panjang.

Ketahanan Keamanan Siber dalam Mendukung Layanan Digital

Seiring dengan percepatan digitalisasi layanan perbankan, BNI menghadapi tantangan meningkatnya kompleksitas ancaman siber, termasuk risiko terhadap keamanan data, keandalan sistem, dan perlindungan nasabah di tengah

perluasan ekosistem digital dan keterlibatan pihak ketiga. Dinamika tersebut menuntut pengelolaan risiko siber yang tidak hanya reaktif, tetapi terintegrasi dalam tata kelola perusahaan dan selaras dengan penerapan pilar keberlanjutan.

Penguatan keamanan data dan keamanan siber dilakukan dengan mempertimbangkan aspek *people*, *process*, dan *technology*. Penguatan ini tidak hanya berfokus pada sistem dan infrastruktur, tetapi juga pada pembangunan *cyber security awareness* di seluruh organisasi, serta edukasi berkelanjutan kepada nasabah terkait pelindungan data dan privasi, serta keamanan transaksi digital.

Dari sisi proses dan teknologi, BNI menerapkan pengelolaan keamanan siber yang selaras dengan *Cyber Security Framework* melalui implementasi sistem pengamanan berlapis, pemantauan berkelanjutan dan dukungan *Cyber Threat Intelligence* yang secara proaktif melakukan identifikasi aktivitas mencurigakan dan serangan siber melalui *threat hunting* serta *Security Operations Center* (SOC) untuk mendeteksi, merespons, dan memitigasi potensi ancaman secara proaktif serta menyediakan visibilitas pemantauan keamanan yang menyeluruh dan terintegrasi yang diperkuat dengan kapabilitas deteksi ancaman dan pemantauan berbasis intelijen dengan secara berkelanjutan memperkuat ketahanan siber guna mendukung keberlanjutan operasional dan kepercayaan pemangku kepentingan. Aspek keamanan juga telah terintegrasi dalam pengembangan sistem dan layanan digital, termasuk pengelolaan akses dan pelindungan data, untuk memastikan keamanan tetap menjadi bagian dari setiap tahapan operasional dan inovasi digital BNI.

Sebagai wujud komitmen tersebut, BNI menetapkan *Cyber Security Zero Incident* untuk insiden dengan dampak material signifikan. Seluruh insiden, termasuk yang berada di bawah ambang batas material, dimonitor dan ditangani secara sistematis melalui mekanisme *Security Incident Response* yang terstandar, guna memastikan keberlangsungan layanan dan kepercayaan nasabah.

Capaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Strategi Pencapaian Target Kinerja

Sustainable Finance

Sepanjang 2026, BNI terus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan, pendanaan, dan produk keuangan yang selaras dengan prinsip ESG. Pilar *Sustainable Finance* difokuskan pada penciptaan nilai jangka panjang bagi Indonesia, lingkungan, dan nasabah, sekaligus mendukung capaian ekonomi rendah karbon dan inklusif.

Dalam implementasi keuangan berkelanjutan, BNI meningkatkan penyaluran pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial. Hingga akhir 2026, portofolio Kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) BNI mencapai Rp190,7 triliun yang meningkat sebesar 3,3% YoY, yang terdiri dari pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) Rp75,0 triliun, dan pembiayaan UMKM Rp115,8 triliun. BNI juga menyalurkan *Sustainability Linked Loan* (SLL) sebesar Rp0,6 triliun. Pada 2026, BNI menerbitkan *Sustainability Bond* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp5 triliun yang digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang memenuhi prinsip keberlanjutan sesuai Framework Sustainability Bond BNI. Sementara itu, penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada 2022 telah menghasilkan penghindaran emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 2.634.694 ton CO_2eq.

BNI pun melanjutkan peran strategisnya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara terstruktur dan terukur, mencakup peningkatan produktivitas usaha (*Go Productive*), akselerasi digitalisasi (*Go Digital*), dan perluasan akses pasar global (*Go Global*). Sejalan dengan itu, BNI menjalankan program pendampingan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing UMKM. Pendekatan ini didukung oleh kolaborasi aktif dengan kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan terkait yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang menyeluruh.

Pada pilar *Go Productive*, BNI menjalankan program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI) yang berfokus pada pemberdayaan UMKM sektor fesyen dan kerajinan berorientasi ramah lingkungan. Sepanjang 2026, BNI menyalurkan pembiayaan sebesar Rp39 miliar kepada 167 UMKM, disertai kegiatan sosialisasi dan *business matching* guna meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing pasar. Pada pilar *Go Digital*, BNI mendukung modernisasi sektor pertanian melalui Program Pembiayaan Traksi Alsintan (Kredit Alsintan) untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, melalui pilar *Go Global*, BNI Xpora terus diperkuat sebagai solusi ekspor terintegrasi bagi UMKM. Hingga akhir 2026, BNI Xpora mencatat pembiayaan sebesar Rp38,6 triliun kepada 12.094 debitur, serta mendukung layanan diaspora dengan 39 nasabah aktif. Selain itu, BNI mengembangkan program BNI Jejak Kopi Khatulistiwa (BNI JKK) sebagai ekosistem pembiayaan hijau berbasis perhutanan sosial, dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp74,9 miliar yang menjangkau 493 petani kopi di lima provinsi. Seluruh inisiatif tersebut menegaskan peran BNI dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi ekspor.

Corporate Sustainability

Pilar *Corporate Sustainability* mencakup pengelolaan energi dan emisi, praktik operasional berkelanjutan, penguatan peran pegawai, serta perlindungan data dan keamanan siber. Dalam mendukung pencapaian target *net zero emission* (NZE), BNI terus mengimplementasikan berbagai inisiatif pengelolaan energi dan emisi di seluruh kegiatan operasional. Sepanjang 2026, BNI melanjutkan inventarisasi dan pemantauan GRK dari aktivitas operasional, serta memperkuat infrastruktur data untuk mendukung pengelolaan emisi yang lebih terintegrasi.

Sejalan dengan upaya dekarbonisasi, BNI terus mendorong efisiensi operasional melalui digitalisasi proses bisnis dan layanan perbankan. Transformasi digital ini berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas, peningkatan efisiensi energi, serta optimalisasi proses internal. Pada akhir periode pelaporan, intensitas konsumsi energi per pendapatan tercatat sebesar 15,6 GJ/ Rp miliar, sementara itu intensitas total emisi GRK per pendapatan sebesar 689,8 ton CO_2eq/Rp miliar. Hasil ini berkontribusi pada capaian BNI yang berhasil mempertahankan performa hijau untuk Gedung Menara BNI (tersertifikasi Gold), Plaza BNI (tersertifikasi Platinum), serta Gedung BNI Pik 2 yang tersertifikasi LEED Gold pada kategori *Building Costruction*, sebagai salah satu prestasi dalam menerapkan standar keberlanjutan operasional.

Sebagai bagian dari pengelolaan keberlanjutan operasional lainnya, BNI menerapkan pengelolaan limbah pedet berbasis konsep *Zero Waste to Landfill* (ZWTL) dengan prinsip *reduce, reuse*, dan *recycle*. Program ini diterapkan di Kantor Pusat sebagai tahap awal dengan dukungan SOP Solid Waste Management dan fasilitas pemilahan limbah. Sepanjang periode pelaporan, limbah yang dikelola meliputi limbah organik melalui *composting* dan *Black Soldier Fly* sebesar 91,6 ton, limbah anorganik melalui proses daur ulang sebesar 108,2 ton, serta limbah residu yang dimanfaatkan melalui teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebesar 372,4 ton.

Pada tahun 2026, BNI memperkuat transformasi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja berkelanjutan melalui pengembangan layanan digital dan penguatan kapabilitas teknologi internal. Dari sisi layanan, BNI memfokuskan pengembangan pada aplikasi wondr by BNI sebagai platform perbankan terintegrasi, termasuk peluncuran fitur wondr *multicurrency* yang memungkinkan pengelolaan hingga 12 mata uang asing dalam satu rekening. Seiring dengan itu, untuk meningkatkan efektivitas operasional, Perseroan mengintegrasikan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *cloud computing* di berbagai lini bisnis, yang dimanfaatkan untuk memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen melalui analitik risiko, deteksi dini potensi kecurangan, serta meningkatkan responsivitas layanan pelanggan. Keseluruhan inisiatif ini mendorong peningkatan transaksi digital dan efisiensi proses, sekaligus mendukung pengurangan aktivitas manual dan penggunaan dokumen fisik.

Sejalan dengan pengembangan layanan digital dan penguatan kapabilitas teknologi internal tersebut, BNI secara konsisten memperkuat pengelolaan keamanan data dan siber sebagai bagian dari ketahanan operasional dan perlindungan nasabah. Pengelolaan tersebut mencakup penguatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP), penguatan keandalan infrastruktur teknologi informasi, implementasi teknologi pengamanan aplikasi untuk perlindungan layanan digital secara *real-time*, pemantauan keamanan layanan digital serta pengembangan kapabilitas sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Melalui pengelolaan tersebut, tidak terdapat insiden pelanggaran data yang berdampak signifikan terhadap operasional BNI sepanjang tahun 2025.

Di tengah meningkatnya ancaman siber, ketahanan siber diperkuat melalui penerapan sistem pengelolaan keamanan siber yang berstandar internasional, sebagaimana tercermin dari sertifikasi ISO 27001:2022 untuk sistem manajemen keamanan informasi layanan *Open API Services*, pengendalian berbasis Service and Organization Control (SOC) 2 Type II mencakup *security, availability, confidentiality,* dan *privacy*, pengendalian melalui pelaksanaan penilaian maturitas TI berbasis COBIT 2019 oleh assessor independen, serta sertifikasi pengelolaan data center berupa Tier III Certification of Constructed Facility oleh Uptime Institute. Pengelolaan keamanan siber mengacu pada National Institute of Standards and Technology (NIST) Cybersecurity Framework yang mencakup tahapan identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan insiden guna memastikan kesinambungan layanan perbankan digital. Melengkapi kesiapan dalam penanganan insiden siber yang menjadi fokus utama, BNI telah menjadi bagian dari Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari aspek sumber daya manusia, BNI terus meningkatkan keterlibatan pegawai dalam implementasi keberlanjutan melalui program pelatihan, komunikasi internal, dan penguatan budaya ESG. Sebanyak 36.143 pegawai telah mengikuti program pengembangan kompetensi keuangan berkelanjutan melalui *e-Learning Mandatory Sustainability Finance*. Sebagai bagian dari pengelolaan kinerja sosial, BNI berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, inklusif, dan adil bagi seluruh pegawai. Kami menerapkan *respectful workplace* dan menghormati hak asasi manusia. Sepanjang 2025, tidak ada laporan atas kasus diskriminasi, maupun kekerasan di lingkungan BNI. Kami rutin melakukan survei kepuasan dan keterikatan pegawai setiap tahunnya, dengan indeks kepuasan pegawai sebesar 86% pada kategori 'Baik' di 2025.

Inclusive and Resilience

Melalui pilar *Inclusion & Resilience*, BNI berkomitmen memperluas akses keuangan, memperkuat literasi keuangan, serta meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pilar ini menegaskan peran BNI tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai mitra strategis debitur, BNI mengembangkan ESG *Advisory Playbook* untuk mendampingi proses transisi bisnis berkelanjutan yang terintegrasi dengan pembiayaan. *Playbook* ini dirancang untuk membantu debitur memahami kondisi awal, manfaat bisnis dari praktik berkelanjutan, serta langkah peningkatan keselarasan terhadap klasifikasi TKBI. Pelaksanaan ESG *Advisory* difokuskan pada subsektor prioritas dengan risiko transisi tinggi, dengan tahap awal berupa peluncuran *playbook* subsektor kelapa sawit pada tahun 2026. Hal tersebut menjadikan BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang mengembangkan panduan tersebut. Kemudian, BNI akan melanjutkannya dengan pelaksanaan *pilot project* implementasi pada tahun 2026.

Untuk mendukung perluasan akses dan efektivitas layanan, BNI mengelola beragam kanal layanan perbankan melalui optimalisasi jaringan fisik, digital, dan kemitraan komunitas. Perluasan akses layanan juga diperkuat melalui jaringan BNI Agen46 sebagai mitra strategis dalam menjangkau

masyarakat hingga ke wilayah yang belum terlayani kantor cabang maupun ATM, termasuk bagi segmen *unbanked* dan *underserved*. Pada 2025, jumlah BNI Agen46 tumbuh 1,7% dengan persebaran di 466 kota/kabupaten atau setara 42,6% cakupan nasional. Dari total BNI Agen46 tersebut, sebanyak 25.177 agen atau sekitar 13% berada di wilayah 3T. Untuk mendukung kualitas layanan, BNI telah mendistribusikan 38.661 unit EDC kepada BNI Agen46, termasuk 7.000 unit yang disalurkan sepanjang 2025, serta menyediakan berbagai kanal transaksi melalui aplikasi mobile, web, EDC Mini ATM, dan EDC Android.

BNI secara konsisten mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat sebagai fondasi pembentukan perilaku keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Program literasi diselenggarakan melalui pendekatan tatap muka dan digital dengan menjangkau berbagai segmen, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Materi edukasi diarahkan pada penguatan kemampuan mengelola keuangan, penggunaan layanan perbankan digital secara aman, serta peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko finansial, seperti investasi ilegal dan judi daring. Inisiatif ini bertujuan membekali masyarakat agar mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dan tetap resilien dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Di sisi pemberdayaan ekonomi, BNI berperan aktif sebagai pengelola Rumah BUMN di 23 titik di berbagai wilayah Indonesia sebagai bagian dari inisiatif Kementerian BUMN. Melalui Rumah BUMN, BNI memberikan pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pasar bagi UMKM binaan. Pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan pada penguatan pasar lokal, tetapi juga pada perluasan jejaring dan peluang ekspansi ke tingkat nasional hingga internasional melalui partisipasi dalam berbagai pameran domestik dan global, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Selain aspek ekonomi dan sosial, BNI juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui berbagai inisiatif konservasi. Pada 2025, BNI melanjutkan program rehabilitasi mangrove di Teluk Pangpang, Banyuwangi, yang telah mencakup area seluas 80 hektare dengan tingkat keberhasilan tanaman mencapai 98%, serta mendukung perlindungan ekosistem pesisir melalui penanaman cemara laut di Indramayu. Di periode yang sama, BNI turut mendukung rehabilitasi 4 individu Orang Utan Kalimantan serta pemulihan 8 hektare lahan kritis di Bamboja Lestari dan Nyaru Menteng.

Apresiasi

Kami meyakini bahwa keberlanjutan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan BNI di masa depan. Kami akan terus menciptakan nilai yang mendukung kesejahteraan masa depan melalui penciptaan dampak positif dari setiap layanan yang kami berikan. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam seluruh aspek bisnis, BNI berkomitmen untuk terus menciptakan nilai ini dalam jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Direksi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan, terutama kepada para nasabah dan insan BNI, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, kami optimistis BNI dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, tanggun, dan berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2026

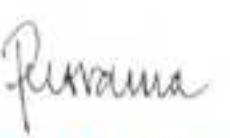

Putrama Wahju Setyawan
Direktur Utama

Sekilas tentang BNI

Profil Perusahaan [p-1]

Nama Perusahaan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha, Produk dan Layanan

Bergerak di bidang usaha perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 22 April 2025.

Alamat Kantor Pusat

Gedung BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
Telepon : (62-21) 251 1946
Surel : bni@bni.co.id
Situs web : www.bni.co.id
PO Box 1946

Pasar Terlayani [p-6]

Geografis pasar terlayani: Indonesia, New York – Amerika Serikat, London, Hong Kong, Singapura, Tokyo – Jepang, Seoul – Korea Selatan, Amsterdam – Belanda, dan Sydney – Australia.

Sektor dan jenis nasabah terlayani:

- Perbankan Bisnis Korporasi, Menengah dan Kecil
- Perbankan Konsumer
- Perbankan Internasional dan Treasri

Persentase Kepemilikan Saham



PT Danantara Asset Management (Persero)
60%

Masyarakat
40%

Negara Republik Indonesia
0%

Wilayah Operasional [p-6]

Beroperasi di 9 negara, yaitu:
Indonesia, Singapura, Hongkong, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, Australia.

Data Jaringan Kantor dan Fasilitas Perbankan:

1 kantor pusat		
10 kantor di luar negeri	17 kantor wilayah	197 kantor cabang
1.579 kantor cabang pembantu	13.391 ATM/CRM	330 DigiCS

Perubahan signifikan pada BNI

Selama tahun 2025, terdapat pembukaan 2 kantor cabang pembantu (KCP) dan penutupan 8 KCP. Selain itu, tidak terdapat perubahan signifikan lain terkait struktur organisasi dan rantai pasok.

Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan.

Misi

- Menyediakan layanan keuangan dan solusi digital yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah domestik maupun internasional.
- Menciptakan nilai yang optimal bagi investor, serta menjaga integritas dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Menjadi mitra strategis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejalan dengan perubahan lanskap industri perbankan, percepatan transformasi digital, serta meningkatnya intensitas persaingan di tingkat internasional, BNI telah melakukan **penyempurnaan dan penajaman Visi, Misi, dan Strategi** sebagai bagian dari proses evaluasi strategis yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memperjelas arah strategis Perseroan, mempertajam fokus bisnis, serta memastikan kesiapan BNI dalam bersaing di level global.

Budaya dan Nilai

Sebagai upaya memperkuat penerapan nilai-nilai AKHLAK, BNI menjalankan transformasi budaya kerja untuk menyelaraskan nilai inti perusahaan di seluruh aktivitas organisasi. Nilai AKHLAK yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN telah diimplementasikan dan dihidupkan pada seluruh tingkatan organisasi. Proses internalisasi tersebut terus diperkuat melalui penghayatan serta penguatan Core Value sebagai pedoman dan keyakinan bersama dalam membentuk perilaku kerja BNI Hi-Movers. Dengan langkah ini, BNI menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, memperkuat kolaborasi, serta mendukung keberlanjutan perusahaan.



Skala Perusahaan



Keterangan:
*) Penyajian kembali informasi keuangan (restatement) tahun 2024 karena penerapan PSAK 117 di BNI Life (3-4)

PRODUK DAN LAYANAN (FN-CB-000.A)

Giro Rp triliun		Deposito Rp triliun		Tabungan Rp triliun		Kredit Bruto Rp triliun	
439,5 2025		314,9 2025		286,5 2025		899,5 2025	
2024	395,7	2024	242,2	2024	257,6	2024	776,9
2023	345,5	2023	345,5	2023	345,5	2023	345,5



Profil Pegawai BNI [GRI 2-7, 2-8]

Keberlangsungan kinerja BNI sangat ditopang oleh kontribusi seluruh pegawai. Oleh karena itu, Bank secara konsisten menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sebagai ruang berkarya dan berprestasi, sejalan dengan salah satu misi perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM), di mana nilai kesetaraan dan antidiskriminasi diterapkan secara menyeluruh. Komitmen tersebut diperkuat melalui penerapan *Respectful Workplace* (RWP) untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan inklusif serta bebas dari pelecehan, perundungan, diskriminasi, dan kekerasan, yang ditetapkan melalui Pedoman Perusahaan No. Instruksi IN/013/HCS-001 tanggal 08-10-2024 sebagai tindak lanjut dari edaran regulator yang membawahi BUMN. Dalam menjaga keragaman, BNI mengupayakan keseimbangan komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, kelompok usia, pengalaman kerja, jenis kelamin, ras, suku, serta agama. Seluruh pegawai BNI berstatus sebagai karyawan penuh waktu dan tidak terdapat pekerja paruh waktu.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kontrak Kerja Kepegawaian dan Jenis Kelamin [GRI 2-7]

Kontrak Kerja	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Tetap	12.169	13.157	12.200	13.178	12.150	13.910
Kontrak	540	728	521	657	647	726
Trainee	362	305	333	274	395	340
Jumlah berdasarkan jenis kelamin	**13.011**	**14.190**	**13.054**	**14.149**	**13.192**	**14.378**
Jumlah keseluruhan	**27.201**		**27.203**		**27.570**	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin [GRI 2-7]

Wilayah Operasional	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kantor Pusat	4.355	3.461	4.168	3.277	5.664	4.798
Kantor Wilayah 01	464	544	471	556	384	473
Kantor Wilayah 02	576	622	647	683	518	604
Kantor Wilayah 03	657	711	667	746	555	637
Kantor Wilayah 04	693	760	735	767	625	657
Kantor Wilayah 05	479	531	496	540	400	472
Kantor Wilayah 06	814	915	816	940	553	817
Kantor Wilayah 07	560	691	569	666	455	539
Kantor Wilayah 08	604	663	610	668	530	593
Kantor Wilayah 09	665	737	662	740	575	653
Kantor Wilayah 10	552	574	546	569	298	536
Kantor Wilayah 11	331	489	336	496	276	417
Kantor Wilayah 12	390	474	395	489	351	450
Kantor Wilayah 14	450	758	456	768	379	707
Kantor Wilayah 15	496	701	512	696	417	691
Kantor Wilayah 16	156	226	207	221	167	212

Wilayah Operasional	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kantor Wilayah 17	545	670	557	683	491	609
Kantor Wilayah 18	562	654	581	658	530	585
Kantor Luar Negeri (KLN)	24	9	23	9	20	9
Jumlah berdasarkan jenis kelamin	**13.011**	**14.190**	**13.054**	**14.149**	**13.192**	**14.378**
Jumlah	**27.201**		**27.203**		**27.570**	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (2-3, 403-1)

Kelompok Usia	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
> 50 Tahun	1.179	989	1.210	1.031	1.359	1.035
> 45-50 Tahun	2.078	1.653	1.975	1.452	1.625	1.222
> 40-45 Tahun	948	942	1.081	1.186	1.543	1.550
> 35-40 Tahun	2.882	3.250	2.695	2.820	2.103	2.181
> 30-35 Tahun	2.685	3.235	2.809	3.494	3.064	3.834
> 25-30 Tahun	2.386	2.927	2.352	3.190	2.719	3.462
≤ 25 Tahun	853	1.194	712	976	779	1.094
Jumlah berdasarkan jenis kelamin	**13.011**	**14.190**	**13.054**	**14.149**	**13.192**	**14.378**
Jumlah	**27.201**		**27.203**		**27.570**	

Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin (2-7, 405-1)

Jenjang Jabatan	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
≥ Senior Vice President*	95	32	91	31	83	28
≥ Vice President	215	78	205	72	156	49
Assistant Vice President	883	446	887	434	846	407
Manager	2.270	1.744	2.259	1.847	2.027	1.491
Assistant Manager	5.536	5.774	5.519	5.806	5.691	5.860
≤ Assistant**	4.009	6.116	4.093	6.159	4.389	6.543
Jumlah berdasarkan jenis kelamin	**13.011**	**14.190**	**13.054**	**14.149**	**13.192**	**14.378**
Jumlah	**27.201**		**27.203**		**27.570**	

Keterangan:
Presentase manajer dan level yang dipekerjakan merupakan warga negara Indonesia (GRI 202-2)
*) Terdiri atas: Senior Vice President, Executive Vice President, dan Senior Executive Vice President
**) Terdiri atas: Assistant dan Pegawai Dasar

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin [GRI 2-7]

Tingkat Pendidikan	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Strata 3	14	5	10	5	9	4
Strata 2	1.594	1.305	1.854	1.274	1.625	1.219
Strata 1	10.649	11.512	10.531	11.620	10.315	11.731
Akademi	497	1.066	555	1.249	724	1.421
SD-SMA	257	2	283	3	319	3
Jumlah berdasarkan jenis kelamin	**13.011**	**14.190**	**13.054**	**14.149**	**13.192**	**14.378**
Jumlah	**27.201**		**27.203**		**27.570**	

Pegawai Lainnya Bukan Pegawai BNI [GRI 2-8]

Di samping karyawan penuh waktu, BNI juga didukung oleh tenaga kerja yang berasal dari skema alih daya melalui kerja sama dengan perusahaan penyedia jasa. Para pekerja ini berperan dalam menunjang kelancaran operasional Bank di berbagai fungsi pendukung. BNI memastikan bahwa seluruh pekerja, baik pegawai internal maupun tenaga alih daya, bekerja dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati serta pemenuhan prinsip HAM. Dalam menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, BNI senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Pada 2025, jumlah tenaga kerja alih daya tercatat sebanyak 10.000 orang, yang sebagian besar ditempatkan pada posisi pendukung operasional, termasuk layanan kebersihan, pengemudi, serta fungsi operasional lainnya.

Inisiatif Eksternal dan Keanggotaan Asosiasi [GRI 2-28]

Dalam mendorong penerapan Keuangan Berkelanjutan serta penguatan prinsip keberlanjutan pada seluruh kegiatan operasional, BNI mengimplementasikan berbagai kerangka kerja dan standar yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sejumlah acuan yang digunakan antara lain:

- Global Reporting Initiative (GRI) sebagai pedoman penyusunan laporan keberlanjutan yang transparan dan akuntabel;
- Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kerangka pembangunan berkelanjutan yang menjadi rujukan penciptaan dampak positif;
- European Foundation for Management Development (EFMD) – Global CLIF (Corporate Learning Improvement Process) untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran korporasi; serta
- International Organization for Standardization (ISO) sebagai standar internasional dalam pengelolaan mutu, lingkungan, dan sistem manajemen lainnya.

Penerapan standar-standar tersebut menegaskan komitmen BNI dalam mengintegrasikan nilai keberlanjutan ke dalam seluruh proses bisnis, sekaligus memastikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan.

Rincian sertifikasi dan akreditasi yang dimiliki:

ISO 27001:2022
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
25 Agustus 2025 - 15 Januari 2029

ISO 9001:2015
Provision of in-House Learning and in Learning/ Digital Learning for BNI Employees
28 Maret 2023 - 9 Maret 2026

ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu untuk BNI Contact Center Services di BSD, Surabaya, & Semarang
2 Agustus 2023 - 10 Maret 2026

ISO 9001:2015
Quality Management System untuk Unit HPS
14 November 2024 - 11 November 2026

ISO 9001:2015
Quality Management System untuk Unit Manajemen Vendor
14 November 2024 - 26 November 2026

ISO 9001:2015
Provision of BNI Credit Cards Business
27 Juni 2024 - 26 Juni 2027

ISO 37001:2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan
1 Januari 2024 - 31 Desember 2026

ISO 30301:2019
Management systems for records untuk Unit Kearsipan
23 Desember 2024 - 22 Desember 2027

Sertifikat Greenship
Menara BNI (Gold):
Januari 2025 - 30 Januari 2028
Plaza BNI: Sertifikat *On Process*

Sertifikat LEED V.4 BD+C: Core and Shell
Gedung BNI PIK 2 (Gold):
Berlaku untuk kategori *Building Construction*

Corporate Learning Improvement Process (CLIP) - EFMD Global
22 Desember 2022 - 22 Desember 2027

Keanggotaan pada Asosiasi terkait Keberlanjutan

Asosiasi	Peran	Lingkup
United Nations Environment Programme Finance Initiatives (UNEP FI)	Anggota	Internasional
The Alliance for Green Commercial Banks	Anggota	Internasional
Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)	Anggota/Pendiri	Nasional
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)	Anggota/Pendiri	Nasional
Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia (IABHI)	Anggota	Nasional
Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	Ketua Bidang 1 Organization Development & Workforce Planning (Direktur Human Capital & Compliance BNI)	Nasional
Forum Human Capital Perbankan Indonesia (FHCPI)	Anggota	Nasional
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)	Anggota	Nasional

Tata Kelola Keberlanjutan

Komitmen dan Budaya Keberlanjutan

Membangun Budaya Keberlanjutan (3-21)

BNI terus memperkuat integrasi prinsip keberlanjutan, termasuk keuangan berkelanjutan, di seluruh tingkatan organisasi. Melalui penerapan yang menyeluruh ini, Bank berupaya membangun perilaku dan budaya kerja yang semakin peka terhadap dampak lingkungan dan sosial. Sejalan dengan upaya tersebut, Bank telah melaksanakan beragam inisiatif, antara lain:

- Membentuk Sub Komite Environment, Sosial, and Governance (ESG) di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud berdasarkan SK Direksi No. KP/464/DIR/R tanggal 26 Oktober 2021 dan diperbarui berdasarkan SK Direksi No. KP/454/DIR/R tanggal 10 September 2025;
- Mengembangkan Departemen Manajemen Environmental Social & Governance (ESM) menjadi Divisi Environmental Sosial & Governance (ESG) untuk memantau praktik keberlanjutan sehari-hari di internal perusahaan;
- Merumuskan kebijakan kredit dengan memperhatikan faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST), serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam Kode Etik, kebijakan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Menyelenggarakan pelatihan untuk menambah pengetahuan pegawai terkait keberlanjutan;
- Melakukan penelaahan terhadap portofolio kredit yang berisiko tinggi terhadap lingkungan;
- Melaksanakan kampanye program green lifestyle, antara lain penghentian konsumsi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), penghematan penggunaan air, serta pemilahan sampah sesuai dengan kategorinya.

Berbagai kegiatan telah dijalankan BNI untuk mendukung tercapainya penerapan prinsip keberlanjutan secara konsisten. Selain mewajibkan penyelesaian modul *e-learning mandatory*, BNI secara aktif meningkatkan literasi kesadaran terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) melalui berbagai media komunikasi, seperti situs web, YouTube, *email blast*, dan Booklet ESG BNI. Upaya tersebut dilengkapi dengan sosialisasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), pelatihan terkait LST, serta inisiatif keberlanjutan lainnya.

Untuk memperkuat langkah-langkah yang telah dijalankan, BNI merumuskan kerangka kerja, *roadmap*, dan kebijakan LST yang komprehensif sehingga prinsip keberlanjutan dapat diimplementasikan secara terarah dan menyeluruh. BNI juga menunjukkan komitmennya pada agenda *net zero emission* (NZE) nasional dan mengikuti perkembangan keuangan berkelanjutan, termasuk pelaksanaan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* (CRMS) dan persiapan implementasi IFRS S1 & S2 sebagaimana diarahkan oleh OJK.

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan (3-4)

Penerapan tata kelola keberlanjutan di BNI diperkuat oleh keterlibatan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab langsung dalam merumuskan dan mengawasi pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan. BNI juga mengelola isu keberlanjutan melalui Sub Komite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud, yang terdiri dari perwakilan lintas fungsi berdasarkan SK Direksi No. KP/464/DIR/R tanggal 10 September 2025. Informasi lebih lengkap mengenai struktur organisasi BNI dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2025.

Ketua	Wakil Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Risk Management
Sekretaris	Pemimpin Divisi Environmental, Social & Governance (merangkap sebagai anggota tetap non-voting member)
Anggota Tetap Setingkat Direksi dan SEVP (Voting Member)	1. Direktur Finance & Strategy 2. Direktur Corporate Banking 3. Direktur Treasury & International Banking 4. Direktur Kelembagaan 5. Direktur Commercial Banking 6. Direktur Consumer Banking 7. Direktur Network & Retail Banking 8. Direktur Operation 9. Direktur Information Technology
Anggota Tetap Setingkat Direksi (Non-Voting Member)	Direktur Human Capital & Compliance
Anggota Tetap Setingkat Divisi/Satuan (Non-Voting Member)	1. Pemimpin Divisi Enterprise Risk Management 2. Pemimpin Divisi Operational Risk Management 3. Pemimpin Divisi Corporate Credit Risk 4. Pemimpin Divisi Enterprise Credit Risk 5. Pemimpin Divisi Commercial Credit Risk 6. Pemimpin Divisi Corporate Planning & Performance Management 7. Pemimpin Divisi Investor Relations 8. Pemimpin Divisi Subsidiaries Management 9. Pemimpin Divisi Procurement & Fixed Assets 10. Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 11. Pemimpin Divisi Corporate Banking 2 12. Pemimpin Divisi Corporate Banking 3 13. Pemimpin Divisi Corporate Banking 4 14. Pemimpin Divisi Syndication & Structured Finance 15. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 1 16. Pemimpin Divisi Enterprise Banking 2 17. Pemimpin Divisi Commercial Banking 1 18. Pemimpin Divisi Commercial Banking 2 19. Pemimpin Divisi SME Business 20. Pemimpin Divisi Business Program 21. Pemimpin Divisi International & Financial Institutions 22. Pemimpin Divisi Treasury 23. Pemimpin Divisi Consumer Product 24. Pemimpin Divisi Card Business 25. Pemimpin Divisi Agen46 26. Pemimpin Divisi Compliance 27. Pemimpin Divisi Policy Governance 28. Pemimpin Divisi Human Capital Strategy 29. Pemimpin Divisi Human Capital Services 30. Pemimpin Divisi BNI University 31. Pemimpin Divisi Corporate Secretary
Anggota Tidak Tetap (Non-Voting Member)	Direktur Sektor/SEVP/Pemimpin Divisi/Satuan yang terkait dengan topik pembahasan

Delegasi Tanggung Jawab atas Pengelolaan LST [illegible]

Keterlibatan jajaran Direksi dalam penerapan LST diwujudkan melalui keanggotaannya dalam Sub Komite ESG, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama implementasi LST di BNI. Sepanjang tahun 2025, Sub Komite ESG telah mengadakan empat rapat triwulanan. Adapun tugas pokok Sub Komite ESG, meliputi:



Selaras dengan peran Sub Komite ESG sebagai pengarah utama, pengelolaan dampak keberlanjutan di tingkat operasional dijalankan secara kolektif oleh seluruh unit kerja di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi guna memastikan efektivitas pelaksanaan tersebut.

Untuk mendukung implementasi tersebut, BNI mengembangkan Departemen Manajemen Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (LST) di bawah Divisi Enterprise Risk Management (ERM) menjadi Divisi Environmental, Social & Governance, yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- Melaksanakan seluruh aktivitas pengembangan, pembuatan dan penyelenggaraan strategi, *framework* & kebijakan terkait *blueprint* dan *roadmap* ESG di BNI termasuk *alignment*-nya dengan BNI Group untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Manajemen BNI;
- Menyusun strategi dan pengelolaan komunikasi dalam rangka mendukung implementasi ESG pada seluruh unit di BNI dan BNI Group;
- Menyusun laporan-laporan terkait ESG untuk pihak internal maupun eksternal sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- Mengelola portofolio ESG BNI *wide* dan aktivitas advisori dan konsultasi terkait penerapan keberlanjutan, ESG dan/atau transisi energi kepada debitur, dengan berkoordinasi dengan unit bisnis terkait;
- Menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan lembaga/institusi pemerintah/non pemerintah, pendidikan, lembaga rating, asosiasi dan lembaga lainnya dalam rangka mendukung pencapaian target dan perkembangan ESG BNI.

Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Environmental, Social & Governance didukung oleh 3 Departemen, yang meliputi:

Departemen Strategi, Kebijakan & Komunikasi

Departemen Emisi & Manajemen Data

Departemen Manajemen Portofolio & Advisori

Struktur Organisasi Divisi Environmental, Social & Governance



Keterangan:
*) Sesuai dengan tata kelola sentralisasi General Services Kantor Pusat

Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan LST

Alur Pengawasan Risiko LST



Kebijakan Internal Pengelolaan Risiko LST [illegible]

Dengan menjadikan etika sebagai fondasi operasional dan pelaporan, BNI menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Komitmen ini diperkuat oleh peran strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, serta mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko di seluruh unit kerja.

Guna memperkuat landasan etika dan tata kelola yang telah diterapkan, BNI membentuk struktur tata kelola dan menyusun kebijakan serta prosedur yang secara khusus diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola pada seluruh aktivitas operasional. Selain itu, BNI secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan Direksi, Dewan Komisaris, serta unit kerja terkait guna memastikan pemenuhan kompetensi, keahlian, dan sertifikasi di bidang Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan regulator.

Prosedur Identifikasi Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan dan Pengelolaannya [illegible]

Pengelolaan risiko keuangan berkelanjutan di BNI dijalankan oleh Sub Komite ESG melalui empat pilar manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, sebagai berikut:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Keoukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit;
3. Sistem Pengendalian Internal;
4. Keoukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.



Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sejumlah risiko dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, yaitu:

RISIKO LST DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

Risiko Operasional bank memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat	Mitigasi Risiko (LST) • Seluruh kantor operasional bank berada di lokasi sesuai dengan fungsinya. • Limbah yang dihasilkan bank jumlahnya minim dan termasuk dalam limbah rumah tangga. • Bank mengolah air limbah dari penggunaan air yang digunakan untuk menyiram tanaman. • Mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dalam operasional perusahaan untuk mengurangi konsumsi kertas. • Melaksanakan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dengan prinsip *zero waste to landfill*, khususnya di seluruh Kantor Pusat.
Risiko Produk/layanan keuangan digital meningkatkan risiko kejahatan teknologi dan mengancam privasi nasabah	Mitigasi Risiko (LST) • Melakukan identifikasi, penilaian, tinjauan, dan perbaikan terkait risiko digital atas setiap produk digital BNI. • Melakukan identifikasi, penilaian, tinjauan, dan perbaikan terkait ketahanan ancaman siber. • Melakukan penilaian dan peningkatan *security maturity* pada pihak ketiga. • Melakukan penilaian privasi data dan kecukupan keamanan data secara *end to end process*.
Risiko Peningkatan emisi dari operasional bank	Mitigasi Risiko (LST) • BNI telah menerapkan penghematan energi berupa: – Pemadaman lampu selama jam istirahat di setiap hari kerja. – Penggunaan solar energi untuk keperluan penerangan di daerah tangga darurat di gedung kantor utama BNI. – Optimalisasi pertemuan/rapat melalui media daring. – Optimalisasi penggunaan AC sentral gedung kantor pusat. • Monitoring emisi operasional secara bulanan. • BNI menetapkan target NZE operasional beserta dengan strategi penurunan emisinya.
Risiko Ancaman risiko fisik (banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan) pada kantor bank	Mitigasi Risiko (LST) • Melakukan analisis risiko bencana alam dalam proses pemilihan kantor. • Kantor bank banyak terletak di daerah perkotaan sehingga tidak terekspos dengan risiko bencana kebakaran hutan. • BNI telah memiliki *Business Continuity Management* sebagai salah satu upaya dalam menanggulangi kondisi bencana.

RISIKO LST DALAM PENYALURAN KREDIT (FN-CB-410a.3)

Risiko **Penyaluran kredit ke sektor emisi tinggi**	Mitigasi Risiko (3-3) • Bank memiliki *Risk Acceptance Criteria* (RAC) dengan menambahkan mitigasi risiko perubahan iklim, memuat persyaratan minimum bagi (calon) debitur untuk sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti sertifikasi RSPO/ISPO dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, and No Exploitation* (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan untuk debitur sektor perkebunan kelapa sawit, pemenuhan dokumen AMDAL atau UPL/UKL atau PROPER sesuai dengan sektor usahanya. • Bank melakukan pembiayaan secara selektif kepada sektor-sektor emisi tinggi dengan memperhatikan implementasi LST serta rencana transisi energi yang akan dilakukan oleh debitur. • Bank menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *Sustainability Linked Loan* (SLL) untuk mendorong debitur memulai transisi energinya. • BNI menerbitkan *advisory playbook* untuk membantu transisi debitur.
Risiko **Pelanggaran aspek LST oleh debitur eksisting**	Mitigasi Risiko (3-3) Secara berkala, unit bisnis akan melakukan pemantauan melalui sistem *watchlist* dan penilaian peringkat debitur. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap aspek LST, BNI akan melakukan verifikasi kepada pihak terkait dan dapat melakukan penyesuaian peringkat debitur.
Risiko **Penyaluran obligasi hijau (*green bond*) dan *sustainability bond* tidak sesuai dengan peruntukannya**	Mitigasi Risiko (3-3) Evaluasi dan seleksi proyek yang dilaalurkan obligasi hijau dan obligasi keberlanjutan dilakukan oleh Sub Komite ESG yang diketuai oleh Wakil Direktur Utama. Penyaluran dilakukan pada proyek-proyek yang bersifat *project financing* sehingga aliran penggunaan dana dapat diawasi oleh BNI. Terdapat opini dari *second party opinion* (SPO) atas laporan penyaluran *green bond* dan *sustainability bond* yang dilakukan oleh BNI.
Risiko **Debitur *Sustainability Linked Loan* tidak memenuhi target KPI SPT yang telah ditetapkan**	Mitigasi Risiko (3-3) Terdapat sistem penalti yang diterapkan kepada debitur yang gagal mencapai target KPI SPT yang ditetapkan. Dilakukan evaluasi tahunan oleh pihak ketiga independen atas kredit termasuk pencapaian target KPI SPT.
Risiko **Klasifikasi taksonomi tidak sesuai dengan TKBI**	Mitigasi Risiko (3-3) • Dilakukan penyusunan kuesioner TKBI dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. • Dilakukan *technical assistant* pengisian kuesioner TKBI bagi para debitur di sektor energi, AFOLU, konstruksi & real estate, transportasi & logistik. • Dilakukan pelatihan klasifikasi TKBI bagi para *Relationship Manager* (RM).

RISIKO SOSIAL DALAM MENJALANKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

Risiko	Mitigasi Risiko (102-15)
Penerima manfaat literasi dan inklusi keuangan belum merata	• Dilakukan penetapan target market penerima literasi dan inklusi keuangan. • Dilakukan pemetaan daerah atas target market penerima literasi dan inklusi keuangan. • Pelaksanaan literasi dan inklusi keuangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil pemetaan target market penerima literasi dan inklusi keuangan.

Komitmen dan Strategi Keberlanjutan BNI (102-14, 102-26)

Komitmen

Komitmen BNI dalam mewujudkan kinerja keberlanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik terus diperkuat melalui penerapan praktik perbankan yang bertanggung jawab serta penguatan strategi berbasis pilar keberlanjutan yang telah diperbarui. Pada 2026, BNI semakin memantapkan arah transformasi keberlanjutan melalui penyusunan ESG *Blueprint* sebagai peta jalan strategis yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam keseluruhan aktivitas bisnis, pengelolaan risiko, serta pengambilan keputusan Perseroan. Inisiatif ini memastikan bahwa komitmen keberlanjutan tidak hanya tercermin dalam kebijakan, tetapi juga diterapkan secara operasional dan terukur di seluruh unit organisasi.

Sejalan dengan peran BNI sebagai lembaga keuangan nasional, Bank secara konsisten mendukung kebijakan pemerintah dan arahan otoritas terkait dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon, termasuk upaya pencapaian target *net zero emission (NZE)*. Melalui implementasi strategi pilar keberlanjutan dan ESG *Blueprint*, BNI berupaya memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan, serta menjaga keseimbangan antara kinerja ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan Internal atas Penerapan Keberlanjutan

BNI melaksanakan Keuangan Berkelanjutan dengan mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017, yang diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan secara konsisten. Untuk mendukung implementasi tersebut, BNI mengembangkan Departemen Manajemen Lingkungan, Sosial & Tata Kelola (LST) di bawah Divisi Enterprise Risk Management (ERM) menjadi Divisi Environmental, Social & Governance. Koordinasi lintas fungsi dilakukan melalui Sub Komite ESG di bawah Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud, sesuai SK Direksi No. KP/464/DIR/R tanggal 10 September 2026. Pelaksanaan tata kelola keberlanjutan ini mendapat pengawasan dan dukungan langsung dari Dewan Komisaris dan Direksi, yang terlibat aktif dalam perencanaan dan evaluasi kinerja ESG untuk memastikan integrasi keberlanjutan dalam strategi bisnis BNI.

Strategi Keberlanjutan

BNI merancang strategi keberlanjutannya dengan mengintegrasikan kinerja LST sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kerangka tersebut dituangkan dalam Pilar Keberlanjutan BNI, yang berisi seluruh inisiatif keberlanjutan untuk mendukung visi dan pencapaian target kinerja berkelanjutan, sekaligus menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi pada perlindungan lingkungan.

Pilar Keberlanjutan BNI dibangun atas tiga fokus utama, yaitu *Sustainable Finance*, *Corporate Sustainability*, dan *Inclusion & Resilience*, yang mencakup pengelolaan risiko ekonomi, sosial, lingkungan, termasuk risiko perubahan iklim. Pilar Keberlanjutan ini merupakan hasil perumusan inti sari dari lima Pilar Keberlanjutan BNI, menggambarkan 3 fokus utama BNI dalam pengelolaan keberlanjutan. Pilar *Sustainable Finance* fokus kepada bagaimana BNI melakukan internalisasi aspek ESG dalam proses bisnis BNI, baik itu kredit, pendanaan maupun layanan. Bank memasukkan kriteria ESG dalam proses penilaian kredit, seperti analisis dampak lingkungan, kepatuhan sosial, serta tata kelola debitur, sehingga keputusan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kelayakan finansial tetapi juga risiko dan peluang keberlanjutan. Selain itu, Bank mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan serta menerapkan kebijakan eksklusi dan *engagement* dengan nasabah untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Pilar *Corporate Sustainability* fokus kepada bagaimana BNI melakukan internalisasi aspek ESG ke seluruh operasional BNI. Strategi ini meliputi penerapan praktik keberlanjutan dalam aktivitas sehari-hari dan tata kelola internal bank. Dari sisi lingkungan, Bank mengelola jejak karbon operasional melalui efisiensi energi, digitalisasi proses, pengelolaan limbah, serta penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Aspek sosial diintegrasikan melalui kebijakan ketenagakerjaan yang adil, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan kompetensi pegawai, serta perlindungan konsumen dan inklusi keuangan.

Strategi inklusi dan resiliensi perbankan difokuskan pada perluasan akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan Bank terhadap risiko ekonomi, sosial, dan lingkungan. BNI mengembangkan program inklusi keuangan layanan keuangan digital, dan literasi keuangan untuk menjangkau kelompok *unbanked* dan *underserved*, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Pada saat yang sama, resiliensi diperkuat melalui program advisori kepada debitur untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, menuju ekonomi rendah karbon.

Memperkuat perannanya dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi lingkungan, BNI melaksanakan program konservasi lahan dan satwa langka. Upaya konservasi lahan berkontribusi pada penyerapan karbon, pencegahan degradasi lahan, serta pengurangan risiko bencana seperti banjir dan longsor, sehingga meningkatkan kapasitas adaptasi lingkungan dan masyarakat sekitar. Sementara itu, pelestarian hewan langka menjaga keanekaragaman hayati yang esensial bagi ketahanan ekosistem.

Pilar Keberlanjutan BNI

Visi	Menjadi lembaga keuangan global terpercaya yang unggul dalam inovasi dan kinerja secara berkelanjutan
Aspirasi & Target	• ESG Blueprint • Target net zero emission (NZE)

Pilar	*Sustainable Finance*	*Corporate Sustainability*	*Inclusion & Resilience*
Strategi & Inisiatif	• Pengembangan *sustainable financing, funding* dan program di Seluruh Segmen • Internalisasi Standar ESG Nasional dan Internasional • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas praktik keberlanjutan	• Pengelolaan energi dan emisi untuk mencapai target *net zero emission* (NZE) • Pengembangan program untuk mendukung praktik operasional berkelanjutan • Penguatan kapabilitas pegawai dalam penerapan ESG • Penguatan keamanan siber & perlindungan data nasabah	• Penguatan inklusi dan literasi keuangan serta pemberdayaan masyarakat dalam praktik bisnis yang berkelanjutan • Mitra strategis debitur dalam melaksanakan transisi menuju praktik usaha berkelanjutan • Pelestarian *nature & biodiversity*
Enabler	*Governance, People, IT & Data Infrastructure*		

Peta Jalan ESG

Sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap keberlanjutan, BNI menyusun peta jalan strategis untuk mengintegrasikan prinsip LST ke dalam seluruh aktivitas bisnis dan pengambilan keputusan Perseroan. Peta Jalan ini menjadi pedoman pelaksanaan inisiatif keberlanjutan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memastikan keselarasan antara kinerja bisnis, manajemen risiko, dan penciptaan nilai berkelanjutan bagi pemangku kepentingan.

Fokus implementasi Peta Jalan ESG BNI memuat arah kebijakan dan target strategis guna mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, perlindungan kepentingan nasabah, serta peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya, BNI akan mengembangkan peta jalan tersebut menjadi ESG *Blueprint* jangka panjang untuk memastikan kesiapan BNI dalam merespons perubahan regulasi dan tuntutan keberlanjutan dari regulasi dan pasar.

PETA JALAN ESG BNI

Fokus Jangka Pendek (2024)	Fokus Jangka Menengah (2025-2026)	Fokus Jangka Panjang (≥2027)
• Memperkuat infrastruktur • Menetapkan NZE dan *Carbon Budget*	• Memperkuat *Risk Acceptance Criteria* (RAC) debitur • Memperkuat infrastruktur manajemen risiko perubahan iklim • Memperkuat keterlibatan Dewan dalam LST • Mengoptimalkan pencegahan kehilangan data	Penerapan manajemen risiko perubahan iklim dalam operasional bank

Evaluasi Pencapaian Target RAKB

Evaluasi Pencapaian Target RAKB 2025

BNI secara konsisten menyusun RAKB sebagai bagian dari pemenuhan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan komitmen terhadap implementasi keuangan berkelanjutan. RAKB Tahun 2026 difokuskan pada penguatan posisi BNI dalam menghadapi risiko perubahan iklim melalui pelaksanaan rencana kerja yang mendukung peran BNI sebagai mitra debitur dalam proses transisi menuju usaha berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, BNI telah menyelesaikan program-program yang tercantum dalam RAKB antara lain:

- Program *advisory* transisi bagi debitur melalui **penyusunan ESG Advisory Playbook** untuk sektor Kelapa Sawit, Batu Bara, dan FLTU yang ditujukan bagi debitur dan *Relationship Manager* (RM).
- **Edukasi program transisi debitur** melalui kegiatan sosialisasi dan *Technical Workshop* Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 untuk sektor Commercial Real Estate (CRE), Transportation & Services (T&S), dan AFOLU.
- **Memperkuat manajemen risiko** iklim dengan mengadopsi standar dan praktik terbaik internasional antara lain melalui pelaksanaan *gap analysis* guna memastikan kesiapan BNI **dalam mengadopsi IFRS S1 dan IFRS S2** yang direncanakan untuk diterapkan pada tahun 2027.
- Pengembangan inisiatif keberlanjutan lainnya, termasuk **pengembangan UMKM ramah lingkungan** dan **UMKM Go Global**, **perluasan inklusi keuangan berkelanjutan**, **pengembangan produk keberlanjutan**, serta **integrasi prinsip keuangan berkelanjutan** ke dalam kerangka manajemen risiko.
- **Penerapan konsep *Zero Waste To Landfill* (ZWTL)** dengan volume daur ulang limbah sebesar 611,6 ton atau 100% limbah yang dihasilkan.

Namun, terdapat beberapa program RAKB 2025 yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut antara lain:

- Penyusunan *Transition Plan* dan penyesuaian manajemen portofolio untuk sektor Kelapa Sawit memerlukan penyesuaian dengan target ekspansi bisnis.
- Pembangunan Platform Emisi yang saat ini berada dalam tahap pengembangan sistem IT.
- *Climate Risk Framework* dengan prinsip TCFD dalam tahap penyusunan.
- Edukasi Program Transisi Debitur untuk sektor Pertambangan dan Kelistrikan akan dilakukan pada Kuartal I 2026.
- Rencana pelaksanaan program *piloting Solid Waste Management* di Kantor Wilayah/Cabang pada Kuartal I tahun 2026.



Rencana Kerja RAKB 2026

Untuk tahun 2026, RAKB difokuskan pada tiga Pilar Keberlanjutan BNI, yaitu *Sustainable Finance*, *Corporate Sustainability*, dan *Inclusion & Resilience*. Pada pilar *Sustainable Finance*, BNI fokus pada integrasi aspek ESG pada seluruh bisnis BNI, baik aspek kredit, pendanaan, maupun layanan. Strategi pelaksanaan *in-depth analysis* dan CRST, penyusunan *transition plan* bagi sektor prioritas, serta pengembangan *enabler* untuk mendukung implementasi dan pelaporan IFRS S1 dan S2. Pilar *Corporate Sustainability* memperkuat komitmen internal melalui pengelolaan energi dan emisi secara bertahap, penerapan konsep *zero waste to landfill*, pengembangan kurikulum ESG *Academy*, serta transformasi *New Generation Security Operation Center* (NG-SOC) berbasis kecerdasan buatan. Sementara itu, pilar *Inclusion & Resilience* menegaskan peran BNI dalam mendukung transisi ekonomi yang adil melalui penyusunan ESG *Advisory Playbook* bagi debitur sektor beremisi tinggi, dan penyelarasan program CSR untuk mendukung pencapaian TPB. Ketiga pilar ini membentuk kerangka strategis yang terpadu dalam memperkuat kontribusi BNI terhadap ekonomi berkelanjutan dan ketahanan jangka panjang.

Permasalahan, Tantangan, Perkembangan, dan Pengaruh terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan

BNI mengidentifikasi sejumlah kendala dan tantangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Berikut adalah kendala yang dihadapi serta strategi pengelolaan yang dilakukan BNI:

1. Pemahaman LST yang belum merata: BNI berfokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan *e-learning*, baik internal maupun eksternal.
2. Kesadaran debitur terhadap LST: masih terbatasnya kesadaran debitur mengenai LST, khususnya dalam mengelola risiko perubahan iklim sehingga perlu pelatihan dan dukungan teknologi.
3. Pengembangan produk keberlanjutan: dibutuhkan inovasi produk keuangan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan nasabah dan debitur.
4. Digitalisasi manajemen data LST: pengembangan sistem digital untuk mengelola *database* LST.
5. Standar dan regulasi LST yang kompleks: menjadi tantangan dalam mengikuti tren perkembangan penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.
6. Ketentuan baru yang dinamis terkait praktik keberlanjutan: panduan seperti CRMS, dan IFRS S1 & S2, menuntut persiapan SDM, pengetahuan, dan kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasinya.

BNI merespons tantangan tersebut dengan memperkuat adaptasi melalui inovasi teknologi, kemitraan strategis, dan penyempurnaan kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Walaupun berbagai tantangan masih dihadapi, terdapat peluang keuangan berkelanjutan yang berpotensi memberikan dampak positif bagi aktivitas perbankan dan pembiayaan, di antaranya:

- Meningkatnya peluang pembiayaan hijau di Indonesia;
- Mendorong pembiayaan bagi debitur yang menerapkan usaha berkelanjutan melalui pemberian *Sustainability Linked Loan*;
- Tren peningkatan kesadaran dunia usaha terkait keuangan berkelanjutan, khususnya korporasi;
- Semakin tingginya minat pemerintah, regulator, dan investor terkait implementasi keberlanjutan;
- Keberadaan *niche market* berkelanjutan menjadi peluang target pasar atas produk/ jasa keuangan berkelanjutan yang sesuai kebutuhan;
- Membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang paham dan kompeten di bidang keberlanjutan untuk merancang program-program yang mendukung TFB.

Komposisi dan Peran Direksi dan Dewan Komisaris [2-9, 2-11]

Direksi dan Dewan Komisaris berperan aktif dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi permasalahan, tantangan, serta perkembangan terkait penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk memastikan bahwa setiap pengaruh yang timbul terhadap strategi dan operasional perusahaan dikelola secara tepat melalui kebijakan, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Informasi lengkap mengenai organ tata kelola tertinggi dan komitenya terdapat dalam Laporan Tahunan.

Penerapan Tata Kelola Keberlanjutan dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) [2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-21]

Dalam menerapkan tata kelola keberlanjutan, keuangan berkelanjutan, dan prinsip keberlanjutan perusahaan, BNI berpegang pada prinsip GCG sebagai landasan utama. Direksi memegang peran dalam menjalankan operasional, sementara Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Direksi. Setiap Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur dan didukung oleh divisi yang mengelola aspek LST. Tanggung jawab terhadap kinerja LST berada pada Direksi secara kolektif. Rincian struktur tata kelola selengkapnya tercantum pada Laporan Tahunan.

Melalui RUPS, Pemegang Saham berwenang menominasikan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam praktik tata kelolanya, BNI memastikan hubungan antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham tetap profesional dan bebas dari konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi keputusan. Informasi terkait hal tersebut diungkapkan pada Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Direksi [2-18]

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu penilaian dalam RUPS, evaluasi pencapaian target Perseroan, dan *assessment* GCG. Informasi lengkap mengenai evaluasi ini tersedia pada Laporan Tahunan.

Kode Etik

BNI menerapkan Kode Etik sebagai *Code of Conduct* yang mengikat seluruh insan BNI di setiap jenjang organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris, untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan kepatuhan dalam seluruh aktivitas bisnis. Kode Etik disusun selaras dengan visi, misi, dan nilai AKHLAK serta mengatur standar nilai, etika bisnis dan etika kerja, batasan perilaku, dan interaksi yang diperkenankan maupun dilarang dengan nasabah, mitra kerja, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengendalian konflik kepentingan, kerahasiaan, penggunaan aset, serta larangan

korupsi dan gratifikasi. Implementasi diperkuat melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai, dukungan Unit Pengendalian Gratifikasi, serta sosialisasi dan pembelajaran berkelanjutan melalui *e-learning*, *sharing session*, media internal, pelatihan GCG, dan *coaching*. Selain itu, BNI secara konsisten menjalankan kampanye penguatan integritas sepanjang tahun, termasuk memanfaatkan momentum hari besar keagamaan maupun momen internal, untuk mengingatkan kepatuhan terhadap Kode Etik serta pencegahan gratifikasi dan konflik kepentingan. Kepatuhan dipantau melalui mekanisme pengawasan serta *Whistleblowing System* dengan jaminan kerahasiaan pelapor, dan setiap pelanggaran ditindak melalui sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab terhadap Isu-Isu Etika

GRI 2-26

Pengawasan terhadap Isu-Isu Etika

Pengawasan atas praktik etika bisnis dan etika perilaku di BNI dilakukan melalui Komite di bawah Direksi, yaitu Komite Manajemen Risiko & Anti Fraud (KRA) dan Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko (KPR). Rapat KRA dan Komite Audit dilaksanakan paling sedikit 4 kali dalam setahun, serta rapat KPR yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan.

Untuk mendukung efektivitas pengawasan tersebut, BNI menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai sarana pelaporan berbagai pelanggaran, termasuk kecurangan (*fraud*), korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi atau penyuapan, pelanggaran kebijakan dan kode etik, serta tindakan tidak etis lainnya, termasuk isu terkait sumber daya manusia (SDM).

Internal Audit bertanggung jawab mengelola WBS dan menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Pada setiap triwulan, Komite Audit dan Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, meninjau laporan tersebut yang meliputi daftar pelanggaran, tindak lanjut yang telah dilakukan, dan evaluasi efektivitas pengelolaan WBS.

Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh laporan pengaduan yang diterima Bank selama 2025 telah ditindaklanjuti secara hati-hati dan profesional oleh pihak penanggung jawab, sesuai prosedur internal yang berlaku di BNI. Tindak lanjut atas laporan WBS yang masuk melalui saluran WBS to CEO menunjukkan komitmen penegakan kepatuhan dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan WBS pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan konsisten mendukung penguatan tata kelola BNI. Meski demikian, Dewan Komisaris tetap memberikan arahan kepada Direksi untuk terus memperluas sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas melalui WBS. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi pegawai maupun pemangku kepentingan, serta memastikan terciptanya lingkungan kerja yang bersih, kondusif, dan berintegritas tinggi.

Audit Reguler atas Pemenuhan Standar Etika

Dalam pelaksanaan audit tahunan, BNI menerapkan kerangka tiga dimensi utama, yaitu *people*, *process*, dan platform, yang berfungsi sebagai landasan dalam memastikan efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan penerapan tata kelola perusahaan. Salah satu fokus strategis pada dimensi *people* adalah pelaksanaan audit atas standar etika, yang bertujuan untuk memperkuat budaya integritas, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian risiko di seluruh lini operasional perusahaan.

KERANGKA 3 DIMENSI UTAMA

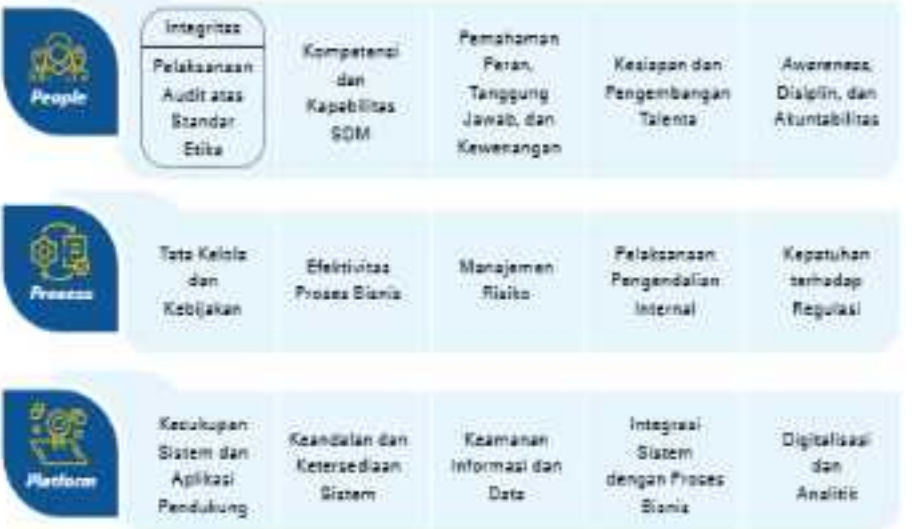

Dalam mengawal penerapan standar etika, BNI menugaskan Internal Audit untuk melakukan audit berkala pada kantor cabang, sentra kredit, kantor wilayah, dan divisi. Audit tersebut mencakup penilaian kepatuhan terhadap kode etik, regulasi, dan kebijakan internal, serta identifikasi potensi pelanggaran etika, termasuk konflik kepentingan, penyuapan, dan *fraud*. Selain audit internal, BNI juga menjalani audit eksternal atas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai bagian dari audit standar etika. Pembahasan lebih lanjut mengenai audit regular atas implementasi kebijakan antikorupsi, antisuap, dan *anti-fraud* disajikan pada bagian "Audit Reguler atas Implementasi Kebijakan Antikorupsi, Antisuap, dan *Anti-fraud*".

Pelatihan terkait Standar Etika

Sepanjang tahun, BNI secara konsisten mendorong penerapan etika bisnis dan perilaku melalui program pelatihan yang diikuti oleh seluruh lini organisasi. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan perilaku pegawai dengan standar industri, memperkuat manajemen risiko internal, serta mengokohkan fondasi perusahaan yang berkelanjutan. Capaian program pelatihan etika sebagai berikut:

123

Jumlah Judul Pelatihan

Judul dengan topik meliputi Budaya Kerja BNI, Strategi Anti Penyuapan dan Anti Korupsi, Budaya Integritas di Lingkungan Kerja, Etika Digital & Cybersecurity, Etika bisnis, Etika Kepemimpinan, dan lain sebagainya.

42.811

Jumlah Pegawai

Pegawai tersebut terdiri dari pegawai tetap, kontrak, trainee, hingga tenaga kerja alih daya. Setiap pegawai menerima rata-rata 10 kali pelatihan tiap tahunnya.

Kebijakan Pengendalian Risiko Perilaku Tidak Etis

Kebijakan *Anti-Fraud*

BNI telah menetapkan dan menerapkan Kebijakan *Anti-Fraud* yang berlaku bagi seluruh pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris. BNI menerapkan kerangka kerja *anti-fraud* secara menyeluruh sebagai bagian dari sistem pengendalian intern, dengan pendekatan pencegahan, deteksi dini, serta penanganan. BNI menerapkan kebijakan dan prosedur yang ketat dalam pencegahan *fraud*, yang mencakup:

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh pegawai setiap tahun sebagai bentuk pengendalian gratifikasi dan komitmen *anti-fraud*.
- Penyusunan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai.
- Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko & *Anti-Fraud* yang disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. KP/464/DIR/R tanggal 10 September 2026.
- Pedoman Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, sebagaimana tercantum dalam Prosedur Perusahaan Nomor IN/003/AFR/001 tanggal 9 Desember 2024.
- Kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.
- Implementasi *single sanction* berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pelaku *fraud*, dan pemberian pengurangan penilaian unit (*boom factor*) bagi unit tempat terjadinya *fraud*.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh calon debitur atau debitur saat perjanjian kredit, sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan.
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh pihak terkait dalam proses pengadaan, yang diatur dalam Pedoman Perusahaan Pengadaan.
- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik antara lain dengan menghindari adanya benturan kepentingan dalam proses kredit, sesuai dengan Pedoman Perusahaan Perkreditan.

Untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan *anti-fraud*, Divisi Compliance mengembangkan *Compliance Index* (CIX) sebagai alat ukur kepatuhan. CIX digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat kepatuhan serta efektivitas pengendalian *fraud* secara berkelanjutan, sehingga penerapan strategi *anti-fraud* BNI dapat berjalan secara terukur.

Audit dan Pengawasan atas *Anti-fraud*

Pengawasan atas penerapan kebijakan *Anti-fraud* merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dalam pengelolaan risiko operasional BNI. Sepanjang tahun 2026, pengawasan dilakukan oleh Satuan *Anti-Fraud* melalui evaluasi berkala dengan frekuensi minimal dua kali dalam setahun (semesteran) terhadap kecukupan dan efektivitas sistem, prosedur, serta mekanisme pengendalian yang diterapkan di seluruh unit kerja. Upaya ini didukung oleh pelaksanaan audit internal yang lebih intensif dan berbasis risiko, serta penggunaan teknologi analitik untuk pemantauan transaksi dan deteksi potensi *fraud* secara real-time. Efektivitas implementasi kebijakan *anti-fraud* selanjutnya diukur melalui CIX yang dikembangkan oleh Divisi Compliance. Hasil evaluasi kemudian dilaporkan minimal 4 kali dalam setahun (triwulanan) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan Antikorupsi & Antisuap

BNI menerapkan serangkaian kebijakan dan prosedur ketat terkait antikorupsi dan antisuap, antara lain:

Prosedur

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pegawai setiap tahun sebagai bentuk pengendalian gratifikasi dan antisuap.
- Deklarasi Gratifikasi dan Anti Suap oleh segenap pegawai secara berkala melalui aplikasi DigiHC.
- Penyusunan Kode Etik sebagai pedoman perilaku bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan segenap pegawai.
- Penerapan sistem manajemen antisuap melalui sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
- Penandatanganan Pakta Integritas oleh calon debitur atau debitur saat penandatanganan perjanjian kredit serta pejabat pemutus dan pihak terkait dalam proses pengadaan.
- Implementasi *single sanction* berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pelanggaran yang melibatkan gratifikasi atau suap.

Kebijakan

- Pedoman Perusahaan Pengendalian Gratifikasi No. IN/726/KPN/002 tanggal 24 September 2021.
- Pedoman Perusahaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) No. IN/118/CMP/006 tanggal 27 Desember 2024.
- Pedoman Perusahaan *Code of Conduct* Bab Ketentuan Sanksi Administratif IN/007/HCE/001 tanggal 13 Februari 2025.

Untuk memastikan kebijakan antikorupsi dan antisuap diimplementasikan secara efektif, BNI memperkuat fungsi pengawasan melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berada di bawah Divisi Compliance. Unit ini menjalankan peran strategis dalam memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian gratifikasi serta pencegahan praktik suap di seluruh proses bisnis Bank. Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian, BNI memiliki saluran pelaporan dugaan pelanggaran antisuap dan antikorupsi melalui WBS.

Audit dan Pengawasan atas Antikorupsi dan Antisuap GRI 205-2

BNI memastikan kepatuhan terhadap kebijakan serta implementasi antikorupsi, antisuap, dan *anti-fraud* selaras dengan standar etika melalui pelaksanaan audit atas penerapan SMAP yang yang mengacu pada standar etika internasional ISO 37001:2016. Frekuensi audit internal atas SMAP dilakukan 1 kali dalam setahun oleh Internal Audit dan kemudian dilakukan audit eksternal 1 kali dalam setahun oleh pihak independen. Ruang lingkup audit internal maupun eksternal SMAP, meliputi penerapan klausul-klausul dalam sertifikasi ISO 37001:2016, termasuk pada ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, kredit segmen korporasi, serta aktivitas dana pensiun. Audit juga mencakup pengaturan antikorupsi, seperti hadiah, gratifikasi, sumbangan, dan bentuk manfaat lainnya yang dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan *surveillance audit* 2026, penerapan SMAP di BNI dinilai konsisten tanpa adanya penyimpangan yang material.

Pada tahun 2026, BNI juga telah menilai unit kerja, termasuk kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, serta entitas pendukung, melalui proses penilaian risiko yang dilaksanakan oleh Internal Audit dan unit terkait. Berdasarkan penilaian tersebut, seluruh operasi BNI yang tercakup dalam ruang lingkup asesmen (100%) telah dievaluasi terhadap risiko korupsi, mencakup risiko gratifikasi, suap, konflik kepentingan, serta potensi *fraud* lainnya. Penilaian ini memberikan dasar bagi BNI untuk menetapkan prioritas pengendalian internal dan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SMAP dan Strategi *Anti-fraud*, serta penguatan telah diterapkan sesuai rekomendasi hasil audit. Internal Audit kemudian melaporkan hasil penilaian kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan frekuensi setahun sekali.

Hasil evaluasi KPK menunjukkan bahwa pengendalian gratifikasi BNI pada tahun 2026 meraih predikat "Sangat Baik", yang mengonfirmasi efektivitas penerapan pengendalian gratifikasi serta SMAP. Untuk menjaga capaian tersebut dan menekan peluang terjadinya korupsi maupun penyuapan, BNI melaksanakan sejumlah tindakan korektif dengan memperkuat berbagai aspek, mencakup:

- Peningkatan pemahaman antikorupsi dan antisuap kepada segenap pegawai melalui berbagai program, seperti sosialisasi, pelatihan, *e-learning mandatory*, webinar *series*, dan imbauan di media sosial resmi BNI.
- Penyebaran informasi mengenai antikorupsi dan antisuap kepada pemangku kepentingan melalui poster, video, *digital banner*, situs web BNI, dan media massa nasional.
- Penyesuaian ketentuan internal terkait antikorupsi dan antisuap sesuai dengan regulasi terkini, *best practice* serta hasil evaluasi/rekomendasi pemeriksaan audit.

Komunikasi, Sosialisasi, dan Pelatihan tentang Antikorupsi, Antisuap, dan *Anti-fraud*

Sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya antikorupsi dan anti-fraud, BNI mengadakan berbagai program sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh pegawai, baik pegawai tetap, kontrak, trainee, dan tenaga kerja alih daya, serta mitra usaha, meliputi:

1. Pelaksanaan acara Compliance Forum dengan tema "Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan dan Anti Korupsi" yang mengundang narasumber dari KPK dan dihadiri oleh 1.453 orang yang terdiri segenap Dewan Komisaris, Direksi, SEVP, Segenap Pemimpin Divisi dan Wilayah, Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak, Ahli Pembangun Integritas, Penyuluh Anti Korupsi, serta segenap pegawai BNI.

2. Pelaksanaan program pelatihan sertifikasi terkait *anti-fraud* untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi pegawai dalam operasional bisnis masing-masing yang diikuti oleh 478 pegawai.

3. Pelaksanaan Program *e-Learning Mandatory* tentang *Anti-Fraud Awareness*, Anti Pencucian Uang, dan Pengendalian Gratifikasi dan SMAP melalui *Learning Management System* BNI (BNI Smarter) yang diikuti oleh 41.489 pegawai.

4. Pelaksanaan 8 program webinar dengan topik meliputi anti-fraud, Anti Korupsi dan Mitigasi *Fraud* yang diikuti oleh 17.953 penonton.

5. Pelaksanaan program Sharing Awareness Operasional Kamis Pagi (SARAPAN) yang dilakukan secara rutin setiap hari kamis, melibatkan Kantor Pusat, kantor cabang, dan kantor wilayah.

6. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran mengenai *anti-fraud* dan antigratifikasi kepada pegawai dan pemangku kepentingan lainnya melalui media komunikasi internal, seperti *email blast*, buletin internal, *desktop wallpaper*, dan poster.

7. Imbauan kepada seluruh pegawai untuk tidak menerima atau meminta imbalan dari pihak ketiga, serta untuk membaca Pakta Integritas yang menginformasikan komitmen BNI terhadap pengendalian gratifikasi.

8. Pelaksanaan sosialisasi antikorupsi & antisuap kepada segenap Vendor melalui pelaksanaan *Vendor Gathering* atau webinar yang diselenggarakan 1 kali dalam setahun.

9. Penyebaran informasi melalui poster, video, *digital banner*, situs web BNI, media massa nasional, dan BNI Forum terkait antigratifikasi, SMAP, serta panduan pencegahan korupsi.

Sistem Pelaporan Pelanggaran [redacted]

Penerapan prinsip GCG di BNI turut diwujudkan melalui pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*/WBS), yang disusun berdasarkan Peraturan BUMN PER-09/MBU/2012 dan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Sistem ini menjadi sarana untuk menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas, dengan menyediakan mekanisme pelaporan bagi insan BNI, nasabah, debitur, mitra usaha, dan pihak eksternal lainnya atas dugaan pelanggaran hukum, kebijakan internal, maupun kode etik. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan, mencakup kecurangan (*fraud*), korupsi, benturan kepentingan, gratifikasi/penyuapan, pelanggaran regulasi, dan tindakan tidak etis lainnya. Melalui WBS, BNI berupaya membangun lingkungan kerja yang aman dan berintegritas tinggi.

WBS memiliki fungsi utama untuk mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan atau pelanggaran secara dini, serta membantu BNI dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk nasabah, debitur, mitra usaha, pegawai, dan regulator, dengan memastikan tindakan pencegahan dapat segera diambil. Perlindungan pelapor diatur melalui Pedoman Perusahaan (PP) tentang WBS, sebagai upaya BNI memberikan jaminan keamanan dan kerahasiaannya sehingga pelapor bebas dari risiko tindakan balasan atau intimidasi, dan pelaporan dapat dilakukan secara aman dan tanpa rasa khawatir.

Untuk memastikan fungsi WBS berjalan optimal, BNI mengimplementasikan "WBS to CEO". Mekanisme ini memungkinkan Direktur Utama untuk meninjau dan memastikan bahwa setiap laporan dengan bukti relevan ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. Independensi dalam tindak lanjut diperkuat melalui pengelolaan WBS oleh Internal Audit yang turut melibatkan pihak independen eksternal. Informasi detail mengenai WBS dan jumlah pengaduan dapat dilihat pada Laporan Tahunan 2026.



Sanksi Tegas [redacted]

Sanksi tegas diberlakukan BNI terhadap setiap individu yang terlibat dalam tindakan korupsi, suap, atau penipuan, termasuk peringatan, penurunan jabatan, pemutusan hubungan kerja, tuntutan ganti rugi, hingga proses hukum. Penegakan ini mencerminkan komitmen BNI dalam menolak segala bentuk tindakan melawan hukum. Untuk kasus *fraud*, pegawai dikenakan *single sanction* berupa PHK dan dapat dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum sebagai upaya memastikan efek jera.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh								
	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris			Pegawai Tetap			Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Total Fraud	0	0	0	12	14	11*	2	2	0
Telah diselesaikan	0	0	0	11	14**	11*	2	2	0
Dalam proses penyelesaian di internal BNI	0	0	0	2	0**	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	5	3*	0	0	0

Keterangan: Kasus penyimpangan fraud dengan kerugian di atas Rp100 juta

*) Penyajian kembali informasi (restatement) karena ada penyesuaian data dengan Laporan Tahunan

**) Penyajian kembali informasi (restatement) karena tahun fraud yang hingga akhir tahun 2024 dalam proses penyelesaian di internal BNI telah diselesaikan di tahun 2025.

Sekilas Laporan Keberlanjutan

Profil Laporan GRI 2-3 2-4 2-5 2-27

Sebagai sarana komunikasi dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan, BNI secara konsisten menyusun Laporan Keberlanjutan setiap tahun. Laporan ini memuat pengungkapan atas penerapan keuangan berkelanjutan serta kinerja Bank pada aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam periode pelaporan 1 Januari hingga 31 Desember 2025.

Penyusunan laporan mengacu pada ketentuan peraturan dan standar pelaporan keberlanjutan yang relevan, meliputi:

- SuratEdaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
- Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2021 yang disusun sesuai dengan GRI Standards;
- GRI G4 Financial Services Sector Supplement;
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) sektor Jasa Keuangan;
- Sustainable Banking Assessment (SUSBA) yang dikembangkan oleh World Wide Fund for Nature (WWF);
- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs); serta
- ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

Selain memenuhi standar tersebut, laporan ini juga dirancang untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dan lembaga pemeringkat kinerja LST, termasuk Sustainalytics dan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Seluruh data dan informasi dalam laporan dihimpun dari Kantor Pusat BNI serta jaringan cabang di seluruh Indonesia. Informasi keuangan yang diungkapkan menggunakan data keuangan konsolidasi yang telah diaudit oleh auditor independen, mencakup entitas anak BNI, yaitu PT BNI Life Insurance, PT BNI Multifinance, PT BNI Sekuritas beserta entitas anaknya, BNI Remittance Ltd., PT BNI Modal Ventura, serta PT Bank Hibank Indonesia. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab atas penyediaan, verifikasi, serta keandalan data yang dilaporkan.

Penyusunan laporan dilakukan dengan menerapkan prinsip pelaporan keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Dalam laporan ini terdapat sejumlah data yang disajikan kembali (*restated*) untuk menyempurnakan pengungkapan pada periode sebelumnya, sebagai dampak dari penyesuaian metodologi dan perluasan cakupan penghitungan pada beberapa parameter.

Seluruh proses penyusunan Laporan Keberlanjutan dikoordinasikan oleh Divisi Environmental, Social, and Governance (ESG). Setiap data dan informasi yang disampaikan telah melalui proses peninjauan dan validasi berlapis dengan mekanisme *maker-checker-approver*, mulai dari PIC divisi/satuan hingga pemimpin divisi/satuan. Pelaksanaan reviu dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

- Konsinyering data dan konfirmasi per divisi melalui rapat koordinasi, baik secara luring maupun daring;
- Wawancara unit kerja sebagai bagian dari proses *assurance* yang difasilitasi oleh lembaga independen;
- Sirkulasi dokumen Laporan Keberlanjutan kepada seluruh Direksi selaku anggota Sub-Komite ESG serta Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan final.

Verifikasi atas Laporan Keberlanjutan

Mengacu pada Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, BNI menunjuk PT Sejahtera Rampan Asia sebagai lembaga independen untuk melaksanakan proses penjaminan (*assurance*) atas Laporan Keberlanjutan ini. Penentuan lembaga penjamin dilakukan melalui proses seleksi yang melibatkan manajemen puncak serta unit terkait, dengan mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, dan kualifikasi lembaga yang telah terdaftar pada AA1000, serta pengalaman yang memadai dalam jasa *assurance* laporan keberlanjutan di Indonesia.

Proses penjaminan dilakukan guna memastikan mutu, akurasi, dan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan sejalan dengan prinsip dan standar pelaporan keberlanjutan. Pelaksanaan *assurance* mencakup verifikasi data dan konfirmasi kepada seluruh pihak kontributor. Standar yang digunakan mengacu pada AA1000 Assurance Standard dengan tingkat *moderate assurance* dan jenis tipe 2. Seluruh tahapan penunjukan dan pelaksanaan *assurance* dilaksanakan secara independen, bebas dari benturan kepentingan antara BNI dengan lembaga penjamin, serta berada di bawah pengawasan manajemen puncak untuk menjamin objektivitas dan integritas proses. Ringkasan hasil *assurance* disajikan pada bagian akhir laporan ini.

Topik Material dan Isu Utama GRI 3-1

Pada 2026 BNI kembali melakukan pemutakhiran proses penilaian materialitas dengan mempertimbangkan dinamika kegiatan operasional, perkembangan regulasi, serta isu-isu keberlanjutan yang berdampak signifikan, baik dari sisi Perseroan terhadap lingkungan dan masyarakat, maupun finansial terhadap kinerja perusahaan.

Proses kaji ulang prioritas topik material dilaksanakan melalui pendekatan yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Keterlibatan pemangku kepentingan eksternal dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk mengidentifikasi isu keberlanjutan, besaran dampak, serta relevansinya terhadap kinerja finansial BNI. Adapun kelompok pemangku kepentingan eksternal yang berpartisipasi meliputi debitur, investor, pemegang saham, Badan Pengawas BUMN selaku perwakilan pemegang saham dan pemerintah, regulator, media, dan pemasok.

Di sisi internal, penggalian isu material dilakukan melalui rangkaian diskusi grup terarah yang melibatkan divisi lintas fungsi. Forum ini bertujuan mengevaluasi dampak operasional BNI terhadap aspek sosial dan lingkungan, sekaligus mengidentifikasi potensi risiko dan peluang keuangan yang timbul dari isu-isu keberlanjutan (pendekatan *double materiality*). Seluruh hasil pemetaan kemudian dianalisis berdasarkan konteks keberlanjutan, materialitas, dan kebutuhan pemangku kepentingan serta relevansinya terhadap strategi bisnis BNI.

Proses Penentuan Topik Material [3-1, 3-2]

Mengidentifikasi dan menilai dampak secara berkelanjutan.

01 Memahami konteks keberlanjutan

Melakukan identifikasi risiko, peluang, dan strategi usaha BNI dan menganalisis dampaknya. BNI juga memperhatikan acuan topik material dalam standar sektor keuangan dari GRI, SASB, serta IFRS Sustainability pada proses ini.

02 Identifikasi dampak aktual dan potensial

Melakukan *in depth interview* dengan internal pemangku kepentingan dan menyebarkan kuesioner untuk eksternal untuk memahami kebutuhan dan dampak aktual atau potensial yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan pemangku kepentingan.

03 Asesmen atas dampak

Melakukan analisis terhadap topik material dan dampak positif dan negatifnya, menggunakan *double materiality approach*, yaitu memperhatikan *financial materiality* dan *impact material*.

Penentuan dan Persetujuan Topik Material

Topik Material
1. Keamanan Data dan Keamanan Siber
2. Kinerja Ekonomi
3. Ketahanan Iklim
4. Manajemen Portofolio Hijau

04 Prioritasi dan Persetujuan Topik Material

Melakukan diskusi dengan *top management* dan ahli untuk memastikan prioritas topik material dari hasil kaji ulang. Persetujuan final topik material dilakukan melalui rapat internal yang melibatkan anggota Direksi yang tergabung dalam Sub Komite ESG.

Topik Material Prioritas [3-2]

Dampak, Risiko, dan Peluang dari Topik Material terpilih

●●● Tinggi ●●○ Sedang-Tinggi ●●○ Sedang

Keamanan Data dan Keamanan Siber

Tingkat dari *Impact Materiality*	Tingkat dari *Financial Materiality*	Jangka Waktu	Respons BNI
Positif	**Risiko**		
●●● Peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, ketahanan sistem perbankan digital, dan meningkatkan performa layanan BNI	●●● Kerugian finansial akibat insiden gagal sistem, biaya pemulihan sistem, risiko reputasi dan peningkatan *capital expenditure*	Jangka Pendek – Menengah - Panjang	Memperkuat tata kelola keamanan data dan siber melalui pengawasan dari level komite Direksi, memperkuat cakupan dan level sertifikasi sistem IT
Negatif	**Peluang**		
●●○ Prosedur autentifikasi yang kompleks, peningkatan sumber daya dan waktu pelatihan, potensi peningkatan biaya investasi	●●○ Diferensiasi layanan digital yang aman meningkatkan *market share* BNI, penguatan *governance cybersecurity*		

●●● Tinggi ●●○ Sedang-Tinggi ●●○ Sedang



Kinerja Ekonomi

Tingkat dari *Impact Materiality*	Tingkat dari *Financial Materiality*	Jangka Waktu	Respons BNI
Positif ●●○ Peningkatan akses layanan keuangan bagi sektor kecil, penciptaan lapangan kerja baru, pencapaian Asta Cita, dan peningkatan kesejahteraan pegawai	**Risiko** ●●○ Risiko penurunan profitabilitas, risiko strategi akibat ekspansi agresif, peningkatan risiko kredit akibat ekspansi yang agresif	Jangka Pendek - Menengah	Meningkatkan keterlibatan BNI dalam pembiayaan dan pemberdayaan UMKM, meningkatkan akses layanan perbankan melalui digitalisasi dan *branchless banking*
Negatif ●●○ Tekanan peningkatan produktivitas di internal bank, penerapan efisiensi yang terlalu ketat	**Peluang** ●●○ Diversifikasi sumber pertumbuhan bisnis melalui ekspansi segmen kecil, peningkatan *market share* BNI, peningkatan layanan dan jumlah nasabah		



Ketahanan Iklim

Tingkat dari *Impact Materiality*	Tingkat dari *Financial Materiality*	Jangka Waktu	Respons BNI
Positif ●●● Pencapaian target NDC tahun 2060 atau lebih cepat, pencapaian pertumbuhan ekonomi hijau sesuai Asta Cita, pengendalian risiko iklim	**Risiko** ●●○ Peningkatan *operational expenditure/capital expenditure*, risiko strategi apabila transisi bank tidak memperhitungkan kelajuan pasar	Jangka Menengah - Panjang	Pengelolaan risiko iklim melalui *climate risk stress testing* dan pengelolaan emisi, melaksanakan ESG *advisory* sebagai sarana edukasi debitur
Negatif ●●○ Kriteria pembiayaan menjadi lebih *rigid*, tekanan terhadap kinerja bank akibat perubahan strategi, peningkatan biaya untuk pelaksanaan inisiatif ketahanan iklim	**Peluang** ●●○ Penguatan hubungan jangka panjang dengan debitur, melalui ESG *advisory*, pengembangan produk pembiayaan berkelanjutan, peningkatan *market share*		

●●● Tinggi ●●○ Sedang-Tinggi ●●○ Sedang

Manajemen Portofolio Hijau

Tingkat dari *Impact Materiality*		Tingkat dari *Financial Materiality*		Jangka Waktu	Respons BNI
Positif		**Risiko**			
●●●	Kemudahan akses debitur terhadap pembiayaan hijau/transisi, peningkatan awareness LGT debitur, dukungan pencapaian NDC pemerintah Indonesia	●●○	Risiko perubahan regulasi seperti kriteria taksonomi, risiko kesalahan pelaporan, risiko reputasi pembiayaan emisi tinggi, peningkatan risiko kredit dalam pembiayaan hijau skala besar	Jangka Menengah	Penyusunan *transition pathway* berbasis sektor untuk pengelolaan emisi pembiayaan, penguatan mekanisme tata kelola dalam penetapan pembiayaan berkelanjutan, serta penyampaian laporan emisi terhindarkan dari pembiayaan/ obligasi hijau
Negatif		**Peluang**			
●●○	Kriteria pembiayaan menjadi lebih rigid, fokus pembiayaan hijau ke segmen tertentu yang dinilai lebih siap, terbatasnya fungsi intermediasi bank terhadap sektor emisi tinggi	●●○	Peluang pengembangan produk pembiayaan hijau, peluang kerja sama *blended financing*, peningkatan reputasi dan *market share*		

Matriks Double Materiality



Isu Utama, Pemangku Kepentingan Terdampak, dan Tautan SDGs

Keamanan Data dan Keamanan Siber

Isu-isu Utama dan Perhatian Pemangku Kepentingan

- Risiko kebocoran data pribadi dan informasi yang sensitif
- Ancaman serangan siber dan *fraud* berbasis digital
- Risiko keamanan data yang berasal dari pihak ketiga dan ekosistem digital

Dampak Pemangku Kepentingan

- Pegawai
- Nasabah
- Debitur
- Pemerintah/Regulator
- Pemegang saham/Investor
- Pemasok

Kinerja Ekonomi

Isu-isu Utama dan Perhatian Pemangku Kepentingan

- Stabilitas dan ketahanan kinerja keuangan sebagai fondasi keberlanjutan usaha
- Distribusi nilai ekonomi yang berimbang kepada pemangku kepentingan
- Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui penyaluran KUR, penguatan UMKM, inklusi dan literasi keuangan, serta pengembangan layanan perbankan di wilayah 3T
- Ketergantungan pada faktor eksternal makroekonomi, seperti suku bunga, kebijakan moneter dan fiskal, pajak, serta kondisi pasar global, dapat memengaruhi kinerja ekonomi Bank

Dampak Pemangku Kepentingan

- Pegawai
- Pemegang saham/Investor
- Pemerintah/Regulator
- Masyarakat
- Pemasok
- Nasabah
- Debitur

Ketahanan Iklim

Isu-isu Utama dan Perhatian Pemangku Kepentingan

- Risiko fisik terhadap portofolio pembiayaan, khususnya sektor yang rentan terhadap perubahan iklim
- Risiko fisik terhadap operasional Bank
- Risiko transisi iklim yang timbul dari perubahan kebijakan, regulasi, standar keberlanjutan
- Eksposur emisi pembiayaan (khususnya sektor emisi tinggi)
- Eksposur risiko iklim terhadap pembiayan dan stabilitas keuangan Bank

Dampak Pemangku Kepentingan

- Pegawai
- Nasabah
- Debitur
- Pemegang saham/Investor
- Pemerintah/Regulator

Manajemen Portofolio Hijau

Isu-isu Utama dan Perhatian Pemangku Kepentingan

- Perubahan regulasi dan kebijakan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan TKBI yang memengaruhi arah dan komposisi portofolio pembiayaan hijau
- Integrasi ESG dan risiko iklim dalam proses pembiayaan
- Kebutuhan pendekatan pembiayaan transisi bagi debitur eksisting beremisi tinggi, melalui *Sustainability Linked Loan*, dan skema pembiayaan lainnya
- Pembiayaan hijau dan pembiayaan transisi.

Dampak Pemangku Kepentingan

- Pegawai
- Debitur
- Pemegang saham/Investor
- Pemerintah/Regulator

Tanggapan Manajemen atas Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya

BNI menyampaikan apresiasi atas masukan dan penilaian yang diberikan oleh para pemangku kepentingan serta lembaga pemeringkat LST terhadap Laporan Keberlanjutan 2024. Umpan balik tersebut menjadi landasan penting dalam penyempurnaan kinerja dan kualitas pengungkapan Perseroan pada laporan periode berjalan. Sejumlah area prioritas yang menjadi fokus peningkatan meliputi:

- Penguatan pengelolaan dan pengungkapan aspek keamanan data dan keamanan siber
- Penguatan manajemen risiko iklim, termasuk integrasinya dalam kerangka manajemen risiko perusahaan
- Pengembangan dan pengelolaan portofolio hijau sebagai bagian dari dukungan terhadap pembiayaan berkelanjutan
- Melakukan kaji ulang topik material melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Penilaian dilakukan menggunakan *double materiality approach* (DMA)
- Melakukan perluasan perhitungan cakupan portofolio emisi cakupan 3 lemial pembiayaani yang dihitung menggunakan PCAF

Secara bertahap, BNI telah menindaklanjuti masukan tersebut melalui berbagai inisiatif perbaikan dan penguatan sistem pengelolaan keberlanjutan. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas serta kelengkapan laporan keberlanjutan, guna menyediakan informasi yang semakin relevan dan menjawab ekspektasi para pemangku kepentingan secara lebih optimal.

Informasi lainnya tentang BNI dapat ditemukan di situs web kami. Untuk informasi lebih lanjut, input dan saran untuk perbaikan dan kemajuan laporan ini, silakan hubungi:

Raycndra Minarsa Goenawan
Divisi Environmental, Social & Governance

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Grha BNI, Lt.20
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta 10220
Indonesia
Telepon : (62-21) 572 0044
Surel : esg@bni.co.id



01

SUSTAINABLE FINANCE

Sebagai bagian dari strategi bisnis yang berorientasi jangka panjang, BNI secara terstruktur mengembangkan pembiayaan dan pendanaan berkelanjutan, serta berbagai praktik keberlanjutan di seluruh segmen usaha. Implementasi tersebut didukung oleh internalisasi standar ESG nasional dan internasional ke dalam kebijakan, proses bisnis, dan kerangka manajemen risiko. Sejalan dengan itu, BNI terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan keuangan berkelanjutan, guna memastikan praktik yang bertanggung jawab, terukur, dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta perekonomian nasional.

Pencapaian Kinerja Ekonomi

Pengelolaan Topik Material [3-3]

Topik Material: Kinerja Ekonomi

Pentingnya Pengelolaan Topik

Pengelolaan kinerja ekonomi yang *prudent* memungkinkan BNI untuk menjaga stabilitas keuangan, memperkuat fungsi intermediasi, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan. Kinerja ekonomi juga menjadi dasar bagi kemampuan BNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan resilien terhadap dinamika eksternal.

Dampak dan Peluang

Pengelolaan kinerja ekonomi yang efektif berdampak langsung pada ketahanan keuangan bank, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, serta kesinambungan fungsi intermediasi. Kondisi ekonomi makro, perubahan suku bunga, volatilitas pasar keuangan, serta dinamika kebijakan fiskal dan moneter merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja ekonomi BNI.

Di sisi lain, kondisi tersebut membuka peluang bagi BNI untuk memperkuat kinerja intermediasi, mengembangkan produk dan layanan keuangan yang adaptif, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui transformasi digital dan optimalisasi model bisnis. Peluang lain juga muncul dari peran Bank dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif.

Target dan Komitmen

BNI menetapkan target kinerja ekonomi secara tahunan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, kualitas aset, dan manajemen risiko.

- Pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar Rp21,4 triliun
- Pertumbuhan kredit sebesar 10,1%
- Pertumbuhan DPK sebesar 14,7%
- Menjaga kualitas kredit dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 2,0%

Kebijakan

- Peningkatan produktivitas bisnis dan *market share* di wilayah melalui transformasi outlet
- Peningkatan tabungan dan deposito ritel, serta giro berbasis transaksi
- Pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan di seluruh segmen, dengan fokus utama pada segmen korporasi dan turunannya, serta konsumer & *wealth* yang berkualitas
- Menjaga kualitas aset untuk mendorong penurunan *Loan at Risk* (LaR)
- Pengembangan berkelanjutan dari wondr by BNI, BNI direct, PBOM, serta platform yang mendukung *customer journey*
- Penguatan *enablers* yang menghasilkan peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional

Evaluasi dan Pengelolaan Dampak

Pengelolaan dan evaluasi kinerja ekonomi berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko, dengan dukungan unit terkait seperti Divisi Keuangan, Divisi Enterprise Risk Management, serta unit bisnis. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan kinerja keuangan, pencapaian target bisnis, serta profil risiko bank.

Hasil evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan manajemen, penyesuaian strategi bisnis, serta penguatan pengendalian risiko guna memastikan kinerja ekonomi tetap berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan.

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan [201-1]

Selama tahun 2026, BNI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan. Di tengah kondisi makroekonomi yang dinamis sepanjang 2026 dan berdampak pada lingkungan bisnis bank, BNI senantiasa mencermati berbagai perkembangan yang terjadi dan memitigasi dampaknya pada realisasi kebijakan strategis, pencapaian bisnis di tahun 2026, serta kesinambungan pencapaian bisnis dengan rencana jangka menengah yaitu penajaman pada eksekusi di wilayah yang sejalan dengan sektor dan aktivitas ekonomi unggulan, serta kolaborasi dalam menggarap ekosistem.

Nilai Ekonomi yang Dihasilkan (dalam Rp miliar) [201-1]

Uraian	2025	2024	2023
Pendapatan bunga - neto	40.553,2	40.480,2	41.275,7
Pendapatan premi - neto	-1,5*	-1,8*	1.659,3
Pendapatan (beban) asuransi dan hasil investasi - neto	744,7	768,1	-
Pendapatan operasional lainnya	23.900,0	22.649,2	19.812,4
Jumlah	**64.976,4**	**63.895,7**	**62.747,4**

Keterangan:
*) Penyajian kembali informasi keuangan (restatement) Tahun 2024 karena penerapan PSAK 117 di BNI Life

Laba bersih BNI mencapai Rp20.041 miliar didorong oleh pulihnya pendapatan operasional dan kualitas aset yang terjaga dengan baik. Kinerja ekonomi BNI mencatat peningkatan pendapatan operasional sebesar Rp64.976 miliar, tumbuh 1,7% dibanding dari tahun 2024. Capaian ini menunjukkan kemampuan BNI dalam menjaga kinerja intermediasi, efisiensi operasional, serta ketahanan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan kinerja ekonomi yang berkelanjutan.

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan [201-1]

Nilai ekonomi yang dihasilkan oleh BNI selanjutnya didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Sebesar Rp50.818 miliar dialokasikan untuk pemangku kepentingan melalui remunerasi dan tunjangan pegawai, dividen untuk pemegang saham, pajak untuk pemerintah, pembayaran kepada pemasok lokal dan noniokal, serta kontribusi donasi dan pemberdayaan. Distribusi nilai ekonomi ini menegaskan peran BNI dalam mengelola topik materiał 'Kinerja Ekonomi' secara bertanggung jawab dan inklusif, sekaligus memperkuat kontribusi kami terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Nilai Ekonomi yang Didistribusikan (dalam Rp miliar) [201-1]

Uraian	2025	2024*)	2023
Biaya operasional (di luar gaji pegawai)	25.934,7	23.411,4	24.140,3
Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai	14.529,2	13.781,5	12.883,7
Dividen	10.951,5	10.454,7	7.324,8
Pajak	4.286,4	4.099,7	4.503,5
Pengeluaran untuk kegiatan masyarakat	116,8	129,9	129,8
Jumlah	**50.818,5**	**52.677,2**	**49.962,1**

Keterangan:
*) Penyajian kembali informasi keuangan (restatement) tahun 2024 karena penerapan PSAK 117 di BNI Life

Nilai Ekonomi yang Ditahan [201-1]

Selisih antara nilai ekonomi yang dihasilkan dan nilai ekonomi yang didistribusikan kepada pemangku kepentingan merupakan nilai ekonomi ditahan. Pada 2026, nilai ekonomi yang ditahan tercatat Rp6.168 miliar, merupakan nilai untuk memperkuat permodalan, menjaga likuiditas, serta mendukung keberlanjutan operasional dan pertumbuhan bisnis. Retensi nilai ekonomi ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan kinerja ekonomi yang *prudent*, guna memastikan ketahanan keuangan BNI dalam menghadapi dinamika ekonomi sekaligus mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Pendekatan dan Kontribusi Perpajakan [207-1, 207-2, 207-3]

Pendekatan BNI terhadap perpajakan didasarkan pada prinsip kepatuhan penuh, transparansi, dan tata kelola yang baik, sejalan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah, melalui otoritas perpajakan, merupakan pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan aspek perpajakan BNI. Dalam pelaksanaannya, BNI menerapkan proses pengelolaan pajak yang komprehensif dan terstruktur, mencakup identifikasi, pengelolaan, serta pemantauan risiko perpajakan. Proses tersebut dilakukan melalui mekanisme monitoring dan rekonsiliasi secara berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku. BNI tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak agresif maupun advokasi kebijakan publik yang bertujuan memengaruhi kebijakan perpajakan.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya Pasal 17 ayat (2b), Wajib Pajak Dalam Negeri yang memenuhi kriteria tertentu berhak memperoleh tarif Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah sebesar 3% dari tarif umum 22%. Persyaratan tersebut meliputi status sebagai Perseroan Terbuka, kepemilikan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dari saham disetor, serta pemenuhan ketentuan lainnya sesuai regulasi yang berlaku. Berdasarkan pemenuhan persyaratan tersebut, pada tahun 2026, BNI menggunakan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 19% dalam perhitungan kewajiban pajaknya. Sepanjang tahun 2026, BNI menyetorkan pajak kepada pemerintah sebesar Rp3.006 miliar. Di samping itu, BNI tidak menerima bantuan finansial lainnya dari pemerintah selama tahun 2026.

Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan, posisi, dan kinerja perpajakan BNI disajikan secara rinci dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian, yang diterbitkan terpisah dari laporan ini.

Portofolio Keuangan Berkelanjutan

Pengelolaan Topik Material (p.2)

Topik Material: Pengelolaan Portofolio Hijau

Pentingnya Pengelolaan Topik

Pengelolaan portofolio hijau merupakan bagian penting dari implementasi keuangan berkelanjutan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan pembangunan berkelanjutan. Sebagai lembaga keuangan, BNI memiliki peran strategis dalam mengarahkan alokasi pembiayaan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat lingkungan, sekaligus memastikan bahwa risiko lingkungan dan sosial dikelola secara memadai.

Dampak dan Peluang

Pengembangan portofolio hijau memberikan dampak positif berupa peningkatan kontribusi BNI terhadap perlindungan lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta dukungan terhadap transisi energi dan praktik usaha berkelanjutan. Pembiayaan hijau juga berpotensi memperkuat reputasi bank dan meningkatkan kepercayaan investor serta pemangku kepentingan.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan kesiapan debitur dalam melakukan transisi menuju praktik usaha yang berkelanjutan, kebutuhan harmonisasi data dan taksonomi, serta risiko transisi yang perlu dikelola secara cermat. Kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi BNI untuk memperluas portofolio pembiayaan hijau, mengembangkan produk keuangan berkelanjutan seperti *green financing* dan *sustainability-linked loans* (SLL), serta meningkatkan kualitas asesmen risiko lingkungan dan sosial dalam proses kredit.

Target dan Komitmen

- Peningkatan nilai portofolio hijau sebesar minimal 5% per tahun;
- Perluasan pembiayaan pada sektor prioritas hijau, termasuk energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- Penyaluran *Sustainability Linked-Loan (SLL)* untuk mendorong debitur bertransisi menuju hijau;
- Pengembangan program pembiayaan UMKM Hijau melalui *technical assistant* debitur UMKM dalam mendorong UMKM melaksanakan praktik keberlanjutan.

Kebijakan

Pembiayaan keberlanjutan, termasuk pembiayaan hijau, merupakan salah satu pilar utama dalam strategi keberlanjutan BNI. Pengelolaan portofolio hijau BNI mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, serta kebijakan internal keuangan berkelanjutan dan kredit usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Dalam pelaksanaannya, BNI juga mendukung penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai acuan klasifikasi kegiatan ekonomi berkelanjutan. Penilaian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dilakukan pada tahap awal proses kredit dan menjadi bagian dari analisis kelayakan debitur.

Evaluasi dan Pengelolaan Dampak

Pengelolaan dan evaluasi portofolio hijau berada di bawah pengawasan Wakil Direktur Utama, dengan koordinasi Divisi Environmental, Social & Governance, Enterprise Risk Management, Policy Governance, serta unit bisnis & risiko terkait. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui pemantauan kualitas portofolio, kepatuhan terhadap kebijakan keuangan berkelanjutan, serta pencapaian target RAKB.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan, penguatan proses asesmen LST, serta pengembangan strategi pembiayaan hijau ke depan. Dengan pendekatan ini, BNI memastikan bahwa pengelolaan portofolio hijau tidak hanya berorientasi pada volume pembiayaan, tetapi juga pada kualitas dampak lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Portofolio Kredit

Portofolio kredit merupakan salah satu pilar utama dalam menjalankan fungsi intermediasi BNI sekaligus mencerminkan arah strategi bisnis kami. Penyaluran kredit dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas aset, dan manajemen risiko, sejalan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan sektor riil.

Portofolio Kredit Berdasarkan Kategori (dalam Rp miliar) (POJK No.51/POJK.03/2017)

Golongan Usaha	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Corporate	320.081	37,0	440.959	56,8	374.203	53,8
Medium (Enterprise & Commercial)	131.435	14,6	100.422	12,9	102.460	14,7
Small	78.705	8,7	75.752	9,8	84.892	12,2
Consumer	152.795	17,0	142.492	18,4	124.487	17,9
Perusahaan Anak	18.304	2,0	16.247	2,1	9.043	1,3
Total Kredit	**899.531**	**100,0**	**775.872**	**100,0**	**695.085**	**100,0**

Portofolio Kredit Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) (FS2)

Kategori kegiatan usaha berkelanjutan (KKUB) terdiri dari kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan usaha mikro, kecil, dan menengan (UMKM). Di 2025, BNI mencatat pembiayaan KKUB sebesar Rp196,7 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 22,3% dari total portofolio kredit. Adapun pembiayaan KUBL yang disalurkan di tahun 2025 sebesar Rp78,0 triliun dengan capaian target pertumbuhan sebesar 101,2% dalam RAKB.

Portofolio Kredit KKUB (dalam Rp miliar) (FS2)

Uraian	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Energi terbarukan	11.665	5,9	13.005	0,8	10.216	5,6
2. Efisiensi energi	12.502	6,4	13.635	7,2	14.460	7,9
3. Pencegahan dan pengendalian polusi	1.087	0,5	2.913	1,5	3.855	2,1
4. Pengelolaan SDA dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	41.359	21,0	32.401	17,0	26.599	14,7
5. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	0	0	0	0	0	0
6. Transportasi ramah lingkungan	4.475	2,3	2.333	1,2	2.317	1,3
7. Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	971	0,5	897	0,5	572	0,3
8. Adaptasi perubahan iklim	0	0	0	0	0	0
9. Produk yang dapat mengurangi sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient)	140	0,1	1.650	0,9	1.190	0,7
10 Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	4.270	2,2	4.502	2,4	5.620	3,1

Uraian	2025		2024		2023	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
11. Kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya	1.540	0,8	2.039	1,1	3.053	1,7
Jumlah Portofolio Pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)	**77.994**	**39,6**	**73.393**	**38,5**	**67.882**	**37,5**
12. Kegiatan UMKM	118.754	60,4	117.121	61,5	113.224	62,5
Jumlah Portofolio Pembiayaan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB)	**196.748**	**100,0**	**190.514**	**100,0**	**181.106**	**100,0**

Keterangan: Data kinerja berasal dari BNI sebagai entitas induk yang menjalankan kegiatan perbankan.



Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM, BNI menyalurkan kredit untuk pengembangan Koperasi Desa Kelurahan/Kecamatan Merah Putih (KDKMP). Penyaluran kredit tersebut dilakukan kepada mitra strategis BNI yang bertanggung jawab dalam pembangunan fisik gerai KDKMP termasuk penyediaan sarana dan prasarana, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2026, total pembiayaan yang disalurkan untuk pembangunan fisik gerai KDKMP mencapai Rp46,7 triliun. Penyaluran pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023.

Pengelolaan Pembiayaan Ramah Lingkungan

Kami telah mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis dan proses pembiayaan. Sepanjang tahun 2026, BNI berhasil membukukan portofolio hijau sebesar Rp78,0 triliun, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp76,6 triliun, atau setara dengan sekitar 8,8% dari total portofolio kredit. Di 2026, penyaluran pembiayaan hijau paling besar ada pada sektor pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan berkelanjutan yang mencapai 21,0%, yang disusul oleh sektor efisiensi energi 8,4%, dan sektor energi terbarukan 6,9%.

Sementara itu, di segmen UMKM, BNI juga memiliki beberapa inisiasi dalam mendorong pembiayaan hijau. Pembiayaan berorientasi ramah lingkungan dari segmen UMKM tercatat sebesar Rp113,6 miliar terhadap 660 debitur. Pembiayaan berorientasi ramah lingkungan tersebut mencakup debitur-debitur yang tergabung dalam program pemberdayaan UMKM, seperti Program BUMI dan Program BNI Jejak Kopi Khatulistiwa. Ke depan, BNI berkomitmen untuk terus mengembangkan portofolio pembiayaan UMKM berwawasan lingkungan secara berkelanjutan guna memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.

Mendukung Transisi Debitur melalui *Sustainability Linked Loan*

Sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah menuju ekonomi rendah karbon dan target NZE, BNI terus memperluas pembiayaan melalui skema *Sustainability Linked Loan* (SLL). Skema SLL dirancang untuk mendorong debitur meningkatkan kinerja keberlanjutan dengan menetapkan *sustainability performance targets* yang terukur dan relevan dengan strategi LST debitur, serta memberikan insentif finansial bagi debitur yang berhasil memenuhi target sesuai perjanjian kedua belah pihak.

BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL kepada debitur dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor agrifood, industri semen, baja, produk batu bara, dan kemasan, yang menunjukkan komitmen nyata BNI dalam mendukung transisi sektor korporasi ke praktik keberlanjutan yang lebih tinggi.

Peran SLL di 2026 semakin strategis dalam mendukung transisi keberlanjutan debitur, termasuk:

1. Memfasilitasi debitur untuk menetapkan dan mencapai target kinerja LST yang spesifik, seperti pengurangan intensitas emisi, peningkatan efisiensi sumber daya, atau sertifikasi keberlanjutan;
2. Meningkatkan integrasi prinsip ESG ke dalam struktur kredit dan kriteria penilaian risiko BNI;
3. Memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang berkomitmen pada transisi ekonomi rendah karbon;
4. Menguatkan posisi BNI sebagai mitra strategi debitur dalam perjalanan transisi keberlanjutan.

Total realisasi SLL hingga akhir 2026 mencapai Rp8,6 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 9 perusahaan yang telah mengalami perubahan kinerja keberlanjutan sesuai indikator yang ditetapkan dalam fasilitas ini.



Portofolio Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (PST: PN-CE-340a1; PN-CE-340a2)

Pertumbuhan sektor UMKM terus berperan signifikan dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pembiayaan UMKM juga menjadi elemen penting dalam praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia, mengingat perannya dalam mendorong inklusi keuangan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan perempuan, kelompok rentan, dan masyarakat marginal.

Hingga akhir 2026, *outstanding* kredit UMKM BNI tercatat mencapai Rp118,8 triliun, dengan porsi 13,4% disalurkan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR). Selain itu, portofolio pembiayaan BNI Xpora mencapai Rp36,0 triliun yang disalurkan kepada 12.094 debitur, di mana 4,6% di antaranya merupakan KUR yang berorientasi ekspor. Sepanjang 2026, BNI Xpora berhasil mendorong 30,4 ribu UMKM binaan Xpora untuk memasuki pasar ekspor (*Go Export*).

Kredit usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) [GRI]

Sejalan dengan perannya sebagai *agent of development*, BNI memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR dan BWU yang menjangkau pelaku usaha di berbagai daerah. Pembiayaan ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga diarahkan untuk mendorong praktik usaha yang lebih berkelanjutan. Pada 2026, BNI menyalurkan KUR dan BWU melalui 194 outlet untuk menyediakan kebutuhan pembiayaan UMKM di seluruh Indonesia. Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp11,9 triliun atau 99,3% dari target Rp12,0 triliun, didukung oleh penerapan digitalisasi kredit secara *end-to-end* dan pemanfaatan teknologi dalam proses penilaian kredit.

Pengembangan dan Pemberdayaan Mitra UMKM [GRI]

[GRI 203-2a-i, GRI 203-2a-ii]

Dalam mendukung roda perekonomian lokal, BNI tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga menyelenggarakan berbagai program seperti: penguatan kapasitas UMKM; pelatihan dan pendampingan berkelanjutan; serta penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. BNI mendorong UMKM untuk tumbuh dan naik kelas melalui perjalanan terstruktur mulai dari peningkatan produktivitas *(Go Productive)*, akselerasi digitalisasi *(Go Digital)*, hingga perluasan akses pasar global *(Go Global)*. Dalam menjalankan upaya tersebut, BNI secara aktif berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Roadmap Pemberdayaan UMKM BNI



Go Productive

Program BNI UMKM Ramah Lingkungan (BUMI)

Program BUMI merupakan inisiatif BNI untuk memperluas dampak ekonomi tidak langsung melalui pemberdayaan UMKM berwawasan lingkungan. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat daya saing pasar bagi UMKM yang menerapkan praktik ramah lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal dan penciptaan nilai berkelanjutan. Program BUMI difokuskan pada pelaku UMKM sektor fesyen dan kerajinan yang berorientasi ramah lingkungan. Sepanjang tahun 2025, BNI tetap menjalankan inisiatif Program BUMI secara selektif dan terukur melalui penyaluran pembiayaan kepada UMKM sektor fesyen dan kerajinan sebesar Rp38 miliar kepada 167 UMKM, serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan *business matching* sebagai bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas sesuai prinsip ekonomi hijau.



BNI Kampung Budidaya Perikanan

BNI Kampung Budidaya Perikanan merupakan program pemberdayaan UMKM sektor perikanan yang pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini dirancang untuk menciptakan dampak ekonomi bagi UMKM melalui penguatan ekosistem dan pengembangan ekonomi biru sebagai prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo - Gibran. Tak hanya tersedia akses pembiayaan, BNI juga menyediakan layanan perbankan terpadu sehingga tercipta *closed loop ecosystem*, yang mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta perluasan akses pasar melalui BNI Xpora hingga tingkat global. Melalui inisiatif ini, BNI berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Alur Pemberdayaan Kampung Budidaya Perikanan dari Hulu ke Hilir

Penguatan Kemitraan & Ekosistem Digital

BNI memperkuat ekosistem melalui kolaborasi dengan mitra *merchant* dan platform *e-commerce*, serta pemanfaatan *big data* untuk memetakan UMKM potensial. Sebagian UMKM juga dipersiapkan menjadi BNI Agen46, sehingga berperan ganda sebagai pelaku usaha sekaligus perpanjangan layanan keuangan di komunitasnya.

Tahap ini bertujuan meningkatkan visibilitas produk UMKM dan efisiensi pemasaran berbasis data.



Sektor Hilir

Pendampingan Usaha

Melalui program BNI Xpora – Ekspor Jadi Mudah, BNI memberikan pendampingan usaha secara langsung dan daring, meliputi:

- kurasi UMKM berpotensi ekspor,
- *coaching clinic* sektor perikanan,
- partisipasi pameran dan bazar, serta
- *business matching* produk ekspor.

Pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha, kualitas produk, dan kesiapan UMKM untuk menembus pasar nasional maupun global.

Realisasi Pembiayaan Kampung Budidaya Perikanan



Perikanan Tangkap

KUR
937
Jumlah Debitur
Rp226,2 miliar
Nilai Kredit

Non-KUR
621
Jumlah Debitur
Rp1.228,2 miliar
Nilai Kredit



Perikanan Budidaya

KUR
3.603
Jumlah Debitur
Rp838,3 miliar
Nilai Kredit

Non-KUR
988
Jumlah Debitur
Rp841,5 miliar
Nilai Kredit

Go Digital

Kredit Usaha Alsintan

Program Pembiayaan Taksi Alsintan merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, modernisasi sektor pertanian nasional, serta implementasi Asta Cita Pemerintah. Melalui skema Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), BNI berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mempercepat mekanisasi pertanian melalui penyediaan akses pembiayaan bagi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang modern, efisien, dan terjangkau. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, memperkuat ketahanan pangan nasional, mendukung transformasi digital di sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Hingga akhir tahun 2026, total pembiayaan yang telah disalurkan melalui program ini sebesar Rp4,7 miliar.



Go Global

BNI Xpora

BNI Xpora sebagai solusi ekspor terintegrasi dari BNI terus diperkuat perannya pada tahun 2026 dalam mendampingi UMKM untuk memperluas akses ke pasar global. Melalui penguatan layanan *end-to-end*, pelatihan dan pendampingan ekspor, serta pemanfaatan platform digital, BNI Xpora mendorong peningkatan daya saing UMKM agar lebih siap menembus rantai nilai internasional. Selain itu, BNI Xpora juga merupakan *One Stop Export Solution* yang menjadi pusat layanan diaspora yang berada di luar negeri.

Hingga akhir 2026, jumlah nasabah diaspora adalah 39 orang. Berbagai inisiatif strategis, seperti peningkatan kolaborasi bersama instansi, lembaga, dan pemangku kepentingan eksportir terkait yang dijalankan sepanjang 2026 diarahkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi ekspor, sejalan dengan peran BNI sebagai mitra transformasi UMKM menuju pasar global. BNI Xpora terus memperkuat pendampingan ekspor UMKM, dengan capaian pembiayaan sebesar Rp36,0 triliun kepada 12.094 debitur.



BNI Jejak Kopi Khatulistiwa (BNI JKK)

BNI Jejak Kopi Khatulistiwa (BNI JKK) merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis perhutanan sosial yang berfokus pada pengembangan pertanian dan UMKM komoditas kopi melalui pembentukan *closed-loop green financing ecosystem*. Program ini dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan tematik BNI pada komoditas kopi, dengan tujuan memperkuat peran kopi rakyat dalam rantai pasok global. Melalui BNI JKK, BNI mendorong peningkatan kesejahteraan petani, perluasan inklusi keuangan, serta pembangunan ekosistem ekonomi hijau yang berorientasi ekspor. Program BNI JKK mencakup pembiayaan usaha, pembinaan dan pendampingan UMKM kopi. BNI JKK juga telah memperoleh penghargaan pemerintah dan terintegrasi dalam PMO Kopi dan Kakao Nusantara sebagai bagian dari penguatan ekosistem kopi nasional (BCOMSS 2024). Pada tahun 2025, pengembangan program BNI JKK terus dilanjutkan dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp74,9 miliar, yang menjangkau 493 petani kopi di 6 provinsi.





Portofolio Investasi Keuangan Berkelanjutan

BNI juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui penempatan investasi pada portofolio keuangan berkelanjutan. Investasi tersebut dialokasikan pada instrumen yang mendukung pencapaian tujuan sosial dan lingkungan, antara lain Sustainable Bond yang dananya digunakan untuk pembiayaan kegiatan berbasis Sustainable Development Goals (SDGs), kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS), dan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL). Selain itu, BNI turut serta mendukung UMKM dengan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh LJK non-bank yang mendukung pengembangan UMKM. Total nilai portofolio investasi berkelanjutan ini mencapai Rp7.064,5 miliar, mencerminkan peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui instrumen investasi.

Nama Instrumen	Penggunaan Dana	Harga Perolehan (dalam Rp miliar)
Sustainable Bond	Eligible Sustainable Development Goals (SDG) Expenditures	5.187,5
	Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)	362
	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)	515
Surat Berharga	Surat Berharga yang Diterbitkan LJK Non Bank yang mendukung UMKM	1.000
Total		**7.064,5**

Obligasi Berwawasan Lingkungan

Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya biaya emisi, seluruhnya digunakan BNI untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Selain itu, penyaluran dana *green bond* dilakukan dengan mengacu pada *Green Bond Framework* BNI yang telah memperoleh reviu independen melalui *second party opinion* dari Sustainalytics, dengan hasil penilaian kuat, transparan, dan selaras dengan empat komponen utama Green Bond Principles 2021. Sebagai bentuk komitmen atas penerapan *framework* tersebut, BNI memastikan bahwa 100% dana hasil penerbitan dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL).

Distribusi Green Bond 2025

Kategori yang Layak	Dibiayai/Dibiayai Kembali	Jumlah yang Dialokasikan	Alokasi Hasil
Energi Terbarukan	Dibiayai	Rp1.910 miliar	38,00%
	Dibiayai Kembali	Rp50 miliar	1,00%
Transportasi Ramah Lingkungan	Dibiayai Kembali	Rp2.324 miliar	46,48%
Gedung Berwawasan Lingkungan	Dibiayai Kembali	Rp305 miliar	6,10%
Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah	Dibiayai Kembali	Rp80 miliar	1,60%
Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan	Dibiayai Kembali	Rp280 miliar	5,60%
Total		**Rp5.000 miliar**	**100,00%**

Sumber: Laporan Green Bond Juni 2025

Komitmen BNI terhadap pengembangan pembiayaan berkelanjutan juga diperkuat melalui kontribusi entitas anak, yaitu BNI Sekuritas, yang menyediakan layanan *advisory* untuk produk-produk investasi berkelanjutan, termasuk penerbitan instrumen investasi berbasis lingkungan dan sosial serta pendampingan investasi sejenis lainnya, guna memberikan solusi investasi yang berfokus pada penciptaan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Sepanjang tahun 2026, BNI Sekuritas berperan dalam penerbitan berbagai instrumen investasi berkelanjutan dengan total nilai penerbitan mencapai Rp26,7 triliun.

Sustainability Bond

Pada 2026, BNI menerbitkan *Sustainability Bond* Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp5 triliun sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target dana hingga Rp15 triliun. Penerbitan ini ditujukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan jangka menengah dan panjang sekaligus memperkuat komitmen BNI dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan yang terintegrasi dengan strategi bisnis Bank.

Proses penerbitan *sustainability bond* dilaksanakan secara bertahap, dengan masa penawaran awal pada 12-19 Juni 2026 dengan tanggal efektif pada 26 Juni 2026. Masa penaweran umum dilakukan pada 30 Juni-1 Juli 2026, kemudian obligasi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2026. Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan Seri B dengan tenor 5 tahun, dengan pembayaran bunga secara triwulanan dan pelunasan pokok secara *bullet payment* pada saat jatuh tempo. *Sustainability Bond* BNI memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo, yang mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap kinerja dan profil risiko BNI.

Dana hasil penerbitan *Sustainability Bond* digunakan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali proyek-proyek yang memenuhi prinsip keberlanjutan, yang dituangkan dalam *framework sustainability bond* BNI. Adapun *framework sustainability bond* yang diterbitkan oleh BNI mengacu kepada POJK No. 18/2023, *Sustainability Bond Principle* yang diterbitkan oleh ICMA dan ASEAN ACMF sustainability bond standard 2018, serta telah menerima *Second Party Opinion* (SPO) dari Sustainalytics dengan hasil *credible & impactful*.

Untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), BNI menyalurkan dana kepada 6 *social eligible project* termasuk di dalamnya layanan infrastruktur dasar, akses layanan esensial, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan, pembiayaan UMKM, perumahan terjangkau, serta peningkatan & pemberdayaan sosio-ekonomi dengan alokasi sebesar 70% dari total dana yang diterima. Sementara itu, Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) mencakup 9 kategori *green eligible project* di antaranya energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, proyek konversi limbah menjadi energi, pengelolaan SDA hayati & penggunaan lahan berkelanjutan, serta efisiensi energi dengan alokasi sebesar 30% dari seluruh dana yang diterima. Adapun alokasi dana dapat dilakukan baik kepada fasilitas kredit baru maupun yang telah berjalan.

BNI berkomitmen dapat menyalurkan seluruh dana yang diterima selambat-lambatnya 1 tahun setelah dana diterima. Untuk selanjutnya proses seleksi proyek dilakukan melalui mekanisme yang ketat dengan persetujuan Sub Komite ESG BNI, dan akan dilaporkan dalam laporan penyaluran *Sustainability Bond* secara terpisah dilengkapi reviu dari SPO yang ditunjuk, selambat-lambatnya pada Q2 2026.

Obligasi tersebut telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo dengan peringkat idAAA (triple A) dan telah mendapatkan opini independen dari Sustainalytics yang menyatakan bahwa kerangka *Sustainability Bond* BNI kredibel dan sesuai dengan standar internasional dan ASEAN. Seluruh proses seleksi proyek dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan melibatkan Komite sub-ESG BNI, mulai dari pengajuan oleh unit bisnis, evaluasi kelayakan oleh unit manajemen risiko, hingga persetujuan akhir.

Pengelolaan Risiko LST pada Aktivitas Pembiayaan

Pengelolaan Topik Material (3-3)

Topik Material: Ketahanan Iklim

Pentingnya Pengelolaan topik

Pengelolaan risiko LST merupakan bagian penting dari implementasi keuangan berkelanjutan BNI dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon dan ketahanan iklim.

Dampak dan Peluang

Ketahanan iklim merupakan topik material bagi BNI karena perubahan iklim dapat memengaruhi kinerja debitur, kualitas aset, dan stabilitas portofolio pembiayaan melalui risiko fisik dan risiko transisi. Untuk mengelola dampak tersebut, BNI mengintegrasikan aspek ESG dan risiko iklim ke dalam proses pembiayaan melalui penerapan *climate risk management & scenario analysis* (CRMS) dan *climate risk stress testing* (CRST).

Penerapan CRMS dan CRST juga membuka peluang bagi BNI untuk memperkuat ketahanan portofolio jangka panjang, mendukung transisi debitur menuju praktik usaha berkelanjutan, serta mengembangkan pembiayaan rendah karbon yang selaras dengan target *net zero emission* (NZE) dan kebijakan regulator. Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih *prudent*, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan.

Target dan Komitmen

- Meningkatkan cakupan penerapan CRST hingga mencakup 100% portofolio
- Pendampingan debitur dalam transisi iklim melalui program *technical assistant* dan *awareness* bagi debitur, serta *advisory playbook* bagi beberapa sektor beremisi tinggi
- Memperkuat ketersediaan dan kualitas data emisi debitur secara bertahap
- Pencapaian target *Net Zero Emission* Pembiayaan pada tahun 2060
- Penyusunan *transition plan* berdasarkan sektor untuk sektor-sektor beremisi tinggi

Kebijakan

Pengelolaan risiko LST dalam kredit diimplementasikan dalam seluruh siklus pembiayaan (*end-to-end credit process*). Proses ini diawali dengan penetapan dan evaluasi *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai bagian dari *pipeline management*. Selanjutnya, hasil analisis risiko dan mitigasi aspek LST tersebut menjadi dasar dalam penetapan syarat dan ketentuan kredit, hingga dilakukan pemantauan kredit secara berkelanjutan, termasuk terhadap pemenuhan dan realisasi aspek LST yang dipersyaratkan. Selain itu, pengelolaan risiko LST juga dilakukan melalui pengaturan eksposur pembiayaan dengan menerapkan *Loan Exposure Limit* (LEL), khususnya bagi sektor-sektor dengan tingkat emisi tinggi. Kebijakan ini bertujuan sebagai langkah antisipasi sekaligus sarana terhadap potensi risiko konsentrasi kredit.

Evaluasi dan Pengelolaan Dampak

Pengelolaan dampak lingkungan dalam pembiayaan berada di bawah pengawasan Direksi dan Sub-Komite ESG, serta dikelola secara operasional oleh Divisi Environmental, Social & Governance, berkoordinasi dengan Divisi Enterprise Risk Management. Pengawasan atas dampak risiko iklim dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kerangka ini memastikan bahwa risiko lingkungan dan iklim dipertimbangkan sebagai bagian dari tata kelola risiko, bukan sebagai isu kepatuhan semata. BNI secara bertahap memperkuat struktur organisasi, mekanisme pelaporan, serta koordinasi lintas fungsi untuk memastikan bahwa keputusan pembiayaan sejalan dengan *risk appetite*, target NZE, serta kebijakan nasional dan global terkait pembiayaan berkelanjutan.

Kebijakan dan Integrasi Risiko LST dalam Proses Kredit

BNI menyadari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) merupakan salah satu aspek utama yang dapat memengaruhi keberlangsungan bisnis Bank, termasuk kredit. Oleh karena itu, BNI mengintegrasikannya ke dalam seluruh siklus kredit, mulai dari perencanaan portofolio, proses persetujuan, hingga pemantauan pascakredit. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meminimalkan risiko fisik dan transisi yang berpotensi berdampak materiil terhadap kualitas aset dan stabilitas keuangan Bank.

Sebelum memberikan pemolayaan kepada calon debitur, BNI melakukan serangkaian proses penilaian kelayakan kredit yang melibatkan berbagai fungsi terkait. Internal Audit turut berperan dalam pelaksanaan audit untuk mengevaluasi kecukupan proses pemberian kredit, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal di masing-masing unit. Dalam peninjauan proposal kredit, BNI melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap risiko LST. Mekanisme dari *pipeline management* sudah berjalan dengan mempertimbangkan LST selama tahun 2025.

Alur Proses *Pipeline Management* dengan Mempertimbangkan LST



Pengelolaan Aspek LST dalam Proses Persetujuan Pembiayaan

Unit Bisnis
Melakukan pemeriksaan *(assessment)* terkait identifikasi risiko dan peluang.

Divisi Compliance
Melakukan *Credit Compliance Review* (CCR) untuk memastikan bahwa proses kredit sudah mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan dalam LST.

Unit Administrasi Kredit/Divisi Credit Operations
Melakukan dokumentasi administrasi kredit.



Unit Risiko (CER, CMR, dan ERM)
Unit Risiko dengan mempertimbangkan faktor LST, melakukan fungsi identifikasi, mengukur, memitigasi, memantau, dan melaporkan risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dengan mengacu pada *Industry Risk Rating* (IRR), *Industry Risk Appetite* (IRA), dan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) yang ditetapkan oleh Divisi ERM. Ketentuan yang ditetapkan tersebut juga telah mempertimbangkan faktor LST.

Komite Kredit
Menganalisis debitur/calon debitur termasuk seluruh risiko beserta mitigasi risikonya berdasarkan pertimbangan dari hasil uji kepatuhan, untuk kemudian memberikan keputusan menyetujui dan/atau menolak kredit.

Kebijakan Pengelolaan Risiko LST di Sektor dengan Risiko Tinggi [illegible]

[illegible]

BNI memiliki panduan sektor yang mengatur syarat minimum keberlanjutan yang perlu dipenuhi, hal yang dilarang, dan aspek yang didorong untuk praktik keberlanjutan. Panduan sektor ini berlaku untuk semua segmen kredit, termasuk *corporate* dan *project finance*. Terdapat 4 sektor yang diidentifikasi memiliki risiko tinggi terkait LST di BNI, yaitu sektor agrikultur sub sektor kelapa sawit, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor energi.

Di BNI, pembiayaan di sektor minyak dan gas dilakukan secara selektif dimana prioritas pembiayaan diberikan kepada pemain utama dengan kinerja di atas rata-rata industri. Ke depannya, dalam proses kredit, khususnya pada tahapan *pipeline management*, BNI akan menyusun *Risk Acceptance Criteria* (RAC) khusus untuk sektor minyak dan gas, serta memastikan pembiayaan kepada debitur yang memiliki kebijakan pengelolaan aspek LST yang baik.

Segmen Corporate dan Enterprise

Beberapa kriteria penilaian risiko LST yang diperisyaratkan oleh BNI untuk sektor-sektor usaha di segmen ini, di antaranya:



Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit:

- Memiliki AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
- Tidak terdapat gangguan lingkungan atau sosial dalam 5 tahun terakhir.
- Memiliki PROPER minimal kategori BIRU apabila sudah dinilai.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.

Tambahan khusus untuk Sektor Perkebunan Kelapa Sawit:

- Memiliki atau sedang proses sertifikasi RSPO atau ISPO.
- Diprioritaskan kemungkinan dibangun kebun sawit untuk energi (dedicated area) agar tidak mengganggu kebutuhan pangan dan ekspor.
- Berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
- Lahan kebun yang dibiayai tidak termasuk ke dalam hutan lindung, lahan gambut yang dilarang sesuai dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.
- Diprioritaskan perusahaan telah memiliki strategi keberlanjutan kepada petani plasma ataupun petani swadaya.



Pertambangan Bijih Logam dan Batu Bara

BNI masuk ke dalam sektor tambang secara terpilih terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pembangunan strategis lainnya.

Pertambangan Bijih Logam dan Pertambangan Batu Bara:

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 3 tahun terakhir.
- Diprioritaskan *Zero Accidents* atau minimal kecelakaan kerja dalam 3 tahun terakhir. Pekerja telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mematuhi SOP kerja, pelatihan kerja & keselamatan diri, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan shift.
- Memenuhi minimal PROPER BIRU (apabila telah dinilai) dapat berupa PROPER Pusat maupun PROPER Daerah.
- Mempunyai tim khusus untuk pelaporan ke BoD untuk mengelola masalah tanggung jawab sosial perusahaan.
- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi pengurangan emisi dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
- Diprioritaskan yang telah memiliki perizinan terkait reklamasi tambang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah setelah pertambangan.
- Telah memenuhi atau memiliki program yang dapat dimonitoring untuk pemenuhan parameter faktor kualitatif lingkungan, sosial, tata kelola (LST) yang ditetapkan BNI sesuai dengan ketentuan regulasi.



Perdagangan Logam, Bijih Logam, dan Batu Bara

- Barang/produk yang dijual bukan berasal dari hasil tambang atau pengolahan yang bermasalah hukum/ ilegal.
- Rekanan/pemasok tidak ada berita buruk tentang pelanggaran peraturan lingkungan, baik lokal dan internasional.



Industri Logam Dasar (Smelter Refiner) dan Industri Barang Logam (Fabricator)

- Telah mendapat persetujuan analisis dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL Rinci), baik izin sendiri atau melalui kawasan/wilayah usaha.
- Tidak ada berita buruk tentang pelanggaran peraturan lingkungan, baik lokal dan internasional.
- Mematuhi peraturan tentang polusi udara & kebisingan termasuk dispersi debu.
- Mematuhi peraturan tentang pengolahan air, sedimen, dan air limbah.
- Mematuhi peraturan tentang pengelolaan bahan limbah berbahaya (B3).
- Mengelola dampak sosial dan budaya pada masyarakat setempat.
- Konservasi satwa liar/manajemen ekologi habitat lokal.
- Diprioritaskan *Zero Accidents* atau minimal kecelakaan kerja dalam 3 tahun terakhir. Pekerja telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mematuhi SOP kerja, pelatihan kerja & keselamatan diri, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan shift.
- Bagi smelter/fabricator yang menggunakan energi fossil fuel maka diprioritaskan yang telah mempunyai salah satu atau lebih dari strategi di bawah ini:
  a. Transisi energi; atau
  b. Strategi penurunan emisi; atau
  c. Strategi penurunan dampak negatif terhadap lingkungan.

Tambahan khusus untuk Sektor Fabricator:

- Bahan baku bukan berasal dari hasil tambang atau pengolahan yang bermasalah hukum/ilegal.

Tambahan khusus untuk Sektor Smelter Refiner:

- Memenuhi kepatuhan atas UU ketenagakerjaan, baik tenaga kerja asing maupun lokal.



Konstruksi Jalan Tol & Konstruksi Sipil dan Bangunan

- Memenuhi dan mematuhi peraturan sub-sektor konstruksi yaitu: hak guna lahan, keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi polusi, meminimalisasi akibat bahan-bahan berbahaya, dan menggunakan/menjaga sumber air alami.
- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 3 tahun terakhir.
- Mematuhi aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi penurunan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
- Diprioritaskan *Zero Accidents* atau Minimal kecelakan kerja dalam 3 tahun terakhir. Pekerja telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mematuhi SOP kerja, pelatihan kerja & keselamatan diri, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan shift.



Ketenagalistrikan

- Telah memiliki AMDAL atau rencana Pengelolaan Lingkungan sesuai dengan regulasi di sektor ketenagalistrikan.
- Memiliki sertifikat atau rencana pengelolaan K3 (bagi debitur ataupun kontraktor).
- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 3 tahun terakhir.
- Telah memenuhi atau memiliki program yang dapat dimonitoring untuk pemenuhan Parameter Faktor Kualitatif LST yang ditetapkan BNI sesuai dengan ketentuan regulasi.
- Untuk pembiayaan PLTU batu bara diprioritaskan yang telah mempunyai salah satu atau lebih dari strategi di bawah ini:
  a. Transisi energi; atau
  b. Strategi penurunan emisi; atau
  c. Strategi penurunan dampak negatif terhadap lingkungan.



Real Estate

Sektor *Real Estate Recurring* & *Real Estate Non-Recurring*:

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RT & RW).
- Tepat guna lahan (kesesuaian lahan dengan fungsinya berdasarkan rencana induk (master plan) kawasan/ wilayah), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB).
- Memenuhi dan mematuhi peraturan sub-sektor real estate yaitu: hak guna lahan, keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi polusi, meminimalisasi akibat bahan-bahan berbahaya, menggunakan/menjaga sumber air alami, dll.
- Memiliki AMDAL atau perizinan lingkungan lainnya.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.



Telekomunikasi dan *Data Center*

Sektor Kontraktor Telekomunikasi & Sektor Operator dan *Data Center*:

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Memenuhi aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Memiliki perizinan dari pemerintah setempat untuk pendirian infrastruktur telekomunikasi.
- Telah memiliki IMB atau perizinan lain yang dipersamakan dengan IMB dan AMDAL serta perizinan terkait lingkungan lainnya.

Tambahan khusus untuk Sektor Operator dan *Data Center*:

- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi penurunan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.



Industri Kimia

- Minimal PROPER BIRU apabila sudah dinilai.
- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Memiliki AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
- Memiliki Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
- Memiliki manajemen pengelolaan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.



Industri Semen

- Memenuhi minimal PROPER BIRU.
- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Mematuhi tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Telah mendapat persetujuan AMDAL, baik izin sendiri atau melalui kawasan / wilayah usaha.
- Mematuhi peraturan tentang polusi udara & kebisingan, termasuk disperse debu.
- Mematuhi peraturan tentang pengolahan air, sedimen, dan air limbah.
- Mematuhi peraturan tentang pengelolaan bahan limbah berbahaya (B3).
- Mengelola dampak sosial dan budaya pada masyarakat setempat.
- Konservasi satwa liar/manajemen ekologi habitat lokal.
- Memenuhi kepatuhan atas UU ketenagakerjaan, baik tenaga kerja asing maupun lokal.
- Diprioritaskan *Zero Accidents* atau Minimal kecelakan kerja dalam 3 tahun terakhir. Pekerja telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mematuhi SOP kerja, pelatihan kerja & keselamatan diri, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan shift.
- Bagi pabrik yang menggunakan energi *fossil fuel*, maka diprioritaskan yang telah mempunyai salah satu atau lebih dari strategi di bawah ini:
  a. Transisi energi; atau
  b. Strategi penurunan emisi; atau
  c. Strategi penurunan dampak negatif terhadap lingkungan.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak dibawah umur.



Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

- Perusahaan memiliki Perizinan Lingkungan, seperti AMDAL/UKL-UPL/RKL-RPL Rinci.
- Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Memiliki kebijakan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Tidak ada gangguan sosial atau lingkungan dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada kelangsungan usaha.
- Memenuhi kepatuhan atas UU ketenagakerjaan, baik tenaga kerja asing maupun lokal.Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.



Rumah Sakit

- ISO 14001 tentang sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan.
- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Tidak ada keputusan hukum malapraktik yang berdampak pada kelangsungan usaha.
- Memiliki unit pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan pemerintah



Farmasi

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari obat yang diproduksi atau dijual.
- Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator, termasuk AMDAL atau perizinan lingkungan lainnya.
- Memiliki manajemen pengelolaan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.



Perdagangan Wholesale

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari produk yang dijual.



Perdagangan Retail

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari produk yang dijual.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.



Jasa Kontraktor Pertambangan

- Tidak ada informasi negatif tentang pelanggaran peraturan lingkungan dan sosial di lokal dan internasional dalam 5 tahun terakhir.
- Memenuhi aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
- Diprioritaskan *Zero Accidents* atau Minimal kecelakan kerja dalam 3 tahun terakhir. Pekerja telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai, mematuhi SOP kerja, pelatihan kerja & keselamatan diri, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, bekerja dengan shift.
- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi pengurangan emisi dan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.



Perguruan Tinggi

- Memiliki dokumen formal kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi.
- Tidak terdapat berita negatif terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam 2 tahun terakhir.

Segmen Commercial

Beberapa kriteria penilaian risiko LST yang dipersyaratkan oleh BNI untuk sektor-sektor usaha di segmen ini, di antaranya:



Perdagangan Umum

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak ada produk yang ilegal, produk yang dijual memiliki izin edar/sesuai standar yang berlaku, dll.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Industri Pengolahan Umum

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Memiliki perizinan AMDAL dan perizinan terkait lingkungan hidup atau perizinan sejenis sesuai dengan sektor usaha.
- Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Jasa Umum

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Perdagangan Ekspor Impor

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari produk yang dijual.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Industri Kimia, Karet, dan Plastik

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Memiliki AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
- Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- Memiliki manajemen pengelolaan limbah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Penyediaan Akomodasi

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 4 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- Tepat guna lahan (kesesuaian lahan dengan fungsinya berdasarkan rencana induk (*master plan*) kawasan/ wilayah), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB).
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Transportasi & Distributor BBM

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Perkebunan Kelapa Sawit (Hulu)

- Memiliki sertifikat ISPO/RSPO atau sedang dalam proses sertifikasi ISPO/RSPO.
- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).
- Memiliki AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Berkomitmen untuk menerapkan kebijakan *No Deforestation, No Peat, and No Exploitation* (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Diprioritaskan perusahaan telah mempunyai strategi pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
- Area kebun tidak berada pada area konservasi, tidak dalam sengketa, dan tidak melebihi zona konsesi.



Jasa Usaha Pertambangan

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 4 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Memenuhi dan mematuhi peraturan yaitu: keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi polusi, meminimalisasi akibat bahan-bahan berbahaya, menggunakan/menjaga sumber air alami, dll.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Rumah Sakit

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 4 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak ada berita malpraktik yang berdampak pada kelangsungan usaha.
- Memiliki unit pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan peraturan pemerintah.
- Tidak mempekerjakan pekerja anak.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Konstruksi

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 4 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Memenuhi dan mematuhi peraturan sub-sektor konstruksi yaitu: hak guna lahan, keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi polusi, meminimalisasi akibat bahan bahan berbahaya, menggunakan/menjaga sumber air alami, dll.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Perdagangan Besar Dalam Negeri

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari produk yang dijual.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Perdagangan Ritel

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Tidak pernah ada berita efek samping fatal dari produk yang dijual.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Dealer Kendaraan Roda Empat atau Roda Dua

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Industri Makanan dan Minuman

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Perusahaan memiliki AMDAL atau perizinan lingkungan lainnya.
- Perusahaan memiliki Kesalamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L).
- Memenuhi ketentuan dan perizinan yang berlaku sesuai jenis usaha.
- Tidak mempekerjakan pekerja anak.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).



Pabrik Kelapa Sawit

- Memiliki AMDAL dan izin lingkungan lainnya.
- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 7 tahun terakhir yang berdampak keberlangsungan usaha.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).
- Area kebun tidak berada pada area konservasi, tidak dalam sengketa, dan tidak melebihi zona konsesi.



Real Estate Housing

- Tidak ada gangguan sosial dan lingkungan dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
- Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- Tepat guna lahan (kesesuaian lahan dengan fungsinya berdasarkan rencana induk (*master plan*) kawasan/ wilayah), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB).
- Memenuhi dan mematuhi peraturan sub-sektor real estate yaitu: hak guna lahan keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi akibat bahan-bahan berbahaya, menggunakan/menjaga sumber air alami, dll.
- Memiliki AMDAL atau perizinan lingkungan lainnya.
- Tidak terdapat kerja paksa atau mempekerjakan anak di bawah umur.
- Perusahaan tidak sedang dalam proses kasus hukum/ terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha (termasuk yang belum ada putusan *inkracht*).

Segmen Small, Medium Enterprise (SME)

Beberapa kriteria penilaian risiko LST yang dipersyaratkan oleh BNI untuk sektor-sektor usaha di segmen ini, di antaranya:

Sektor	Kriteria Aspek LST
Perdagangan Besar Dalam Negeri (Wholesale)	Tidak ada gangguan sosial/lingkungan dalam 2 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.
Perdagangan Eceran (Retail)	
Industri Pengolahan Makanan dan Minuman	
Industri Kimia	
Perdagangan Ekspor Impor	
Transportasi Umum	
Perkebunan Kelapa Sawit (Hulu)	• Area tanam tidak berada pada area tanah gambut dan atau konservasi hutan. • Tidak ada gangguan sosial/lingkungan dalam 5 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha. • Tidak ada berita atau isu negatif terkait pembakaran atau penyerobotan dalam pembukaan lahan.
Konstruksi	• Tidak ada gangguan sosial/lingkungan dalam 4 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha. • Memenuhi dan mematuhi peraturan sub-sektor konstruksi yaitu: hak guna lahan, keselamatan & kesehatan kerja karyawan, meminimalisasi polusi, meminimalisasi akibat bahan bahan berbahaya, menggunakan/menjaga sumber air alami, dll.
Penyedia Akomodasi	• Tidak ada gangguan sosial/lingkungan dalam 3 tahun terakhir yang berdampak pada keberlangsungan usaha.

Daftar Sektor Pengecualian Pembiayaan

BNI juga menetapkan daftar sektor pengecualian pembiayaan (*exclusion list*), yaitu mencakup hal-hal berikut:

- Dilarang oleh pemerintah atau regulator.
- Penebangan liar.
- Kerja paksa, eksploitasi anak, pelanggaran hak asasi manusia.
- Pelanggaran hak masyarakat.
- Dilarang oleh pemerintah apabila menghancurkan situs warisan dunia.
- Penjualan dan produksi narkotika.
- Industri dan penjualan senjata secara ilegal.
- Perjudian dan pencucian uang.
- Perdagangan flora dan fauna yang dilindungi.
- Pendanaan terorisme.

Integrasi Risiko LST dalam Proses Perkreditan

BNI mengintegrasikan pertimbangan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke dalam pemantauan kredit berkelanjutan secara terstruktur melalui Pedoman Perusahaan (PP) Perkreditan, yang berlaku untuk segmen *Corporate, Enterprise, Commercial, Small Medium Enterprise* (SME), dan *Consumer*. Pengawasan ini mencakup pemantauan ketepatan pembayaran, prospek usaha, dan kondisi keuangan debitur sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Pemantauan kredit dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi portofolio, audit internal, serta mekanisme penanganan kredit bermasalah, termasuk restrukturisasi apabila diperlukan. Sebagai bagian dari penguatan pengawasan risiko LST, Internal Audit melaksanakan audit terhadap debitur yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan signifikan. Selama periode pelaporan, audit dilakukan terhadap 19 debitur pada segmen *Corporate, Enterprise*, SME, yang berasal dari sektor-sektor berisiko tinggi, seperti industri kayu *plywood*, perkebunan kelapa sawit, pupuk dan senyawa nitrogen, peternakan, konstruksi jalan tol, transportasi, telekomunikasi, pertambangan, serta perdagangan bahan bakar padat/cair/gas.

Pelaksanaan audit mengacu pada *risk-based audit* melalui Rencana Audit dan Konsultasi, guna memastikan pengawasan risiko LST dilakukan secara proporsional, terfokus pada sektor prioritas, dan selaras dengan kebijakan perkreditan serta manajemen risiko BNI.

Kepatuhan Lingkungan oleh Debitur

Pengelolaan risiko lingkungan dalam kegiatan pembiayaan dilakukan secara ketat untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Pengawasan dilakukan dengan mengacu pada *industry risk appetite* dan *risk acceptance criteria* guna mencegah potensi dampak negatif seperti deforestasi, pencemaran, dan penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, BNI mensyaratkan kepemilikan sertifikasi lingkungan yang relevan sesuai sektor usaha, antara lain RSPO dan ISPO untuk kelapa sawit, PROPER untuk pembangkit listrik, manufaktur, dan pertambangan, serta sertifikasi pendukung lainnya seperti FSC dan ISO 14001.

Kepemilikan Sertifikat Pengelolaan Aspek Lingkungan oleh Debitur

Uraian	Jumlah		
	2025	2024	2023
PROPER Emas	13	9	11
RSPO/ISPO	64	49	48
Proses memperoleh RSPO/ISPO	15	17	9
PROPER Merah	2	1	0
PROPER Biru	56	59	50
PROPER Hijau	13	5	5
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	11	13	18

Penilaian Debitur Berbasis Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)

Sejalan dengan penguatan standar pengungkapan risiko dan peluang iklim, BNI secara bertahap mengintegrasikan TKBI sebagai penyempurnaan dari Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dalam kerangka manajemen risiko iklim dan pembiayaan berkelanjutan. TKBI digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi tingkat keselarasan aktivitas debitur terhadap tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Melalui penerapan TKBI dalam proses analisis kredit, pemantauan portofolio, serta pendampingan debitur, BNI mendorong peningkatan praktik lingkungan debitur secara bertahap, termasuk penyusunan rencana transisi yang terukur. Pendekatan ini mendukung kesiapan BNI dalam mitigasi dan resiliensi perubahan iklim, khususnya dalam mengalihkan risiko dan peluang terkait iklim dengan strategi bisnis, manajemen risiko, serta metrik dan target yang berdampak pada kinerja dan ketahanan keuangan Bank.

Penilaian TKBI dilakukan pada 4 sektor utama, yaitu *Energy, Construction & Real Estate* (CRE), *Transportation & Storage* (T&S), dan sebagian *Agriculture, Forestry and Other Land Uses* (AFOLU) dalam hal ini sektor kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Sejalan dengan arahan OJK, penilaian TKBI dilakukan secara bertahap. Untuk mendukung penerapan TKBI, BNI melaksanakan *technical assistant* untuk seluruh debitur terdampak, untuk meningkatkan pemahaman debitur atas TKBI.

Pemantauan, Audit, dan Eskalasi Risiko Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) [FS7, FS8]

Sebagai komitmen dalam pembiayaan berkelanjutan, BNI telah mengintegrasikan mekanisme uji tuntas LST dalam proses analisis, persetujuan, dan pemantauan kredit. Kepatuhan debitur dan calon debitur terhadap regulasi lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi salah satu faktor utama dalam penilaian risiko kredit. Setiap indikasi pelanggaran LST akan dilakukan evaluasi lanjutan untuk menilai penyebab, tingkat materialitas, serta potensi dampaknya terhadap kualitas kredit dan eksposur risiko bank.

Dalam prosesnya, Unit Bisnis dan Unit Risiko melakukan evaluasi berupa verifikasi, analisis mendalam, serta koordinasi dengan debitur dan pihak eksternal terkait untuk menilai dampak LST terhadap kinerja keuangan, kemampuan membayar, reputasi debitur, serta risiko hukum dan reputasi bagi BNI.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BNI dapat menerapkan tindakan korektif yang proporsional, mulai dari pemberian tenggat waktu perbaikan, penyesuaian syarat pembiayaan, penghentian sementara fasilitas kredit, penundaan proses pembiayaan baru, hingga permintaan pelunasan kredit. Mekanisme ini memastikan bahwa risiko LST dikelola secara sistematis, terdokumentasi, selaras dengan kebijakan perkreditan , dan regulasi yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.

Mitigasi dan Resiliensi Perubahan Iklim

Sebagai lembaga keuangan, dampak utama BNI terhadap perubahan iklim tidak berasal dari aktivitas operasional secara langsung, melainkan dari aktivitas pembiayaan yang secara tidak langsung membiayai emisi dan risiko iklim debitur. Oleh karena itu, BNI mengelola risiko iklim sebagai bagian integral dari manajemen risiko keuangan, dengan mengalihkan aspek iklim terhadap kualitas aset, ketahanan portofolio, dan kinerja keuangan jangka panjang. [GRI 3-3]

Pendekatan ini diperkuat melalui pengembangan kerangka *climate risk management & scenario analysis* (CRMS) dan *climate risk stress testing* (CRST) yang selaras dengan kebijakan OJK, metodologi internasional. Melalui pendekatan tersebut, BNI berupaya memastikan bahwa risiko dan peluang perubahan iklim telah teridentifikasi, diukur, dan dikelola secara sistematis dalam pengambilan keputusan bisnis.

Melalui pengembangan CRMS dan CRST secara berkelanjutan, BNI memperkuat ketahanan portofolio, mendukung target NZE nasional, dan memastikan bahwa risiko iklim telah terinternalisasi secara sistematis dalam strategi dan manajemen risiko perusahaan.



Penetapan target NZE operasional tahun 2028 difokuskan pada penurunan emisi gas rumah kaca dari aktivitas operasional BNI untuk cakupan 1 dan cakupan 2. Target tersebut ditetapkan dengan mengacu pada *baseline* emisi tahun 2023 sebagai tahun dasar perhitungan. Sementara itu untuk cakupan 3 operasional mengikuti target NZE pembiayaan pada tahun 2060.

Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS)

BNI mengembangkan kerangka CRMS untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko serta peluang perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi portofolio kredit dan kinerja keuangan. Kerangka ini mencakup empat pilar utama: tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target, sebagaimana mengacu *framework* IFRS S2.

Tata Kelola

Pengelolaan risiko iklim berada di bawah Divisi Environmental, Social & Governance berkoordinasi dengan Divisi Enterprise Risk Management, dengan pengawasan oleh Sub-Komite ESG yang merupakan bagian dari Komite Manajemen Risiko dan *Anti-Fraud* dan Dewan Komisaris. Pada 2024–2025, BNI memperkuat struktur organisasi ESG melalui pengembangan organisasi dari departemen menjadi divisi, dan penambahan unit kerja guna mendukung pengelolaan risiko iklim yang lebih mendalam dan terintegrasi. Pemantauan dilakukan secara berkala dan hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan strategis.

Strategi

Dalam konteks strategi, BNI menempatkan diri sebagai mitra transisi debitur, bukan semata penyedia pembiayaan. Sepanjang 2024–2025, BNI meningkatkan peran *advisory* kepada debitur melalui berbagai forum dan program edukasi, termasuk *BEST Event* dan *workshop* Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), khususnya bagi sektor-sektor beremisi tinggi seperti energi. Pendekatan ini bertujuan mendorong debitur menyusun peta jalan transisi yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan target NZE Indonesia. Pada tahun 2025, BNI merupakan bank pertama di Indonesia yang menerbitkan *advisory playbook* di sektor Perkebunan Kelapa Sawit, sebagai panduan bagi debitur dalam menjalankan transisi hijau.

Manajemen Risiko

BNI mengintegrasikan risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko melalui:

- Penguatan *risk acceptance criteria* (RAC) dengan memasukkan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, HAM, serta K3;
- Pemetaan sektor beremisi tinggi dan pengaturan eksposur melalui *loan exposure limit* (LEL);
- Penerapan TKBI secara bertahap, pada sektor energi, AFOLU, konstruksi & *real estate*, dan transportasi & logistik;
- Pelaksanaan CRST untuk seluruh portfolio kredit BNI untuk menilai dampak perubahan iklim terhadap portfolio kredit BNI; serta
- Penguatan *business continuity management* (BCM) untuk memitigasi risiko fisik akibat bencana iklim.

Metrik dan Target

BNI terus menyempurnakan pengukuran emisi GRK, baik operasional maupun pembiayaan. Sejak 2024, BNI telah menggunakan metodologi PCAF secara penuh dan memperluas cakupan perhitungan emisi pembiayaan, mencakup mayoritas segmen kredit produktif. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam pengelolaan portofolio, penetapan target NZE pembiayaan, serta pemantauan kinerja transisi debitur.

Climate Risk Stress Testing (CRST) [OJK-C]

Sebagai bagian dari implementasi *climate risk management & scenario analysis* (CRMS), BNI melaksanakan *climate risk stress testing* (CRST) untuk menilai ketahanan portofolio pembiayaan terhadap risiko fisik dan risiko transisi akibat perubahan iklim. Melalui CRST, BNI dapat mengidentifikasi potensi dampak risiko iklim terhadap kinerja debitur, termasuk penurunan arus kas, peningkatan probabilitas gagal bayar, serta implikasinya terhadap kualitas aset. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam mengantisipasi tekanan terhadap rasio kredit bermasalah, *loan at risk* (LaR), serta kecukupan *Expected Credit Loss* (ECL). Dengan demikian, CRST berperan penting dalam menjaga ketahanan portofolio, stabilitas permodalan, dan keberlanjutan kinerja keuangan BNI dalam jangka panjang.

Pada 2026, CRST BNI mencakup seluruh portofolio kredit. Uji stres dilakukan sesuai dengan panduan CRMS yang diterbitkan oleh OJK, dimana panduan CRMS ini juga mengadopsi skenario *Network for Greening the Financial System* (NGFS), yaitu:

- *Net Zero 2050 (Orderly Transition)*
- *Delayed Transition (Disorderly)*
- *Current Policies (Hot House World)*

Analisis risiko transisi dilakukan dengan 3 *horizon* waktu, yaitu jangka pendek (2026, 2026, 2027), jangka menengan (hingga tahun 2030) dan jangka panjang (hingga tahun 2060). Uji *stress* mencakup risiko kredit, pasar, operasional, serta likuiditas. Hasil *Climate Risk Stress Test* (CRST) menunjukkan bahwa skenario *Net Zero* 2060 merupakan skenario dengan dampak paling signifikan dibandingkan skenario lainnya, dimana sektor yang paling terdampak risiko iklim adalah sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin.

Sementara itu, analisis risiko fisik dilakukan melalui uji stress terhadap kredit produktif di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan skenario kebakaran hutan, serta terhadap kredit pemilikan properti dengan skenario banjir dalam horizon waktu satu tahun. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dampak risiko fisik paling signifikan terdapat pada portofolio kredit pemilikan properti.

Adapun risiko operasional akibat potensi banjir dalam horizon waktu satu tahun pada proyeksi 2028 diperkirakan berdampak pada 188 dari 1.780 kantor operasional (8,9%) yang berlokasi di wilayah dengan tingkat risiko banjir tinggi (nilai IRBI > 12). Pada risiko likuiditas, hasil *stress test* dengan horizon waktu satu bulan menunjukkan bahwa rasio cakupan likuiditas tetap terjaga di atas ketentuan regulator (100%). Sementara itu, dampak risiko iklim terhadap ATMR

Risiko Pasar untuk pergerakan *rating* dan *yield* surat berharga pemerintah maupun korporasi, menunjukkan penurunan terbesar pada skenario *Net Zero* tahun 2030 sebesar 8,2%.

Secara keseluruhan, risiko iklim diproyeksikan memberikan dampak terhadap nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam jangka panjang. Namun demikian, nilai CAR tersebut tetap berada dalam batas ketahanan permodalan Bank, yang mencerminkan resiliensi permodalan Bank dalam menghadapi risiko terkait perubahan iklim.

Data Emisi GRK dari Pembiayaan

Perhitungan emisi GRK dari pembiayaan pada tahun 2025 mencakup 90,6% dari portofolio kredit produktif yang terdiri dari segmen *Corporate*, *Enterprise*, *Commercial*, dan *Retail Productive*, yang dihitung menggunakan metodologi *Partnership for Carbon Accounting Financials* (PCAF). Cakupan ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang baru mencakup 70,3% portofolio kredit produktif.

Emisi GRK Dibiayai berdasarkan *Asset Class*

Asset Class PCAF	*Outstanding* 2025 (Rp miliar)	*Financed Emission* 2025 (Ton CO_2eq)
Business Loans	553.439	37.207.662
Project Finance	104.015	7.433.482
Total	**657.454**	**44.641.144**

Emisi GRK dari Aktivitas Pembiayaan per Segmen Kredit

Segmen	*Outstanding Plafond* 2025 (Rp miliar)	Emisi GRK (Ton CO_2eq) 2025	Emisi GRK (Ton CO_2eq) 2024
Corporate	477.480	39.217.943	27.532.032
Enterprise	60.239	2.312.995	2.289.814
Commercial	44.630	1.841.136	1.234.931
Total	**582.363**	**43.372.074**	**31.056.577**
Retail Productive	75.090	1.269.070	2.196.684
Grand Total	**657.454**	**44.641.144**	**33.253.262**

Emisi GRK dari Aktivitas Pembiayaan per Sektor Usaha

Sektor Usaha	*Outstanding Plafond* 2025 (Rp miliar)	Emisi GRK (Ton CO_2eq) 2025	Emisi GRK (Ton CO_2eq) 2024
Industri Pengolahan	141.260	20.429.838	11.924.154
Perdagangan	107.847	1.522.073	1.027.502
Pertambangan & Penggalian	65.258	8.708.996	8.012.103
Transportasi, Penunjang Angkutan & Pergudangan	30.733	1.341.212	303.883
Listrik, Gas, dan Air	47.656	7.214.101	2.415.033
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	49.372	1.903.307	1.682.017
Real Estate	21.106	156.779	35.692
Konstruksi	108.451	434.817	251.809
Lainnya	87.747	2.852.021	7.661.068
Total	**657.454**	**44.641.144**	**33.253.262**

Emisi GRK dari Aktivitas Pembiayaan per Kualitas Data

Kualitas Data	*Outstanding* 2025 (Rp miliar)	*Financed Emission* 2025 (Ton CO_2eq)
Score 1	51.114	13.141.838
Score 2	105.297	6.714.654
Score 3	-	-
Score 4	501.042	24.784.652
Score 5	-	-
Total	657.454	44.641.144

Kartu Kredit Berwawasan Lingkungan

Pemanfaatan material ramah lingkungan dalam pengembangan produk perbankan merupakan bagian dari komitmen Bank Negara Indonesia dalam mendukung mitigasi perubahan iklim serta penerapan prinsip *green banking* dan keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui pengelolaan dampak lingkungan pada daur hidup produk, termasuk dalam pemilihan material yang lebih bertanggung jawab. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan produk dan kolaborasi dengan mitra strategis, salah satunya melalui penerbitan Kartu Kredit BNI American Express Vibe yang 80% komposisi setiap kartunya diproduksi dari material plastik daur ulang. Namun demikian, BNI tidak memiliki produk yang berasal dari pemerolehan ulang. Inisiatif ini mencerminkan upaya BNI dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam inovasi produk, sejalan dengan kerangka kebijakan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang berlaku.

Volume Pemanfaatan Plastik Daur Ulang Tahun 2025



Keterangan:
Asumsi: Setiap kartu kredit memiliki berat total sebesar 5 gram, maka 4 gram (80%) di antaranya merupakan material daur ulang. Oleh karena itu, volume plastik daur ulang dihitung berdasarkan jumlah kartu kredit yang diproduksi dikalikan dengan berat material daur ulang per kartu.

BNI juga menghadirkan kartu kredit BNI WWF yang dikembangkan melalui kolaborasi dengan World Wide Fund for Nature Indonesia (WWF Indonesia). Melalui produk ini, BNI memfasilitasi partisipasi nasabah dalam memberikan kontribusi tidak langsung terhadap program pelestarian, restorasi, serta pengelolaan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia dimana sebagian biaya transaksi nasabah (*sharing fee* 0,4%) disalurkan ke WWF Indonesia.

Kartu Kredit Berwawasan Lingkungan

Jenis Kartu	New CIF			Volume Penjualan (Rp miliar)		
	Target FY 25	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target FY 25	Realisasi 2025	Capaian (%)
WWF	21.874	25.310	115,7%	524,23	640,95	122,3%
Amex Vibes	50.000	53.955	107,9%	96,00	708,10	737,6%
Total	71.874	79.265	110,3%	620,23	1.349,05	217,5%



02

CORPORATE SUSTAINABILITY

BNI meyakini bahwa keberlanjutan dapat dicapai apabila operasional perusahaan dikelola secara disiplin, adaptif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, BNI secara berkelanjutan mengelola energi dan emisi, mengembangkan praktik operasional berkelanjutan, serta mendorong keterlibatan aktif pegawai dalam penerapan prinsip LST. Seiring dengan penguatan layanan digital, BNI juga memperkuat keamanan siber dan pelindungan data nasabah guna memastikan keberlanjutan operasional yang aman dan terpercaya.

Upaya Mencapai Ketahanan Iklim

Pengelolaan Topik Material 2-2

Topik Material: Ketahanan Iklim

Pentingnya Pengelolaan Topik

Pengelolaan ketahanan iklim menjadi isu strategis bagi BNI mengingat perubahan iklim berpotensi memengaruhi keberlanjutan bisnis Bank. Integrasi aspek ketahanan iklim dalam strategi dan operasional Bank memungkinkan BNI memperkuat manajemen risiko, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen nasional *Net Zero Emission* (NZE).

Dampak dan Peluang

Perubahan iklim menimbulkan dampak berupa potensi gangguan layanan akibat cuaca ekstrem serta penurunan keandalan infrastruktur fisik dan teknologi informasi. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pemeliharaan dan biaya pemulihan operasional, khususnya pada jaringan kantor dan fasilitas pendukung di wilayah yang rentan terdampak perubahan iklim.

BNI menangkap peluang tersebut melalui integrasi manajemen risiko iklim dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Salah satunya dalam bentuk efisiensi energi dan pengurangan emisi pada lingkup operasional juga memberikan peluang peningkatan efisiensi biaya dan penurunan jejak karbon Bank. Selain itu pengembangan digitalisasi dalam operasional dan layanan BNI memberikan peluang dalam memitigasi risiko iklim yang muncul.

Target dan Komitmen

BNI berkomitmen mendukung pencapaian *Net Zero Emission* (NZE) melalui pengelolaan ketahanan iklim yang terintegrasi dalam operasional. Komitmen utama BNI meliputi:

- Pencapaian target *Net Zero Emission* scope 1 dan 2 pada tahun 2025.
- Perluasan pengelolaan limbah berprinsip kepada *zero waste to landfill* secara bertahap ke wilayah/cabang.
- Perluasan cakupan pengelolaan limbah BNI kepada kategori limbah lainnya.
- Optimalisasi program efisiensi energi di lingkungan kantor BNI.

Target tersebut selaras dengan *roadmap* ESG BNI serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).

Kebijakan

Dalam mendukung ketahanan iklim, BNI menetapkan dan menerapkan berbagai kebijakan, antara lain:

- Kebijakan dan *roadmap* ESG yang mencakup usaha-usaha pengurangan emisi gas rumah kaca dan dukungan pelaksanaan transisi bagi mitra usaha;
- Kebijakan efisiensi energi dan pengelolaan emisi di lingkup operasional, yang mengacu pada:
  1. Ketentuan Pelaksanaan Efisiensi No. JAL/2.2/1799;
  2. Ketentuan Efisiensi Penerangan dan Pendinginan Ruangan No. JAL/3/3564;
  3. Ketentuan Penggunaan AC Inverter untuk Efisiensi Biaya Listrik No. JAL/3/1317.
- Kebijakan pengelolaan limbah di lingkup operasional gedung kantor wilayah dan cabang yang mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) *Solid Waste Management* Gedung Kantor Wilayah dan Cabang No. NSO/4/0127 tanggal 10 Oktober 2025.

Evaluasi dan Pengelolaan Dampak

Pengelolaan dan evaluasi ketahanan iklim berada di bawah Direksi sedangkan pengawasannya di bawah Dewan Komisaris. Pengelolaan ketahanan iklim dilakukan oleh Divisi Environment, Social and Governance dengan dukungan unit terkait, seperti Divisi Operation Risk Management, Divisi Procurement and Fixed Assets, dan Divisi Networks Service and Distribution. Di lingkup operasional, evaluasi dilakukan melalui pemantauan konsumsi energi dan emisi, serta implementasi program efisiensi energi secara konsisten di seluruh gedung dan kantor BNI. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan penguatan ketahanan Bank terhadap risiko iklim jangka pendek dan jangka panjang.

Strategi Dekarbonisasi

Pengelolaan Energi [103-1, 103-2]

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efisiensi energi operasional sekaligus pengurangan emisi dan, BNI melaksanakan berbagai inisiatif sebagai berikut:

- Menerapkan program *Earth Hour* melalui pengaturan pemadaman lampu ruang kerja pada jam istirahat (12.00–13.00).
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan *Earth Hour* tahunan yang dilaksanakan setiap minggu keempat bulan Maret di seluruh kantor BNI.
- Mengoptimalkan penggunaan lampu hemat energi di Grha BNI, Plaza BNI, Gedoeng BNI, dan Menara BNI.
- Melakukan pengurangan pengoperasian *chiller* pada hari Sabtu dan Minggu guna menekan konsumsi energi.
- Mengimplementasikan teknologi *magnetic bearing* pada sistem pendingin Plaza BNI dan Grha BNI untuk meningkatkan efisiensi energi melalui pengurangan gesekan mekanis.
- Memanfaatkan energi terbarukan melalui pemasangan 76 unit panel surya dengan kapasitas total 3.040 Watt sebagai sumber listrik untuk tangga darurat di Plaza BNI.
- Memiliki panel surya pada Gedung BNI PIK 2, dengan total unit sebanyak 418 unit dengan kapasitas 230 Kw.
- Mengurangi emisi dari perjalanan dinas dengan mengalihkan koordinasi dan pertemuan ke sarana komunikasi jarak jauh (telekonferensi).
- Menerapkan prinsip desain bangunan ramah lingkungan pada Gedung Menara BNI, Gedung Plaza BNI, dan PIK 2.
- Merencanakan penerapan kaidah *green building* pada pembangunan Gedung BNI di kawasan PIK 2.

Optimalisasi pengelolaan energi sepanjang tahun 2025 menghasilkan penurunan konsumsi energi operasional BNI yang berasal dari listrik (Cakupan 2) hingga tercatat sebesar 669.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian ini sejalan dengan penguatan penerapan konsep *green building*, yang ditandai dengan diraihnya sertifikasi Green Building Gold untuk Gedung Menara BNI dan Green Building Platinum untuk Gedung Plaza BNI dari Green Building Council Indonesia. Sementara itu, pada Gedung BNI PIK 2 telah diperoleh sertifikasi Green Building Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) dari United States Green Building Council (USGBC) dengan level Gold pada kategori *Building Construction*. Namun demikian, hingga akhir tahun 2025, BNI belum melakukan perhitungan untuk konsumsi energi di luar operasional. [302-4]

Konsumsi dan Intensitas Energi Operasional [302-1, 302-2, 302-3]

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Energi yang Berasal dari Sumber Daya Tak Terbarukan				
Penggunaan BBM untuk genset dan penggunaan energi listrik di kantor BNI seluruh Indonesia	GJ	559.194	598.235	604.186
Penggunaan BBM untuk perjalanan dinas darat dan operasional di kantor BNI		321.296	334.861	327.264
Energi yang Berasal dari Sumber Daya Terbarukan				
Penggunaan energi listrik dari panel surya	GJ	95,9	95,9	95,9
Total energi listrik dan BBM		**880.586**	**933.192**	**931.546**
Pendapatan	Rp triliun	64,9	64,5	62,7
Intensitas energi terhadap pendapatan*	**GJ/Rp miliar**	**13,6**	**14,5**	**14,9**

Keterangan:

Perhitungan menggunakan faktor konversi BBM menjadi energi sebesar 0,033 GJ/liter dan listrik menjadi energi sebesar 0,0036 GJ/kWh.

*) Perubahan angka disebabkan oleh penyesuaian satuan matrik menjadi Rp miliar.

Pengelolaan Emisi GRK [illegible]

Pengelolaan emisi BNI didukung oleh penghitungan emisi gas rumah kaca yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2021. Fokus utama pendekatan ini adalah konsistensi metodologi serta perluasan cakupan pengukuran seiring dengan peningkatan kualitas data. Penghitungan emisi cakupan 1 dan 2 telah dilakukan secara rutin, dan sejak tahun 2022 diperluas untuk mencakup emisi cakupan 3. Pada tahun 2026, BNI memperluas perhitungan portofolio emisi cakupan 3 kategori 16 (emisi pembiayaan) yang pada tahun 2024 adalah 70,4% menjadi 90,6% portofolio kredit produktif yang terdiri dari segmen *Corporate*, *Enterprise*, *Commercial*, dan *Retail Productive*. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan pada nominal emisi pembiayaan BNI.

Selain penguatan penghitungan emisi pembiayaan, BNI juga secara konsisten mengelola emisi yang bersumber dari aktivitas operasional dan perjalanan dinas. Emisi cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3 dari perjalanan dinas tercatat sebesar 181.646,31 ton CO_2eq, mengalami penurunan sebesar 6,3% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan emisi cakupan 1 dan 2 tahun 2026 dibandingkan baseline tahun 2023 mencapai 6,7%. Intensitas emisi cakupan 1, 2, & 3 perjalanan dinas terhadap pendapatan juga tercatat mengalami penurunan dari 3,00 ton CO_2eq/Rp miliar dari tahun sebelumnya menjadi 2,8 ton CO_2eq/Rp miliar.

Emisi Gas Rumah Kaca yang Dihasilkan [illegible]

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Cakupan 1				
Pemakaian BBM di gedung	Ton CO_2eq	1.206,7	1.327,1	1.701,1
Penggunaan freon		919,1	839,8	1.023,6
Pemakaian BBM operasional		15.650,8	15.175,0	15.874,9
Cakupan 2				
Emisi dari penggunaan listrik	Ton CO_2eq	158.839,1	169.179,5	170.760,4
Cakupan 3				
Perjalanan dinas udara	Ton CO_2eq	1.728,8	1.856,7	2.959,2
Perjalanan dinas darat		3.301,1	5.355,2	4.220,8
Emisi pembiayaan		44.841.144	33.233.262	28.718.388
Emisi GRK cakupan 1 & 2		**176.615,4**	**186.541,3**	**189.360,2**
Total emisi GRK		**44.822.789**	**33.427.016**	**28.914.928**
Pendapatan	Rp triliun	64,9	64,5	62,7
Intensitas emisi GRK cakupan 1, 2, & 3 perjalanan dinas terhadap pendapatan*	Ton CO_2eq/Rp miliar	**2,8**	**3,0**	**3,1**
Intensitas emisi GRK cakupan 3 pembiayaan terhadap pendapatan*		**687,0**	**515,1**	**457,7**
Intensitas total emisi GRK (cakupan 1, 2, & 3) terhadap pendapatan*		**689,8**	**518,1**	**460,8**

Keterangan:
Metodologi perhitungan emisi GRK operasional menggunakan GHG Protocol dan referensi IPCC 2014. Sementara itu, untuk perjalanan dinas menggunakan referensi dari myclimate.
*) Perubahan angka disebabkan oleh penyesuaian satuan matrik menjadi Rp miliar.

Hingga akhir tahun 2026, BNI belum melakukan perhitungan emisi polutan udara selain gas rumah kaca (GRK), seperti Nitrogen Oksida (NOx) dan Sulfur Oksida (SOx), mengingat sumber utama emisi tersebut tidak berasal dari kegiatan operasional BNI. Di sisi lain, sebagai langkah pengendalian potensi dampak terhadap lapisan ozon, BNI secara bertahap mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan menggantinya dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, termasuk AC Inverter. [illegible]

Inisiatif Perbankan Ramah Lingkungan

Pengelolaan Limbah (GRI 1, 306-2, 306-4)

Tahapan Pengelolaan Limbah di BNI



BNI mengelola limbah berdasarkan klasifikasi limbah padat, limbah cair, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pengelolaan limbah padat di BNI dilaksanakan dengan mengacu pada konsep *Zero Waste to Landfill* (ZWTL) melalui penerapan prinsip *reduce, reuse,* dan *recycle* (3R). Program ini saat ini diterapkan di lima Kantor Pusat BNI sebagai tahap awal untuk mengoptimalkan proses daur ulang limbah gedung serta mengurangi pembuangan limbah secara langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sebagai dasar pelaksanaan, BNI menetapkan SOP *Solid Waste Management* yang berlaku di Kantor Pusat. Perluasan penerapan program ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang direncanakan secara bertahap seiring dengan hasil evaluasi pelaksanaan. Upaya perluasan tahap pertama dilakukan dengan menetapkan SOP *Solid Waste Management* untuk Kantor Wilayah dan Cabang dengan kerja sama dengan Bank Sampah, UMKM atau vendor pengelolaan limbah. (306-5)

Volume Limbah Padat yang Dihasilkan (306-3, 306-5)

Uraian	Satuan	2025	2024
Limbah Organik	m^3	-	817,2*
Limbah Anorganik		-	3.283,3*
Limbah Organik	ton	91,5	10,8**
Limbah Anorganik		169,2	51,5**
Limbah Residu		372,4	-

Keterangan:
Pada tahun 2025, pengukuran limbah padat menggunakan satuan berat (ton) seiring dengan dimulainya kerja sama pengelolaan limbah yang mencakup proses daur ulang limbah organik, anorganik, residu.
*) Periode data: Januari-November 2024
**) Periode data: Desember 2024

BNI menerapkan pengelolaan limbah padat melalui pengurangan sumber limbah, khususnya kemasan plastik, serta pelaksanaan proses daur ulang dengan metode yang disesuaikan dengan jenis limbahnya. Pengelolaan ini didukung oleh infrastruktur pemilahan berupa tempat sampah tiga kategori, yaitu organik, anorganik, dan residu, serta penguatan kesadaran pegawai melalui kampanye pengurangan penggunaan kemasan plastik.

Metode Pengelolaan Daur Ulang Limbah Padat

Limbah Organik
Composting dan *Black Soldier Fly* (BSF) *treatment*

Limbah Anorganik
Proses daur ulang sesuai dengan jenis limbah

Limbah Residu
Menggunakan *Refuse Derived Fuel* (RDF) *technology* yang kemudian akan diolah menjadi bahan bakar alternatif

Volume Limbah Daur Ulang (Ton) [GRI 306-4]



Keterangan: *) Periode data Desember 2024

Khusus untuk limbah kertas dihasilkan dari dua aktivitas. Aktivitas pertama merupakan aktivitas operasional sehari-hari di lima gedung kantor pusat BNI yang terkonsolidasi dengan data limbah anorganik. Aktivitas kedua yaitu limbah kertas yang berasal dari dokumen arsip masa lalu yang telah melewati masa retensi penyimpanan sesuai ketentuan yang berlaku. Limbah kertas dari aktivitas kedua disajikan dalam tabel Volume Daur Ulang Limbah Kertas. Namun demikian, pada tahun 2025 belum ada keputusan untuk melakukan daur ulang arsip.

Sementara itu, pengelolaan limbah B3 dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga berizin, dengan mekanisme penyimpanan sementara di fasilitas penyimpanan limbah B3 sebelum dilakukan pengamolan sekali dalam setahun. Pada tahun 2025, volume limbah B3 yang dihasilkan adalah 1.006 kg. Data limbah B3 tersebut hanya mencakup gedung Plaza BNI, Menara BNI, dan Griha. Sementara itu, untuk informasi mengenai pengelolaan limbah cair dapat dilihat pada bab Pengelolaan Air. [GRI 306-4]

Volume Daur Ulang Limbah Kertas untuk Arsip (Ton) [GRI 306-4]



Melalui penerapan pengelolaan limbah, BNI berhasil menghindarkan timbulnya emisi gas rumah kaca yang seharusnya dihasilkan dari metode pembuangan konvensional. Pada tahun 2025, inisiatif ini berkontribusi pada penghindaran emisi sebesar 338,9 ton CO_2eq dibandingkan skenario tanpa pengelolaan limbah berkelanjutan.

Pengelolaan Air [GRI 3-3, 303-3, 303-5, 303-4]

Dalam operasional perkantoran, BNI menggunakan air untuk kebutuhan domestik, seperti sanitasi, pemeliharaan taman, dan aktivitas pendukung lainnya. BNI tidak melakukan pengambilan air dari sumber mata air, namun pasokan air berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan pemanfaatan air tanah secara terbatas. Pada 2025, total pengambilan air di Kantor Pusat BNI yang bersumber dari PDAM tercatat sebesar 318.661 m³. Sejalan dengan karakteristik kegiatan operasional yang tidak menghasilkan efluen berbahaya, BNI tidak melakukan pengujian baku mutu efluen. Berbagai inisiatif efisiensi air pun telah diterapkan, antara lain penggunaan teknologi pengelolaan air berupa *Sewage Treatment Plan* (STP) di di Gedung Plaza BNI dan Gedung Menara BNI, kampanye hemat air, penerapan perilaku penggunaan air yang bertanggung jawab, pelaporan kebocoran keran, serta pemanfaatan air olahan untuk penyiraman tanaman. Total konsumsi air BNI pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.457.807 m³, mencakup Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang.

Volume Penggunaan Air [303-5]

Uraian	Satuan	2025	2024	2023
Kantor pusat	m³	318.661	329.544	272.165
Kantor wilayah dan cabang		1.169.906	1.552.696	1.485.969
Total volume penggunaan air		**1.487.567**	**1.882.040**	**1.758.134**
Total Pegawai	Orang	27.201	27.203	27.570
Intensitas penggunaan air rata-rata tahunan	m³/Orang	**54,7**	**69,2**	**63,8**

Keterangan:
Perhitungan konsumsi air dihitung dengan menggunakan data PDAM dalam m³

Upaya Mencapai Ketahanan Operasional
Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kerangka Pengembangan SDM

BNI memandang pengembangan sumber daya manusia sebagai proses berkelanjutan yang dirancang secara terstruktur untuk memastikan ketersediaan talenta yang selaras dengan kebutuhan bisnis saat ini maupun masa depan. Kerangka pengembangan SDM BNI dijalankan secara *end-to-end*, dimulai dari penetapan standar kompetensi sebagai fondasi pengelolaan karier dan talenta, dilanjutkan dengan penguatan pola dan jalur karier, serta pemetaan talenta melalui *profiling* dan *assessment* untuk menilai kapasitas, potensi, dan kesiapan peran. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BNI menetapkan *talent pool* melalui segmentasi, kemudian menjalankan program pengembangan berbasis *Individual Development Plan* (IDP) untuk menyiapkan talenta sebagai suksesor. Seluruh proses ini diperkuat melalui evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar pengembangan talenta tetap relevan, tepat sasaran, dan berdampak bagi organisasi.

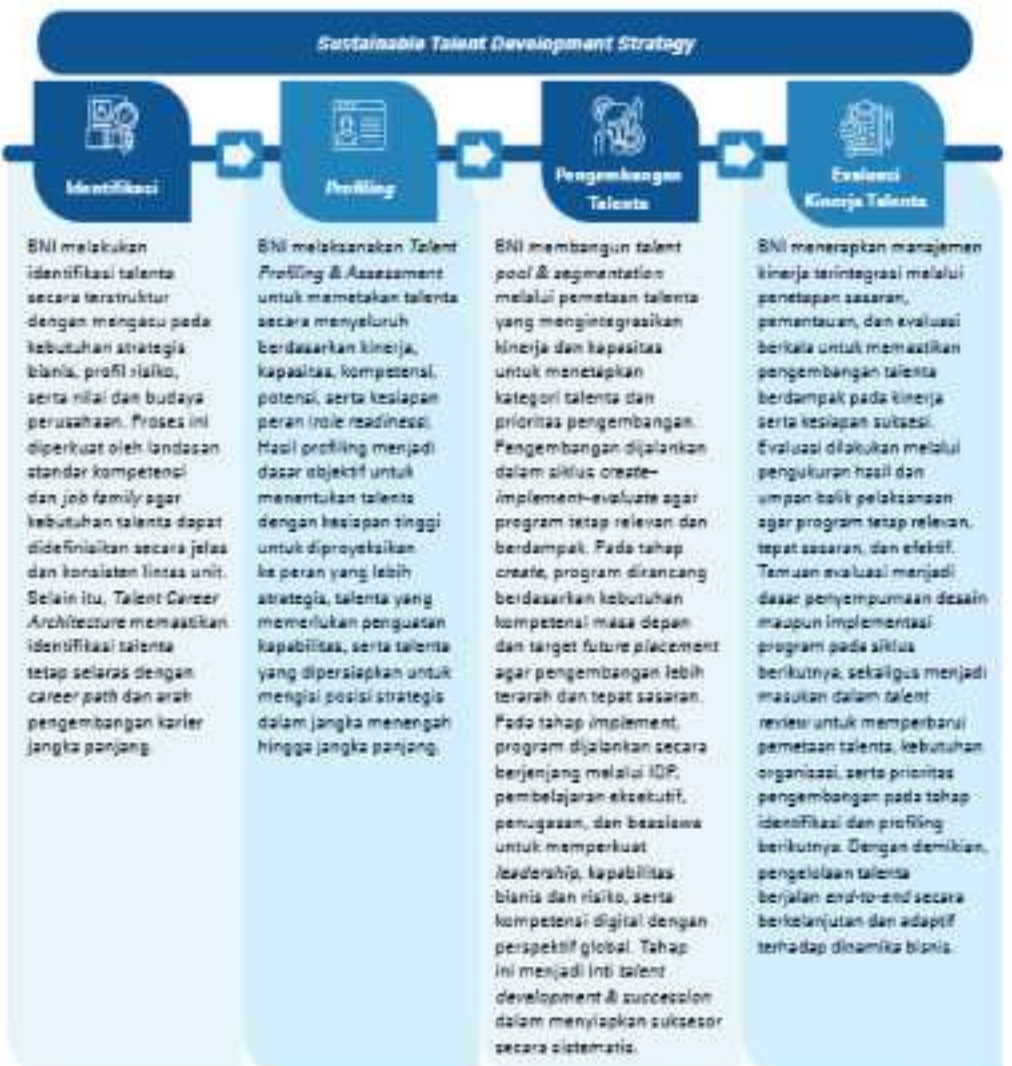

Identifikasi dan Profiling Talenta

Pengelolaan sumber daya manusia di BNI dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengacu pada *Employee Value Proposition* (EVP) yang menekankan kontribusi, pembelajaran, dan pertumbuhan pegawai. Kebijakan *human capital* diterapkan secara terintegrasi sepanjang siklus ketenagakerjaan, mulai dari proses rekrutmen hingga pegawai menyelesaikan masa kerjanya, guna mendukung motivasi dan retensi talenta.

Proses rekrutmen di BNI dilakukan secara terstruktur dan objektif dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan serta kesesuaian kandidat terhadap nilai dan budaya perusahaan sebagai bagian dari strategi pengembangan *talent pipeline*. Tahapan awal diawali dengan identifikasi talenta, yang mempertimbangkan rekam jejak kinerja historis, evaluasi kinerja, serta prestasi akademik dan non-akademik yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.

Selanjutnya, BNI melaksanakan *profiling* talenta sebagai tahapan lanjutan untuk menetapkan profil individu secara komprehensif dan terstruktur. Proses ini mengacu pada karakteristik yang mencerminkan kesiapan dan kesesuaian talenta terhadap kebutuhan organisasi, antara lain kualitas kepemimpinan, kompetensi kerja, potensi pengembangan jangka menengah dan panjang, kesiapan untuk mengemban peran yang lebih strategis, serta komitmen terhadap organisasi.

Dalam mendukung ketersediaan talenta, BNI menjalankan kerja sama dalam perekrutan *fresh graduate* dari perguruan tinggi unggulan seperti pada Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung dan lain-lain untuk menjadi calon pegawai BNI melalui program rekrutmen *Assistant Development Program* (ADP) dan *Officer Development Program* (ODP). Adapun program ODP internal merupakan jalur pengembangan dan promosi pegawai internal. BNI juga berpartisipasi dalam Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawas BUMN.

Officer Development Program
632 pegawai
Jalur rekrutmen yang bersumber dari *fresh graduate* untuk mengisi posisi setingkat officer yang memiliki independensi yang cukup dominan.

Assistant Development Program
829 pegawai
Jalur rekrutmen posisi setingkat non-officer dalam mendukung target bisnis BNI dan keberlangsungan operasional.

Officer Development Program Internal
129 pegawai
Sebagai jalur pengembangan dan promosi pegawai internal BNI menuju posisi officer.

Rekrutmen Bersama BUMN
43 pegawai
Untuk profesional dan lulusan baru.

BNI membuka peluang magang melalui Program BINA BNI bagi *fresh graduate*, Program Magenta bagi mahasiswa semester akhir yang bekerja sama dengan Kementerian BUMN, serta Program MagangHub bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman kerja praktis dan penguatan keterampilan profesional di lingkungan perbankan melalui pendekatan *on-the-job learning*. Sepanjang tahun 2026, Program BINA BNI diikuti oleh 3.983 peserta, Program Magenta BNI diikuti oleh 403 peserta, dan Program MagangHub diikuti oleh 4.178 peserta.

3.583 peserta	403 peserta	4.178 peserta
BINA BNI	Magenta	MagangHub

Program *talent pipeline* BNI bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan pegawai potensial sebagai calon pemimpin di masa depan. Pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan kinerja, manajemen talenta, dan perencanaan suksesi. Dalam proses tersebut, BNI menjunjung tinggi prinsip inklusivitas dan keberagaman dengan menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai dan kandidat tanpa diskriminasi latar belakang apapun. Informasi lebih lengkap mengenai masing-masing program rekrutmen disajikan dalam Laporan Tahunan 2026 yang diterbitkan terpisah dari laporan ini.

Perekrutan, Tingkat Retensi, dan *Turnover*

Pada 2026, BNI mencatat 1.324 pegawai yang meninggalkan perusahaan dengan berbagai alasan, termasuk pengunduran diri. Untuk menjaga keberlangsungan kinerja perusahaan, BNI mengelola sumber daya manusia dengan menerapkan berbagai upaya retensi, antara lain melalui pengelolaan hubungan industrial yang sehat, penyediaan remunerasi dan manfaat yang selaras dengan praktik industri, serta pengembangan kompetensi dan penyediaan peluang jenjang karier.

Sejalan dengan hal tersebut, BNI juga melakukan peninjauan perekrutan talenta guna memastikan keberlanjutan Bank dalam bentuk analisis proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Analisis proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan rencana pensiun pegawai, dinamika strategi bisnis dan operasional, serta estimasi tingkat perputaran pegawai.

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja

- **27.203** jumlah pegawai 2024
- **0,067%** (persentase penurunan jumlah pegawai di 2025)

Estimasi pegawai masuk di tahun 2025

- **1.556** jumlah pegawai masuk 2025
- **27.201*** jumlah pegawai 2025

Estimasi pegawai keluar di tahun 2026

- **809** jumlah pegawai keluar pensiun 2025
- **515** jumlah pegawai keluar non-pensiun

Keterangan:
*) Terdapat selisih perhitungan dari pegawai berakhir hubungan kerja karena alasan tertentu.

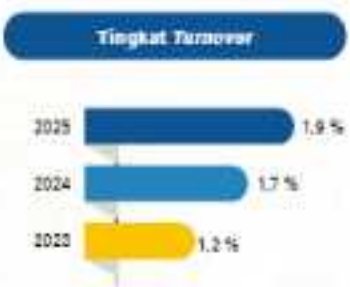

BNI menggunakan tingkat *turnover* sebagai indikator retensi pegawai. Pada 31 Desember 2026 mencatat tingkat *turnover* sebesar 1,9%, relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata industri, yang menunjukkan konsistensi penerapan strategi BNI dalam meningkatkan *employee experience*. Untuk menjaga dan memperkuat retensi tersebut, BNI memperkuat implementasi *Employee Value Proposition* (EVP) sebagai upaya membangun *a great place to contribute, learn, and grow* melalui penguatan budaya organisasi yang mendorong kolaborasi dan produktivitas, perluasan kesempatan pengembangan karier, penyediaan *reward and recognition* yang kompetitif, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, serta kepemimpinan yang memberdayakan, sehingga keterlibatan pegawai tetap terjaga dan tingkat *turnover* dapat ditekan secara berkelanjutan.

Komposisi Pegawai Baru Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (401-1)

Kelompok Usia	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
< 30 Tahun	686	846	410	430	764	790
30-50 Tahun	34	16	54	39	79	33
> 50 Tahun	10	4	12	1	13	7
Jumlah	**1.596**		**976**		**1.685**	

Komposisi Pegawai Baru Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin (401-1)

Wilayah Operasional	2025		2024		2023	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kantor Pusat	485	396	364	236	657	477
Kantor Wilayah 01	13	19	10	16	11	21
Kantor Wilayah 02	17	24	3	10	19	25
Kantor Wilayah 03	3	4	4	7	5	6
Kantor Wilayah 04	24	42	7	17	15	30
Kantor Wilayah 05	8	27	6	21	11	26
Kantor Wilayah 06	15	25	16	11	22	31
Kantor Wilayah 07	20	38	11	19	11	23
Kantor Wilayah 08	17	20	14	16	10	20
Kantor Wilayah 09	24	55	4	4	3	5
Kantor Wilayah 10	24	31	15	14	10	21
Kantor Wilayah 11	4	11	4	11	4	16
Kantor Wilayah 12	13	36	5	21	10	21
Kantor Wilayah 14	11	22	13	18	11	21
Kantor Wilayah 15	14	35	8	22	13	34
Kantor Wilayah 16	8	26	5	5	11	10
Kantor Wilayah 17	15	27	11	12	18	19
Kantor Wilayah 18	15	27	5	10	14	24
Kantor Luar Negeri (KLN)	0	0	1	0	0	0
Jumlah	**1.596**		**976**		**1.685**	

Komposisi Pegawai Keluar Berdasarkan Kelompok Usia dan Jenis Kelamin (401-1)

Kelompok Usia	2025		2024*		2023*	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
< 30 Tahun	75	122	39	98	33	100
30-50 Tahun	174	342	144	314	108	229
> 50 Tahun	369	242	176	137	380	154
Jumlah	**1.324**		**930**		**1.006**	

Keterangan:
*) Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya penambahan cakupan perhitungan (pensiun dan non-pensiun).

Komposisi Pegawai Keluar Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin [401-1]

Wilayah Operasional	2025		2024*		2023*	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kantor Pusat	181	115	91	73	110	95
Kantor Wilayah 01	24	28	13	21	32	13
Kantor Wilayah 02	37	38	21	42	26	22
Kantor Wilayah 03	27	42	28	23	30	17
Kantor Wilayah 04	48	39	18	32	27	35
Kantor Wilayah 05	27	41	11	17	19	26
Kantor Wilayah 06	18	45	27	39	37	35
Kantor Wilayah 07	30	24	16	20	34	13
Kantor Wilayah 08	20	36	23	23	16	19
Kantor Wilayah 09	42	66	28	54	35	27
Kantor Wilayah 10	18	25	4	19	18	23
Kantor Wilayah 11	21	19	14	14	13	13
Kantor Wilayah 12	17	29	12	36	18	21
Kantor Wilayah 14	15	41	7	34	23	29
Kantor Wilayah 15	22	31	12	32	21	37
Kantor Wilayah 16	13	14	4	5	5	9
Kantor Wilayah 17	32	46	27	35	27	25
Kantor Wilayah 18	30	27	27	30	31	24
Kantor Luar Negeri (KLN)	1	0	0	0	1	0
Jumlah	**1.324**		**930**		**1.006**	

Keterangan:
*) Penyajian kembali informasi (restatement) karena adanya penambahan sekupan pemikungan (pensiun dan non-pensiun).

Pengembangan Talenta

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

BNI berkomitmen untuk mewujudkan keunggulan sumber daya manusia melalui kebijakan pengembangan kompetensi yang inklusif dan berkelanjutan. BNI menjamin hak seluruh pegawai, termasuk pegawai tetap, kontrak, *trainee*, dan tenaga alih daya untuk mendapatkan akses yang setara terhadap program pelatihan dan pengembangan sesuai dengan peran dan kebutuhan masing-masing.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi tersebut dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum yang telah dituangkan pada Pedoman Perusahaan Kebijakan Human Capital BNI, serta dirancang untuk memastikan kesiapan pegawai BNI dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang. Selain itu, BNI juga menyediakan program pemagangan sebagai sarana pembelajaran yang berbasis pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pada bidang pekerjaan yang relevan, serta menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif di masa depan.

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan berdaya saing, seluruh inisiatif pengembangan kompetensi disinergikan melalui BNI University. BNI University berperan sebagai orkestrator pembelajaran yang merancang strategi pengembangan kapabilitas serta menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang selaras dengan kebutuhan bisnis BNI, termasuk penguatan kompetensi di bidang Keuangan Berkelanjutan dan ESG.

BNI menerapkan kerangka pengembangan kompetensi pegawai yang mencakup tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pengembangan Kapabilitas Berdasarkan Kategori Pegawai, yang meliputi:
   - *Employee Development*, yang difokuskan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan peran dan fungsi pada posisi saat ini; dan
   - *Talent Development*, yang ditujukan pada pengembangan pegawai berprestasi (*talent*) sebagai persiapan untuk menempati peran dan tanggung jawab yang lebih tinggi.
2. Pengembangan Kapabilitas Berdasarkan Posisi, yang disesuaikan dengan persyaratan kompetensi pada masing-masing jabatan. Pengembangan ini dilaksanakan melalui program yang bersifat wajib, tematik, dan individual, sesuai kebutuhan pegawai, baik untuk peran saat ini maupun peran di masa mendatang.
3. Pengembangan Kapabilitas Berjenjang, yang diselaraskan dengan jenjang jabatan pegawai melalui berbagai program lintas fungsi, antara lain *Leadership*, *Risk Management*, dan *Human Capital*.

Jenis dan Cakupan Program Pengembangan Talenta

BNI menetapkan jenis dan cakupan program pengembangan talenta secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan mengacu pada tujuan pengembangan yang telah ditetapkan sejalan kebutuhan bisnis perusahaan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program pembelajaran memberikan kontribusi yang relevan terhadap peningkatan kapabilitas pegawai, kesiapan kepemimpinan, dan keberlanjutan organisasi.

Program pengembangan talenta disusun untuk menjangkau berbagai jenjang jabatan dan fungsi kerja, serta diselaraskan dengan dinamika industri perbankan dan arah strategis BNI.

Program Pembelajaran untuk Meningkatkan Kapabilitas Pegawai guna Mendukung Bisnis BNI

BNI menyelenggarakan program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai dalam mendukung pencapaian kinerja dan pertumbuhan bisnis perusahaan. Program pembelajaran tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) bidang pelatihan dan pengembangan utama, sesuai dengan kebutuhan fungsi dan lini bisnis BNI.

Sepanjang tahun pelaporan, kedelapan bidang program pembelajaran mencakup *Leadership* yang diikuti oleh 3.724 peserta; *Finance & Human Capital* sebanyak 23.741 peserta; *IT, Digital & Operation* sebanyak 10.971 peserta; *Legal, Governance, Audit & Compliance* sebanyak 17.261 peserta; *Network & Services* sebanyak 11.673 peserta; *Retail Banking* sebanyak 20.004 peserta; *Risk* sebanyak 28.418 peserta; serta *Wholesale, Treasury & International Banking* sebanyak 22.865 peserta.

Cakupan pembelajaran yang luas tersebut mencerminkan komitmen BNI untuk memastikan pemerataan akses pengembangan kompetensi, sekaligus mendukung penguatan kapabilitas operasional, manajemen risiko, dan daya saing bisnis secara berkelanjutan.

Program Pembelajaran untuk Mendukung Kapabilitas Kepemimpinan

Sebagai bagian dari penguatan pengembangan talenta, BNI merancang dan melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan suksesi. Program ini bertujuan untuk memastikan kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan, serta mempersiapkan calon pemimpin BNI dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan.

Program pengembangan kepemimpinan disusun secara berjenjang (*level-based*) dan diberikan kepada seluruh jenjang pegawai sebagai bagian dari penguatan *leadership pipeline*. Setiap program dirancang dengan orientasi pada hasil, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kompetensi dan penerapannya dalam praktik kerja.

Dalam mendukung pendekatan tersebut, BNI menetapkan standar *skillset* yang spesifik untuk setiap jenjang jabatan pegawai guna membentuk pemimpin yang adaptif (*versatile leaders*), berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap keberlanjutan bisnis dan tata kelola perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan GRI 404-2

Pengembangan kompetensi kepemimpinan dilaksanakan melalui dua fase utama, yaitu Fase Orientasi (*Onboarding*) dan Fase Pengembangan (*Development*), yang disesuaikan dengan jenjang jabatan dan kategori kepemimpinan masing-masing pegawai, mencakup pegawai tetap, pegawai kontrak, dan *trainee*.

Fase Orientasi (*Onboarding*)

Fase Orientasi ditujukan untuk membekali setiap pegawai BNI yang menduduki jabatan atau peran baru di organisasi, mulai dari jenjang Entry Level hingga Board Level. Pegawai akan dibekali pemahamahan kepemimpinan sesuai dengan peran dan tanggung jawab pada masing-masing jenjang jabatan. Pada fase ini, fokus pembelajaran diarahkan pada pembentukan landasan kepemimpinan, pemahaman konteks bisnis, serta pengenalan peran kepemimpinan dalam mendukung keberlanjutan organisasi.

No.	Jenjang Jabatan	Kategori Kepemimpinan	Fokus Pengembangan	Program	Jumlah Peserta
1	BOD, BOC, dan SEVP	*Leading Business*	Program orientasi pada jenjang ini difokuskan pada pemahaman kompleksitas bisnis, kemampuan pengambilan keputusan strategis, serta peran kepemimpinan dalam memastikan pertumbuhan serta keberlanjutan organisasi.	Directorship Onboarding Program	19
2	*Experienced Hire*	*Leading Others*	Fokus pengembangnan pada kemampuan membangun hubungan yang efektif, memberikan arahan, menginspirasi tim, dan mendukung pencapaian tujuan bersama	Advanced Onboarding Training Program for Experience Hire	25
				Intermediate Onboarding Training Program for Experience Hire	39
				Basic Onboarding Training Program for Experience Hire	88
3	*Entry Level*	*Leading Self*	Pada jenjang ini, kapabilitas kepemimpinan dimulai melalui pengenalan dan pengelolaan diri, serta pemahaman atas kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai pribadi.	Officer Development Program (ODP)	697
				Assistant Development Program (ADP)	574

Fase Pengembangan (Development)

Fase Pengembangan difokuskan pada pendalaman dan penguatan kapabilitas kepemimpinan secara berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas peran dan tanggung jawab jabatan. Program pada fase ini dirancang untuk memastikan kesiapan pemimpin dalam mengelola perubahan, memimpin organisasi, serta menciptakan dampak bisnis yang berkelanjutan.

No.	Jenjang Jabatan	Kategori Kepemimpinan	Fokus Pengembangan	Program	Jumlah Peserta
1	BOD, BOC, dan SEVP	*Leading Business*	Pengembangan kepemimpinan pada level ini difokuskan pada pengambilan keputusan strategis, tata kelola perusahaan, dan penguatan peran kepemimpinan sebagai pengarah utama keberlanjutan bisnis	Board Level Leadership Program	19
2	*Senior Leaders* (BOD-1)		Program dirancang untuk memperdalam kapabilitas kepemimpinan strategis, manajemen kompleksitas bisnis, serta pengambilan keputusan berdampak tinggi.	Advanced Management Leadership Program (AMLP)	53

No.	Jenjang Jabatan	Kategori Kepemimpinan	Fokus Pengembangan	Program	Jumlah Peserta
3	*Middle Management*	*Leading Others*	Program dirancang untuk memperkuat kemampuan pemimpin menengah dalam mengelola tim, mendorong kolaborasi, serta menerjemahkan strategi ke dalam eksekusi operasional.	Middle Management Leadership Program (MMLP)	548
4	*First Line Management*	*Leading Self*	Program difokuskan pada penguatan kepemimpinan diri, pengelolaan tim operasional, serta kesiapan menjalankan peran kepemimpinan di lini terdepan organisasi.	Firstline Management Leadership Program (FMLP)	2.297

Dalam menyelenggarakan program kepemimpinan tersebut, BNI menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga pendidikan terkemuka, baik di tingkat global maupun nasional, guna memastikan kualitas pembelajaran yang relevan dengan tantangan bisnis dan kepemimpinan masa depan.

Untuk jenjang Board Level dan Senior Leaders, BNI bekerja sama dengan institusi pendidikan bisnis kelas dunia melalui kemitraan global, antara lain Harvard Business School, Wharton School, Northwestern Kellogg School of Management, Stanford Graduate School of Business, MIT Sloan School of Management, Columbia Business School, National University of Singapore (NUS), IMD, serta Emeritus. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan eksposur global, benchmark praktik terbaik internasional, serta penguatan kapabilitas kepemimpinan strategis.

Sementara itu, untuk jenjang *Middle Management* dan *First Line Management*, BNI menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan dalam negeri yang kredibel, yaitu BINUS University dan PT LAPI ITB, guna memastikan relevansi pembelajaran dengan konteks bisnis, regulasi, dan karakteristik industri perbankan nasional.

Program pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui model pembelajaran yang intensif dan imersif, dengan mengombinasikan berbagai metode pembelajaran, antara lain *interactive in-class learning, expert sharing sessions, coaching* dan *mentoring*, serta pengalaman belajar berbasis praktik melalui *action learning projects* dan penugasan nyata. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong penerapan kompetensi kepemimpinan secara langsung dalam konteks kerja.

Program Pembelajaran untuk Mendukung Persiapan Pegawai dalam Memasuki Masa Purnabakti

Dalam mendukung transisi pegawai menuju masa pensiun, BNI menyediakan program Pra Purnabakti yang dirancang untuk membekali pegawai dengan kesiapan non-teknis dan finansial. Pembekalan mencakup penguatan pemberdayaan diri, penyesuaian terhadap perubahan psikologis, penerapan gaya hidup sehat, perencanaan keuangan masa pensiun, serta pemetaan peluang usaha. Pada tahun 2025, pelaksanaan program difokuskan pada topik *Wisdom Living, Healthy Lifestyle, Financial Planning, Entrepreneur, Second Career Inspiration*, serta Hak & Kewajiban Masa Pensiun. Pada tahun 2025, program Pra Purnabakti BNI menjangkau 4.165 partisipan, yang dilaksanakan melalui metode hibrida. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.407 partisipan mengikuti pelatihan secara *in-class learning*, sementara 2.758 partisipan lainnya mengikuti program melalui webinar online.

Program Beasiswa dan Sertifikasi

BNI berkomitmen mendukung pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh pegawai dengan memberikan dukungan untuk mengejar gelar akademik maupun sertifikasi profesional. Program ini dirancang untuk memastikan kesetaraan terhadap peluang peningkatan keterampilan bagi seluruh pegawai, baik yang berstatus tetap dan kontrak.

Program Beasiswa Pendidikan

Sebagai bagian dari penguatan jalur pembelajaran jangka panjang pegawai, BNI memfasilitasi pengembangan pendidikan formal hingga jenjang pascasarjana. Kesempatan ini diberikan kepada seluruh pegawai BNI melalui dua skema pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi pegawai, yaitu:



Peserta program beasiswa pendidikan 2025

45 orang
SDP

24 orang
GPP

Self Development Program (SDP), yaitu program penggantian biaya pendidikan bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dalam negeri pada jenjang S1, S2, atau S3. Program ini terbuka bagi pegawai BNI di setiap jenjang jabatan yang memenuhi persyaratan program. Fokus bidang studi diarahkan pada kompetensi yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan bisnis BNI, seperti *business & management; information & technology; data science & artificial intelligence; economics, accounting & finance; environmental, social & governance; legal studies.*

Global Postgraduate Program (GPP), yaitu program beasiswa S2 di universitas luar negeri terbaik yang menempati peringkat 30 besar berdasarkan *QS World University Rankings*. Program ini ditujukan bagi pegawai berprestasi pada jenjang jabatan Manager (MGR) hingga Asisstant Vice President (AVP) yang memenuhi persyaratan program. Fokus bidang studi diarahkan pada *economics & econometrics; accounting & finance; master of business administration; business & management; marketing; law & legal studies; computer science & information system; data science.*

Program Sertifikasi

BNI merancang program sertifikasi untuk memastikan setiap pegawai memiliki standar kompetensi yang relevan dengan regulasi dan mendukung pelaksanaan aktivitas bisnis perusahaan. Sertifikasi di BNI dikelompokkan ke dalam dua kategori utama:

Sertifikasi Mandatory

Sertifikasi ini diwajibkan oleh regulasi bagi pegawai pada bidang kerja tertentu sebagai upaya menjaga kompetensi pegawai selaras dengan persyaratan jabatan dan tanggung jawab pekerjaannya. Hingga tahun 2025, BNI mencatat total kepemilikan sertifikasi *mandatory* sebanyak 20.240 sertifikat, mencakup dari 31 sertifikat yang dimiliki di tingkat Board Level (BOD, BOC, dan SEVP), 18.624 sertifikat dimiliki pegawai tetap, 137 sertifikat di pegawai kontrak, serta 648 sertifikat dimiliki pegawai posisi *frontliner*.

Nama Sertifikasi	Tujuan	Kriteria Jabatan	Kepemilikan Sertifikat
Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR)	Menjamin standar kompetensi pengurus dan pejabat Bank dalam manajemen risiko	Jenjang Jabatan Asisstant Manager (AMGR) sampai Board Level (BOD/BOC)	14.423
Sertifikasi terkait Penerapan Anti Fraud (CAFM & CAFG)	Memperkuat kapabilitas dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan sesuai Strategi Anti Fraud Bank	Pimpinan unit kerja yang membawahi fungsi penerapan Strategi Anti Fraud	6
Sertifikasi WPPE-P	Menjamin petugas memiliki kompetensi dalam pemasaran produk pasar modal secara transparan kepada nasabah	Pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran (Private Banking RM, Emerald RM, Emerald Acquisition RM, Personal RM)	514
Sertifikasi WAPERD	Menjamin petugas memiliki kompetensi untuk mengedukasi dan menjual produk reksa dana	Pejabat pemasar dan spesialis investasi (Emerald Head dan Investment Specialist)	40
Sertifikat PBK Sistem Pembayaran	Menjamin keahlian teknis dan kepatuhan dalam penyelenggaraan operasional transaksi sistem pembayaran	Pelaku yang mengelola transaksi dan operasional sistem pembayaran	3.115
Sertifikasi Tresuri	Menjamin profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan transaksi pasar uang dan valuta asing	Pelaku transaksi pasar uang dan/atau transaksi pasar valuta asing	142

Sertifikasi *Non-Mandatory*

Sertifikasi *non-mandatory* ditujukan untuk meningkatkan keahlian pegawai guna mendukung pelaksanaan berbagai aktivitas bisnis perusahaan secara lebih optimal. Jumlah peserta yang diberikan program sertifikasi *non-mandatory* tahun 2025 adalah 386 pegawai tetap.

Nama Sertifikasi	Tujuan	Target Peserta	Peserta
Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (CCISO, CISM, CCSP, COMPTIA CYSAs+, dan COMPTIA Security+)	Menjamin penguatan ketahanan siber melalui proteksi infrastruktur *cloud*, serta analisis ancaman teknis secara komprehensif	Pegawai yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang *cyber security*	18
Sistem Kontrol (CISA dan CRISC)	Menjamin efektivitas pengawasan, audit sistem informasi, dan pengelolaan risiko teknologi pada seluruh operasional perbankan	Pegawai yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang kontrol sistem perbankan	4
Tata Kelola & Arsitektur (COBIT 5 Foundation dan TOGAF)	Menjamin penerapan tata kelola IT dan arsitektur BNI yang selaras dengan tujuan strategis serta transformasi digital Bank	Pegawai yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang tata kelola IT dan arsitektur IT	7
Layanan & Jaringan IT (ITIL V4 Foundation dan MTCNA)	Menjamin keandalan infrastruktur jaringan serta standardisasi manajemen layanan teknologi yang efisien bagi nasabah	Pegawai yang memiliki peran dan fungsi dalam bidang infrastruktur jaringan dan layanan teknologi	9
Audit (CBIA, Sertifikasi Audit Intern Bank, dan Sertifikasi IT Auditor)	Menjamin kualitas pengawasan internal khusus sektor perbankan guna memastikan pemenuhan kepatuhan dan pengendalian yang *prudent*	Pegawai yang memiliki fungsi melakukan audit internal	112
Trade Finance (CITF CertPay, CSDG, dan CGCF)	Menjamin penguasaan standar operasional dan aspek teknis pembiayaan perdagangan internasional (ekspor-impor) secara global	Department Head pada Unit Supply Chain Financing Product Development dan Wholesale Transaction Product Specialist Department	25
Certified Contract Drafter	Menjamin keakuratan pegawai dalam menyusun, menalaah, dan memastikan kualitas kontrak bisnis yang kuat secara hukum, mitigatif terhadap risiko, serta selaras dengan kepentingan dan tata kelola perusahaan	Pegawai Legal atau yang secara langsung menyusun perjanjian/kontrak kerja sama	27
Sertifikasi Kepatuhan Perbankan	Menjamin dalam penerapan fungsi kepatuhan secara efektif guna memastikan kegiatan usaha bank berjalan sesuai regulasi, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik	Pegawai pada unit kepatuhan	18
Sertifikasi Anti Money Laundering (CAMS, APU PPT & PPPSPM)	Menjamin dalam penerapan program APU PPT dan PPPSPM secara komprehensif guna mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	Pegawai yang memiliki fungsi terkait penerapan APU PPT & PPPSPM	23

Nama Sertifikasi	Tujuan	Target Peserta	Peserta
Sertifikasi Praktisi Hukum dan Penyelesaian Hubungan Industrial	Menjamin pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengelola hubungan industrial serta menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan secara tepat, adil, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pegawai yang memiliki fungsi dalam hal mengelola hubungan kepegawaian	22
Sertifikasi Governance, Risk, and Compliance (GRCM, GRCE, CCCO)	Menjamin penguasaan pengintegrasian aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara menyeluruh guna mendukung pengambilan keputusan yang berprinsip dan berkelanjutan	Pegawai yang memiliki fungsi terkait dengan tata kelola	15
Manajemen Risiko (ERMAP, CCRA, GRCP, IRMP, IAIP, IPMP, ICEP, CRISC)	Menjamin pemahaman dan keterampilan pegawai dalam manajemen risiko	Pegawai yang memiliki fungsi terkait manajemen risiko	55
Sertifikasi ESG (ISSB Standards)	Menjamin pemahaman dan keterampilan pegawai terkait penerapan ESG	Pegawai yang memiliki fungsi terkait penerapan ESG	2

Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan

Sebagai wujud komitmen terhadap keuangan berkelanjutan, BNI mengembangkan modul pelatihan yang dirancang untuk membangun pemahaman pegawai mengenai isu dan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta prinsip keberlanjutan dan keuangan berkelanjutan. Pengembangan modul dilakukan melalui kolaborasi dengan *subject matter expert*, konsultan, dan pihak berkompeten lainnya, sehingga pegawai memiliki kapasitas untuk memahami konsep keberlanjutan, mengelola risiko LST, serta menganalisis laporan keberlanjutan perusahaan.

Pada akhir periode pelaporan, 97,0% pegawai BNI atau sebanyak 26.143 pegawai telah mengikuti program pengembangan kompetensi keuangan berkelanjutan melalui *e-Learning Mandatory Sustainability Finance*. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), yaitu pengembangan kompetensi bagi 93,5% pegawai hingga tahun 2026.

Selain *Sustainability Finance*, program *e-Learning Mandatory* yang diikuti oleh pegawai BNI secara keseluruhan mencakup sembilan topik pembelajaran, yaitu:



Pada tahun 2025, partisipasi pegawai dalam kegiatan *mandatory webinar* tercatat sebanyak 37.733 pegawai, yang meliputi pegawai tetap, kontrak, *trainee*, dan tenaga kerja alih daya. Kegiatan ini melengkapi program *e-learning mandatory* sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pegawai. Topik *mandatory webinar* yang diselenggarakan, antara lain:

1. BNI *Inspiring Talk BOD* - Akar, Nilai, dan Perjalanan Hidup Sang Penjaga Integritas
2. BNI *Road to Zero Waste - Lets Sort, Recycle, and Reuse*
3. *Compliance Forum*: Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi
4. *Early Warning Systems - Detecting and Preventing Liquidity Risks*
5. *ESG - Understanding Sustainability Financing*
6. *Foundation of Digital Leadership - Adapting to Digital Transformation in Banking*
7. *Governance, Risk & Compliance (GRC) Webinar Series*
8. Membangun Budaya Anti Korupsi dalam Jaringan Komitraan Bisnis
9. *Operational Risk - Protecting the Organization through Effective Risk Governance*
10. Penguatan *Anti Fraud Awareness* melalui Penerapan POJK No. 12 Tahun 2024 bagi LJK
11. Persiapan dan Panduan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2025 melalui Coretax DJP
12. *Risk Management - Dive into Sustainability Disclosure*
13. *Servant Leadership - Inspiring People through Service and Authenticity*
14. Sosialisasi 8 Wonders - *Soft Competency* Wajib bagi BNI Hi-Movers
15. Pelindungan Data Pribadi *Webinar Series*
16. *Strategic Digital Leadership - Digital Marketing and Business Growth Optimization*
17. *Leadership Accelerator Essentials - Growing Your Business "Elevating Business Performance through Market Expansion"*

Pada tahun 2025, BNI juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi keberlanjutan yang ditujukan bagi divisi yang terkait dengan pengelolaan keberlanjutan. Pelatihan dan sertifikasi tersebut, meliputi topik:

a. *Green House Gas (GHG) Caculation, Mitigation, Audit, & Reporting* yang diikuti oleh 2 pengelola ESG;
b. *Workshop* Implementasi IFRS S1 & S2 yang diikuti oleh 19 pegawai Enterprise Risk Management Division, Operational Risk Management Division, dan divisi terkait lainnya; Sertifikasi International Sustainability Standards Board (ISSB) yang diikuti oleh 2 pengelola ESG;
c. *Executive Forum on Sustainability Transformation in Action* yang diikuti oleh 2 pengelola ESG;
d. *Climate Governance Bootcamp* serta *Leadership Roundtabel Discussion* yang diikuti oleh 2 pegawai Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) Hongkong

Penguatan kapasitas kepemimpinan dalam isu keberlanjutan di BNI juga dilakukan pada Board Level. Sepanjang periode pelaporan, 13 anggota Direksi dan 8 anggota Dewan Komisaris mengikuti berbagai forum dan pelatihan yang dirancang untuk memperdalam perspektif strategis terkait keberlanjutan, tata kelola, dan transformasi bisnis. Materi yang diikuti mencakup:

a. Compliance Forum: Pengambilan Keputusan berdasarkan Prinsip *Business Judgement Rule* dalam Rangka *Good Corporate Governance* dan Anti Korupsi;
b. *Jakarta Sustainability Investment Forum: Advancing Sustainability for Top 20 Global City;*
c. *Navigating Global Dynamics: The Resilience of Indonesia's Economic and Financial Systems;*
d. *Leadership Forum: Indonesia's Oil & Gas Future;*
e. *Master Class Compliance Management (CRMS);*
f. *Executive Competency Enhancement: Risk, Governance & Compliance;*
g. *The Cross Border Payment Landscape, Economic Outlook, Industry Development, Future Proofing Trade Operation, Compliance Overview and Best Practice, Cyber and Fraud Protection;*
h. *International Conference on Infrastructure 2025: Sustainable Infrastructure for the Future - Innovation and Collaboration;*

i. *Economy Mastery Forum 2026: Unlock Opportunities in Global Economic Changes;*
j. *BNI ESG Sustainability & Transition "BEST" Event.*

Di samping keikutsertaan dalam pelatihan, peran Direksi dan Dewan Komisaris BNI dalam agenda keberlanjutan juga diwujudkan melalui kontribusi pemikiran pada forum eksternal. Sepanjang tahun 2026, pimpinan BNI berpartisipasi sebagai narasumber dalam 15 sesi diskusi dan pelatihan, yang ditujukan untuk memperluas pemahaman pemangku kepentingan mengenai tantangan dan peluang keberlanjutan di sektor keuangan. Kontribusi tersebut mencakup penyampaian materi, di antaranya BRICS Women's Entrepreneurship Forum - peran BNI dalam mendukung UMKM perempuan melalui digitalisasi; Forum Management Risiko terkait ESG; Pembiayaan Hijau *(Green Financing)*; CNBC Talkshow segmen Money Talk - Perlindungan Konsumen; Digitalisasi dan Edukasi Finansial Perbankan; CNBC Talkshow segmen Money Talk - Kesiapan BNI terhadap Kondisi Bencana dan Operasional Akhir Tahun; *Women Leaders in Fintech and Banking Roundtable: Shaping the Future of Innovation*; Edukasi Keuangan; Konferensi Nasional Peningkatan Nilai Tambah Regem Keunggulan Daerah melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan; *Wise Connect Singapore 2026: The Future of Retail - Designing Experiences, Not Just Transactions*; Perkembangan AI di Perbankan; *Shaping Character, Leading the Nation.*

BNI mengembangkan ekosistem pembelajaran digital yang terintegrasi untuk memastikan pengembangan kompetensi pegawai berjalan dengan adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Ekosistem pembelajaran digital yang digunakan adalah BNI Smarter, sebuah Learning Management System (LMS) yang menjadi pusat akses seluruh materi pengembangan bagi pegawai BNI. Melalui pemanfaatan teknologi ini, BNI berhasil menciptakan budaya belajar mandiri (*self-driven learning*) yang mendukung transformasi digital Bank secara menyeluruh.

Pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran di BNI berupa: program *e-learning mandatory*, yang hasilnya dilaporkan secara berkala kepada regulator sebagai bentuk kepatuhan; *Daily Exercise Employee Program* (DEEP45) yang merupakan program pembelajaran dengan format kuis singkat harian untuk memastikan pemahaman berkelanjutan atas topik-topik krusial; akses ke platform pembelajaran digital pihak ketiga berskala internasional, seperti GoFluent, LinkedIn Learning, Coursera, Udemy, dan Moody's; serta pemanfaatan kanal YouTube BNI University untuk menyelenggarakan webinar pembelajaran yang dapat diakses secara fleksibel oleh seluruh pegawai. Seluruh kegiatan pelatihan pegawai BNI dikelola dan diawasi oleh BNI University serta didokumentasikan dalam Integrated Human Capital System (IHCS).

Data Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai

Pada tahun 2026, BNI mengalokasikan dana sebesar Rp192,8 miliar untuk pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai. Program ini diikuti oleh 20.937 pegawai dari seluruh jenjang jabatan, mulai dari *new entry* hingga level eksekutif, serta mencakup seluruh status kepegawaian. Rata-rata frekuensi pelatihan tercatat 16 kali untuk pegawai tetap, 11 kali untuk pegawai kontrak, dan 12 kali untuk *trainee*.

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Jenis Kelamin (Jam)

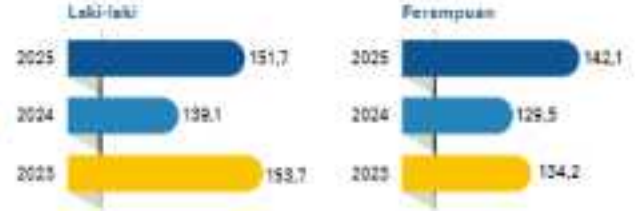

Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Level Jabatan dan Jenis Kelamin [404-1]

Level Jabatan	Pegawai yang Mengikuti Pelatihan		Jam Pelatihan Setahun		Rata-rata Jam Pelatihan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
≥ Senior Vice President *)	93	31	7.135,4	2.083,2	76,7	67,2
Vice President	211	78	22.800,5	7.935,2	108,1	101,7
Assistant Vice President	861	432	128.018,9	63.400,3	148,7	146,8
Manager	2.244	1.702	311.608,3	242.058,5	138,9	142,2
Assistant Manager	5.490	5.728	1.076.353,5	1.014.569,1	196,1	177,1
≤ Assistant **)	3.988	6.079	408.895,5	665.981,1	102,5	109,6
Jumlah	**26.937**		**3.950.839,5**		**146,7**	

Keterangan:
Data yang tersaji meliputi dari kategori pegawai tetap, kontrak, dan trainee-ertif dini, di luar pegawai dalam masa persiapan pensiun, cuti di luar tanggungan, istirahat sakit, dan perugasan di luar BNI sebanyak 354 pegawai.
*) Terdiri atas: Senior Vice President, Executive Vice President, dan Senior Executive Vice President.
**) Terdiri atas: Assistant dan Pegawai Dasar

BNI secara konsisten menyelenggarakan pelatihan kebijakan penagihan sebagai bagian dari penguatan aspek kepatuhan dan etika bisnis. Pada tahun 2026, pelatihan tersebut dilaksanakan melalui berbagai metode, termasuk *in-class training* (*online* dan *offline*) serta webinar, dengan metode pembelajaran interaktif untuk memastikan pemahaman pegawai yang memadai dan berkelanjutan.

Program pelatihan tersebut diikuti oleh pegawai yang berperan langsung sebagai pelaksana penagihan, baik pegawai BNI maupun pihak ketiga jasa penagihan untuk memastikan pemahaman dan penerapan kebijakan penagihan secara konsisten, patuh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelatihan terkait Kebijakan Penagihan Utang Tahun 2026

Nama Pelatihan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Jam Pelatihan	Jumlah Peserta	Cakupan Peserta			Frekuensi Pelatihan (dalam 1 Tahun)
				Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Mitra/ Vendor	
Agency Recovery Meeting Jakarta	*Offline*	24	248	v	x	v	12 Kali
Agency Recovery Meeting Non-Jakarta	Zoom	288	1.495	v	x	v	12 Kali
Etika Penagihan & Hukum Debt Collecting	*In Class Training*	4,5	57	v	v	x	1 Kali
Pelatihan Teknik Negosiasi & Etika Penagihan	Zoom	160	1.936	v	v	x	20 Kali
Pelatihan Onboarding Asisten Colllection	Zoom	35	49	x	v	x	1 Kali
Pelatihan Onboarding Supervisor Colllection	*In Class Training*	35	25	v	x	x	1 Kali
Pelatihan Restrukturisasi	*In Class Training*	16	137	v	v	x	4 Kali
Penyelesaian Kredit LaR - Strategi Efektif dalam Memulihkan Aset	Webinar	1,3	109	v	v	x	1 Kali

Evaluasi Kinerja Pegawai [GRI 404-3]

Performance cycle di BNI merupakan siklus pengelolaan kinerja yang berkelanjutan dan menjadi dasar dalam pengelolaan kinerja pegawai. Siklus ini terdiri atas *Goal Setting* untuk penetapan sasaran kinerja, *Performance Driving* untuk mendorong pencapaian kinerja, serta *Performance Evaluation* sebagai sarana evaluasi kinerja pegawai. Penerapan siklus ini bertujuan untuk mendukung pencapaian strategi dan kinerja bisnis BNI.

Pada tahun 2026, 100% pegawai telah menyelesaikan tinjauan kinerja, penetapan tujuan, dan evaluasi guna mendukung pengembangan kinerja serta pencapaian target melalui berbagai mekanisme evaluasi. Evaluasi kinerja pegawai dikelola oleh Divisi Human Capital Strategy dan Divisi Human Capital Services.



Penilaian Kinerja Individu

Metode *Self assessment*
Frekuensi 1x setahun



Multirater 360

Metode 360 *degrees survey*
Frekuensi 1x setahun



One-on-One Discussion with Line Manager

Metode One-on-one
Frekuensi 1x setahun

Penilaian kinerja mengacu pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) individu dan dilaksanakan dengan memastikan tidak adanya praktik diskriminasi jenis kelamin, suku, ras, agama, dan golongan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM). Dalam mendukung penguatan *performance culture*, BNI menerapkan penilaian kinerja secara menyeluruh bagi seluruh pegawai. Untuk divisi tertentu, penilaian kinerja turut memasukkan aspek keberlanjutan, termasuk pada Divisi Enterprise Risk Management dengan indikator yang mencakup kinerja portofolio hijau, ESG Framework, dan ESG Rating BNI. Sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas, 360 *degrees survey multirater* melibatkan berbagai pihak yang memiliki interaksi kerja langsung dengan pegawai, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan.

Dalam rangka mendorong pengembangan berkelanjutan, BNI menerapkan budaya *continuous feedback* melalui diskusi *One-on-One* pada awal tahun pascapenilaian kinerja. Diskusi ini digunakan untuk menyusun *Individual Development Plan* (IDP) sebagai rencana pengembangan pegawai sepanjang tahun. Selanjutnya, hasil penilaian kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemberian *reward* dan remunerasi, pengembangan kapabilitas, serta perencanaan karier, termasuk penetapan kelayakan pegawai untuk mengikuti program promosi atau kenaikan jabatan berdasarkan kriteria objektif komite kepegawaian. Sebagai bentuk komitmen BNI dalam menyempurnakan pengelolaan kinerja dan pengembangan pegawai, proses pemberian umpan balik kepada pegawai dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi melalui platform DigiHC, sehingga proses pemantauan kinerja, pengembangan, dan tindak lanjut dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Kesejahteraan dan Perlindungan Pegawai

Menghormati HAM dan Keberagaman

[3-2, 406-1, 408-1]

BNI memiliki Pedoman Perusahaan (PP) Human Capital yang mengacu pada UU No. 6 Tahun 2023 dan menjadi rujukan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur tentang prinsip-prinsip ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, BNI memastikan tidak adanya praktik kerja paksa dan pekerja anak, termasuk di tahun 2026. Dalam implementasinya, pelaksanaan kerja lembur dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pegawai dan pimpinan perusahaan untuk pekerjaan yang bersifat mendesak, dengan tetap memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja (*work–life balance*) serta pemenuhan ketentuan usia minimal bekerja sesuai regulasi.

Kesempatan Karier bagi Pegawai Disabilitas

BNI menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kompetensi dan keterampilan individu dalam penempatan posisi dan penugasan pekerjaan. Penerapan prinsip ini dilakukan secara konsisten di seluruh lingkungan BNI, termasuk anak perusahaan dan afiliasi terkonsolidasi, sejalan dengan komitmen terhadap kesetaraan gender dan inklusivitas. Untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja, BNI menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti lift, area parkir dan toilet khusus, akses ramp, kursi roda, serta alat bantu mobilitas lainnya. Pada tahun 2026, BNI mempekerjakan 22 pegawai disabilitas.

Meningkatkan Peran Perempuan di Level Manajerial

Perusahaan memperkuat pengembangan karier talenta perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada level kepemimpinan, khususnya Assistant Vice President (AVP) ke atas. Upaya ini dijalankan melalui *Talent Acceleration Career Track* (TACT) sebagai jalur percepatan karier berbasis kinerja, kompetensi, dan potensi, sekaligus bagian dari penguatan *pipeline* suksesi bagi peran-peran strategis. Melalui TACT, talenta perempuan yang berpotensi dipersiapkan secara lebih terarah melalui eksposur, pengembangan kapabilitas, dan pemantauan kesiapan jabatan, sehingga mendorong peningkatan proporsi perempuan di level pimpinan dalam beberapa tahun terakhir.

Perempuan yang menduduki posisi pimpinan (%) [405-1]



Sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan yang setara, termasuk cuti haid, fasilitas *daycare*, cuti melahirkan, *employee assistance program* (EAP) untuk mendukung kesehatan fisik, mental, dan finansial pegawai, penyediaan ruang menyusui di setiap gedung, serta pengaturan kerja fleksibel. Penerapan kebijakan tersebut mencerminkan komitmen Perusahaan dalam memprioritaskan kesetaraan, keadilan, dan penciptaan lingkungan kerja yang inklusif.

Dalam rangka mendorong pengembangan karier yang setara dan berbasis kompetensi serta kinerja, BNI memoentuk Srikandi BNI sebagai wadan strategis untuk mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemberdayaan pegawai perempuan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen BNI dalam mengimplementasikan semangat kepemimpinan perempuan yang mengedepankan nilai *caring, inspiring,* dan *collaboration*, yang relevan bagi penguatan organisasi. Kehadiran Srikandi BNI dinarapkan dapat mendorong pegawai, khususnya perempuan, untuk saling mendukung serta meningkatkan kapabilitas personal dan profesional.

Sepanjang tahun 2025, Srikandi BNI menyelenggarakan rangkaian kegiatan inspiratif dan edukatif, antara lain "WOTD: Westra of the *Day Challenge*" dalam rangka Hari Kartini untuk mendorong apresiasi budaya dan kebersamaan unit, serta *Women in Celebration Week* dalam rangka Hari Ibu yang menghadirkan *talk show* bersama pemimpin dan praktisi, sekaligus penguatan dukungan UMKM yang dikelola oleh perempuan melalui aktivitas seperti *Glow & Grow Market*. Selain itu, Srikandi BNI juga memperkuat *wellbeing* dan ketahanan pegawai melalui berbagai sesi *health talk* dan diskusi tematik, termasuk topik pola hidup sehat, keseimbangan karier dan *wellbeing*, kesehatan mental, serta dukungan bagi orang tua bekerja, sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang inklusif dan memberdayakan.

Serikat Pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) [3-3(b), 407-1]

Dalam rangka membangun hubungan industrial yang sehat serta menjamin hak kebebasan berserikat dan berkumpul bagi seluruh pegawai, BNI melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menjalin komunikasi berkala dengan Serikat Pekerja (SP) melalui forum komunikasi bersama antara Manajemen dan SP.
2. Menanggapi masukan dari SP secara responsif sebagai bagian dari mekanisme dialog dan kemitraan hubungan industrial.
3. Menerapkan komunikasi yang terbuka dan transparan guna mencegah dan/atau menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara konstruktif.
4. Memberikan izin meninggalkan pekerjaan pada waktu tertentu bagi pengurus SP untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya sebagai SP namun tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
6. Memberikan bantuan finansial maupun non-finansial kepada SP dalam melaksanakan aktivitasnya.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024–2026 merupakan hasil kesepakatan antara Manajemen dan Serikat Pekerja (SP) yang disusun berdasarkan semangat kemitraan, kebersamaan, dan asas kekeluargaan, serta mengatur hubungan kerja dan hak serta kewajiban yang berlaku bagi seluruh (100%) pegawai BNI.

Mekanisme Penyampaian Keluhan Pegawai

Pengaduan pelanggaran hukum, kebijakan internal, maupun kode etik Perusahaan dapat disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang dikenal sebagai "WBS to CEO" yang dikelola secara independen oleh pihak eksternal dan berada di bawah pengawasan Direksi BNI. Sementara itu, keluhan pegawai tentang hubungan kerja dapat disampaikan melalui atasan langsung atau sarana komunikasi resmi BNI, termasuk *call center* dan *email*, serta difasilitasi oleh Serikat Pekerja untuk diteruskan kepada pimpinan Perusahaan secara berjenjang.

Remunerasi dan Manfaat Lainnya bagi Pegawai [3-3(b), 401-2, 401-3, 405-2]

BNI menerapkan kebijakan remunerasi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan daya saing pasar. Sistem remunerasi dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerja memperoleh imbalan yang sepadan

dengan kontribusi, tanggung jawab jabatan, serta pencapaian kinerja, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, latar belakang, maupun status kepegawaian. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kategori pekerja, baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak, sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh BNI.

BNI menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja (*performance-based remuneration*) dengan pendekatan meritokrasi (*merit-based increase*), kenaikan penghasilan diberikan berdasarkan pencapaian individu. Penetapan remunerasi mempertimbangkan aspek, antara lain klasifikasi jabatan bobot dan kompleksitas pekerjaan, masa kerja, kompetensi, serta hasil evaluasi kinerja tahunan. Pendekatan ini memastikan bahwa remunerasi diberikan secara objektif, terukur, dan transparan.

Untuk menjamin daya saing di industri, BNI secara rutin setiap tahun mengikuti *Salary Survey* yang diselenggarakan oleh konsultan independen. Survei tersebut mencakup proyeksi inflasi dan kenaikan gaji, tren remunerasi industri, serta struktur remunerasi sesuai industri, termasuk industri perbankan nasional. Hasil survei ini digunakan sebagai referensi dalam melakukan evaluasi serta penyesuaian gaji, tunjangan, *benefit*, dan *reward*, sehingga remunerasi BNI tetap kompetitif dibandingkan dengan *peer group* perbankan, baik BUMN maupun swasta nasional.

BNI memastikan seluruh pekerja menerima upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten di setiap unit kerja BNI. BNI juga memberikan benefit tambahan untuk mendukung kesejahteraan pekerja, dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan dan aksesibilitas pegawai di unit penempatan dengan *homebase*-nya. Dengan demikian, struktur remunerasi tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga adaptif terhadap kondisi ekonomi regional.

Selain kompensasi finansial, BNI juga memberikan *benefit* terkait kesejahteraan pekerja melalui manfaat non-upah bagi pegawai tetap dan pegawai kontrak di seluruh wilayah operasional BNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di antaranya sebagai berikut:

Pemberian Manfaat Non-Upah di BNI

Jenis Manfaat	Nama Program	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak
Asuransi jiwa	BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Jaminan Kematian, Santunan Duka	Ya	Sesuai isi Perjanjian
Fasilitas kesehatan	BPJS Jaminan Kesehatan, Asuransi Swasta BNI Life	Ya	Sesuai isi Perjanjian
Tanggungan kecacatan dan ketidakmampuan	BPJS Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Jaminan Kesehatan, Asuransi Swasta BNI Life	Ya	Sesuai isi Perjanjian
Program pensiun	Dana Pensiun BNI, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BNI, Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP) BNI	Ya	Sesuai isi Perjanjian
Cuti	Cuti melahirkan, cuti mendampingi istri melahirkan, cuti tahunan termasuk cuti wajib/block leave (cuti 3 hari berturut-turut), cuti di luar tanggungan, serta izin tidak masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Ya	Sesuai isi Perjanjian

Pelaksanaan remunerasi pegawai di BNI berada dalam pengawasan Dewan Komisaris, antara lain melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dan/atau rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan remunerasi ditetapkan dalam HC Policy yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sementara ketentuan dan prosedur pelaksanaannya diputuskan oleh Direksi.

Hak Cuti dan Perlindungan bagi Pegawai

BNI memberikan manfaat lainnya yang diberikan kepada seluruh pegawai adalah hak cuti yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 27 hingga Pasal 33, yang mencakup cuti tahunan, cuti besar, cuti haid, cuti melahirkan dan keguguran, cuti di luar tanggungan, izin menjalankan kewajiban beragama, istirahat sakit dan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hak cuti melahirkan bagi pegawai perempuan diberikan selama 3 bulan, termasuk pada kondisi keguguran atau *abortus provocatus*, dengan jaminan pengembalian status dan hak kerja. Pegawai laki-laki pun diberikan izin 2 hari kerja untuk mendampingi istri melahirkan pendampingan. Dalam kondisi khusus, diberikan tambahan cuti bagi ibu yang melahirkan hingga 3 bulan dan tambahan izin tidak masuk kerja bagi suami hingga 3 hari kerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Selama tahun 2025, hak cuti melahirkan dimanfaatkan oleh 624 pegawai perempuan, sementara sebanyak 642 pegawai laki-laki menggunakan izin tidak masuk untuk mendampingi istri yang melahirkan. Seluruh (100%) pegawai perempuan yang telah menyelesaikan cuti melahirkan kembali bekerja pada jabatan yang sama, dan 100% pegawai laki-laki yang menggunakan izin tidak masuk untuk mendampingi istri yang melahirkan juga telah kembali bekerja.

Data Cuti Melahirkan (Orang) GRI 401-3

Uraian	Jenis Kelamin	2025	2024	2023
Jumlah pegawai yang berhak menerima cuti melahirkan dan izin tidak masuk untuk mendampingi istri melahirkan.*)	Laki-laki	7.080	6.881	6.698
	Perempuan	7.080	7.162	7.098
Jumlah pegawai yang mengambil cuti melahirkan dan izin tidak masuk untuk mendampingi istri melahirkan.	Laki-laki	642	809	853
	Perempuan	624	1.092	849
Kembali setelah mengambil cuti melahirkan dan izin tidak masuk untuk mendampingi istri melahirkan.	Laki-laki	642	809	853
	Perempuan	624	1.092	849
Tingkat persentase pegawai yang mengambil cuti melahirkan dan izin tidak masuk untuk mendampingi istri melahirkan telah kembali bekerja dan dapat dipertahankan.	Laki-laki	100%	100%	100%
	Perempuan	100%	100%	100%

Keterangan: *) Pegawai dan pasangan pegawai yang sudah menikah dan memiliki usia produktif melahirkan.

Program Insentif Jangka Panjang

BNI menerapkan Program Kompensasi Jangka Panjang berbasis kinerja sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Manajemen dan pegawai, sekaligus untuk memastikan keberlanjutan kinerja Perusahaan. Program ini dilaksanakan melalui skema kepemilikan saham, yaitu *Management Stock Ownership Program* (MSOP), *Employee Stock Allocation* (ESA), dan *Performance Stock Bonus Program*. Kebijakan ini bertujuan mendorong kinerja berkelanjutan serta menyelaraskan kepentingan pegawai dengan tujuan Bank.

Employee Stock Allocation (ESA)

Program pemberian alokasi saham kepada pegawai yang memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Program. Program *Employee Stock Allocation* (ESA) dilaksanakan sejak tahun 2022 sebanyak 102.462.320 lembar dengan pembukaan *lock up period* secara bertahap selama 5 tahun sampai dengan tahun 2026.

Performance Stock Bonus Program

Dalam rangka peningkatan kinerja tabungan, Manajemen memberikan *reward* sebagai *performance booster* untuk peningkatan pertumbuhan tabungan berupa program kepemilikan saham kepada pegawai jenjang manajerial serta pemimpin unit terkecil (Sub Branch Manager) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, dengan alokasi saham diberikan untuk peningkatan kinerja tabungan. Program ini tidak berjalan di tahun 2025, adapun pada tahun 2024 terdapat pembagian sebanyak 24.877.600 lembar saham.

Management Stock Ownership Program (MSOP)

Management Stock Ownership Program (MSOP) merupakan program pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja yang berpedoman pada POJK No. 45/2015 dan Permen BUMN No. 3/2023. Program ini ditujukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Non Independen, sementara Komisaris Independen diberikan dalam bentuk kompensasi tunai. Pada tahun 2023 dan 2024 terdapat pemberian masing-masing sebanyak 1.816.099 dan 12.776.954 lembar saham. Adapun pada tahun 2025 belum terdapat alokasi MSOP dan masih menunggu kebijakan serta penetapan dari Danantara.

Insentif berbasis kepemilikan saham melalui ESA yang berlangsung dari tahun 2022 secara bertahap hingga tahun 2026 telah mencakup 90% total pegawai BNI, sedangkan dalam bentuk MSOP pada tahun 2024 telah menyasar kepada 100% penerima yaitu Direksi dan Komisaris Non Independen. Di masa mendatang, Bank BNI berkomitmen untuk terus menjalankan program kepemilikan saham ini, dengan cakupan yang disesuaikan untuk pegawai dan manajemen sesuai kebijakan dan penetapan dari Danantara. Pembahasan lebih detail terkait ESA, *Performance Stock Bonus Program*, dan MSOP dapat dilihat di Laporan tahunan pada bagian Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja.

Program Masa Pensiun (401-3)

Berdasarkan ketentuan PKB Pasal 62 hingga Pasal 66, BNI menyelenggarakan program masa pensiun sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan pascapensiun bagi pegawai yang telah berkontribusi dan berkembang bersama Perusahaan, yang meliputi sebagai berikut:

Program Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Program persiapan menghadapi masa pensiun normal bagi pegawai yang mulai dapat dilaksanakan 1 tahun sebelum masa pensiun normal, di mana pegawai yang bersangkutan tidak aktif bekerja di BNI namun tetap diberikan penghasilan secara penuh.

Program Pensiun dengan pola:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP): Berlaku bagi pegawai yang diangkat menjadi pegawai tetap sebelum 1 September 2006. Program ini didanai melalui iuran sebesar 7,6% dari penghasilan dasar pensiun yang ditanggung pegawai, serta kontribusi perusahaan berdasarkan perhitungan aktuaria.
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP):
   a. Berlaku bagi pegawai tetap yang diangkat sebelum 1 September 2006. Beban iuran pegawai sebesar 0,8% dari total penghasilan, sementara Perusahaan memberikan kontribusi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing pegawai.
   b. Berlaku bagi pegawai tetap yang diangkat sejak 1 September 2006. Beban iuran pegawai sebesar 3,8% dari total penghasilan, sementara perusahaan memberikan kontribusi sebesar 11,8% dari total penghasilan.

Program Dana Kesehatan Masa Pensiun (DKMP)

Program pendanaan yang bersifat iuran pasti untuk membantu persiapan manfaat kesehatan pegawai dan pasangan pada masa pensiun, yang dipersiapkan sejak masa aktif sampai dengan usia pensiun dengan sasaran manfaat berupa BPJS Kesehatan dan fasilitas *Cash Plan*.

Program Jaminan Sosial Wajib

Di luar program internal, BNI juga mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang mencakup antara lain Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sebagai bagian dari perlindungan masa pensiun sesuai ketentuan pemerintah.

Wellbeing Culture Program

BNI mendukung pelaksanaan *employee wellbeing program* sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan kesehatan pegawai. Implementasi program ini mengacu pada SE BUMN No. SE-1/MBU/01/2024 tentang Employee Wellbeing Policy (EWP) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dengan mempertimbangkan peran strategis pegawai dalam pencapaian visi dan misi Perusahaan.

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, BNI menerbitkan Employee Wellbeing Guidebook sebagai panduan bagi pimpinan dan pegawai dalam memahami pentingnya kesejahteraan di lingkungan kerja. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan BNI terhadap *employee wellbeing program* untuk menciptakan lingkungan kerja yang menjadi kebanggaan pegawai dan mendorong pencapaian kinerja.

Melalui penguatan *Employee Wellbeing*, BNI menargetkan peningkatan ketenibatan pegawai yang berkontribusi pada produktivitas organisasi.

Program-program *Employee Wellbeing* yang diinisiasi, antara lain:

BNI *Steps Challenge*

BNI *Steps Challenge* merupakan inisiatif unggulan *Well-Being* BNI dalam implementasi Employee Well-Being Policy (EWP), yang diselenggarakan bersama keluri melalui tantangan pencatatan dan pengumpulan langkah harian untuk membangun kebiasaan hidup aktif secara berkelanjutan, memperkuat kesehatan dan produktivitas pegawai, serta menumbuhkan budaya kerja yang lebih sehat, energik, dan positif di lingkungan BNI.

Komunitas BNI (40Society)

BNI memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pegawai melalui berbagai komunitas yang tergabung dalam 40Society. Komunitas ini mencakup bidang olahraga, seni, dan hobi lainnya, serta menjadi wadah interaksi sosial yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah BNI Football League 2025, yang menghadirkan ruang partisipasi dan kolaborasi antar unit melalui kegiatan olahraga, sekaligus mendorong kebugaran, kebersamaan, dan semangat sportivitas di lingkungan kerja.





Panduan Pakaian Kerja BNI Professional Style – *"Suit Up, Stand Out, Win the Market"*

BNI memperbarui panduan pakaian kerja sebagai bagian dari penguatan budaya profesionalisme dan representasi institusi, selaras dengan transformasi organisasi menuju standar kerja yang lebih adaptif dan berkelas dunia. Panduan ini mendukung konsistensi penampilan kerja yang rapi dan profesional, serta meningkatkan kepercayaan diri pegawai dalam memberikan layanan dan berinteraksi dengan nasabah.

***Medical Check Up* Pegawai (Klinik SWAMED)**

Sebagai bagian dari penguatan program *employee wellbeing*, BNI memfasilitasi kegiatan *medical check up* bagi pegawai bekerja sama dengan Klinik SWAMED. Program ini ditujukan untuk mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini kondisi kesehatan, sehingga pegawai dapat menjaga kebugaran dan kesehatan kerja secara berkelanjutan.

BNI menginisiasi BNI *Holistic Employee Wellbeing Program* sebagai pendekatan dalam pengelolaan kesejahteraan pegawai. Program ini difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu kesehatan mental dan fisik, kesehatan finansial, serta kesehatan sosial, sejalan dengan pemahaman BNI bahwa *wellbeing* pegawai merupakan aspek penting dalam mendukung pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan.



Employee Assistance Program 2.0

Sebagai bagian dari penguatan pendekatan *wellbeing* yang lebih adaptif, BNI mengembangkan EAP 2.0 sebagai layanan dukungan profesional yang berfokus pada ketahanan kinerja pegawai dalam menghadapi tantangan pekerjaan maupun dinamika personal yang berpotensi memengaruhi produktivitas dan hubungan kerja.

Sejak 2024, layanan ini ditransformasikan ke dalam model digital berbasis aplikasi melalui kerja sama dengan konsultan profesional. Platform tersebut memungkinkan pegawai memperoleh akses mandiri dan berkelanjutan terhadap layanan konsultasi kesehatan mental dan fisik, sekaligus menyusun rencana peningkatan kondisi kesehatan yang terpersonalisasi, selaras dengan kebutuhan dan tujuan masing-masing pegawai.

BNI Little Explorers

Dalam rangka mendukung kesejahteraan pegawai dan produktivitas kerja, BNI menyediakan BNI *Little Explorers Daycare* sebagai fasilitas penitipan anak bagi pegawai dengan anak usia 1-4 tahun. *Daycare* ini dikelola bersama mitra profesional dan dilengkapi sarana bermain edukatif berbasis *open-ended toys*, lingkungan yang aman dan higienis, pendampingan tenaga profesional dengan kunjungan berkala dari psikolog anak dan dokter spesialis anak, serta penyediaan makanan bergizi yang dipantau oleh ahli gizi. Untuk melengkapi dukungan bagi orang tua bekerja, BNI juga menyelenggarakan *Wellbeing Parenting Series* melalui sesi edukasi dan webinar yang membekali pegawai dengan wawasan praktis dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Survei Keterikatan dan Kepuasan Pegawai

BNI secara rutin melaksanakan survei kepuasan pegawai yang dapat diikuti oleh seluruh pegawai melalui pengisian kuesioner pada platform DigiHC. Survei ini menjadi media interaksi untuk memantau tingkat kepuasan dan keterikatan pegawai, sejalan dengan pemahaman BNI bahwa kepuasan kerja berkontribusi pada keterikatan positif terhadap organisasi.

Sejak 2024, pengukuran *employee engagement* dilakukan melalui penilaian rata-rata tingkat kepuasan pegawai yang didasarkan pada sembilan *driver*, meliputi *leadership*, iklim kerja, infrastruktur kerja, pelatihan & pengembangan karier, penilaian kinerja, *work-life balance*, *reward & remuneration*, serta kebijakan organisasi. Hasil pengukuran kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan dalam upaya peningkatan *engagement* pegawai.

BNI mencatat skor *employee engagement* sebesar 38% pada tahun 2026 dengan kategori "Baik", di mana nilai ini menunjukkan adanya keterikatan pegawai terhadap BNI. Untuk memperoleh hasil yang lebih mencerminkan kondisi aktual *engagement*, BNI menyempurnakan metode pengukuran dengan menggunakan *employee Net Promoter Score* (NPS). Pengukuran *engagement* dilaksanakan satu kali setiap tahun.

Tingkat Engagement Pegawai

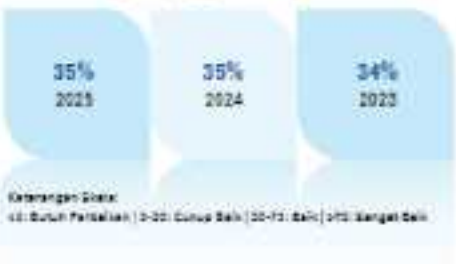

Keterangan Skala:
<0: Buruk Perbaikan | 0-30: Cukup Baik | 30-70: Baik | >70: Sangat Baik

Tempat Kerja yang Sehat, Layak, dan Aman

Akses pada Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan, Keterikatan dan Kepuasan Pegawai

[403-1 403-2 403-4 403-5 403-6 403-7 403-8]

BNI membangun lingkungan kerja yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan untuk memastikan pegawai dapat bekerja secara aman dan nyaman dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berlaku bagi seluruh (100%) pegawai di lingkungan BNI, termasuk pegawai tetap, pegawai kontrak, dan tenaga kerja alih daya. Upaya ini menjadi bagian dari penerapan *workplace policy* yang didukung oleh fasilitas penunjang, termasuk ruang makan, ruang menyusui, *daycare*, dan fasilitas olahraga.

BNI pun secara rutin menyelenggarakan webinar dan *health broadcast* dalam rangka meningkatkan kesadaran kesehatan pegawai. Upaya ini dilengkapi dengan penyediaan akses layanan medis melalui klinik di Grha BNI, Menara BNI, Plaza BNI, dan Gedoeng BNI, serta mekanisme rujukan ke rumah sakit mitra di DKI Jakarta maupun kota terdekat untuk operasional di luar Jakarta.

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan darurat, BNI melaksanakan simulasi kebakaran dan gempa bumi dua kali setiap tahun di gedung operasional utama melalui kolaborasi dengan pengelola gedung dan Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Upaya ini didukung oleh ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) serta alat pelindung diri (APD) di berbagai fasilitas kerja.

Dalam praktik pengelolaan keselamatan gedung, seluruh gedung operasional BNI telah mengadopsi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari masing-masing *Building Management* sebagai acuan menghadapi kondisi darurat, yang diterapkan kepada seluruh pegawai (100%) dan diperkuat dengan prosedur tanggap darurat gedung. Hingga akhir 2026, BNI belum memiliki komite atau kebijakan K3 khusus yang mengatur pengelolaan gedung.

Mekanisme Pelaporan Insiden [403-2, 403-4]

BNI memiliki prosedur mekanisme komunikasi yang mengatur pemberian izin bagi pegawai dalam hal terdapat kondisi kesehatan atau meninggalkan kantor dalam rangka keselamatan tertentu dengan menyampaikan kondisi tersebut kepada atasan langsung.

BNI menyiapkan mekanisme pelaporan internal untuk mengidentifikasi dan menangani potensi risiko keselamatan serta gangguan fasilitas gedung. Pelaporan dapat disampaikan oleh pegawai melalui kanal komunikasi, seperti telepon/WhatsApp atau melalui berita acara kerusakan yang dikelola oleh *Building Management*. Sepanjang tahun 2026, seluruh pengaduan terkait fasilitas gedung telah ditangani dengan tingkat penyelesaian 100%.

Potensi bahaya juga dapat dilaporkan kepada Emergency Task Force yang dibentuk pada masing-masing divisi/unit. Apabila kondisi tersebut berkembang menjadi insiden berskala luas, BNI dapat mengaktifkan *Business Continuity Management* dengan pembentukan Crisis Management Team. Masing-masing CMT dilengkapi dengan *playbook* penanganan krisis yang mengatur peran dan tanggung jawab, alur eskalasi, serta mekanisme koordinasi lintas fungsi. Penerapan sistem pelaporan internal, struktur Crisis Management Team, serta ketersediaan *playbook* krisis menjadi bagian dari upaya BNI dalam menjaga keselamatan kerja, keberlangsungan operasional, dan ketahanan perusahaan secara berkelanjutan.

Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Kerja [403-9, 403-10]

BNI memandang kesehatan pegawai sebagai faktor penunjang produktivitas kerja. Oleh karena itu, BNI membangun lingkungan kerja yang layak dan aman dengan menyediakan dukungan layanan kesehatan yang bersifat preventif dan kuratif, antara lain asuransi kesehatan, *medical check up* (MCU), layanan konseling dengan psikolog, konsultasi kesehatan secara daring, serta kepesertaan BPJS Kesehatan.

BNI menyelenggarakan MCU tahunan yang bersifat wajib bagi pegawai melalui rumah sakit, klinik, dan laboratorium rekanan sebagai langkah preventif untuk deteksi dini kondisi kesehatan. Secara umum, hasil MCU menunjukkan keluhan kesehatan yang meliputi gangguan penglihatan jarak jauh dan/atau dekat (*miopia* dan *astigmatisme*), kadar kolesterol darah tinggi (*hipercolesterolemia*), kelebihan berat badan (*overweight*), peradangan hati (*fatty liver*), serta karies gigi. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar *quick action* berupa rekomendasi tindak lanjut medis dan edukasi kesehatan sesuai kebutuhan. Hingga saat ini, tidak ditemukan penyakit khusus yang diakibatkan oleh pekerjaan. Sepanjang tahun 2026, tidak terdapat pegawai BNI yang mengalami kecelakaan kerja, cedera, maupun penyakit akibat kerja.

Menindaklanjuti keluhan kesehatan yang teridentifikasi, BNI melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif, antara lain melalui penyelenggaraan webinar kesehatan dengan menghadirkan praktisi dan tenaga ahli. Selain itu, BNI mendorong partisipasi pegawai dalam program *wellbeing* untuk membangun pola hidup sehat, termasuk melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dikelola oleh Komunitas BNI (40Society).

Sebagai bagian dari ekosistem *wellbeing* yang terintegrasi, BNI mengimplementasikan *Employee Assistance Program* 2.0 (EAP 2.0) melalui kerja sama dengan penyedia layanan konsultasi digital. Program ini dirancang untuk mendukung kesehatan mental, fisik, dan finansial pegawai. Melalui EAP 2.0, pegawai dapat mengakses konsultasi dengan psikolog serta pendampingan dari tim pelatih multidisiplin yang terdiri atas ahli gizi, penasihat medis, pelatih eksekutif, dan pelatih kebugaran, guna membantu pencapaian target kesehatan seperti pengelolaan berat badan, tekanan darah, kadar gula dan kolesterol, serta manajemen stres. Di luar EAP 2.0, BNI juga menyediakan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dengan penyedia asuransi kesehatan, di samping kepesertaan wajib BPJS Kesehatan, untuk mendukung penanganan kebutuhan kesehatan pegawai dan keluarga.

Pada 2026, BNI melaksanakan sosialisasi pola hidup sehat dan kesehatan mental, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi kesehatan melalui Webinar *Healthy Talk Series*. Topik yang dibahas antara lain:

- Edukasi Penyakit Kronis & Metabolik, membahas pencegahan melalui topik "Cegah dan Kendalikan Diabetes untuk Masa Depan" serta "Prediabetes - Waktunya Konsultasi ke Dokter Spesialis Metabolik".
- Kesehatan Fisik & Gaya Hidup Digital, mengangkat isu relevan "Kesehatan Mata dan Gaya Hidup Digital" serta "Cedera Olahraga: Pencegahan, Pengobatan, dan Pemulihan".
- Nutrisi & Kesehatan Muslimah, memberikan panduan dalam "Pola Makan Sehat untuk Energi yang Optimal Saat Puasa" serta upaya preventif melalui "Waspada ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) - Gejala, Penyebab, dan Pencegahan".
- Kesiapsiagaan Darurat & Kesejahteraan Masa Depan, pembekalan keterampilan teknis dalam "*Basic Life Support*: Kuasai Teknik CPR" serta dukungan kesehatan jangka panjang melalui topik "Tetap Bugar di Usia Emas".

Pelayanan Prima untuk Nasabah

Pengelolaan Topik Material [3-3]

Topik Material: Keamanan Data dan Siber

Pentingnya Pengelolaan Topik

Keamanan data dan siber merupakan isu strategis bagi BNI seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan perbankan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional dan interaksi dengan nasabah. Ancaman kejahatan siber, kebocoran data, serta pelanggaran privasi berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan nasabah, stabilitas operasional, reputasi Bank, serta risiko finansial dan kepatuhan. Oleh karena itu, pengelolaan keamanan data dan siber menjadi bagian integral dari penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pelindungan data pribadi nasabah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dampak dan Peluang

Risiko keamanan data dan siber dapat berdampak pada gangguan layanan, potensi kerugian finansial, sanksi regulator, serta penurunan kepercayaan pemangku kepentingan. Risiko tersebut semakin kompleks seiring dengan berkembangnya teknologi, seperti *cloud computing*, *Open* API, dan pemanfaatan *artificial intelligence* (AI), yang memperluas eksposur risiko tidak hanya pada internal Bank, tetapi juga pada pihak ketiga dan rantai pasok teknologi.

Di sisi lain, penguatan sistem keamanan data dan siber membuka peluang bagi BNI untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, memperkuat ketahanan sistem digital, serta mendukung pengembangan layanan perbankan digital yang aman dan andal. Peningkatan kapabilitas keamanan siber juga menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis Bank dalam jangka panjang.

Target dan Komitmen

BNI berkomitmen untuk mencegah terjadinya kebocoran data dan pelanggaran privasi nasabah melalui penguatan sistem manajemen keamanan informasi dan pelindungan data pribadi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

- Sepanjang tahun 2025, BNI tidak menghadapi pengaduan terkait kebocoran data, pelanggaran data pribadi, maupun penyalahgunaan data nasabah oleh pihak ketiga karena kelalaian BNI. [FH-CS-330a.1]
- Sebanyak 42.422 pegawai, mencakup pegawai tetap, kontrak, *trainee*, dan tenaga alih daya, mengikuti program sosialisasi dan pelatihan kesadaran keamanan informasi dan pelindungan data pribadi secara berkala.

Kebijakan

Pengelolaan keamanan data dan siber di BNI mengacu pada kebijakan dan ketentuan internal, antara lain:

- Prosedur Manajemen Risiko Teknologi Informasi (TI) & Digital
- Kebijakan Keamanan Siber
- Kebijakan Pengamanan Informasi
- Prosedur Pelindungan Data Pribadi

Evaluasi dan Pengelolaan Dampak

Keamanan data dan siber merupakan tanggung jawab dari Divisi Chief Information Security Officer (CISO) yang berada di bawah Direktur Information Technology. Pengawasan keamanan data dilakukan oleh Komite Manajemen Teknologi. BNI juga telah menerapkan standar ISO 27001 untuk memperkuat manajemen privasi informasi.

Evaluasi dan pengelolaan dampak keamanan data dan siber dilakukan secara berkesinambungan melalui penerapan konsep *three lines model*. BNI secara tahunan melaksanakan asesmen keamanan siber dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BNI melibatkan pihak independen untuk kegiatan pengujian keamanan siber dengan frekuensi minimal satu kali setahun. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar penyusunan *roadmap* penguatan keamanan siber yang dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, audit tematik terkait Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber dilakukan secara berkala oleh fungsi audit internal, didukung oleh kegiatan *control testing* dan program peningkatan kesadaran (*awareness*) bagi pegawai. Di lingkup operasional, BNI telah menerapkan *Network Access Control*, *end-point detection and response*, *data loss prevention*, dan *privilege access management* untuk mendukung implementasi IT Hygiene. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan sistem, kebijakan, dan penguatan ketahanan Bank terhadap ancaman siber di masa mendatang.

Kebijakan Pelindungan Data dan Privasi

BNI memandang pelindungan data pribadi dan privasi nasabah sebagai bagian integral dari penghormatan terhadap hak asasi manusia serta fondasi kepercayaan dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital. Seiring dengan akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan teknologi baru, BNI menerapkan pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dalam setiap pemrosesan data pribadi, baik pada aktivitas operasional, pengembangan produk, maupun kolaborasi dengan pihak ketiga.

Kerangka Pelindungan Data Pribadi BNI

BECOMING PRIMEST FINANCIAL INSTITUTION THAT EXCELS IN PERSONAL DATA PROTECTION THROUGH SUSTAINABLE AND CONTINUOUS IMPROVEMENT

Customer Trust | Effective Personal Data Governance | Regulatory Compliance | Awareness & Data Protection Culture

Governance			
PDP Policy	Data Protection Officer		Management Oversight
I. ASSESS	II. PROTECT	III. SUSTAIN	IV. COMMUNICATE
Gap Assessment	Lawful Basis for Personal Data Processing	Privacy by Design & Privacy by Default	Education & Literacy
Record of Processing Activities (RoPA)	Data Processing Agreement	Personal Data Classification	Privacy Notice
Data Protection Impact Assessment (DPIA)	Data Subject Rights	Personal Data Retention Restriction	Data Breach Report
Third Party Risk Management (TPRM)	Data Protection	Training & Awareness	Corporate Action
Transfer Impact Assessment (TIA)	Data Breach Management & Recovery	PDP Audit	
Management Commitment	Data Quality	Reliable Technology	Corporate Culture

BNI telah menetapkan kerangka pengelolaan pelindungan data pribadi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tak terbatas pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta ketentuan terkait pelindungan konsumen Bank Indonesia. Kebijakan ini menegaskan komitmen BNI untuk memastikan bahwa seluruh siklus pemrosesan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, hingga penghapusan, dilakukan secara sah, transparan, dan aman sesuai tujuan pemrosesannya dan menjamin hak subjek data pribadi.

Dalam pengelolaan data pribadi, BNI memiliki peran dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. BNI sebagai Pengendali Data Pribadi memiliki peran dalam menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data pribadi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BNI mewajibkan penyusunan *Record of Processing Activities* (RoPA) di seluruh unit organisasi yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi dan mencatat aktivitas pemrosesan yang melibatkan data pribadi di BNI. Selain itu, setelah mengidentifikasi aktivitas pemrosesan data pribadi yang berisiko tinggi, seluruh unit organisasi berkewajiban menyusun *Data Protection Impact Assessment* (DPIA).

Penyusunan RoPA dan DPIA dilakukan secara bertahap dan terstruktur dengan melibatkan partisipasi pegawai yang berperan langsung dalam setiap aktivitas pemrosesan data di seluruh lini organisasi. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan seluruh proses bisnis dan alur data teridentifikasi secara menyeluruh, sehingga potensi celah dalam pengelolaan dan pelindungan data pribadi dapat diminimalkan sejak tahap perencanaan.

Dalam merespons perkembangan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI), *cloud computing*, dan *open banking*, BNI menerapkan prinsip pengendalian risiko yang ketat. Pemanfaatan AI di lingkungan BNI saat ini masih bersifat terbatas dan diarahkan sebagai alat bantu analisis, tanpa melibatkan data pribadi nasabah dan tanpa digunakan sebagai pengambil keputusan akhir. Pendekatan ini dilakukan mengingat belum terdapatnya kerangka regulasi AI, khususnya terkait lokasi penyimpanan data dan potensi risiko lintas negara sehingga BNI memilih untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan pelindungan data sebelum melakukan adopsi yang lebih luas.

Untuk memperkuat tata kelola, BNI mengintegrasikan risiko pelindungan data dan privasi ke dalam kerangka IT & Digital Risk Management, dengan salah satu taksonomi risiko berupa *Information and Data Privacy Risk*. Pengendalian risiko diterapkan melalui kombinasi kontrol preventif, detektif, dan korektif, yang mencakup aspek *people* (peningkatan *awareness* dan kompetensi), *process* (pedoman dan prosedur internal), serta *technology* (pengamanan sistem dan infrastruktur). BNI juga telah menerapkan ISO 27001 sebagai standar sistem manajemen keamanan informasi untuk memperkuat manajemen keamanan informasi secara lebih komprehensif.

Dalam pengelolaan ekosistem digital dan keterlibatan pihak ketiga, termasuk penggunaan API dan layanan berbasis *Software as a Service* (SaaS), BNI menerapkan mitigasi risiko *third party* dan *supply chain risk*. Hal ini mencakup pengaturan tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) dalam lingkungan *cloud*, penguatan pengamanan *Open* API, serta penerapan IT Hygiene untuk keamanan sistem informasi secara menyeluruh, termasuk penerapan *Network Access Control* (NAC), *end-point detection and response*, *data loss prevention*, *privilege access management*, untuk memitigasi berbagai risiko keamanan siber di lingkungan BNI.

Untuk memastikan kebijakan pelindungan data dan privasi berjalan efektif sepanjang siklus operasional, BNI menerapkan mekanisme evaluasi berkelanjutan. Evaluasi ini mencakup pelaksanaan asesmen keamanan siber dan penilaian materialitas yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan dukungan konsultan independen guna menjamin independensi dan kualitas hasil penilaian. Di tingkat internal, pengujian pengendalian (*control testing*), audit tematik Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan keamanan siber, serta penguatan kesadaran pegawai dilakukan secara periodik sebagai bagian dari upaya menjaga kepatuhan dan ketahanan organisasi.

Kedepan, BNI akan terus memperkuat kebijakan dan implementasi pelindungan data melalui penerapan prinsip *security by design*, *privacy by design*, serta *privacy by default* sehingga aspek keamanan dan privasi merupakan hal yang otomatis berlaku dan telah menjadi pertimbangan sejak tahap awal perancangan sistem dan produk. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketahanan BNI terhadap risiko siber, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap layanan perbankan digital BNI.

Penanggung Jawab atas Pengelolaan dan Pengawasan Privasi, Keamanan Siber, dan Pelindungan Data

BNI menerapkan tata kelola privasi, keamanan siber, dan pelindungan data melalui struktur berlapis yang memastikan kejelasan peran, akuntabilitas, serta mekanisme eskalasi dari tingkat operasional hingga pengambilan keputusan strategis di tingkat Direksi.

Divisi Chief Information Security Officer (CISO)

Divisi CISO bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional pengelolaan keamanan informasi dan keamanan siber, termasuk pengelolaan risiko siber, penerapan pengendalian keamanan, pemantauan ancaman, serta penanganan dan pelaporan insiden keamanan informasi. Divisi ini juga memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal serta standar dan regulasi yang berlaku terkait pelindungan data dan keamanan sistem.

Data Protection Officer (DPO)

DPO adalah petugas/pejabat pelindungan data pribadi yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi serta bertanggung jawab memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi dan melakukan mitigasi atas risiko pelanggaran.

Fungsi DPO meliputi peningkatan pemahaman kepada seluruh pegawai BNI terkait pelindungan data pribadi (PDP), pemberian masukan sesuai ruang lingkup PDP, pemantauan implementasi PDP di BNI, serta koordinasi dan peran sebagai narahubung dengan regulator atau lembaga terkait PDP atas isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi.

Supporting Staff Group (SSG)

Supporting Staff Group berperan dalam mendukung koordinasi, pemantauan, dan konsolidasi implementasi kebijakan privasi, keamanan siber, dan pelindungan data di seluruh unit kerja. SSG menjadi penghubung antara fungsi operasional dan forum manajerial, serta menyampaikan laporan dan isu strategis untuk ditindaklanjuti pada tingkat komite.

Komite di Bawah Direksi

a. **Komite Manajemen Teknologi (KMT)**
Pada tingkat Direksi, pengawasan dan arahan strategis dilakukan melalui Komite Manajemen Teknologi (KMT), yang bertugas mengevaluasi kebijakan, memantau efektivitas pengendalian, serta memastikan pengelolaan privasi dan keamanan siber, pelindungan data nasabah selaras dengan strategi bisnis dan kerangka manajemen risiko BNI.

b. **Komite Manajemen Risiko (MRC)**
Melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi atas penerapan manajemen risiko, salah satunya risiko operasional pada parameter teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, mencakup ketersediaan sistem TI terhadap ancaman dan serangan, serta keamanan siber.

c. **Steering Committee Pelindungan Data Pribadi**
Steering Committee ini terdiri dari anggota tetap (beranggotakan Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Finance, Direktur Information & Technology, dan Direktur Risk Management) dan anggota non tetap (Direktur/ SEVP yang terkait dengan topik pembahasan) dengan ruang lingkup di antaranya memberikan arahan strategis dalam rangka implementasi PDP; memberikan keputusan atas penyelesaian permasalahan terkait PDP dengan tujuan Perusahaan dan regulasi yang berlaku; dan lainnya.

Sistem Manajemen Pengamanan Data

Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan data, BNI menerapkan pendekatan terintegrasi yang mencakup aspek *people, process,* dan *technology*:

1. Pada aspek *people*, program pelatihan lanjutan bagi pegawai harus diperkuat agar budaya pengamanan data di seluruh organisasi, mulai dari level eksekutif hingga staf operasional, akan membantu mengurangi risiko yang disebabkan oleh faktor manusia. Edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga keamanan data disampaikan melalui petugas cabang dan kanal digital resmi, seperti media sosial, pesan singkat, dan situs web resmi.
2. Pada aspek *process*, BNI secara berkesinambungan mengembangkan kebijakan dan prosedur yang matang serta selaras dengan *Cyber Security Framework* (CSF). Ini mencakup pembuatan ataupun pengkinian semua prosedur yang mendukung pengamanan data. Penerapan proses audit keamanan siber secara berkala telah dilakukan guna mengidentifikasi *gaps* dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Selain itu, Bank telah melakukan penilaian maturitas Teknologi Informasi berbasis COBIT 2019 oleh asesor independen yang mencakup penilaian atas efektivitas proses tata kelola dan manajemen TI, termasuk pengamanan data serta keamanan siber pada objektif *Managed Security* dan *Managed Security Services*. Saat ini BNI sudah memiliki Tim Cybersecurity Governance yang bertugas memantau penerapan kebijakan serta memastikan koordinasi antardivisi berjalan efektif dalam menanggapi ancaman siber.
3. Pada aspek *technology*, pelaksanaan sistem manajemen keamanan data di BNI mencakup serangkaian pengendalian yang terintegrasi untuk memastikan pelindungan data dan ketahanan sistem informasi, yang antara lain meliputi:
   a. Security Operation Center (SOC)
      BNI mengoperasikan Security Operation Center (SOC) yang melakukan pemantauan keamanan secara berkelanjutan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pemantauan ini mencakup *endpoint*, jaringan, aplikasi, dan *server*. Setiap insiden yang ternasi dimitigasi didokumentasikan beserta hasil analisisnya dalam sistem manajemen keamanan data sebagai bahan pembelajaran dan dasar perbaikan berkelanjutan. Selain itu, BNI memiliki Security Incident Response Team (SIRT) yang secara aktif menangani seluruh insiden keamanan internal.
   b. Identifikasi Ancaman dan Aktivitas Mencurigakan
      BNI secara proaktif melakukan identifikasi aktivitas mencurigakan dan serangan siber melalui kegiatan *threat hunting*, termasuk penanganan dan penutupan situs web palsu yang mengatasnamakan BNI. Sebagai langkah pencegahan penipuan, Tim Cyber Threat Intelligence melaporkan indikasi transaksi kartu debit yang terpapar melalui situs palsu untuk meminimalkan potensi risiko bagi nasabah.
   c. Edukasi Keamanan Informasi
      BNI secara berkelanjutan memberikan edukasi kepada pegawai dan nasabah untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko keamanan informasi, antara lain dengan mendorong praktik transaksi yang aman seperti menjaga kerahasiaan kata sandi dan PIN. Edukasi dilakukan melalui beberapa media seperti saat nasabah menghubungi BNI Call atau melalui platform media sosial di akun Instagram @cxc.customerprotection. Informasi dan panduan keamanan transaksi juga tersedia melalui situs resmi bni.co.id untuk berbagai layanan BNI e-Banking, termasuk *Internet Banking*, ATM, SMS *Banking*, *Mobile Banking*, dan wondr by BNI.
   d. *Fraud Detection System* (FDS)
      Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan nasabah, BNI mengoperasikan *Fraud Detection System* (FDS) yang memantau transaksi mencurigakan pada kartu debit, kartu kredit, serta kanal *e-channel* lainnya.

e. Audit Keamanan Berkala
Audit keamanan dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas pengendalian sistem keamanan informasi serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau perbaikan.

f. Integrasi Keamanan dalam Pengembangan Produk dan Layanan
Aspek pelindungan data diintegrasikan dalam proses pengembangan produk dan layanan dengan melibatkan fungsi keamanan dan privasi data guna memastikan kepatuhan terhadap standar internal dan ketentuan regulasi yang berlaku.

g. *Data Loss Prevention* (DLP)
BNI menerapkan sistem *Data Loss Prevention* sebagai pengamanan perimeter untuk mencegah pencurian data kredensial dan akses tidak sah terhadap informasi rahasia.

h. *Endpoint Detection and Response* (EDR)
BNI mengimplementasikan *Endpoint Detection and Response* untuk memantau aktivitas *endpoint* secara *real-time* serta merespons insiden keamanan dan potensi ancaman secara cepat.

i. *Network Access Control* (NAC)
Network Access Control diterapkan untuk memperkuat pengendalian dan manajemen akses jaringan, mencegah akses tidak sah, serta memastikan perangkat yang terhubung telah memenuhi standar keamanan BNI.

j. Teknologi Enkripsi
BNI menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data internal dan data nasabah, baik yang disimpan maupun yang ditransmisikan, guna menjaga kerahasiaan informasi dari pihak yang tidak berwenang.

k. Keamanan dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC)
Setiap pengembangan produk, aplikasi, atau layanan baru di BNI melalui proses *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang mencakup pengendalian keamanan secara menyeluruh, termasuk penilaian risiko, tinjauan desain, kode, konfigurasi, serta pengujian penetrasi.

l. *Security Assessment* Aplikasi
BNI secara berkala melaksanakan *security assessment* untuk mengidentifikasi potensi celah atau kerentanan aplikasi melalui kegiatan *Penetration Testing*, *Vulnerability Assessment*, serta *Application Security Testing*, termasuk *Static Application Security Testing* (SAST) dan *Dynamic Application Security Testing* (DAST).

m. *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP)
BNI menerapkan manajemen identitas dengan menggunakan *Lightweight Directory Access Protocol* (LDAP) secara terpusat untuk memudahkan pengaturan hak akses yang konsisten dan sesuai dengan prinsip keamanan dalam pemberian akses user.

n. *Privileged Access Management* (PAM)
BNI menerapkan *Privileged Access Management* (PAM) untuk memberikan pengamanan dan pengendalian khusus terhadap akun-akun dengan hak akses tinggi (Admin/Super User) melalui perekaman aktivitas dan pembatasan izin untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Sertifikasi Sistem Manajemen Informasi

1. **ISO 27001**

   BNI menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi berdasarkan standar internasional ISO 27001 sebagai fondasi utama pengelolaan risiko keamanan informasi di seluruh aktivitas operasional yang dikuasai dan dikendalikan oleh BNI. Hingga akhir tahun 2025, sertifikasi ISO 27001 telah mencakup *Open* API dari seluruh (100%) platform digital BNI.

2. **Service and Organization Control (SOC) 2**

   BNI mengadopsi standar pengendalian berbasis SOC 2 mencakup *security, availability, confidentiality,* dan *privacy*, dengan cakupan sistem berupa *core banking, go remit (remittance), go trust (treasury),* dan *go trade (trading).*

3. **Uptime Institute's Tier Certification of Operational Sustainability (TCOS)**

   BNI memperoleh sertifikasi pengelolaan *data center* berupa Tier III Gold Certification of Operational Sustainability yang saat ini mencakup gedung BNI Dual Data Center (DDC) Slipi.

Ke depan, BNI merencanakan peningkatan penerapan dan verifikasi sistem manajemen keamanan informasi secara bertahap guna mencakup seluruh unit operasional yang berada dalam pengendalian Perseroan. Peningkatan ini diarahkan pada penguatan pengamanan di unit layanan digital, infrastruktur pendukung, serta fungsi operasional yang memiliki eksposur risiko siber dan pelindungan data yang tinggi, sejalan dengan perkembangan bisnis, kompleksitas operasional, dan dinamika risiko yang dihadapi.

Perseroan juga berkomitmen melakukan investasi strategis guna memperkuat keamanan pengelolaan informasi internal dan melindungi kepentingan nasabah. Dengan mengacu pada *framework* keamanan siber serta standar internasional, seperti ISO 27001 dan NIST (*identify, protect, detect, respond, recover*), BNI memastikan keandalan sistem digital yang digunakan. Pada tahun 2026, tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran privasi maupun kehilangan data nasabah. (418-1)

Peningkatan Kesadaran Pelanggan

BNI berkomitmen meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pentingnya keamanan data guna mencegah kebocoran informasi dan kejahatan siber. Sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan, BNI secara aktif mengedukasi nasabah mengenai pelindungan data pribadi melalui berbagai media komunikasi luring dan daring. Melalui sosialisasi tersebut, BNI mengimbau nasabah untuk menjaga kerahasiaan informasi sensitif, termasuk PIN transaksi dan OTP, serta segera menghubungi BNI Call apabila kartu hilang, dicuri, atau ditemukan transaksi yang tidak sesuai.

Pelindungan Data Pribadi

BNI berkomitmen menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal. BNI melarang pengungkapan data nasabah kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah dan/atau dasar pemrosesan lain yang sah sesuai ketentuan hukum. Selain itu, BNI menetapkan kebijakan yang menjamin hak nasabah untuk mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, serta mengajukan penghapusan atau pembaruan data pribadi.

Dalam rangka memperkuat pelindungan data pribadi, BNI menerapkan kebijakan dan prosedur pelindungan data yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mencakup seluruh siklus pemrosesan data pribadi di lingkungan BNI. Kebijakan dan prosedur terkait pelindungan data pribadi juga disusun dan distandardisasikan di masing-masing perusahaan anggota konglomerasi BNI sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan tersebut. Dalam prosedur internal BNI, telah diatur lebih lanjut mengenai penilaian mitra/vendor dalam memproses data pribadi, agar senantiasa memperhatikan kewajiban pemrosesan data pribadi sesuai UU PDP.

Setiap pengumpulan data pribadi nasabah dalam penyediaan produk dan/atau layanan dilakukan berdasarkan dasar pemrosesan hukum yang sah, termasuk persetujuan nasabah, hubungan kontraktual, maupun pemenuhan kewajiban hukum. BNI berkomitmen untuk meminimalisasi permintaan data dengan memastikan bahwa data pribadi yang diminta dari nasabah dibatasi pada informasi yang benar-benar diperlukan, relevan, dan proporsional sesuai tujuan pemrosesan data yang telah diinformasikan sebelumnya kepada nasabah, contohnya untuk pembukaan rekening, pengajuan kredit, dan pembayaran tagihan. Informasi tujuan tersebut disampaikan kepada nasabah dalam dokumen syarat ketentuan produk dan/atau layanan dan pemberitahuan privasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan regulasi dan kebijakan internal Bank yang berlaku sebagaimana diatur pada Prosedur Pelindungan Data Pribadi. BNI juga tidak melakukan pengumpulan data pribadi dari nasabah maupun dari pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai wujud komitmen BNI terhadap regulasi pelindungan data pribadi (PDP), telah dibentuk Steering Committee Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan strategis dan keputusan terkait implementasi PDP. Steering Committee ini beranggotakan Direktur Human Capital & Compliance, Direktur Finance, Direktur Information Technology, Direktur Risk Management, dengan anggota tidak tetap yaitu Direktur/SEVP yang terkait dengan topik pembahasan.

BNI hanya melakukan pengungkapan atau transfer data kepada pihak ketiga sepanjang telah memenuhi dasar pemrosesan yang tepat, sehingga pemrosesan data dilakukan secara terbatas dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pemrosesan data pribadi lanjutan disesuaikan dengan preferensi, perilaku, dan segmentasi nasabah untuk mendukung pemasaran produk yang relevan.

Sebagai bentuk transparansi, BNI menyediakan pemberitahuan privasi yang menjelaskan mekanisme perolehan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi nasabah, yang dapat diakses melalui laman resmi BNI yang dapat diakses pada link https://www.bni.co.id/id-id/individu/pemberitahuanprivasi.

Persetujuan nasabah (consent) atas pemrosesan data tersebut diperoleh melalui berbagai kanal layanan BNI, termasuk kantor cabang, aplikasi wondr by BNI, BNI Mobile Banking, serta DigiCS.

Seluruh data pribadi nasabah disimpan dengan tingkat keamanan yang memadai, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*, melalui pembatasan akses dan pengendalian keamanan teknologi sesuai kebijakan internal. Selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi, BNI memberikan fasilitas kepada nasabah untuk mengelola data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, menarik persetujuan, serta mengajukan penghapusan atau pemberuan data sesuai dengan ketentuan hukum.

Nasabah berhak meminta BNI untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadi pengguna apabila data pribadi pengguna tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Bagian Penggunaan Data Pribadi atau jika tidak ada dasar hukum lain untuk Pemrosesan Data Pribadi atau hal ini tidak dibatasi oleh ketentuan. Setelah menerima permintaan pengakhiran, penghapusan, dan/atau pemusnahan tersebut, BNI akan memberikan konfirmasi penerimaan perintah dan juga akan memberikan konfirmasi setelah data pribadi pengguna telah dihapus dan/atau dimusnahkan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, pengguna mungkin tidak akan dapat menerima/menggunakan layanan BNI jika telah melakukan penghapusan/pemusnahan data pribadi, baik sebagian maupun keseluruhan.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan penyimpanan data, data pribadi pengguna disimpan oleh BNI selama 5 tahun setelah berakhirnya hubungan kerja sama dengan pengguna atau untuk jangka waktu yang lebih panjang apabila diwajibkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku ("Masa Retensi"). Selama pengguna masih menjadi nasabah atau pengguna layanan bank, BNI melakukan pemrosesan data pribadi guna mendukung penyediaan layanan perbankan dengan penerapan standar pelindungan data yang optimal. BNI mengatur penghapusan dan pemusnahan data pribadi pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Penghapusan Data
   BNI dapat menghapus dan/atau memusnahkan data pribadi pengguna dari sistem setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, yaitu 5 tahun, sehingga data tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pengguna.
2. Pengecualian atas Penghapusan
   Penghapusan atau pemusnahan data pribadi tidak dilakukan apabila data masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum, kepentingan pembuktian di kemudian hari, keperluan perpajakan, audit, dan akuntansi, atau masih berada dalam masa retensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar Pemusnahan Data
   Dalam melakukan pemusnahan data pribadi, BNI menerapkan langkah-langkah yang wajar dan sesuai standar untuk menghancurkan, menghapus, serta memastikan data tersebut secara praktis tidak dapat dipulihkan kembali, dengan metode yang disesuaikan berdasarkan jenis data serta media penyimpanannya.

BNI mengimplementasikan kebijakan pelindungan data melalui penerapan standar dan prosedur berikut:

- Standar Pengamanan Data Berdasarkan Klasifikasi
- Prosedur Klasifikasi dan Pengamanan Data
- Standar Enkripsi
- Prosedur Pengamanan Perangkat *Endpoint*
- Standar Pengamanan Aplikasi
- Standar Pengamanan Akses API
- Standar Pengamanan Penyebaran Data/Informasi Dokumen Perusahaan
- Prosedur Pengamanan Data/Informasi (*Data Loss Prevention*)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi terkait Pelindungan Data Pribadi

BNI menempatkan kerahasiaan data sebagai prioritas utama dengan memperkuat kesadaran dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan serta penanganan pengaduan yang berkaitan dengan data keuangan. Program pembelajaran ini dilaksanakan secara berkala dengan frekuensi minimal satu kali dalam setahun untuk memastikan seluruh pegawai BNI tetap adaptif terhadap risiko keamanan data pribadi terbaru.



Upaya tersebut didukung oleh pelaksanaan program kampanye keamanan informasi yang masif melalui berbagai media komunikasi internal, seperti *email blast*, poster, dan sarana lainnya. Pada tahun 2026, BNI berkomitmen memberikan pembelajaran komprehensif kepada seluruh pegawai mencakup pegawai tetap, kontrak, *trainee*, hingga tenaga kerja alih daya melalui program sertifikasi dan pelatihan terkait pelindungan keuangan dan data konsumen.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi terkait Pelindungan Data Pribadi dan Metode Penyampaian

In-Class Learning
- *Cybersecurity bagi Data Protection Officer (DPO)*
- *Enhancement Skill for Compliance Officer - Pelindungan Data Pribadi (PDP)*
- *Pelatihan Auditor - Data Security & Governance*
- *Pelatihan Auditor - IT & Digital Audit Forensic*
- *Pelatihan Auditor - IT Audit Fundamental*
- *Pelatihan Auditor - Pelindungan Data Pribadi*
- *Pembekalan Finalisasi NDPA & DPIA - Implementasi UU PDP*
- *Privacy by Design & Privacy by Default*
- *Refreshment & Re-Certified Anti Fraud Manager (CAFM)*
- *Regulatory Compliance & Fraud Risk dalam Aksi Korporasi*
- *Risk Management kerja sama Channeling BNI dengan Mitra Fintech*

e-Learning Mandatory
- *Anti Fraud Awareness*
- *Security Awareness*
- *Pelindungan Data Pribadi (PDP)*

Webinar
- *Financial Crimes Sharing Session*
- Penguatan *Anti Fraud Awareness* melalui Penerapan POJK No. 12 Tahun 2024 bagi LJK
- Webinar Series Pelindungan Data Pribadi - Kesadaran *Data Privacy* dan Pelindungan Data

Kuis Harian/Daily Exercise for Employee Program (DEEP 45)
- *Anti Fraud Awareness*
- Pelindungan Data Pribadi (PDP)
- *Security Awareness* - Melindungi *Userid* dan *Password*
- *Security Awareness* – Pengamanan pada Penyebaran Data

Sertifikasi
- Certified *Anti Fraud* Manager (CAFM)
- Certified Chief Information Security Officer (CCISO)
- Certified Indonesia Personal Data Protection Officer (CIPDPO)
- Certified Information Security Manager (CISM)

Persetujuan Penggunaan Data Pribadi Nasabah untuk Kepentingan Pihak Ketiga

Penggunaan data pribadi nasabah di BNI wajib didasarkan pada persetujuan nasabah, yang mana mengenai hal tersebut telah diatur dalam PP Prosedur Ketentuan Umum Pelindungan Data Pribadi sehingga hak nasabah untuk mengendalikan data pribadinya terlindungi. Mekanisme pengendalian tersebut dimulai sejak pembukaan rekening yaitu saat calon nasabah diminta memberikan persetujuan atas pengungkapan data pribadinya apabila diperlukan. Sejalan dengan PP Prosedur Ketentuan Umum Pelindungan Data Pribadi, BNI melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesannya dan tidak menggunakan data untuk tujuan sekunder (*secondary purposes*). Data pribadi tidak disewakan, dijual, atau diberikan kepada pihak ketiga untuk tujuan apa pun selain untuk penyelesaian transaksi, penyediaan layanan atau pemenuhan kewajiban hukum kepada instansi yang berwenang. Pengungkapan data pribadi kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk kepentingan hukum dan kepatuhan, antara lain perpajakan, proses peradilan pidana dan/atau perdata, penyidikan tindak pidana pasar modal, penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta pencegahan tindak pidana terorisme dan pencucian uang, dengan tetap berpedoman pada ketentuan rahasia bank.

Dalam implementasinya, pengungkapan data pribadi kepada Perusahaan Anak dan/atau mitra usaha dilakukan secara terbatas untuk tujuan kegiatan usaha tertentu sesuai tujuan yang telah ditetapkan dan berdasarkan persetujuan nasabah yang sah dan terdokumentasi. Penerapan pelindungan data pribadi serta mekanisme persetujuan tersebut dipantau dan ditinjau secara berkala guna memastikan keamanan data dan pemenuhan hak nasabah sebagai Subjek Data Pribadi.

Pelindungan Data Pemasok dan Mitra usaha

Dalam pengelolaan rantai pasokan, BNI memastikan bahwa sistem manajemen keamanan data mencakup pelindungan atas data pemasok dan mitra usaha, termasuk data pribadi individu, data korporasi, serta data transaksi. Sistem *procurement* yang diimplementasikan telah dilengkapi dengan pengamanan teknologi informasi untuk melindungi data yang berkaitan dengan transaksi dan kontrak kerja. Pelindungan data pribadi juga diterapkan terhadap pemasok atau mitra yang memiliki rekening di BNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BNI juga mengintegrasikan klausul pemrosesan data pribadi ke dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk penandatanganan perjanjian kerahasiaan/*Non-Disclosure Agreement* atau Ketentuan Pemrosesan Data Pribadi Nasabah. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kerja sama dengan pemasok maupun mitra usaha, data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelaksanaan kerja sama yang disepakati dan tidak untuk tujuan lain.

Terhadap kerja sama yang dilakukan dengan vendor/mitra, BNI melakukan *assessment* pelindungan data pribadi untuk memastikan kepatuhan dan menilai kesiapan serta komitmen vendor/mitra dalam melindungi data pribadi setiap melakukan pemrosesan data pribadi. BNI telah mengatur kriteria spesifik vendor/mitra yang bekerja sama dengan BNI untuk menerapkan pelindungan data pribadi dan menerapkan langkah-langkah keamanan teknologi informasi.

Terhadap *assessment* pelindungan data pribadi tersebut, unit BNI yang melakukan kerja sama dengan vendor/mitra akan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan, sesuai dengan matriks risikonya, dan memantau komitmen pemenuhan PDP yang disampaikan saat *assessment* dilakukan.

Keamanan Siber

Dalam menjaga ketahanan operasional di tengah meningkatnya risiko siber, BNI mengadopsi National Institute of Standards and Technology (NIST) *Cybersecurity Framework* sebagai kerangka pengelolaan keamanan siber yang mencakup identifikasi risiko, perlindungan sistem, deteksi insiden, respons, serta pemulihan. Kerangka ini menjadi dasar bagi BNI dalam memastikan kesinambungan layanan perbankan digital. Penerapannya diperkuat dengan sertifikasi ISO 27001:2022 untuk layanan *Open API Services* serta sertifikasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) No. 546/CSIRT.01.03/BSSN/04/2024 dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang menegaskan bahwa sistem manajemen keamanan informasi BNI dievaluasi dan diaudit secara berkala setiap tiga tahun sesuai standar internasional.

Sejalan dengan peningkatan digitalisasi layanan, BNI secara konsisten mengurangi ketergantungan pada proses berbasis dokumen fisik dan interaksi manual melalui pendekatan *customer to system* dan *employee to system*. Untuk memitigasi risiko kebocoran data, pengamanan diterapkan pada seluruh *endpoint* melalui penguatan konfigurasi sistem (*hardening*), integrasi dengan domain, penggunaan perangkat lunak antivirus, pengelolaan akses jaringan, pemantauan aktivitas perangkat, serta implementasi berbagai alat pengamanan data dan *workstation monitoring*. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi nasabah di seluruh titik akses sistem.

Mekanisme Penanganan *Data Breach*

Dalam menghadapi risiko pelanggaran keamanan informasi dan data (*data breach*), BNI telah menerapkan kerangka kerja penanganan insiden siber yang terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta meminimalkan dampak insiden terhadap operasional, nasabah, dan reputasi Perusahaan.

BNI membentuk Security Incident Response Team (SIRT) yang terdiri dari unit lintas fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan insiden siber, termasuk pelanggaran keamanan data. SIRT dipimpin oleh Koordinator SIRT dan didukung oleh berbagai fungsi terkait, antara lain Divisi Chief Information Security Officer (CISO), Security Operation Center (SOC), fungsi teknologi informasi, manajemen risiko, hukum, kepatuhan, layanan nasabah, serta unit bisnis. Di bawah koordinasi Divisi CISO, Koordinator SIRT bertanggung jawab dalam penanganan kondisi insiden, memastikan tindak lanjut mitigasi risiko, menyusun serta melaporkan hasil tindak lanjut penanganan insiden terkait.

Proses penanganan insiden keamanan informasi dan *data breach* di BNI dilaksanakan melalui empat tahapan utama sebagai berikut:

Persiapan dan Perencanaan

BNI memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi insiden siber melalui penetapan peran dan tanggung jawab SIRT, penyusunan prosedur tanggap insiden, serta koordinasi lintas fungsi. Pada tahap ini, BNI juga memastikan kesiapan infrastruktur, sistem, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penanganan insiden, dengan melakukan simulasi dan uji coba.

Deteksi dan Analisis

Deteksi dini insiden dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan keamanan oleh Security Operation Center (SOC). SOC melakukan monitoring, investigasi awal, serta analisis peristiwa keamanan menggunakan berbagai alat pendukung, termasuk sistem deteksi dan *threat intelligence*. Setiap indikasi insiden, termasuk potensi kebocoran data, dianalisis untuk menentukan tingkat keparahan, ruang lingkup dampak, serta risiko terhadap operasional dan nasabah. Proses ini melibatkan koordinasi dengan fungsi Manajemen Risiko, Satuan Anti-fraud, kantor wilayah/cabang, serta unit bisnis terkait.

Mitigasi dan Pemulihan

Pada tahap mitigasi, BNI melakukan langkah-langkah pengendalian untuk mencegah perluasan dampak insiden, termasuk isolasi sistem terdampak (containment), penghentian sumber serangan, serta perbaikan kerentanan. BNI juga melaksanakan proses pemulihan sistem dan layanan (recovery) agar operasional dapat kembali berjalan secara normal dengan tetap menjaga keamanan data. Apabila diperlukan, proses mitigasi didukung oleh pelaksanaan *digital forensic* untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dalam kondisi tertentu, BNI juga dapat mengaktifkan *Disaster Recovery Plan* (DRP) untuk menjaga keberlangsungan layanan dan bisnis.

Pelaporan dan Evaluasi

Setiap insiden siber, termasuk *data breach*, didokumentasikan dan dilaporkan secara komprehensif oleh Koordinator SIRT. BNI melakukan evaluasi pascainsiden untuk menilai efektivitas penanganan, mengidentifikasi area perbaikan, serta memperkuat kontrol keamanan informasi. BNI juga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dengan melakukan notifikasi kepada otoritas terkait sesuai peraturan yang berlaku, serta menyusun komunikasi kepada pemangku kepentingan, termasuk nasabah dan publik, apabila diperlukan.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pelindungan Data Pribadi, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai yang berlaku. BNI menerapkan mekanisme sanksi disiplin secara berjenjang, mulai dari demosi sampai dengan pemutusan hubungan kerja, sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan internal, sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola dan pelindungan data yang bertanggung jawab.

Audit dan Pengawasan atas Sistem Keamanan Informasi

Evaluasi dan pengelolaan dampak keamanan data dan siber dilakukan secara berkesinambungan melalui penerapan konsep *three lines model* yang merupakan model tata kelola yang membagi fungsi organisasi menjadi 3 lini yang saling independen dalam melaksanakan fungsinya, antara lain 1st *Line Roles* (*Risk Owner*), 2nd *Line Roles* (*Risk Control*), dan 3rd *Line Roles* (*Risk Assurance*).

Pengelolaan keamanan siber dilaksanakan oleh Divisi Chief Information Security Officer (CISO) yang bertanggung jawab dalam melakukan langkah pencegahan, identifikasi, analisis, investigasi, serta pemulihan insiden keamanan informasi. Secara berkala, Divisi CISO melaporkan tanggung jawabnya kepada Direktur Information Technology BNI sebagai bagian dari pengawasan manajemen.

Efektivitas pengelolaan keamanan siber dievaluasi melalui audit keamanan informasi dan *self-assessment* yang dilakukan setiap tahun oleh Internal Audit. Pada tahun 2025, audit internal difokuskan pada audit Divisi CISO, audit Pengelolaan User Akses Aplikasi Transaksional Kategori *Very Critical*, audit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), ISO 27001:2022 *Information Security*, audit Pengelolaan Data Pribadi (System), dan audit TI sistem pembayaran. Sementara itu, audit eksternal dilakukan dengan frekuensi setiap tahun untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan/standar yang berlaku dengan cakupan audit kebijakan prosedur, tingkat ketersediaan layanan, interkoneksi dan interoperabilitas, keamanan sistem dan aplikasi jaringan pendukung, pengamanan data dan informasi, rencana pemulihan bencana, *fraud management system*, dan audit *trail* transaksi.

BNI juga melibatkan pihak ketiga untuk melakukan asesmen terhadap IT *security* melalui penilaian keamanan (*penetration testing*) sistem/aplikasi. Secara berkala, BNI melakukan pelaporan hasil penilaian terhadap kepada regulator.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi terkait Keamanan Siber

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman siber di sektor perbankan, BNI memprioritaskan penguatan ketahanan siber melalui pengembangan kompetensi pegawai. BNI secara konsisten menyelenggarakan program pelatihan dan sertifikasi keamanan siber yang komprehensif guna memastikan seluruh pegawai BNI memiliki kesadaran dan keahlian untuk mengidentifikasi, mencegah, serta merespons potensi ancaman keamanan informasi. Pegawai yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi ini mencakup pegawai tetap, kontrak, *trainee*, hingga tenaga kerja alih daya.



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi terkait Keamanan Siber dan Metode Penyampaian

In-Class Learning
- *Comprehensive Webmethods: Integration, Debugging, and API Service*
- *Cyber Defense Academy (CDA)*
- *Cyber Security Fundamentals*
- Cybersecurity bagi Data Protection Officer (DPO)
- *ISO 27001:2022 Information Security Management System*
- *IT Governance, Risk Management, Assurance & Cybersecurity Summit*
- *IT Software Development Life Cycle (SDLC)*
- *Pelatihan Auditor - Data Security & Governance*
- *Pelatihan Auditor - IT & Digital Audit Forensic*
- *Pelatihan Auditor - IT Audit Fundamental*
- *Pelatihan Auditor - IT Governance & New SDLC*
- *Pelatihan Auditor - Penetration & Vulnerability Testing*
- *Seminar Kejahatan Siber: Ancaman dan Solusi Keamanan Siber*
- *Webmethod Integration Server - Advanced*

e-Learning Mandatory
- *Security Awareness*
- *Cyber Security*

Webinar
- *Financial Crimes Sharing Session*
- *Leading Business: The Future of Banking - Artificial Intelligence & Blockchain Innovation*

Kuis Harian/Daily Exercise for Employee Program (DEEP 45)
- *Blockchain*
- *Security Awareness* – Pengamanan pada Penyebaran Data
- *Security Awareness* - Pengamanan Perangkat *Endpoint*

Sertifikasi
- Certified Chief Information Security Officer (CCISO)
- Certified Cloud Security Professional (CCSP)
- Certified Information Security Manager (CISM)
- Certified Information System Auditor (CISA)
- Certified in Risk & Information System Control (CRISC)
- COBIT 5 Foundation Certification
- COMPTIA CYSA+
- COMPTIA Security+
- ITIL V4 Foundation Certification
- The Open Group Architecture Framework
- Mikrotik Certified Network Administrator (MTCNA)

Survei Kepuasan Nasabah

BNI kembali menorehkan capaian membanggakan melalui hasil Survei Kepuasan Nasabah yang menempatkan BNI sebagai salah satu lembaga keuangan dengan tingkat kepuasan tertinggi. Hal ini terwujud melalui hasil survey "*Bank Service Excellence Monitor* (BSEM) 2025" yang diselenggarakan Marketing Research Indonesia (MRI) dan BNI menduduki posisi pertama sebagai Bank Umum Konvensional Terbaik. Pencapaian ini menjadi refleksi nyata atas komitmen BNI dalam menghadirkan layanan yang prima, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah di setiap titik interaksi.

Sebagai bagian dari sistem pengelolaan mutu layanan, BNI menggunakan *Customer Satisfaction Survey* (CSS) sebagai alat evaluasi berkala untuk menilai kinerja layanan dari sudut pandang pengguna eksternal maupun internal. Hasil survei menjadi salah satu input utama dalam proses peningkatan kualitas layanan dan penyempurnaan proses bisnis Bank. Adapun survei tersebut dilakukan melalui dua aspek evaluasi, yaitu:

1. *Business Satisfaction Survey* (BSS). Survei ini dilakukan kepada nasabah atau debitur dari segmen Business Banking (Korporasi, Menengah, Kecil) dan segmen Retail (Emerald dan Non-Emerald). Survei ini mengevaluasi kepuasan nasabah berdasarkan aspek 7P: *product, price, place, promotion, people, process*, dan *physical environment*.

2. *User Satisfaction Survey* (USS). Survei yang dilakukan di internal BNI yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan atas kinerja layanan yang diberikan oleh divisi/satuan/unit fungsional dan sekaligus menjadi wawasan dalam rangka peningkatan kualitas layanan di masing-masing unit yang di survei. Aspek penilaian dalam survei ini meliputi aspek: koordinasi, komunikasi, kerja sama; hasil kerja/ *output*; proses kerja; komitmen/SLA; pegawai; serta penyediaan data/informasi.

Pendekatan pengukuran kepuasan yang mencakup perspektif eksternal dan internal memungkinkan BNI memperoleh gambaran menyeluruh atas kualitas layanan yang diberikan. Umpan balik dari CSS digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) di seluruh lini layanan. Pada tahun 2026, skor CSS BNI tercatat sebesar 4,43 pada skala 1-5, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 4,28.



Penanganan Pengaduan Nasabah

Setiap interaksi nasabah, termasuk keluhan, kritik, dan masukan, diperlakukan oleh BNI sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan. Untuk itu, BNI menetapkan mekanisme penanganan pengaduan berbasis *Service Level Agreement* (SLA), dengan penyelesaian pengaduan lisan maksimal 6 hari kerja dan pengaduan tertulis maksimal 10 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap, dan dapat diperpanjang 10 hari kerja berikutnya. Nasabah dapat menyampaikan pengaduan melalui *Contact Center*, kantor cabang, maupun berbagai kanal digital resmi BNI, termasuk media sosial, WhatsApp, situs web, surel, dan fitur Tanya BNI pada aplikasi BNI Mobile Banking. Seluruh proses penanganan dipantau secara terpusat oleh Divisi Customer Experience Center di bawah pengawasan Direktur Operations.



BNI menghormati hak nasabah untuk memperoleh penyelesaian sengketa secara adil. Oleh karena itu, apabila penyelesaian pengaduan tidak menghasilkan kesepakatan, nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) maupun melalui pengadilan, sesuai dengan pilihan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Mekanisme Pengaduan Pelanggan dan Penyelesaiannya



BNI memanfaatkan aplikasi *customer journey* terintegrasi untuk mengelola pengaduan nasabah secara terpusat di seluruh titik layanan. Melalui pendekatan *omnichannel*, data nasabah yang masuk dari berbagai kanal dapat diakses dalam satu sistem, memungkinkan pencatatan, pemantauan, dan penyelesaian pengaduan dilakukan secara konsisten. Sistem ini secara otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah pada saat proses pengaduan telah selesai.

Jumlah Pengaduan dan Persentase Penyelesaian

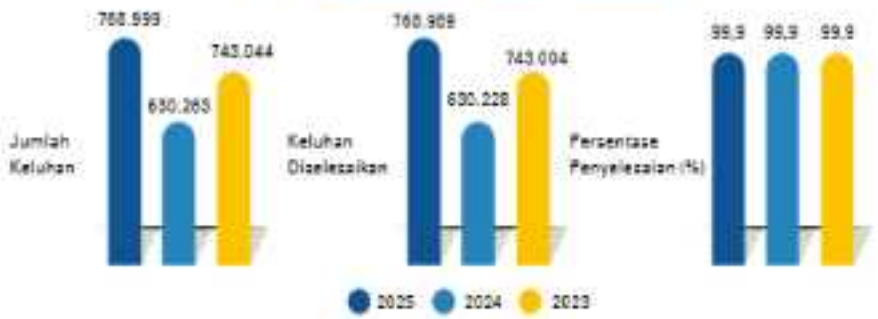

Sepanjang tahun 2026, BNI menerima berbagai interaksi dari nasabah yang didominasi oleh permintaan informasi produk dan jasa sebesar 67,2%, diikuti permintaan atau perubahan data nasabah (20,0%), pengaduan (11,4%), serta transaksi (1,4%). BNI terus berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA). Untuk dapat menyelesaikan pengaduan sesuai SLA, BNI terus melakukan perbaikan proses bisnis, meningkatkan kapabilitas pegawai dalam memproses penyelesaian pengaduan dan memperbaiki sistem teknologi agar dapat menyelesaikan pengaduan secara otomatis.

Demi memastikan nasabah tidak menghadapi kesulitan dalam melakukan transaksi serta terhindar dari modus-modus kejahatan, BNI secara konsisten mengedukasi nasabah tentang solusi perbankan, tips aman dalam bertransaksi, dan selalu waspada terhadap modus kejahatan perbankan sebagai bagian dari kegiatan

pelindungan konsumen. Sosialisasi dan edukasi pelindungan konsumen rutin dilakukan oleh BNI melalui media daring dan luring, serta Direksi BNI juga turut berpartisipasi dalam pemberian sosialisasi dan edukasi tersebut.

Selain pengaduan yang diterima secara langsung, Customer Experience Center juga menangani pengaduan yang disampaikan melalui regulator, termasuk Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, BNI secara berkala melaporkan penanganan pengaduan yang berkaitan dengan aspek finansial kepada Bank Indonesia melalui aplikasi Antasena dengan frekuensi empat kali setahun serta kepada OJK melalui aplikasi siPaduli dengan frekuensi dua kali setahun.

Pengawasan Tata Kelola Penyelesaian Pengaduan

BNI menempatkan pengelolaan pengaduan nasabah sebagai bagian integral dari sistem tata kelola dan manajemen risiko. Kinerja pengelolaan pengaduan dilakukan oleh Direksi dan dipantau oleh Komite Pemantau Risiko yang setingkat Dewan Komisaris. Unit pengelola yang bertanggung jawab atas pengaduan nasabah, yaitu Divisi Customer Experience Center, wajib menyampaikan laporan pelindungan konsumen, termasuk di dalamnya laporan pengaduan nasabah, secara berkala minimal dua kali dalam setahun kepada Direksi dan Komisaris sebelum dilaporkan kepada Bank Indonesia dan OJK.

BNI juga memberikan perhatian khusus untuk menangani pengaduan nasabah terkait penagihan kredit retail dengan membuka nomor *hotline* khusus yang secara langsung akan ditangani oleh Unit Complaint Handling pada Divisi Retail Collection & Recovery.

Di luar aspek kepatuhan, pengelolaan pengaduan nasabah juga digunakan sebagai parameter pengukuran risiko reputasi. Pembahasan profil risiko reputasi dilakukan secara terstruktur melalui rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan paling sedikit empat kali setiap tahun, guna memastikan potensi risiko reputasi dapat diidentifikasi dan dimitigasi secara tepat waktu.

Pelindungan Konsumen

Kebijakan Pelindungan Finansial Pelanggan

Pelindungan finansial nasabah di BNI dimulai sejak tahap awal hubungan perbankan melalui analisis profil dan kemampuan keuangan calon nasabah, guna memastikan pemahaman produk serta mencegah pemberian pembiayaan yang melebihi kapasitas finansial. BNI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penetapan limit, kriteria risiko, serta penggunaan analisis data untuk menilai kemampuan bayar nasabah secara objektif. Dalam kondisi tertentu, BNI juga menyediakan opsi restrukturisasi atau penyesuaian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang menghadapi tekanan keuangan, agar kewajiban dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Pendekatan tersebut dilengkapi dengan mekanisme pelindungan yang konsisten sepanjang siklus pembiayaan, termasuk pada tahap pemantauan kualitas kredit dan penyelesaian kewajiban nasabah. Sejalan dengan prinsip tersebut, proses penagihan kredit dilaksanakan dengan mengedepankan etika, privasi, serta martabat nasabah. Di sisi lain, pelindungan data dan keamanan informasi nasabah menjadi prioritas utama, yang dikelola melalui penguatan sistem, kebijakan internal, dan pengawasan berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas layanan perbankan.

Pelatihan Pegawai terkait Pelindungan Finansial Pelanggan (413-2)

BNI secara konsisten memperkuat kapasitas karyawan dalam aspek pelindungan keuangan pelanggan melalui penyelenggaraan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan *conduct risk* dengan memastikan pegawai memahami kewajiban penyampaian informasi produk dan layanan keuangan secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Melalui peningkatan kompetensi ini, BNI mendorong praktik penjualan yang transparan dan bertanggung jawab, sekaligus membangun budaya layanan yang mengutamakan kepentingan, keamanan, dan pelindungan finansial nasabah.

Pegawai yang mendapatkan pelatihan ini mencakup pegawai tetap, kontrak, *trainee*, dan tenaga kerja alih daya, termasuk *Relationship Manager* (RM) dan *Frontliner*, seperti *Customer Service*, *Teller*, dan Emerald Service, yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Selama tahun 2026, cakupan pelatihan terkait pelindungan keuangan pelanggan di antaranya:

47 **Judul**
dengan topik meliputi Edukasi & *Awareness* Pelindungan Konsumen & Masyarakat, *Anti-Fraud*, dan *Security Awareness*.

42.324 **pegawai**
yang terdiri dari pegawai tetap, kontrak, *trainee*, hingga tenaga kerja alih daya. Setiap pegawai menerima rata-rata 3 kali pelatihan tiap tahunnya.

Penagihan Kredit yang Beretika

BNI menerapkan kebijakan penagihan kredit yang mengedepankan pendekatan persuasif dan namun tetap menghormati hak-hak serta martabat nasabah. Penagihan kredit untuk segmen Retail dilakukan oleh pihak pegawai internal Bank dan pihak ketiga penyedia jasa penagihan melalui skema kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku. Keseluruhan proses penagihan baik melalui pihak internal maupun eksternal dimonitor oleh Divisi Retail Collection & Recovery.

Proses penagihan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal BNI yang tercantum dalam Pedoman Perusahaan (PP) Prosedur Tata Kerja Divisi Retail Collection and Recovery, serta mengacu pada ketentuan eksternal, khususnya POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Kebijakan tersebut mengatur bahwa penagihan kredit kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menerapkan prinsip etika, kepatutan, serta mempertahankan kondisi dan kemampuan konsumen dalam melakukan penagihan. Salah satu bentuk etika penagihan yang menjadi pedoman antara lain:

a. penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen;
b. penagihan dilakukan tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
c. penagihan dilakukan tidak kepada pihak selain konsumen;
d. penagihan dilakukan tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
e. penagihan dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen;
f. penagihan dilakukan hanya pada hari senin sampai dengan sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
g. penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, mekanisme penagihan dimulai dari pemberitahuan melalui kanal digital, seperti pesan singkat tertulis (via Whatsapp), pesan suara, panggilan telepon memanfaatkan teknologi AI (dalam hal ini Robo Coll), dan panggilan telepon melalui petugas penagihan, serta kunjungan langsung oleh petugas untuk debitur yang sulit dihubungi. Dalam upaya melakukan penagihan BNI juga memberikan surat peringatan bertahap (Surat Teguran 1, Surat Teguran 2, dan Surat Teguran 3) yang disesuaikan dengan jumlah hari keterlambatan debitur yang mencantumkan informasi utama seperti tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, pokok dan denda terutang sesuai dengan ketentuan POJK.

Selain itu, penagihan juga dilakukan melalui kerja sama dengan penyedia jasa penagihan khusus untuk debitur wanprestasi. BNI memastikan setiap kerja sama dengan penyedia jasa penagihan dilakukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan terhadap data nasabah, tunduk pada ketentuan dan pengawasan Bank, serta wajib mematuhi kode etik yang berlaku.

Untuk memastikan proses penagihan kredit dijalankan secara profesional dan beretika, BNI menyelenggarakan program pelatihan secara berkelanjutan kepada para petugas yang terlibat dalam penagihan kredit. Informasi tersebut dapat dilihat pada bagian Data Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai.

Opsi Restrukturisasi dan Penyesuaian Kredit

BNI menyediakan opsi restrukturisasi dan penyesuaian kredit *(loan modification options)* bagi debitur yang menghadapi kesulitan keuangan. Skema restrukturisasi dirancang berbasis kemampuan bayar *(income-based repayment)* dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada kebijakan dan prosedur terkait restrukturisasi tertuang dalam Pedoman Perusahaan Perkreditan terkait Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit berupa penurunan tunggakan bunga kredit, penundaan pembayaran angsuran pokok, penundaan pembayaran bunga, dan penyesuaian jadwal/jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan didasarkan pada prinsip objektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran. Setiap kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar debitur sesuai proyeksi arus kas, serta restrukturisasi diputus oleh pejabat pemutus restrukturisasi (dalam hal ini pejabat yang tidak terlibat dalam pemberian kredit) atau pejabat yang lebih tinggi dari pejabat pemutus pemberian kredit.

BNI memastikan debitur memperoleh akses informasi yang jelas mengenai pilihan restrukturisasi dan mekanisme pengajuan, serta simulasi angsuran restrukturisasi dari petugas penagihan. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis risiko untuk mendukung keberlanjutan usaha debitur sekaligus menjaga kualitas aset dan manajemen risiko bank, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan konsumen.

Skema restrukturisasi yang ditawarkan ke debitur disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial dan kondisi usaha debitur terakhir. Selain itu, simulasi angsuran setelah restrukturisasi disampaikan secara tertulis ke nasabah sebelum perjanjian kredit restrukturisasi ditandatangani oleh debitur dan pihak BNI.

Di penghujung tahun 2026, BNI juga memberikan kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk membantu debitur segmen Business Banking dan Retail agar tetap memiliki kesempatan memulihkan kondisi keuangan serta melanjutkan aktivitas usaha setelah terdampak bencana. Perlakuan khusus skim restrukturisasi kredit bagi daerah dan/atau sektor tertentu yang terdampak bencana mengacu pada ketentuan eksternal POJK No. 19 tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana dan telah dituangkan dalam dokumen ketentuan internal Keputusan Komite Prosedur Perkreditan (KPP) No. 13/30/KPP/2026 tanggal 17 Desember 2026.



Alur Pelaksanaan & Pengawasan Restrukturisasi

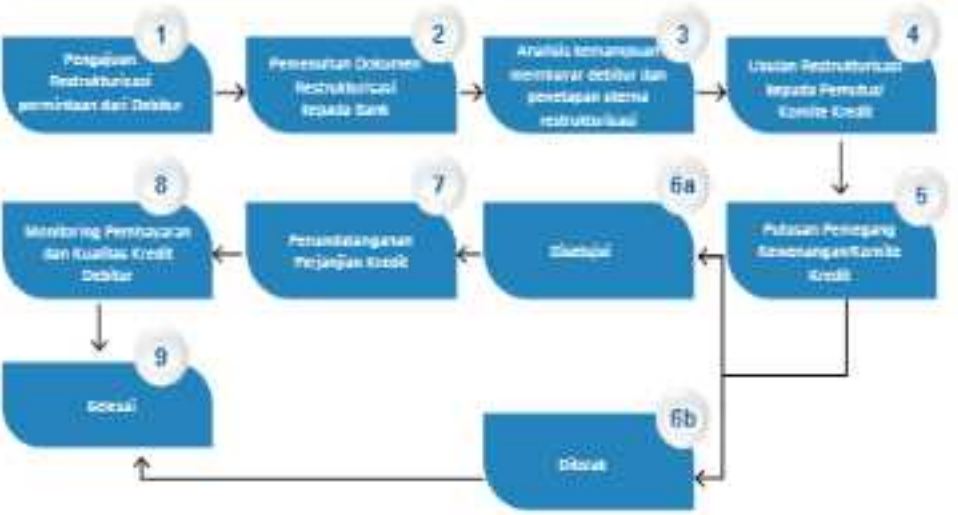

Sementara itu, informasi lebih lanjut mengenai penanganan kredit bermasalah telah disampaikan dalam Laporan Tahunan BNI Bab Pengelolaan Risiko Kredit.

Alur Penanganan Kredit Bermasalah

1. Restu
Penelaahan kualitas kredit secara berkala berdasarkan parameter penilaian kualitas aset sesuai dengan ketentuan regulator serta kebijakan internal Bank.

2. Single Integrated Monitoring Tool (SIMON)
Single Integrated Monitoring Tool (SIMON) merupakan alat pemantauan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko debitur, dengan memprediksi debitur yang berpotensi mengalami penurunan kualitas atau risiko gagal bayar dalam 12 bulan ke depan. Pemantauan tersebut dilakukan dengan menggunakan aspek kuantitatif dan kualitatif, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk pemantauan dan langkah lanjutan terhadap debitur.



3. Restrukturisasi Kredit
Melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki repayment capacity dan menunjukkan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meningkatkan kualitas aset Bank.

4. Write-Off
Melakukan penghapusbukuan kredit dari neraca Bank sesuai dengan kebijakan internal. Meskipun telah dilakukan write-off, BNI tetap melaksanakan upaya penagihan dan penyelesaian kredit.

5. Exit Strategy
Menerapkan strategi penyelesaian kredit melalui eksekusi atau penjualan agunan, langkah hukum, maupun mekanisme penyelesaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Monitoring
Melakukan pemantauan atas pemenuhan kewajiban debitur, baik pascarestrukturisasi maupun pada kredit bermasalah lainnya, untuk memastikan efektivitas penanganan dan menjaga kualitas kredit.

Kebijakan Pemasaran yang Bertanggung Jawab

Pemasaran Produk dan Layanan yang Adil dan Transparan

Dalam kegiatan pemasaran, BNI memastikan bahwa seluruh informasi terkait produk dan layanan kredit disampaikan secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan, termasuk mengenai manfaat, risiko, biaya, serta hak dan kewajiban nasabah. Komunikasi produk dan layanan yang adil transparan dilakukan dengan mengoptimalkan platform digital yang telah dimiliki dan dikelola oleh BNI (*own media*).

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemasaran

Praktik pemasaran produk dan ini sejalan dengan ketentuan OJK mengenai pelindungan pelanggan serta kebijakan internal BNI terkait etika pemasaran produk perbankan yang tertuang dalam Pedoman Perusahaan (PP) Tata Kerja Divisi Manajemen Pemasaran & Portofolio Segmen Retail; PP Komunikasi Pemasaran Terpadu; PP Pengelolaan Event; PP Sponsorship; dan PP Periklanan. Selain itu, BNI juga berpedoman pada regulasi eksternal, antara lain POJK No 22 tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pedoman Iklan Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Hal ini memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi, ekspektasi pemangku kepentingan, serta praktik terbaik industri perbankan nasional dan internasional.

Penerapan kebijakan pemasaran berada di bawah pengawasan Direksi melalui Komite Marketing Strategy yang terdiri dari Direktur Consumer Banking, Direktur Finance & Strategy, Direktur Network & Retail Funding dan Direktur Corporate Banking dengan frekuensi pelaksanaan komite minimal dua kali dalam setahun. Komite Marketing Strategy memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan strategi besaran *marketing & corporate branding* BNI yang sejalan dengan rencana strategis bisnis BNI (Corporate Plan & RBB).
2. Melakukan prioritisasi inisiatif/program *marketing & corporate branding* BNI (termasuk anggaran dan *timeline*) yang berdampak signifikan terhadap bisnis dan kegiatan usaha BNI dan sejalan dengan *planning & budgeting* BNI.
3. Melakukan reviu atas rencana & memonitor realisasi strategi *marketing & corporate branding* BNI.

Dalam rangka memperkuat komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab, BNI terus mengembangkan kompetensi pegawai melalui berbagai program pelatihan dan seminar sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

No.	Nama Pelatihan	Bentuk Pelatihan	Jumlah Peserta	Cakupan peserta		Frekuensi pelatihan (dalam 1 tahun)
				Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	
1	Marketing+Media Alliance *Innovate* Indonesia 2025	Konferensi	3	v	x	1
2	*Performance Marketing (Paid Advertising)*	*Public training*	1	v	v	1
3	*Comprehensive Marcomm Program for Bankers: Skills for Daily Execution*	*In-house training*	50	v	v	2
4	*Digital & Social Selling* - Menjadi Pemasar Andal di Era Digital	Webinar	2.254	v	v	1
5	*Strategic Digital Leadership - Mastering Digital Leadership: Digital Marketing And Business Growth Optimization*	Webinar	2.280	v	v	1

Periklanan yang Etis

BNI melaksanakan kegiatan periklanan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan prinsip etika dan kepatuhan. Ketentuan periklanan diatur dalam Pedoman Perusahaan (PP) Pengelolaan Periklanan, yang memastikan bahwa informasi mengenai produk dan layanan Bank disampaikan secara jujur, jelas, dan akurat, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya, BNI memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan tidak bersifat menyesatkan serta meminimalkan potensi perbedaan penafsiran antara Bank dan nasabah. Kebijakan ini sekaligus bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya sengketa. Materi pemasaran produk dan layanan perbankan, termasuk yang disampaikan melalui media digital, disusun dan disesuaikan dengan kode etik periklanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inovasi dan Pengembangan Layanan Perbankan

Inovasi dan Pengembangan Produk dan/atau Jasa

Sepanjang tahun 2026, Perseroan secara konsisten memperkuat fundamental inovasi produk dan layanan sebagai manifestasi dari komitmen transformasi digital yang berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya dirancang untuk memperluas aksesibilitas layanan keuangan yang responsif, namun juga untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, andal, dan aman. Selaras dengan dinamika pasar yang bersifat *digital-first*, Perseroan terus melakukan modernisasi infrastruktur guna meningkatkan efisiensi layanan serta mempercepat penetrasi inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat.

Pilar utama dalam peta jalan digital Perseroan tetap berfokus pada pengayaan kapabilitas aplikasi wondr by BNI. Sebagai platform perbankan terintegrasi, wondr by BNI menyediakan solusi komprehensif bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan transaksi harian, pengelolaan keuangan, hingga instrumen investasi.

Pada tahun pelaporan, Perseroan mencapai tonggak sejarah baru melalui peluncuran fitur wondr *multicurrency*. Inovasi ini memungkinkan nasabah untuk mengelola hingga 12 jenis mata uang asing dalam satu rekening tunggal (*single account*), memberikan efisiensi biaya dan kenyamanan transaksional bagi nasabah dengan mobilitas global tinggi, serta mendukung integrasi ekonomi lintas batas.

Transformasi digital ini memberikan dampak signifikan terhadap kapabilitas operasional Perseroan. Optimalisasi kanal digital telah mendorong peningkatan volume transaksi hingga mencapai nilai triliunan rupiah, diikuti dengan pertumbuhan basis pengguna aktif yang substansial. Hal ini mencerminkan ketangkasan Perseroan dalam mengadaptasi evolusi perilaku nasabah yang kini mengutamakan akses mobilitas (*mobile-first*).

Selain manfaat finansial, digitalisasi layanan ini memberikan kontribusi nyata terhadap aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan meminimalisasi proses manual dan penggunaan dokumen fisik (*paperless*), Perseroan berhasil menurunkan konsumsi sumber daya operasional dan mengurangi jejak lingkungan (*environmental footprint*). Melalui pengembangan produk digital yang relevan dan berkelanjutan, BNI berkomitmen untuk mempertahankan daya saing jangka panjang sekaligus menjadi motor penggerak inklusi keuangan nasional. Setiap pengembangan produk digital dikomunikasikan melalui notifikasi pada aplikasi, serta disampaikan secara langsung melalui sosialisasi kepada institusi yang bekerja sama dengan BNI dan edukasi kepada nasabah oleh *frontliner* di kantor cabang.

Kemudahan Digital *Banking*

BNI memperkuat penyediaan layanan keuangan yang inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau ekosistem masyarakat yang lebih luas. Melalui agenda transformasi yang berkelanjutan, Perseroan mengintegrasikan inovasi layanan dengan upaya peningkatan efisiensi proses bisnis. Pengembangan kemudahan *digital banking* senantiasa mengedepankan aspek keberlanjutan solusi, di mana setiap inovasi telah melalui proses tinjauan lintas unit yang mendalam untuk memastikan relevansi terhadap kebutuhan nasabah. Dengan sistem pemantauan yang andal dan berkelanjutan, Perseroan memastikan bahwa kemudahan transaksi digital yang diberikan tetap berada dalam kerangka perlindungan konsumen yang kuat.

Memperkuat Daya Saing Melalui Digitalisasi

Perseroan menetapkan transformasi digital sebagai pilar strategis dalam memperkokoh daya saing jangka panjang guna menghadapi eskalasi disrupsi teknologi serta penetrasi pelaku jasa keuangan nonbank dan bank digital. Komitmen ini selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (*Corporate Plan*) 2024-2028, yang mengusung aspirasi menjadi "*The Bank with Best Technology & People at the Core to Serve You*". Strategi ini diimplementasikan secara terstruktur melalui tiga area fokus utama: *productivity*, platform, dan *proposition* yang menjadi fundamental bagi pengembangan kapabilitas bisnis dan ketahanan teknologi Perseroan.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas operasional, Perseroan mengintegrasikan teknologi *artificial intelligence* (AI) dan *cloud computing* di berbagai lini bisnis. Utilisasi AI diarahkan untuk memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen melalui:

- Analitik prediktif: Personalisasi layanan dan analitik risiko yang lebih akurat.
- Keamanan sistem: Deteksi dini potensi kecurangan (*fraud detection*).
- *Conversational banking*: Peningkatan responsivitas layanan pelanggan.

Sementara itu, adopsi teknologi *cloud* memastikan skalabilitas dan keandalan sistem dalam melayani segmen ritel, UMKM, hingga korporasi secara tangkas dan efisien.

Perseroan juga melakukan transformasi jaringan fisik melalui optimalisasi format *outlet* yang disesuaikan dengan karakteristik demografis dan kebutuhan wilayah. Langkah ini diikuti dengan reposisi peran tenaga pemasar garis depan (*frontliner*) ke dalam model layanan yang lebih produktif dan berorientasi pada solusi. Digitalisasi proses operasional, seperti pembukaan rekening berbasis biometrik, *digital loan*, serta otomasi proses internal melalui data *analytics*, telah memberikan dampak signifikan pada efisiensi biaya umum dan administrasi serta efektivitas biaya operasional secara keseluruhan.

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap aspek lingkungan, transformasi digital Perseroan secara simultan mendorong pengurangan ketergantungan pada penggunaan kertas (*paperless operation*). BNI secara bertahap mengonversi dokumen fisik dan proses administrasi manual ke dalam sistem digital yang terintegrasi. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam menekan jejak karbon operasional dan meningkatkan efisiensi sumber daya, seraya memastikan bahwa setiap tahapan perjalanan pelanggan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan. [illegible]





Digital Banking:

- Optimalisasi *e-Office* BNI, yaitu portal aplikasi persuratan internal yang mencakup memo, nota intern, dan surat-menyurat resmi yang tercatat serta beredar di lingkungan BNI.
- Digitalisasi proses presensi pegawai melalui DigiHC, mencakup pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran, pengajuan cuti atau izin, serta keterlambatan.
- Penerapan DigiCode, yaitu sistem pengelolaan *standard operating procedure* (SOP) internal yang terintegrasi dengan konsep *paperless*.
- Pemanfaatan aplikasi *e-Procurement* BNI dan *e-Arsip* untuk mengoptimalkan otomasi dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan dokumen pendukungnya.
- Digitalisasi pengajuan dan pemantauan lembur (*overtime*) pegawai melalui DigiHC, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi SDM.
- Penerapan *electronic loan* – Pengelolaan Dokumen Kredit Terpadu (eLO PDKT), yang saat ini digunakan pada pengelolaan dokumen kredit konsumen, mulai dari proses review hingga verifikasi.
- Simplifikasi materi pemasaran dengan mengalihkan penyampaian informasi ke platform digital, khususnya melalui optimalisasi konten pada situs web BNI dan pada *super apps wondr by BNI* guna menekan penggunaan *marketing collateral* berbasis cetak.
- Optimalisasi layanan *digital banking* kepada nasabah, antara lain melalui *digital acquisition* kartu kredit dan penerapan *e-billing statement*.
- Penerapan Digiposter, yaitu layar digital yang digunakan sebagai pengganti poster dan *standing banner* berbahan kertas, serta berfungsi sebagai media promosi dan komunikasi yang informatif bagi nasabah maupun pegawai.
- Penerapan DigiCS, yaitu mesin layanan *customer service* mandiri (*self-service*) di kantor cabang BNI yang memudahkan dan mempercepat akses layanan perbankan tanpa bergantung pada petugas *customer service*.
- Pemanfaatan media digital internal, seperti grup WhatsApp internal, untuk penyampaian undangan rapat antar unit kerja, sebagai alternatif pengganti undangan cetak.



Inisiatif Konvensional

- Penghematan kertas melalui pemanfaatan kertas bekas serta mendorong peningkatan digitalisasi dalam aktivitas administrasi.
- Pengurangan pencetakan *hardcopy* untuk dokumen publikasi utama, termasuk Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Pemakaian Kertas di Wilayah BNI (Kg)

Uraian	2025	2024	2023
Kantor pusat	52.985	60.348	148.939
Kantor wilayah dan cabang	1.512.140	1.531.636	1.789.345
Total	**1.565.125**	**1.591.984**	**1.936.284**

Dampak E-Office pada Pengurangan Kertas

(Satuan Lembar Kertas) (GRI 4)

Uraian	2025	2024	2023
Electronic SOF/BNI e-PP	71.269.300	57.200.420	46.503.360
Electronic billing statement BNI e-billing	13.996.855	13.486.086	13.583.123
Efisiensi amplop *billing*/BNI e-billing	49.092	57.735	70.142
Total	**85.315.127**	**70.832.241**	**60.156.625**

Dampak eLO POKT pada Pengurangan Kertas



Jumlah Dokumen yang Beredar melalui Aplikasi

Uraian	2025	2024	2023
Memo	97.616	81.761	100.742
Nota intern	4.129	3.150	7.110
Surat eksternal	32.554	32.711	43.664
Total dokumen	**134.299**	**117.622**	**151.516**
Lembar disposisi	**331.624**	**284.769**	**423.585**

Dalam mendukung inklusi keuangan dan perluasan jangkauan layanan, BNI melanjutkan penguatan BNI Agen46 sebagai kanal *branchless banking* yang memungkinkan akses layanan perbankan hingga ke wilayah yang belum terjangkau jaringan kantor. Selain itu, BNI juga memperkuat peran Xpora, sebagai solusi terintegrasi bagi UMKM berorientasi ekspor, yang didukung oleh platform digital BNI untuk memfasilitasi pembayaran, transaksi perdagangan internasional, dan perluasan pasar global.

Meningkatkan Pengalaman Pelanggan

BNI menetapkan peningkatan pengalaman pelanggan (*customer experience*) sebagai pilar utama dalam strategi transformasi digital. Komitmen ini diimplementasikan melalui pengembangan platform digital yang mengedepankan aspek integrasi, keamanan, dan fungsionalitas bagi seluruh segmen nasabah. Pada segmen Retail, Perseroan secara berkelanjutan memperkuat ekosistem aplikasi wondr by BNI melalui tiga pilar utama yaitu *Insight*, *Transaction*, dan *Growth*. Sebagai bagian dari peta jalan inovasi, pada tahun 2026 BNI melakukan ekspansi fitur *multicurrency* guna memfasilitasi kebutuhan transaksi lintas negara serta mendukung inklusi keuangan global.

Sebagai wujud komitmen BNI dalam mendukung transformasi digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pada bulan Agustus 2025 di acara BNI Wondr X, BNI telah meluncurkan BNIdirect bisnis yang dirancang khusus untuk mendukung transaksi nasabah UMKM. Dengan tampilan yang lebih segar dan modern, platform ini mempermudah pengusaha UMKM untuk memantau arus kas secara *real-time*, mengelola likuiditas dengan lebih baik, memenuhi berbagai kebutuhan transaksi, dengan kapabilitas *single user* yang membuat pengelolaan transaksi nasabah semakin efisien. Fitur rekap finansial yang tersedia juga membantu nasabah untuk memantau pemasukan dan pengeluaran bisnis dengan cepat. Kehadiran kapabilitas ini diharapkan mampu memberikan pengalaman yang lebih personal dan memudahkan transaksi bagi nasabah UMKM.

Dalam mendukung UMKM untuk *go global*, BNIdirect bisnis dilengkapi dengan fitur unggulan seperti transfer internasional yang cepat, informasi kurs *real-time*, pengelolaan multi-mata uang dalam satu rekening, serta integrasi dengan berbagai solusi keuangan digital lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas interaksi dan respons layanan, BNI juga mengoperasikan aplikasi *contact center* digital berbasis AI dan *natural language processing* (NLP). Aplikasi ini memungkinkan interaksi yang lebih cepat, konsisten, dan responsif dengan nasabah, sekaligus meningkatkan efisiensi penanganan permintaan layanan. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari upaya BNI untuk menjaga kualitas layanan seiring meningkatnya volume transaksi digital.

Selain pengembangan internal, BNI secara aktif menjalin kolaborasi strategis dengan mitra eksternal untuk memperkaya ekosistem layanan digital. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah integrasi BNI API *One Gate Payment* dengan Bluebird, yang memudahkan transaksi, pemantauan arus kas, serta *real-time disbursement* bagi puluhan ribu mitra pengemudi. Kolaborasi ini mencerminkan peran BNI sebagai *enabler* transformasi digital bagi mitra usaha, sekaligus menciptakan nilai tambah yang saling menguntungkan.

Secara holistik, digitalisasi layanan dan transformasi pengalaman nasabah yang dijalankan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta akselerasi layanan, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam menciptakan nilai tambah jangka panjang. Inisiatif ini berdampak positif pada optimalisasi efisiensi operasional, penguatan retensi nasabah, serta peningkatan kontribusi pendapatan berbasis komisi (*fee-based income*) dan struktur dana murah (CASA). Melalui sinergi yang harmonis antara teknologi, perbaikan proses bisnis, dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia, Perseroan berkomitmen untuk membangun *customer journey* yang relevan, konsisten, dan berkelanjutan guna menghadapi dinamika ekonomi digital.

Akses dan Keterjangkauan Layanan Perbankan

Perseroan menetapkan perluasan akses terhadap produk dan layanan keuangan sebagai prioritas strategis dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Hal ini diwujudkan melalui penguatan sinergi antara kanal digital dan jaringan konvensional guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara geografis. Hingga periode pelaporan, Perseroan telah mengoperasikan jaringan layanan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, ekspansi global Perseroan di tujuh negara menjadi bukti komitmen BNI dalam memfasilitasi kebutuhan layanan perbankan dan sistem pembayaran. Praktik pemasaran produk ini sejalan dengan ketentuan OJK mengenai pelindungan pelanggan serta kebijakan internal BNI terkait etika pemasaran produk perbankan, serta akses pemblayaan nasabah di kancah internasional.

Sejalan dengan dinamika industri jasa keuangan, Perseroan secara berkelanjutan mengembangkan portofolio produk dan layanan digital serta finansial, finansial lainnya, termasuk layanan kartu kredit dengan berbagai fitur digital, seperti pembayaran digital (QRIS), cicilan, dan dana tunai melalui wondr by BNI, serta program loyalitas yang adaptif. Dalam pelaksanaannya, BNI secara aktif menyampaikan informasi produk dan layanan, termasuk ketentuan, manfaat, biaya, dan risiko kartu kredit, sesuai dengan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Perseroan memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang diluncurkan telah melalui mekanisme tata kelola yang ketat, mencakup:

- Persetujuan otoritas regulator terkait.
- Proses manajemen risiko yang komprehensif.
- Uji kepatuhan (*compliance test*) dan kajian aspek pendukung lainnya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi dan transparansi, Perseroan mendiseminasikan informasi produk secara jelas, akurat, dan mudah dipahami melalui strategi komunikasi *omnichannel*. Saluran informasi ini mencakup kantor cabang, jaringan BNI Agen46, media cetak dan elektronik, media sosial, aplikasi wondr by BNI, serta situs web resmi Perseroan.

Guna mendukung interaksi berkelanjutan dengan nasabah, Perseroan menyediakan pusat layanan konsultasi yang responsif melalui BNI Call serta kanal digital mutakhir seperti WhatsApp Business BNI dan *virtual assistant*. Layanan ini dirancang untuk memastikan nasabah mendapatkan dukungan informasi secara *real-time*, sekaligus memperkuat ekosistem perlindungan konsumen yang andal dan terpercaya.

Kinerja Perbankan Digital

wondr

1.972 Triliun
(27,1% YoY)
Volume Transaksi

BNIdirect

2.380 Triliun
(26,4% YoY)
Pertumbuhan volume transaksi BNIdirect

Xpora

21,4 Triliun
(16,5% YoY)
Volume Transaksi

Etika Bisnis dan Kepatuhan

Tanggung Jawab Produk dan/ atau Jasa Keuangan

Evaluasi Keamanan Produk/Jasa Keuangan

Setiap produk dan jasa keuangan BNI yang dikembangkan untuk diluncurkan kepada masyarakat diwajibkan melalui evaluasi keamanan secara menyeluruh. Proses ini dirancang untuk memastikan perlindungan privasi nasabah sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi yang tersedia pada situs web resmi Perusahaan. Evaluasi dilakukan secara lintas fungsi dengan melibatkan Divisi Compliance, Divisi Legal, Divisi Enterprise Risk Management, dan Divisi Operational Risk Management, Divisi CISO, dan Satuan Anti Fraud untuk menilai risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko usaha, risiko operasional, dan keamanan siber.

Sementara itu, Satuan Teknologi Informasi melakukan pengujian aspek operasional dan teknologi, termasuk pelaksanaan *post implementation review* (PIR) setelah produk diimplementasikan. Hasil PIR menjadi dasar pengambilan keputusan lanjutan. Produk yang masih memerlukan perbaikan akan disempurnakan dan dievaluasi kembali melalui PIR hingga seluruh persyaratan terpenuhi. Produk dan jasa yang telah memenuhi aspek operasional, teknologi, dan risiko selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia sebelum dipasarkan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat produk atau jasa keuangan baru BNI yang ditarik kembali setelah peluncuran akibat pengaduan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola secara berkelanjutan, Internal Audit sebagai pihak independen yang melaksanakan aktivitas *independent review* dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan regulator, khususnya untuk kecukupan keamanan dan edukasi nasabah atas penerbitan produk digital bank.

Dampak Positif dan Negatif Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan

Sebelum meluncurkan produk atau jasa keuangan baru, BNI secara konsisten melakukan evaluasi terhadap potensi dampak dan risiko yang ditimbulkan. Setiap pengembangan produk dirancang dengan pendekatan kehati-hatian untuk menekan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) serta meminimalkan dampak negatif, sekaligus mengoptimalkan manfaat positif bagi nasabah dan masyarakat. Sejumlah inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan BNI, antara lain Kredit Usaha Berwawasan Lingkungan, BNI UMKM Raman Lingkungan (BUMI), BNI Jejak Kopi Khatulistiwa (JKK), BNI Kampung Budidaya Perikanan, *Sustainability Linked Loan*, pembiayaan untuk mendukung transisi energi, serta *advisory playbook* sektor beremisi tinggi sebagai panduan transisi bagi debitur BNI.

Di sisi inklusi keuangan, BNI menjalankan berbagai program yang juga memberikan dampak lingkungan dan sosial, seperti program menabung dengan sampah yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelajar dan masyarakat. Kehadiran BNI Agen46 turut memperluas akses layanan perbankan hingga berbagai lapisan masyarakat yang belum terjangkau *outlet* bank maupun ATM, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Seiring dengan pengembangan produk dan layanan digital, BNI juga menyadari adanya risiko yang melekat, antara lain terkait keamanan data, perlindungan privasi nasabah, dan potensi kejahatan siber. Untuk itu, BNI memastikan penggunaan infrastruktur teknologi informasi yang andal dan aman sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perlindungan data dan manajemen risiko digital.

Menghormati Hak Asasi Manusia

Dengan keberagaman latar belakang dan karakteristik pegawai, BNI berkomitmen membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi saling menghormati serta bebas dari diskriminasi, pengucilan, pelecehan, perundungan, dan bentuk kekerasan lainnya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang diawasi oleh Direksi, khususnya Direktur Human Capital and Compliance.

Dalam perumusannya, kebijakan ketenagakerjaan BNI mengacu pada prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan standar International Labour Organization (ILO) dan United Nations Global Compact (UNGC), serta peraturan perundang-undangan nasional di bidang ketenagakerjaan dan hak asasi manusia. Sejalan dengan komitmen tersebut, BNI mendukung penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di lingkungan kerja melalui Srikandi BNI sebagai bagian dari ekosistem Srikandi Danantara Indonesia. Inisiatif ini selaras dengan kolaborasi UN Women dan Srikandi Danantara Indonesia dalam mendorong penerapan *Women's Empowerment Principles* (WEPs) serta penguatan kapasitas untuk menciptakan tempat kerja yang lebih inklusif dan setara.

Seluruh pegawai memiliki akses terhadap kebijakan perusahaan terkait HAM yang tercantum dalam Tata Tertib (e-PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) melalui platform DigiHC, DigiCM. Setiap kebijakan baru maupun pembaruan kebijakan dikomunikasikan melalui infografis di DigiHC, serta disosialisasikan secara berkala kepada pegawai dan fungsi terkait sesuai dengan kebutuhan operasional. Untuk mendukung kemudahan akses dan pemahaman kebijakan, BNI menyediakan BNI Diva (*DigiCode Virtual Assistant*) sebagai aplikasi berbasis ChatAI menggunakan teknologi *Generative* AI yang berfungsi sebagai asisten virtual yang membantu pegawai BNI dalam mencari pedoman perusahaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.

Selain itu BNI juga menyediakan HC Virtual *Assistant* berupa *chatbot* bernama "Kinara" untuk meningkatkan *engagement* pegawai terkait pemahaman kebijakan Human Capital dan "Jaring Opini" guna menjaring *feedback* dan saran pegawai terkait kebijakan Human Capital yang telah diterbitkan.

Sebagai bagian dari komitmen menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, BNI menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pelecehan dan tindakan diskriminatif, baik di tempat kerja maupun dalam aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Komitmen tersebut dituangkan dalam penerapan *respectful working place* pada Kebijakan Umum Human Capital, yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja di lingkungan BUMN. BNI menerapkan sanksi administratif yang tegas atas setiap pelanggaran kebijakan tersebut dan menyediakan saluran pelaporan melalui WBS maupun pelaporan langsung kepada *line manager* atau pemimpin unit.

Dalam penerapannya, BNI menempatkan kesetaraan, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabat individu sebagai prinsip utama. BNI menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, proses penanganan yang transparan, serta edukasi berkelanjutan guna memperkuat pencegahan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Kementerian BUMN melalui Surat No. SE-1/MBU/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, BNI menetapkan pedoman perusahaan berupa Instruksi Nomor IN/015/HCG/001 tentang penerapan *respectful working place*. Pedoman ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan inklusif, serta melindungi harkat dan martabat manusia, bebas dari diskriminasi, pengucilan, perundungan, pelecehan, maupun bentuk kekerasan mental dan fisik lainnya bagi seluruh pegawai BNI Group.

Melalui penerapan kebijakan *respectful working place*, BNI berupaya menciptakan ruang kerja yang aman dan saling menghargai bagi seluruh pegawai. Kebijakan ini menegaskan komitmen BNI untuk mencegah segala bentuk diskriminasi, pengucilan, perundungan, pelecehan, maupun kekerasan, baik secara fisik maupun nonfisik, sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang inklusif, produktif, dan menjunjung tinggi HAM.

Komitmen tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam penguatan program kesejahteraan pegawai melalui BNI *Holistic Employee Wellbeing Program*. Program ini menitikberatkan pada keseimbangan kesehatan mental dan fisik, ketahanan finansial, serta hubungan sosial yang sehat di lingkungan kerja. Inisiatif yang dijalankan meliputi *Employee Assistance Program* 2.0, fasilitas penitipan anak BNI *Little Explorers*, dukungan kesehatan finansial melalui *New* DKMP, serta penguatan jejaring sosial pegawai melalui 46Society.

Penerapan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam manajemen sumber daya manusia BNI diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan praktik ketenagakerjaan, antara lain:

1. Penerapan prinsip keberagaman dan kesetaraan kesempatan kerja dengan menjunjung tinggi kebijakan non-diskriminasi.
2. Penyediaan kesempatan kerja yang inklusif melalui pemberdayaan 22 pegawai dengan disabilitas fisik.
3. Penghormatan terhadap hak berserikat dan berkumpul melalui fasilitasi Serikat Pekerja.
4. Pemenuhan hak beragama dengan menyediakan sarana dan prasarana ibadah di setiap unit kerja BNI.
5. Pemberian remunerasi yang kompetitif di atas Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMP/UMK) serta penerapan prinsip kesetaraan upah tanpa perbedaan berdasarkan gender. [illegible]
6. Pemenuhan hak cuti pegawai, termasuk cuti haid maksimal dua hari dan cuti melahirkan selama tiga bulan kalender, dengan tetap menjamin seluruh hak normatif pegawai setelah masa cuti berakhir. [illegible]
7. Pemberian hak izin tidak masuk kerja dengan tetap menerima gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa pengurangan hak cuti, melalui mekanisme pengajuan yang sah.

Praktik Operasi yang Adil dan Persaingan yang Sehat [illegible]

Dalam menjalankan kegiatan usaha, BNI memastikan penerapan praktik operasional yang adil melalui kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan standar etika yang berlaku. Pendekatan ini mencakup pengelolaan aset intelektual, perlakuan yang adil terhadap para pemangku kepentingan, serta pengendalian risiko konflik kepentingan dengan pemasok, pesaing, dan pihak terkait. BNI juga berkomitmen untuk memastikan setiap konsumen memperoleh layanan atas produk dan/atau jasa secara setara tanpa diskriminasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BNI secara konsisten menerapkan prinsip antikorupsi, antisuap, dan *anti-fraud*, serta mematuhi ketentuan persaingan usaha dan antimonopoli. Hubungan dengan mitra kerja dan pemasok dibangun atas dasar kepercayaan, kode etik, dan pakta integritas, dengan pelaksanaan yang dikoordinasikan oleh divisi/satuan/unit fungsional terkait sesuai peran dan kewenangannya.

Kebijakan operasi yang adil berupa kebijakan antikorupsi dan kebijakan pemenuhan hak-hak debitur yang dapat diakses pada situs web BNI: https://www.bni.co.id/id-id/beranda/informasi-perseroan/kebijakan

integritas dan keberlanjutan menjadi landasan BNI dalam mengelola seluruh rantai nilai usaha yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk dan layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dalam menjalankan aktivitas tersebut, BNI secara konsisten mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, privasi nasabah, dan aspek pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab korporasi.

Kontribusi Politik [415-1]

BNI menjaga independensi dan netralitas dengan tidak terlibat dalam aktivitas politik dalam bentuk apa pun, baik melalui kontribusi dana maupun barang, secara langsung ataupun tidak langsung, serta memastikan bahwa pegawai BNI tidak menjadi anggota partai politik. Dalam aspek pendanaan, BNI menerapkan kebijakan dan prosedur dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengendalian potensi benturan kepentingan, guna memastikan pengelolaan dana yang sehat dan bertanggung jawab.

Penerapan APU-PPT dan PPPSPM

Pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM) di BNI berpedoman pada pedoman perusahaan. Program ini dijalankan melalui lima pilar penerapan yang saling terintegrasi, meliputi pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, Kebijakan dan Prosedur, Pengendalian Internal, Sistem Informasi Manajemen, serta Sumber Daya Manusia dan Pelatihan. BNI secara konsisten menyampaikan laporan pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran, sesuai dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh regulator.

BNI secara berkelanjutan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai BNI terhadap penerapan APU PPT dan PPPSPM melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas, yang meliputi:

- Program pelatihan, baik melalui media elektronik/*online*, seperti *e-Learning* APU PPT dan PPPSPM pada platform BNI Smarter, maupun pelatihan tatap muka (*in-class* ataupun secara daring), termasuk bagi calon pegawai baru (ODP/ADP/BINA BNI), peserta magang, serta unit dan divisi tertentu, seperti operasional, teknologi informasi, *custody*, dana pensiun, bisnis luar negeri, dan *cross-border correspondent banking*.
- Supervisi dan sosialisasi penerapan program APU PPT dan PPPSPM di kantor cabang berdasarkan hasil *Individual Risk Assessment* (IRA), serta pada divisi terkait.
- Monitoring penerapan program APU PPT dan PPPSPM pada kantor luar negeri dan Perusahaan Anak.
- Program penyegaran (*refreshment*) APU PPT dan PPPSPM bagi jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BNI serta Perusahaan Anak.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan pengendalian internal, BNI mengintegrasikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM ke dalam seluruh proses bisnis. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan implementasi program tersebut tersedia pada situs resmi BNI, yaitu https://www.bni.co.id/en-us/company/corporate-governance/patriot-acts-certification-ami.

Efektivitas pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM dinilai melalui *Rift on ML/TF*, yaitu penilaian yang dilakukan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan terhadap komitmen, kualitas implementasi, dan tingkat kepatuhan pihak pelapor. Pada tahun 2025, BNI memperoleh skor 9,43 dengan kategori "Sangat Baik".

Pelibatan Pemangku Kepentingan [3-24]

BNI secara konsisten membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Penetapan pemangku kepentingan prioritas dilakukan melalui pemetaan yang mempertimbangkan tingkat pengaruh (*influence*), ketergantungan (*dependency*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kedekatan (*proximity*). Pada tahun berjalan, BNI melibatkan perwakilan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam kegiatan *in-depth interview* untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, memperoleh umpan balik atas kinerja keberlanjutan tahun sebelumnya, serta membahas topik-topik material yang memengaruhi proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

Nasabah: Hubungan Ekonomi

Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
• Layanan *call center*, kantor cabang, *phone banking*, situs web, media sosial (Facebook, Instagram, dan X) • Survei Kepuasan Pelanggan • Informasi dari *Website* & *Frontliner* • *Gathering* BNI Agen46	• Setiap saat • Dua tahun sekali • Setiap saat • Minimal setahun sekali	• Keamanan transaksi perbankan • Kredit Usaha Kecil dan Menengah • Fasilitas perbankan dan kemudahan akses • Informasi produk dan layanan perbankan yang jelas dan transparan • Inovasi produk/jasa keuangan • Kerahasiaan data nasabah

Respons BNI

- Inovasi produk, jasa serta layanan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi
- Edukasi keuangan perbankan terkait produk perbankan
- Penyimpanan dan pelindungan data nasabah sesuai peraturan terkait UU Pelindungan Data Pribadi dan ketentuan yang terkait
- Mempertahankan sertifikasi ISO 27001 yang sudah dimiliki
- Menjangkau dan membina UKM, hingga membantu memberikan pembiayaan

Investor/Pemegang Saham: Hubungan Ekonomi, Kepemilikan & Legal

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
• Pelaporan kinerja BNI per kuartal dalam pertemuan analis pasar modal dan investor saham yang dilakukan per kuartal • Pertemuan regular dengan analis pasar modal dan investor saham yang dilakukan secara rutin • Pelaksanaan *Public Expose* minimal 1 kali dalam setahun • Pelaksanaan agenda RUPS Tahunan (setahun sekali) dan RUPS Luar Biasa sesuai kebutuhan • Pertemuan rutin dengan investor saham & *fix income* melalui agenda *conference* dan *roadshow* • Pelaksanaan retail webinar dan *podcast* dengan topik tertentu termasuk topik ESG	• Kinerja keuangan dan non-keuangan • Kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) • Nilai kapitalisasi saham yang tumbuh positif • Nilai investasi (*total shareholder return*) yang optimal • Investasi/pembiayaan kepada sektor-sektor ramah lingkungan • Meminimalisasi dampak dari pembiayaan terhadap sektor komoditas • Pengelolaan risiko iklim • Pengungkapan target, metodologi, dan hasil perhitungan cakupan 1, 2, dan 3 secara komprehensif • Pengelolaan dan pengembangan SDM • KPI mendorong pencapaian profitabilitas yang berkelanjutan • Partisipasi dalam upaya reforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati • Implementasi kebijakan remunerasi manajemen telah sejalan dengan *corporate governance* • *Cyber security* dan pelindungan data pribadi

Respons BNI

- Penyediaan informasi berkala kinerja BNI
- Komunikasi secara intens langsung kepada investor maupun melalui analis perusahaan sekuritas (broker), guna memastikan penyampaian informasi perusahaan telah sesuai
- Konsisten menjalankan strategi untuk mencapai target bisnis
- Mengungkapkan informasi kinerja LST dengan lebih komprehensif di dalam Laporan Keberlanjutan, materi *Earnings Call*, maupun *update* berkala
- Penguatan kemampuan, keterampilan, dan keahlian pegawai
- Menindaklanjuti rekomendasi aspek LST dari Lembaga Rating, SPO, maupun investor
- Melakukan audit atas Laporan Keuangan
- Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
- Menerapkan *risk acceptance criteria* (RAC) pada proses kredit

Pegawai: Legal & pemangku kepentingan yang membantu pencapaian tujuan perusahaan

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
• Serikat pekerja • Media Internal (Majalah Digital eSinergi, HCMS, Majalah Sinergi, BNI Forum) • Survei Kepuasan Pegawai • BNI *Smarter* • DigiHC & HCMS • Komunitas BNI	• Hak-hak pegawai • Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai • Kesetaraan kesempatan pengembangan karier • Pengalaman bekerja yang berharga dan menyenangkan • *Work life balance*

Respons BNI

- Pelatihan *in-class training* dan *e-learning*
- Sistem penilaian kinerja dan promosi
- Ketersediaan sarana komunikasi resmi yang disediakan BNI untuk pegawai seperti Info HC, DigiHC, HCMS, Komunikasi internal (eSinergi, SMS Blast)
- Adanya serikat pekerja
- Adanya komunitas yang terbentuk berdasarkan bidang olahraga, seni, dan hobi yaitu 46Society; serta Badan Pembinaan Kerohanian
- Ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan aktivitas

Serikat Pekerja: Legal

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
• Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) • Pertemuan dan diskusi antara lain melalui: a. Tim remunerasi b. Tim fasilitas kesehatan c. Tim sanksi • Forum komunikasi • Lembaga kerja sama bipartit (LKS Bipartit)	• Pengembangan karier • Remunerasi • Produktivitas atau kinerja • Integritas • Hak-hak pegawai lainnya

Respons BNI

- Menampung dan mengidentifikasi usulan dan masukan dari Serikat Pekerja
- Melakukan proses komunikasi apabila terjadi perselisihan hubungan industrial
- Mengadakan pertemuan berkala dalam forum komunikasi antara BNI dan serikat pegawai
- Menciptakan kegiatan operasional BNI yang optimal dengan tata cara yang efektif dan efisien demi kemajuan BNI dan kesejahteraan pegawai melalui PKB

Pemerintah/OJK: Legal/Kepentingan LJK

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
• Penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan realisasinya kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • Penyampaian RAKB pada OJK • Pelaporan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku kepada regulator • Berbagai kegiatan sosialisasi/webinar/ dengar pendapat/forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah dan otoritas • Minimal setahun sekali	• Kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan • Pengelolaan risiko LST pada aktivitas financing • Analisis risiko lingkungan & sosial dalam pemberian kredit • *Anti-Bribery and Corruption (ABC), Anti- Money Laundering (AML) and Anti-Terrorism Green banking Inclusive banking* • Penerapan keuangan berkelanjutan • Dukungan pada TPB • Penetapan target yang lebih terukur dan terarah terutama dalam mendukung terwujudnya ekonomi hijau dan target NZE di Indonesia

Respons BNI

- Mematuhi seluruh regulasi yang berlaku
- Membayar pajak, retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai peraturan perundang-undangan
- Menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)
- Membentuk Sub Komite ESG untuk memantau implementasi RAKB
- Penyesuaian kebijakan dan peraturan internal, sesuai peraturan yang diterbitkan pemerintah
- Penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh unit kerja
- Penyampaian laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan lain: Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, serta laporan lain

Pemasok: Hubungan ekonomi dan Legal

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
Seminar dan sosialisasi kebijakan sesuai kebutuhan melalui vendor gathering	• Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam pengadaan barang dan/atau jasa • Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pengadaan barang dan/atau jasa • Kebijakan aspek sosial dan lingkungan dalam proses rekanan BNI

Respons BNI

- Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam pengadaan barang dan/atau jasa
- Penerapan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pengadaan barang dan/atau jasa
- Penerapan aspek sosial dan lingkungan dalam proses rekanan BNI

Masyarakat: Relasi sosial, inisiasi sosial & tanggung jawab sosial serta kedekatan dengan perusahaan

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
Kerja sama strategis dalam kepedulian sosial BNI	• Dampak dan kinerja lingkungan • Program TJSL yang dilaksanakan dan direncanakan • Kesempatan untuk berkolaborasi dalam program TJSL • Informasi kegiatan perusahaan • Pemahaman mengenai keuangan berkelanjutan

Respons BNI

- Pelaksanaan inklusi dan literasi keuangan
- Menyelenggarakan program TJSL melalui program BNI Berbagi
- Menyelenggarakan program magang atau kontrak untuk *fresh graduate* melalui Program BINA BNI
- Penyediaan kesempatan kerja sesuai kebutuhan

Media: Relasi sosial, inisiasi sosial

Metode Pelibatan	Topik/Isu Signifikan dan Kebutuhan
Siaran pers saat diperlukan dan media gathering setiap tiga bulan sekali	• Kinerja keuangan dan nonkeuangan • Dampak dan kinerja lingkungan • Program TJSL yang dilaksanakan dan direncanakan • Kesempatan untuk berkolaborasi dalam program TJSL • *Press release* terkait kinerja keberlanjutan

Respons BNI

- Pemberian informasi terkait solusi perbankan atau kinerja perusahaan yang disampaikan dalam situs web www.bni.co.id
- Secara berkala menjalin hubungan yang baik dengan media melalui media gathering, pemimpin redaktur (pemred) gathering
- Menyediakan materi *press release* di situs web www.bni.co.id dan media online

Pelibatan Pihak Lokal dalam Rantai Pasok

Kemitraan dalam rantai pasok BNI dibangun dengan orientasi jangka panjang melalui pemberdayaan pemasok lokal yang dimiliki oleh pihak dalam negeri. Untuk memastikan kemitraan tersebut berjalan efektif, BNI secara berkala meninjau kinerja mitra kerja sebagai dasar peningkatan kualitas dan keberlanjutan kerja sama. BNI juga memanfaatkan forum *vendor gathering* sebagai media dialog dan penyelarasan nilai, khususnya terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan preferensi terhadap produk dalam negeri. Inisiatif ini memperkuat kepercayaan dan integritas dalam rantai pasok, sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis Pemasok/Mitra Kerja	2025		2024		2023	
	Jumlah Pemasok/ Mitra Kerja	Nilai Pengadaan Barang (Rp Triliun)	Jumlah Pemasok/ Mitra Kerja	Nilai Pengadaan Barang (Rp Triliun)	Jumlah Pemasok/ Mitra Kerja	Nilai Pengadaan Barang (Rp Triliun)
Lokal	604	9,3	606	4,2	473	7,0
Luar Negeri	50	6,4	52	0,9	8	-
Jumlah	654	15,7	658	5,1	481	7,0

Keterangan:
- Lokal adalah perusahaan yang secara kepemilikan seluruhnya dari dalam negeri
- Luar negeri adalah perusahaan yang secara kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari luar negeri

Seleksi Pemasok Baru dengan Menggunakan Kriteria Lingkungan dan Sosial

Dalam rangka mengelola risiko keberlanjutan dan meminimalkan potensi dampak negatif yang timbul di sepanjang rantai pasok, BNI mulai menerapkan kebijakan evaluasi pemasok berbasis aspek lingkungan dan sosial sejak Desember 2024. Evaluasi ini mencakup kepatuhan terhadap perizinan lingkungan, pengelolaan emisi GRK dan limbah, lokasi operasional yang tidak berbatasan dengan kawasan lindung, tidak ada pekerja di bawah umur, tidak ada pekerja paksa, bebas praktik diskriminasi SARA, serta kesetaraan dalam promosi dan remunerasi.

Penyampaian komitmen telah dilakukan baik untuk pemasok yang sudah menjadi rekanan maupun calon pemasok yang telah diverifikasi oleh BNI dan telah memenuhi kriteria minimum atau sudah mendapatkan tanda daftar rekanan sementara (TDRS).

BNI memastikan penerapan kebijakan ini melalui penilaian terhadap seluruh (100%) calon pemasok sebelum memperoleh TDRS dalam proses verifikasi awal. Selain itu, BNI pun telah melakukan penilaian ulang terhadap pemasok yang telah menjadi rekanan secara berkala setiap tahun.



03

INCLUSION AND RESILIENCE

BNI berkomitmen memastikan bahwa dampak positif bagi nasabah, masyarakat, dan lingkungan diwujudkan melalui inisiatif yang berada di luar aktivitas bisnis. Fokus utama diarahkan pada penguatan inklusi dan literasi keuangan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta pendampingan debitur sebagai mitra strategis dalam menjalankan transisi menuju praktik usaha yang berkelanjutan. Fokus tersebut menjadi bagian dari upaya BNI membangun ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Penguatan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Pendampingan Debitur Sektor Usaha Berkelanjutan

Sebagai bagian dari implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017, BNI memperkuat peran strategisnya dalam mendukung transisi sektor usaha menuju praktik yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan pendampingan debitur. Pendekatan ini sejalan dengan penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai acuan klasifikasi kegiatan usaha serta pengelolaan risiko keberlanjutan, termasuk risiko transisi dan risiko fisik terkait perubahan iklim sebagaimana ditekankan dalam kerangka IFRS S2 Climate-related Disclosures.

Dalam konteks tersebut, BNI tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis debitur dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkan transisi yang terukur, bertahap, dan sesuai dengan profil usaha masing-masing debitur. Pendampingan ini ditujukan untuk mendorong penurunan emisi dari kegiatan operasional debitur, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha dan kualitas portofolio pembiayaan BNI, sejalan dengan dukungan BNI terhadap pencapaian *net zero emission* (NZE).

Pelaksanaan ESG *Advisory* FC1

BNI mengembangkan dan melaksanakan inisiatif ESG *Advisory* melalui penyusunan *ESG advisory playbook* yang berfungsi sebagai panduan transisi bagi debitur dan Relationship Manager (RM). *Playbook* ini dirancang untuk membantu debitur dalam memahami posisinya saat ini dan keuntungan yang diperoleh saat debitur melakukan bisnis berkelanjutan. *Advisory playbook* diharapkan dapat mendorong debitur untuk memulai transisi menuju praktik bisnis berkelanjutan, termasuk meningkatkan tingkat kesejarasan aktivitas usahanya terhadap klasifikasi TKBI. Bagi RM, *playbook* ini menjadi alat pendukung dalam memberikan pendampingan yang konsisten dan terstruktur dalam mendorong peningkatan klasifikasi debitur secara bertahap.

Pelaksanaan *ESG Advisory* difokuskan pada subsektor dengan intensitas emisi tinggi dan risiko transisi signifikan, antara lain sektor pertanian dan kehutanan (subsektor kelapa sawit), sektor pertambangan dan penggalian (subsektor batu bara), serta pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sebagai tahap pertama, pada tahun 2026, BNI meluncurkan *playbook* untuk subsektor kelapa sawit dimana BNI sebagai bank pertama di Indonesia yang meluncurkan *playbook* tersebut. Selanjutnya, BNI akan memulai *pilot project ESG Advisory*, khususnya pada subsektor kelapa sawit, di tahun 2026.



Selain itu, BNI melaksanakan *technical assistant* untuk pada debitur untuk mempersiapkan debitur dalam penerapan TKBI. *Technical assistant* dilakukan untuk seluruh debitur pada sektor terdampak, yaitu *energy, Agriculture, Forestry, and Other Land Use* (AFOLU), *Construction & Real Estate* (CRE), *Transportation & Storage* (T&S).



Untuk meningkatkan *awareness* debitur, BNI melaksanakan *BNI Sustainability & Transition* (BEST) *Event* sebagai ajang sosialisasi, berbagi informasi dan pengalaman tentang penerapan *sustainability* baik di Indonesia maupun global, bagi para debitur/nasabah.

Melalui inisiatif ini, BNI mendorong peningkatan kesiapan debitur dalam menghadapi tuntutan transisi, pengelolaan risiko iklim, serta perkembangan standar pelaporan keberlanjutan, sekaligus mendukung transformasi sektor riil menuju ekonomi rendah karbon secara bertahap dan inklusif.

Penguatan Inklusi dan Literasi

BNI secara konsisten memperkuat perannya dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dan OJK. Upaya ini diarahkan untuk memastikan bahwa berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang sebelumnya belum atau kurang terlayani (*underserved*) di Indonesia yaitu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dapat memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.



33
Kantor cabang di lokasi 3T



110
ATM/CRM BNI di lokasi 3T



24.796
Merchant BNI di lokasi 3T



13.391
Jaringan ATM Bersama



197
O-Branch



327
Cabang dilengkapi layanan self-service

Sebagai kesinambungan proses transformasi jaringan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, BNI menerapkan konsep jaringan kantor yang mempertimbangkan potensi pasar, yaitu *Super Flagship, Business Flagship, Thematic, Digital First,* dan *Smart Conventional*. Pada tahun 2025, transformasi jaringan kantor difokuskan pada peningkatan produktivitas kantor cabang dalam merebut pangsa pasar melalui penataan organisasi serta penerapan strategi bisnis yang lebih agresif. Hingga akhir periode pelaporan, sebanyak 327 *outlet* kantor cabang telah dilengkapi dengan layanan pembukaan rekening secara mandiri (DigiCS) dan layanan cetak buku tabungan (Sprint).

BNI menyadari bahwa perluasan inklusi keuangan juga dapat membawa tantangan dan risiko, antara lain terkait keamanan transaksi dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, BNI secara berkelanjutan mengintegrasikan program literasi keuangan ke dalam setiap inisiatif inklusi yang dijalankan, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang aman, bijak, dan berkelanjutan.

Program Inklusi Keuangan

BNI telah mengembangkan beragam pendekatan dan kanal layanan guna mendekatkan perbankan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan jaringan fisik, digital, maupun kemitraan berbasis komunitas. Selain memperluas akses, BNI juga menempatkan edukasi dan pendampingan keuangan sebagai elemen penting dalam pelaksanaan inklusi keuangan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator dan perwakilan di luar negeri, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan, serta membekali mereka dengan pengetahuan pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab.

BNI Agen46

BNI Agen46 merupakan mitra strategis BNI dalam menghadirkan layanan perbankan yang inklusif hingga berbagai lapisan masyarakat termasuk *underserved demographic*, baik yang belum terjangkau *outlet* bank dan ATM, maupun wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui penguatan jaringan keagenan, BNI memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2025, jumlah BNI Agen46 tumbuh sebesar 1,7% dengan persebaran yang mencakup 406 kota/kabupaten, 6.174 kecamatan, dan 38.729 kelurahan/desa di seluruh Indonesia. Capaian ini setara dengan sekitar 42,6% cakupan kelurahan/desa di Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 28.177 Agen atau sekitar 19% berada di wilayah 3T, dengan pertumbuhan sebesar 13,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian mencerminkan komitmen BNI ini dalam memperluas jangkauan layanan perbankan ke daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau serta memperkuat peran Agen46 dalam mendorong inklusi keuangan pertumbuhan ekonomi lokal.



BNI Agen46 menjangkau 42,6% kelurahan/desa di Indonesia dengan jumlah 28.177 Agen, sekitar 19% di antaranya berada di wilayah 3T.

Profil BNI Agen46 berdasarkan Gender & Usia

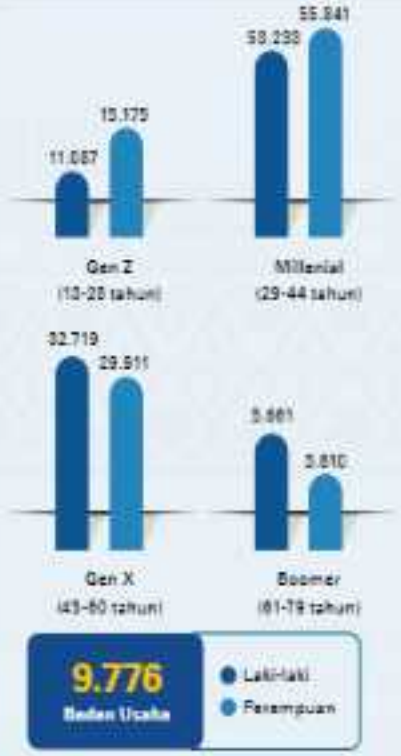

Profil BNI Agen46 berdasarkan Pelaku UMKM



Usaha Mikro
216.389
(99,7%)



Usaha Kecil
556
(0,3%)



Usaha Menengah
68
(0,03%)

Catatan: Kategori UMKM berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021

Persebaran BNI Agen46



Pertumbuhan BNI Agen46 di Wilayah 3T

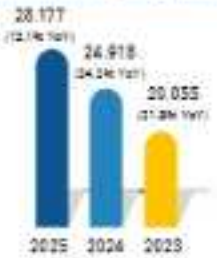

Perluasan jaringan BNI Agen46 memberikan dampak multiplier, khususnya pada pendapatan non-bunga. Sepanjang tahun 2025, *fee based income* (FBI) BNI dari transaksi melalui *channel* BNI Agen46 sebesar Rp189 miliar, tumbuh 16,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut turut mencerminkan peningkatan pendapatan yang diterima Agen46 dari bisnis keagenan mencapai 2 kali lipat dari FBI BNI. Selain kontribusi finansial, ekosistem Agen46 juga berpotensi mendorong penciptaan pekerjaan bagi warga sekitar agen yang diperkirakan mencapai kurang lebih 217 ribu tenaga kerja. Untuk menjaga motivasi dan apresiasi kinerja agen, BNI secara rutin menyelenggarakan program reward tahunan dengan tajuk SPEKTA.

Melalui jaringan agen yang terus berkembang, BNI Agen46 tidak hanya menyediakan layanan transaksi perbankan harian yang lebih mudah, cepat, dan dekat, tetapi juga mendukung pelaksanaan program-program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan antara lain penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Sembako Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Sepanjang 2025, sekitar kurang lebih 32 ribu agen mendukung penyaluran bansos kepada 2,9 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH senilai Rp2,2 triliun, 6,6 juta KPM Sembako senilai Rp3,3 triliun, serta 4,9 juta KM BLTS Kesra senilai Rp4,4 triliun yang tersebar di 106 kabupaten/kota di Indonesia. BNI Agen46 memperpendek jarak akses layanan bagi KPM dalam pencairan bantuan. Kedekatan titik layanan dengan komunitas berkontribusi pada efisiensi mobilitas masyarakat dan berpotensi memberikan dampak lingkungan positif melalui pengurangan perjalanan yang sebelumnya diperlukan menuju cabang/ATM.

BNI turut mendukung program koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP) dengan menjadikan koperasi sebagai pusat layanan transaksi perbankan bagi warga sekitar. Sepanjang 2026, tercatat sebanyak 1.167 KDKMP telah bergabung dan beroperasi sebagai Agen46.

BNI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung inklusi keuangan yang setara dengan menggandeng Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) melalui program pembinaan dan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas untuk menjadi BNI Agen46. Pada 2025, tercatat sebanyak 74 penyandang disabilitas telah bergabung menjadi BNI Agen46. Inisiatif ini juga memperoleh pengakuan rekor MURI sebagai pemberdayaan penyandang disabilitas pertama sebagai Agen Laku Pandai BNI Agen46.



Mendukung ekonomi berkelanjutan dan digitalisasi ekonomi hijau, BNI mendorong penguatan ekosistem bank sampah melalui integrasi layanan keuangan agar nilai tabungan sampah dapat dikonversi secara langsung ke rekening yang tercatat dalam sistem perbankan. Sepanjang 2025, sebanyak 216 bank sampah telah bergabung menjadi BNI Agen46. Total volume transaksi setoran oleh Agen46 Bank Sampah mencapai Rp7,4 miliar, yang berdasarkan estimasi diperkirakan setara dengan 2,4 ton sampah. BNI juga aktif memberikan edukasi pengelolaan dan menabung sampah, termasuk kegiatan edukasi di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 15 Bekasi pada Agustus 2025.

Sebagai mitra BNI, Agen46 juga dibekali kapabilitas untuk melakukan *referral* produk tabungan reguler melalui wondr by BNI serta produk kredit KUR/ BWU. Sampai dengan Desember 2025, Agen46 telah mereferalkan 293.392 rekening tabungan dengan total nilai Rp1,7 triliun. Pada sisi pembiayaan, tercatat 31.686 Agen debitur dengan baki debet Rp33,6 triliun.

Dalam memberikan layanan perbankan, BNI Agen46 dapat bertransaksi melalui berbagai kanal perangkat, yaitu aplikasi *mobile*, web, EDC Mini ATM, dan EDC Android. Dalam rangka mendukung pemutakhiran perangkat yang digunakan Agen46, BNI telah mendistribusikan 38.661 unit EDC, dengan 7.000 unit di antaranya disalurkan pada tahun 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan stabilitas transaksi serta memperkaya fitur layanan yang tersedia bagi Agen46 dan nasabah. Untuk mendukung proses digitalisasi pendaftaran BNI Agen46, telah diimplementasikan proses pendaftaran secara swadaya (*self register*) melalui aplikasi *Mobile* Agen.

Digitalisasi melalui Agen46 memudahkan masyarakat *underserved* untuk membuka rekening dan melakukan e-KYC dengan pendampingan agen tanpa harus datang ke kantor cabang. Melalui agen lokal, masyarakat juga dapat melakukan setor-tarik tunai di dekat tempat tinggal, khususnya bagi wilayah yang jauh dari ATM maupun jaringan kantor, dan wilayah 3T. Selain itu, Agen46 mendukung transaksi harian secara digital seperti pembayaran tagihan, serta memfasilitasi transfer dan penerimaan bantuan sosial dengan lebih cepat.

Selain dengan pengayaan layanan, BNI juga mengembangkan fitur pembelian asuransi mikro BNI Life pada aplikasi mobile serta menghadirkan fitur PLN pada EDC Android. Selain itu, BNI telah mengimplementasikan ketentuan pelindungan data pribadi sesuai UU PDP dalam ekosistem Agen46 guna menjaga privasi, keamanan data nasabah, dan perlindungan konsumen. Untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan nasabah, BNI berkomitmen meningkatkan kualitas keamanan sistem melalui pembaruan keamanan TI, termasuk pada platform IOS, guna memperkuat perlindungan agen dan nasabah dari risiko serangan siber.

Akses Perbankan bagi Pekerja Migran

BNI bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi keuangan kepada diaspora dan pekerja migran Indonesia dengan memanfaatkan jaringan kantor perwakilan BNI di luar negeri. Pendampingan dilakukan sejak tahap pemberangkatan sebelum keberangkatan. Hingga 31 Desember 2025, sebanyak 418.821 rekening Taplus BNI telah dimiliki oleh pekerja migran.

Akses Perbankan bagi Penyandang Disabilitas

BNI juga memastikan akses layanan bagi nasabah penyandang disabilitas melalui penyediaan ATM ramah disabilitas yang mudah diakses. ATM tersebut dilengkapi *headphone* dan tombol huruf braille. Hingga saat ini, BNI menyediakan 3.472 ATM ramah disabilitas yang tersebar di 405 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia serta cabang luar negeri di Singapura dan Hongkong. Selain itu, BNI juga menyiapkan jalur akses menuju *Banking Hall* dan Galeri ATM untuk mendukung penggunaan kursi roda.



Produk Tabungan bagi Pelajar

BNI mengajak pelajar untuk menabung sejak dini dan memperkenalkan produk simpanan pelajar melalui beberapa program seperti Bank Goes to School, Ayo Menabung dengan Sampah, serta Program Indonesia Pintar.

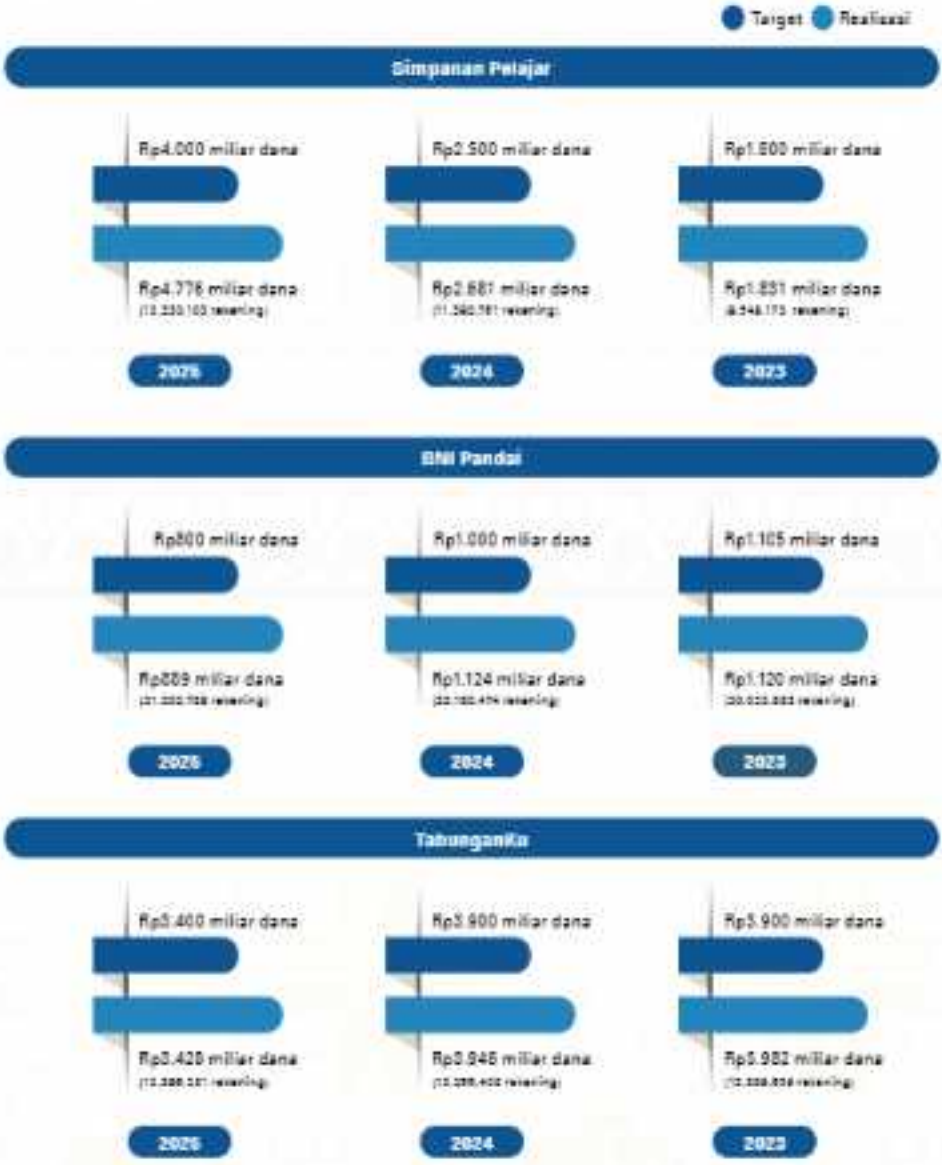

Ayo Menabung dengan Sampah

Program Ayo Menabung dengan Sampah merupakan inisiatif BNI yang mengintegrasikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan inklusi keuangan. Pada pelaksanaan program, BNI bekerja sama dengan bank sampah, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas. Melalui program ini, dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp1.630 juta, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp1.600 juta. Perolehan dana tersebut terdiri atas Rp1.486 juta yang disalurkan ke rekening Simpanan Pelajar (SimPel) dan Rp161 juta ke rekening BNI Pandai. Selain itu, program ini juga menghasilkan pembukaan 196.163 rekening, yang terdiri dari 194.807 rekening SimPel dan 1.360 rekening BNI Pandai.

Program Super Bidan

BNI melanjutkan kerja sama dengan *Women's World Banking* (WWB) dalam pelaksanaan Program Super Bidan, yang menyediakan solusi perbankan untuk mendukung perencanaan keuangan terkait persalinan dan perawatan pascamelahirkan. Di 2024, Program Super Bidan telah diimplementasikan dengan melibatkan 100 bidan yang tersebar di 4 kota. Sebagai tindak lanjut, WWB melakukan kunjungan monitoring langsung dari kantor pusat di New York untuk meninjau pelaksanaan program di lapangan. Evaluasi tersebut mencakup aspek pemanfaatan produk perbankan, pemahaman bidan terhadap materi program, serta relevansi solusi yang ditawarkan bagi kebutuhan peserta. Di 2026, sebagai kelanjutan dari dari *piloting* tesebut, telah dilakukan *kick-off* program super bidan antara BNI, WWB, dan Ikatan Bidan Indonesia pada tanggal 6 November 2026 bersamaan dengan acara tahunan ikatan bidan Indonesia di Jakarta. Pada awal tahun 2026, akan dilakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi, baik secara daring maupun luring, di seluruh area kantor wilayah BNI sehingga akan terjadi kolaborasi antara kantor wilayah BNI dengan pengurus wilayah/provinsi ikatan bidan Indonesia.

Program Literasi Keuangan

BNI secara konsisten melaksanakan program literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang bijak, pemanfaatan layanan perbankan yang aman, serta mitigasi risiko finansial. Edukasi dilakukan melalui pendekatan tatap muka dan digital, dengan menyasar berbagai segmen masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan komunitas. Materi literasi mencakup pengenalan layanan perbankan digital, dasar pengelolaan keuangan, serta peningkatan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal dan judi daring.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, BNI juga memanfaatkan media dan perangkat digital yang tersedia di jaringan kantor dan *outlet* layanan. Penyebaran materi edukasi dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi di cabang, antara lain layar ATM dan CRM, mesin DigiCS (baik *in-branch* maupun *off-branch*), mesin DigiCS Lite (*in-branch*), serta media Digital Poster. Sebagai bagian dari peningkatan pengalaman nasabah sekaligus percepatan adopsi transaksi digital, BNI menghadirkan layanan *O-Branch Banking Café*. *O-Branch Banking Café* adalah konsep layanan perbankan bergerak dalam bentuk minibus berdesain kafe. Layanan ini memberikan alternatif pengalaman bagi nasabah untuk memperoleh informasi dan melakukan transaksi secara lebih nyaman dan interaktif. Pemanfaatan sarana ini juga memungkinkan penyampaian pesan literasi keuangan secara konsisten kepada masyarakat dan nasabah dalam aktivitas layanan sehari-hari.

Pemanfaatan Perangkat Digital untuk Literasi Keuangan



Konten Literasi Keuangan melalui Media Sosial

2.019.227 pengikut Instagram @bni46
1.139.017 pengikut X @BNI
443.905 pengikut Facebook @BNI
1.328.017 pengikut Tiktok @bni46
82.584 pengikut Youtube BNI

Selain itu, literasi keuangan juga diperkuat melalui interaksi langsung di kantor cabang, dengan melibatkan petugas layanan depan (*frontliner*) yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan penjelasan dan edukasi kepada nasabah. Di sisi lain, BNI secara aktif menggunakan media sosial sebagai kanal penyebaran informasi dan konten edukasi keuangan, sehingga pesan literasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan adaptif terhadap perkembangan pola konsumsi informasi digital.

Literasi Keuangan 2025

BNI tidak hanya menyediakan layanan perbankan, namun juga memiliki komitmen kuat untuk menjadi *agent of development* yang mendukung program pemerintah dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan. Memahami literasi keuangan sebagai fondasi untuk mencapai stabilitas finansial dan kesejahteraan di masa depan, BNI terus berinovasi dalam memberikan edukasi dan memfasilitasi akses terhadap produk keuangan yang relevan baik untuk perencanaan masa depan, pengembangan usaha maupun penggunaan teknologi secara optimal. Program literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)



Kolaborasi BNI dalam program yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk membentuk karakter budaya menabung khususnya segmen pelajar, yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cekap dalam mengelola keuangan pribadi, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan ekonomi di masa depan ini sekaligus membekali mereka dengan pemahaman dasar tentang pengelolaan finansial sejak bangku sekolah. Selain hal tersebut, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengakselerasi penambahan rekening simpanan pelajar (SimPel) dalam rangka mendukung pencapaian target inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2029 di angka 93%.

Di tahun 2025, program ini telah disosialisasikan pada 229 sekolah dan telah menambah 10.422 rekening pelajar. Komitmen BNI dalam menyosialisasikan simpanan pelajar dan fasilitasi rekening dengan biaya ringan serta fitur menarik bagi pelajar ini berbuah manis pada saat kegiatan diselenggarakan di MTS Negeri 3 Malang yang membawa BNI berhasil meraih penghargaan dari OJK sebagai Mitra Kerjasama Satuan Pendidikan Berbasis Agama Implementasi KEJAR Terbaik.

BNI SULTAN

BNI SULTAN (Sahabat Untuk LITerasi dan Inklusi KeuangAN) merupakan inisiatif strategis dari BNI yang di desain untuk memposisikan bank sebagai sahabat terpercaya masyarakat dalam membangun pemahaman dan akses keuangan yang inklusif. BNI aktif melakukan edukasi literasi keuangan secara masif, merata, dan tepat sasaran, termasuk kolaborasi dengan OJK melalui program OJK PEDULI (Penggerak Duta Literasi). Edukasi secara masif yang BNI lakukan salah satunya dengan memberdayakan *frontliner* di berbagai wilayah sebagai duta literasi untuk memberikan edukasi finansial baik secara langsung maupun melalui kanal media sosial, mulai dari pengelolaan keuangan sederhana hingga pemahaman tentang risiko-risiko finansial.



Pada tahun 2026 BNI memiliki:

2.434	356	2.010.683	7.689.878
duta literasi	posting konten	*engagement*	jangkauan user pengguna media sosial (reach)

Dalam program ini BNI meraih prestasi dan pengnargaan dari OJK sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan Pembentukan Duta Literasi Termasif 2026.

Kampanye Literasi Keuangan

BNI secara aktif terlibat dalam berbagai kampanye dan program literasi keuangan, terutama fokus pada kegiatan untuk mengedukasi dan menciptakan masyarakat yang paham keuangan sejak dini, mendorong kebiasaan menabung, dan memastikan inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Kampanye dilakukan, baik secara luring maupun daring. Salah satu contoh kampanye literasi keuangan BNI secara luring yang terbaru adalah partisipasi aktif BNI dalam *National Financial Health Event* (NFHE) 2026 yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk kampanye secara daring, BNI menggunakan platform media sosial Instagram BNI untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dengan konten dan tema:

- Perencanaan dan pengelolaan keuangan
- Kesadaran masyarakat terhadap tindak kejahatan finansial.

Pada kegiatan kampanye di tahun 2026, BNI mempublikasikan 44 konten kampanye sosial media dengan capaian 2.178.401 *viewers*.

Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN)

Sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah, BNI bersama dengan OJK terus mengakselerasi pemerataan literasi keuangan secara masif dan kolaboratif serta mendorong pemanfaatan produk layanan/jasa keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN).

GENCARKAN merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (OJK, lembaga jasa keuangan, instansi/kelembagaan, masyarakat) yang memiliki tujuan mengorkestrasi dan meningkatkan sinergi pelaksanaan kegiatan literasi dan inklusi keuangan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan masyarakat cerdas keuangan sehingga dapat mengambil keputusan finansial yang tepat dan terhindar dari berbagai kasus kejahatan finansial. Pada 2025, BNI bersama dengan pemangku kepentingan terkait merealisasikan program GENCARKAN di 80 kabupaten/kota dengan 174 kegiatan dan 30.116 peserta.

GEMA PASAR BNI

Gerakan Masyarakat Pasar Sadar Literasi dan Inklusi Keuangan (GEMA PASAR BNI) merupakan program yang dirancang untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital di pasar-pasar tradisional di Jakarta, mulai dari penerapan sistem pembayaran digital hingga pengelolaan data transaksi guna membangun ekosistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Sejalan dengan program digitalisasi pasar yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya bersama dengan BI serta OJK, program ini menjadi sarana untuk melakukan literasi digital kepada masyarakat di lingkungan pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya DKI Jakarta.



Di program ini, BNI memperkenalkan solusi keuangan bagi para pedagang dan pengunjung pasar, seperti QRIS untuk transaksi non-tunai, aplikasi wondr by BNI, serta program unik JELITA (Minyak Jelantah Tukar Telur Ayam) yang mengubah limbah minyak goreng bekas menjadi telur ayam melalui peran bank sampah. Pada program ini, BNI mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara 1 Digitalisasi Keuangan Terbaik 2025.

KEJAR OJK DKI Jakarta

Program *Pilot Project* KEJAR OJK DKI Jakarta merupakan inisiatif strategis OJK Regional Jabodebek yang diluncurkan pada 2025 sebagai bagian dari program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar dengan mendorong pembukaan rekening tabungan untuk setiap siswa. Program KEJAR - OJK DKI Jakarta menyinergikan pemangku kepentingan terkait (sekolah, Dinas Pendidikan DKI, OJK, dan pelaku usaha jasa keuangan) dengan menyasar seluruh jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA, SMK). DKI Jakarta dipilih sebagai salah satu dari 4 provinsi *pilot project* OJK (bersama Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Barat). Selama periode *piloting* program yang dimulai sejak November 2025, BNI berpartisipasi aktif dengan menyasar 14 sekolah di DKI Jakarta dengan capaian jumlah rekening sebanyak 1.138. Atas kontribusi pada program ini, BNI mendapat apresiasi dari OJK Jabodebek berupa Piagam Penghargaan Pilot Project KEJAR DKI Jakarta.



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL): Mewujudkan Nilai melalui BNI Berbagi



BNI menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan, BNI terus berinovasi menghadirkan solusi yang efektif dan relevan dalam menjawab berbagai tantangan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat. Seluruh pelaksanaan TJSL tersebut dijalankan secara terintegrasi di bawah 'payung' BNI Berbagi, sebagai platform investasi sosial strategis perusahaan. Melalui BNI Berbagi, TJSL tidak hanya difokuskan pada penyaluran bantuan, tetapi diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial, mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, serta mendorong keberlanjutan lingkungan secara berkelanjutan dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, BNI Berbagi mengadopsi prinsip *Creating Shared Value* (CSV) yang menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan tujuan bisnis perusahaan. Inisiatif ini juga merupakan instrumen strategis untuk memitigasi dampak operasional perusahaan serta mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Melalui pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur strategis, BNI terus mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra keuangan yang terpercaya. Komitmen ini diwujudkan dengan alokasi dan eksekusi yang terukur.

Pada tahun 2025, BNI mengalokasikan dana sebesar Rp100 miliar untuk program TJSL, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp110,82 miliar (70,37%). Implementasi yang efektif ini mencerminkan dedikasi BNI dalam menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang nyata serta mengukuhkan peran perusahaan sebagai mitra pembangunan yang andal, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dan keberlanjutan usaha BNI sendiri. BNI Berbagi memainkan peran vital dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan stabilitas industri keuangan melalui perluasan akses layanan perbankan.

Keberadaan program BNI Berbagi telah memberikan berbagai dampak positif yang terukur, melalui:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui perluasan akses permodalan, pendampingan usaha, dan akses pasar yang mendorong perbaikan taraf hidup penerima manfaat;
- Peningkatan pendapatan, yang memberikan dampak langsung terhadap stabilitas finansial dan keberlanjutan ekonomi penerima manfaat;
- Peningkatan inklusi dan literasi keuangan, khususnya bagi UMKM dan kelompok masyarakat rentan, melalui akses terhadap layanan perbankan formal;
- Transformasi perilaku masyarakat, dengan mendorong pola pikir yang lebih produktif, mandiri, dan berorientasi kewirausahaan;
- Penguatan kapasitas dan kemandirian UMKM, sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas skala usaha, dan menciptakan lapangan kerja;
- Penguatan ketahanan sosial dan ekonomi komunitas, termasuk dalam menghadapi risiko sosial, bencana, dan disrupsi ekonomi;
- Peningkatan kepercayaan publik dan mitigasi risiko sosial-operasional perusahaan, melalui hubungan yang harmonis dan berkelanjutan dengan masyarakat.

Melalui dampak tersebut, BNI Berbagi tidak hanya menciptakan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian TPB serta penguatan nilai jangka panjang dan keberlanjutan usaha BNI.

BNI menyadari bahwa keberhasilan program TJSL sangat bergantung pada jangkauan dan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, BNI secara proaktif mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko sosial yang dapat timbul, antara lain ketidakmerataan pembinaan dan bantuan antar wilayah, keterbatasan akses informasi bagi kelompok rentan, serta potensi kecemburuan sosial yang berisiko menimbulkan konflik antar komunitas.

Sebagai langkah mitigasi, BNI menerapkan pendekatan komunikasi yang aktif, terbuka, dan partisipatif dengan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan di setiap tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memastikan bahwa program TJSL BNI dijalankan secara inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Melalui BNI Berbagi, BNI mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi aktif di sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama program TJSL BNI sebagai wujud nyata peran BNI sebagai *agent of development*. Sejumlah ruas jalan berhasil diperbaiki dan menghubungkan akses jalan di desa-desa wilayah Jawa. Dua titik di Kabupaten Bekasi, yakni Tambun Selatan dan Pebayuran, mendapatkan bantuan dana untuk pengecoran dan perbaikan jalan desa. Sementara itu, BNI memberikan bantuan pemasangan paving dan rabat beton di tiga kecamatan di Kabupaten Probolinggo.

Aspek Ekonomi: Menciptakan Nilai Tambah bagi Masyarakat [413-1, 413-2]

BNI senantiasa berkomitmen menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan dengan mempertahankan keseimbangan antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui implementasi berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sepanjang tahun 2025, BNI mengalokasikan dana sebesar Rp166 miliar untuk mendukung program TJSL, dengan realisasi penyaluran mencapai Rp116,8 miliar atau setara dengan 70,4% dari total anggaran yang ditetapkan.

Keberadaan BNI telah memberikan berbagai dampak positif, antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif, serta peningkatan pendapatan bagi penerima manfaat. Namun demikian, BNI juga mencermati potensi dampak negatif yang dapat timbul, bukan dari aktivitas yang dijalankan namun dari keterbatasan jangkauan program terhadap penerimaan manfaat, seperti ketidakmerataan pembinaan dan bantuan, keterbatasan akses informasi, serta potensi kecemburuan sosial yang berisiko menimbulkan konflik antarkomunitas. Untuk memitigasi hal tersebut, BNI secara berkelanjutan membangun komunikasi yang aktif dan terbuka dengan para penerima manfaat selama pelaksanaan program.

Program KAWAN BNI [203-1, 203-2, 413-1]

Program KAWAN BNI merupakan inisiatif pemberdayaan masyarakat desa yang dirancang sebagai platform pendampingan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Melalui pendekatan kolaboratif, KAWAN BNI mengembangkan potensi unggulan desa dengan mengintegrasikan pendampingan usaha, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses terhadap pasar dan layanan keuangan.

Program KAWAN BNI berfokus pada pendampingan masyarakat di destinasi wisata, seperti desa budaya dan ekowisata, serta pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan dan masyarakat lokal. Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.



Ringkasan Kegiatan Kawan BNI

Lokasi:
Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Potensi yang dikembangkan:
Ekowisata mangrove, pembibitan mangrove, budidaya kepiting soka

Jumlah penerima manfaat:
5.037 pemangku kepentingan

Dampak:
Wellbeing: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat pesisir melalui lingkungan yang lebih sehat dan produktif akibat perbaikan ekosistem mangrove.

Nature: Memulihkan fungsi ekologis kawasan pesisir Teluk Pangpang melalui rehabilitasi 50 hektare hutan mangrove yang rusak akibat alih fungsi lahan, meningkatkan kapasitas penyerapan karbon per tahun serta menjaga keanekaragaman hayati pesisir.

Society: Memberdayakan perempuan dan pemuda pesisir melalui kegiatan pembibitan dan pengembangan wisata edukasi lingkungan yang inklusif dan partisipatif.

Economy: Mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata mangrove dan budidaya kepiting soka, pembibitan mangrove dan produk turunan.

Lokasi:
Desa Wisata Ponggok Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
Potensi yang dikembangkan:
Wisata air berbasis mata air (umbul), desa wisata

Jumlah penerima manfaat:
877 pemangku kepentingan

Dampak:
Wellbeing: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan karyawan BUMDes Ponggok Tirta Mandiri dalam pengelolaan dan pelayanan pariwisata, meningkatnya kapasitas SDM dalam ekosistem wisata Ponggok terkait digitalisasi finansial melalui pelatihan penggunaan QRIS dalam transaksi bisnis wisata.

Nature: Terjaganya kelestarian mata air (umbul) melalui pengelolaan wisata yang terkontrol dan berkelanjutan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sumber daya air sebagai aset utama desa.

Society: Pelibatan berbagai pemangku kepentingan Program Desa Wisata Ponggok, Klaten, yang efektif untuk menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif.

Economy: Peningkatan pendapatan BUMDes Ponggok Tirta Mandiri dari pengelolaan destinasi wisata. Efisiensi dan transparansi keuangan wisata berkat implementasi QRIS BNI dalam transaksi layanan wisata.

Lokasi:
Kampung Batik Laweyan (Kota Surakarta, Jawa Tengah) dan Kampung Batik Giriloyo (Kecamatan Imogiri, DIY)
Potensi yang dikembangkan:
Ekonomi Kerakyatan Lewat Pendampingan Batik Ramah Lingkungan

Jumlah penerima manfaat:
100 pemangku kepentingan

Dampak:
Wellbeing: Peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri perajin melalui pelatihan teknis (malam sawit, desain motif, daur ulang malam), penyusunan dan penerapan SOP produksi, keuangan, dan tata kelola.

Nature: Substitusi malam parafin ke malam sawit (berbasis bahan baku terbarukan).

Society: Memberdayakan perempuan dan pemuda pesisir melalui kegiatan pembibitan dan penguatan peran perempuan sebagai aktor utama ekonomi rumah tangga.

Economy: Nilai jual produk meningkat melalui label RSPO, branding, dan diferensiasi "batik berkelanjutan".

Lokasi:
Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur
Potensi yang dikembangkan:
Ekowisata Mangrove



Jumlah penerima manfaat:
40 pemangku kepentingan

Dampak:

Wellbeing: Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat pengelola ekowisata melalui edukasi pengelolaan keuangan dasar.

Nature: Terjaganya dan meningkatnya fungsi ekosistem mangrove sebagai pelindung pesisir dan habitat biota, meningkatnya luasan dan kualitas vegetasi mangrove melalui upaya rehabilitasi dan pemeliharaan.

Society: Penguatan kohesi sosial melalui kegiatan kolektif (penanaman, pemeliharaan, layanan wisata), tumbuhnya kepemimpinan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Economy: Diversifikasi ekonomi desa yang lebih tahan terhadap risiko lingkungan dan musim, potensi pengembangan ekowisata sebagai aset ekonomi jangka panjang desa.

Lokasi:
Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT
Potensi yang dikembangkan:
Ekonomi kreatif (anyaman lontar & produk turunan), budaya (pelestarian dan penguatan tenun ikat tradisional)



Jumlah penerima manfaat:
420 pemangku kepentingan

Dampak:

Wellbeing: Meningkatkan kesejahteraan keluarga perajin melalui pendapatan yang lebih stabil dan dukungan pemenuhan gizi anak serta ibu hamil, menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan layak melalui akses air bersih dan fasilitas Rumah Anyam.

Nature: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem lokal sebagai basis keberlanjutan ekonomi kreatif.

Society: Memperkuat kelembagaan sosial dan ekonomi melalui koperasi dan aktivitas kolektif seperti Kegiatan Menganyam Bersama (KMB), menjaga keberlanjutan warisan budaya anyaman lontar dan tenun ikat melalui transfer pengetahuan lintas generasi.

Economy: Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal melalui standar produksi dan manajemen usaha yang lebih baik, membuka peluang akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Lokasi:
Kampung Adat Yaro Wora, Desa Patola Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT
Potensi yang dikembangkan:
Desa Wisata berbasis Budaya



Jumlah penerima manfaat:
200 pemangku kepentingan

Dampak:

Wellbeing: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui terciptanya peluang usaha dan sumber pendapatan baru dari sektor pariwisata budaya, meningkatkan rasa bangga dan kesejahteraan psikososial masyarakat adat terhadap identitas dan warisan budayanya.

Nature: Menjaga keseimbangan antara aktivitas wisata dan kelestarian lingkungan sekitar.

Society: Memperkuat kohesi sosial dan partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan desa wisata, menjamin pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat melalui keterlibatan aktif generasi muda dan tokoh adat.

Economy: Menggerakkan ekonomi lokal melalui pengembangan atraksi wisata, paket wisata, dan jasa pendukung, mendorong terbentuknya ekosistem desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

Lokasi:
Desa Jawapogo, Kelurahan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT
Permasalahan yang diselesaikan:
Tingginya prevalensi stunting dan masalah gizi anak, kondisi gizi ibu yang rentan, rendahnya pengetahuan dan perilaku gizi keluarga, dan keterbatasan kapasitas kader Posyandu

Jumlah penerima manfaat:
90 pemangku kepentingan

Dampak:
Wellbeing: Perbaikan status gizi dan pertumbuhan anak serta kondisi kesehatan ibu hamil KEK melalui PMT terarah, meningkatnya pengetahuan dan praktik pengasuhan sehat keluarga melalui *parenting class*.

Society: Menguatnya kapasitas kader Posyandu dan DASHAT sebagai agen perubahan di tingkat desa, penguatan peran perempuan dalam kepemimpinan komunitas dan ketahanan keluarga.

Economy: Penguatan fondasi ekonomi desa jangka panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Lokasi:
Desa Wisata Lembah Asri Serang, Purbalingga, Jawa Tengah
Potensi yang dikembangkan:
Desa wisata dengan potensi besar di sektor agrowisata dan hortikultura

Jumlah penerima manfaat:
55 pemangku kepentingan

Dampak:
Wellbeing: Meningkatnya kapasitas SDM dalam ekosistem wisata D'LAS terkait digitalisasi finansial melalui sosialisasi penggunaan jasa perbankan.

Society: Pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan manfaat ekonomi yang inklusif dan kolaboratif.

Economy: Tersedianya fasilitas bagi masyarakat kurang mampu untuk membuka usaha melalui penyediaan lapak di area foodcourt, peningkatan pendapatan UMKM karena memperoleh lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses pengunjung.



Rumah BUMN

Sebagai bagian dari inisiatif Kementerian BUMN, Rumah BUMN hadir untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Dalam implementasinya, BNI berperan aktif sebagai pengelola Rumah BUMN di 23 titik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan Rumah UMKM mencakup pelatihan peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga fasilitasi akses pasar.

Melalui Rumah BUMN, pengembangan UMKM tidak hanya difokuskan pada penguatan pasar lokal, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang ekspansi ke tingkat nasional hingga internasional. UMKM binaan difasilitasi untuk memperkenalkan produk unggulan mereka melalui berbagai pameran domestik dan global, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan.



UMKM Disabilitas Kelolaan Rumah BUMN

Pertama, Ibu Sukarmini Bulu merupakan UMKM Disabilitas yang juga sebagai penggerak lingkungan di Sumba Barat Daya (NTT). Sukarmini Bulu aktif menjadi UMKM Rumah BUMN Sumba Barat Daya sejak 2018. Selain sebagai pengrajin, Sukarmini juga aktif berbagi keterampilan sebagai narasumber dan telah mengunjungi berbagai desa di Provinsi NTT untuk memberikan pelatihan pengelolaan sampah plastik dan pembuatan tas daur ulang. Rumah BUMN Sumba Barat Daya turut aktif mendampingi Sukarmini sebagai UMKM Disabilitas Penggerak Lingkungan. Kontribusi Rumah BUMN BNI ini tidak hanya tentang pelatihan teknis, tetapi juga tentang memberikan harapan dan peluang sehingga mendorong perubahan positif yang berdampak langsung pada lingkungan.

Kedua, Kelompok UMKM Gollu Rade di Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya terus mengepakkan sayapnya di dunia usaha kecil menengah. Kelompok UMKM Gollu Rade di Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya terus mengepakkan sayapnya di dunia usaha kecil menengah. Diketuai oleh Solzeman Mawo memanfaatkan sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik, seperti jahe, daun kelor, cabai, kelapa, jagung. Gollu Rade dapat menciptakan dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pelan tapi pasti, Kelompok UMKM Gollu Rade bisa berkembang jadi salah satu UMKM ternama di SBD bahkan jadi mitra dari perbankan, seperti BNI dan Rumah BUMN Sumba Barat Daya.

Aspek Sosial: Memperkuat Ketahanan dan Kohesi Sosial Masyarakat

[413-1, 413-2]

Pilar Sosial diarahkan untuk memperkuat kapasitas sosial masyarakat agar mampu menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari kerentanan sosial, ketimpangan akses layanan dasar, hingga dampak bencana dan perubahan sosial yang cepat. BNI memandang bahwa ketahanan sosial tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga melalui penguatan jejaring sosial, nilai kebersamaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, BNI mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kapasitas lokal. Intervensi sosial dirancang untuk menumbuhkan rasa kepemilikan, solidaritas, dan kepercayaan antar pemangku kepentingan, sehingga tercipta kohesi sosial yang kuat sebagai fondasi stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, program TJSL tidak hanya menghasilkan dampak individual, tetapi juga membangun ketahanan kolektif masyarakat.

Pendidikan

Program Pendidikan Karakter Anak dan Sertifikasi Guru

Sebagai bagian dari komitmen BNI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia, pada tahun 2026 BNI melaksanakan Program Pendidikan Karakter Anak dan Sertifikasi Guru di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini menjangkau 10 sekolah di Lombok dengan melibatkan 3.400 siswa, 180 guru, dan 380 orang tua melalui penguatan pendidikan karakter yang menekankan sinergi antara sekolah dan keluarga. Selain itu, BNI mendukung sertifikasi internasional TOEIC bagi 100 guru Bahasa Inggris se-NTB sebagai upaya meningkatkan kapasitas pendidik agar mampu memberikan pengajaran yang kompetitif dan selaras dengan standar internasional. Inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mencetak generasi yang unggul secara akademis sekaligus berkarakter kuat di masa depan.



Beasiswa

Sebagai bagian dari komitmen BNI dalam mendukung peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, sepanjang tahun 2026 BNI menyalurkan program beasiswa kepada 780 penerima dengan total alokasi sebesar Rp1,8 miliar. Program ini ditujukan untuk mendorong keberlanjutan pendidikan dan pengembangan potensi generasi muda, sebagai investasi sosial jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Sarana Prasarana Pendidikan

Pada tahun 2026, BNI berkontribusi dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui penyaluran bantuan kepada 127 sekolah dan instansi pendidikan di berbagai wilayah kerja BNI, meliputi pembangunan dan renovasi gedung sekolah, ruang kelas, serta laboratorium, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, alat peraga edukatif, dan taman baca. Dukungan ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nias, Sumatra Utara, dan Maluku, dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Melalui inisiatif tersebut, BNI berupaya mendukung terciptanya generasi unggul yang berdaya saing dan berkontribusi bagi pembangunan di masa depan.

Kesehatan

Program Penurunan *Stunting*

BNI berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan *stunting* di Indonesia melalui implementasi dua program strategis yang saling melengkapi dan berorientasi pada dampak berkelanjutan.

- Melalui Program KAWAN BNI, BNI menyasar penanganan langsung terhadap kelompok rentan di Kabupaten Nagekeo dengan memberikan intervensi gizi kepada 60 anak yang mengalami *stunting*, *wasting*, dan *underweight*, serta 26 ibu dengan kondisi Kekurangan Energi Kronis (KEK). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga dan kader lokal dalam praktik pengasuhan dan gizi seimbang.
- Melalui BNI Berbagi, BNI mendukung perbaikan determinan dasar kesehatan di Provinsi Banten dengan menyediakan bahan makanan bergizi bagi 200 penerima manfaat selama 6 bulan, disertai dengan perbaikan rumah tidak layak huni serta pembangunan fasilitas jamban. Intervensi ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan sanitasi lingkungan sebagai faktor penting dalam pencegahan *stunting* jangka panjang. Selain itu, BNI juga melaksanakan intervensi terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting* di Tasikmalaya, Jawa Barat. Program ini mencakup penyaluran makanan tambahan bergizi kepada 47 anak *stunting* selama 2 bulan, pemberian bantuan sembako kepada orang tua anak *stunting*, serta penyelenggaraan seminar gizi bagi ibu hamil sebagai upaya pencegahan sejak dini. Selain itu, BNI memperkuat aspek pengasuhan dan kesehatan mental melalui pelatihan *smart parenting* dan *mental health*, meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dasar melalui pelatihan bidan dan kader Siaga *Stunting*, serta menyalurkan alat permainan edukatif (APE) kepada 8 posyandu guna mendukung stimulasi tumbuh kembang anak dan keberlanjutan layanan posyandu.

Program Katarak

Pada tahun 2026, BNI bekerja sama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) (SPBK) mengadakan bakti sosial operasi katarak di RSUD Komodo, Labuan Bajo, NTB dalam rangka membantu masyarakat mencegah gangguan penglihatan sehingga dapat beraktivitas secara normal. Program ini membantu 100 mata pasien katarak, sehingga penerima manfaat dapat kembali beraktivitas secara normal dan produktif, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan Kelompok Disabilitas

Melalui BNI Berbagi, BNI mendukung pemberdayaan kelompok disabilitas melalui berbagai program sosial yang berfokus pada penguatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi. Dukungan ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan BNI dalam memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang setara terhadap peluang penghidupan yang layak.

- Salah satu bentuk intervensi diwujudkan melalui pemberian bantuan mesin produksi briket kepada Komunitas Difabel Mandiri yang berlokasi di Pesar Banjardowo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha komunitas yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi para anggotanya. Sebelumnya, komunitas ini memproduksi briket dalam skala kecil dengan keterbatasan peralatan, yang berdampak pada rendahnya volume produksi dan pendapatan. Dengan adanya dukungan sarana produksi yang lebih memadai, BNI mendorong peningkatan produktivitas, perluasan peluang usaha, serta perbaikan kesejahteraan ekonomi anggota komunitas disabilitas dan keluarganya secara berkelanjutan.
- BNI mendukung pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, melalui Rumah BUMN di Bekasi. Sejak didirikan pada 2017, Rumah BUMN BNI di Bekasi telah menjadi wadah pengembangan bagi lebih dari 400 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini tak hanya menyediakan pelatihan dan pendampingan usaha, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran BNI sebagai *agentofdevelopment*. Salah satu kisah inspiratif dari penerima manfaat Rumah BUMN BNI adalah Paini, seorang perempuan penyandang disabilitas yang kini sukses mengembangkan usaha kuliner Bumbu Pecel Yuk Ni. Melalui dukungan alat produksi dari BNI, Paini mampu meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan.
- BNI Bersama dengan Kementerian Sosial RI memberikan dukungan terhadap 10 UMKM disabilitas berupa bantuan peralatan usaha, pendampingan pengembangan usaha, pendampingan pengelolaan media sosial, serta bantuan alat bantu disabilitas. Program tersebut sebagai upaya BNI untuk mendorong penyandang disabilitas untuk dapat berkembang, meningkatkan kesejahteraan, memperluas kesempatan usaha, penciptaan ekosistem UMKM yang lebih inklusif, mendorong kemandirian ekonomi bagi disabilitas.

Ketahanan Sosial

BNI berkomitmen untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan sebagai bagian dari upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program ketahanan pangan yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam rangkaian peringatan hari besar keagamaan seperti bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Program ini diarahkan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, meringankan beban ekonomi masyarakat rentan, serta memperkuat solidaritas sosial dan kohesi masyarakat.

Pada tahun 2025, BNI menyalurkan sebanyak 291.860 paket pangan kepada masyarakat rentan di berbagai wilayah Indonesia. Penyaluran ini merupakan bagian dari strategi TJSL BNI dalam memperkuat ketahanan sosial, menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat, serta memastikan kehadiran perusahaan dalam merespons kebutuhan dasar masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Tanggap Darurat Bencana

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

BNI membantu korban bencana di seluruh Indonesia antara lain bencana banjir bandang di Sumatra, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur (NTT), banjir bandang di Nagekeo dan Pulau Bali, dan kebakaran di Desa Wisata Yaro Wora, Sumba Barat (NTT) dengan membagikan paket pangan hingga alat kebersihan. Dukungan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak melalui penyaluran paket pangan, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan darurat lainnya guna menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, serta mempercepat stabilisasi kondisi pascabencana.



Satu Hati untuk Sumatera

BNI membantu korban bantuan tanggap darurat untuk korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda di berbagai wilayah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara. Bantuan yang diberikan mencakup bahan pangan dan kebutuhan harian seperti beras, mie instan, telur, nasi siap saji, serta perlengkapan bayi dan lansia seperti pampers, susu bayi, dan bubur bayi. Distribusi diprioritaskan di wilayah dengan dampak terparah yang telah berstatus darurat bencana. Khusus untuk Aceh, bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi warga terdampak bencana di wilayah Aceh. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari respons cepat dan aksi nyata BNI dalam mendukung fase tanggap darurat sekaligus pemulihan awal masyarakat terdampak, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar serta dukungan bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

Penanganan Darurat Infrastruktur

BNI menyalurkan bantuan di Aceh berupa 30 unit tenda, terdiri atas tenda ukuran 3x4 sebanyak 6 unit, tenda ukuran 3x6 sebanyak 6 unit, serta 20 unit tenda pleton ukuran 6x14. Di bidang pendidikan, BNI menyalurkan 400 seragam SD, 700 seragam SMP, dan 100 seragam SMA. Untuk mendukung kegiatan *trauma healing* anak-anak, BNI juga menyalurkan 200 boneka, 200 buku cerita anak, 100 set mainan, serta matras *puzzle* seluas 24 meter persegi. Selain itu, BNI menyalurkan bantuan pendukung lainnya berupa 1.000 selimut, perlengkapan kebersihan seperti sabun, sikat, cairan pembersih, dan sapu lidi, empat unit tandon air, 10 unit senter isi ulang, serta 10 kotak masker.



Trauma Healing untuk Anak di Kawasan Bencana

BNI turut mendampingi pemulihan psikososial anak-anak terdampak banjir bandang di Desa Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara. Upaya ini menegaskan komitmen BNI dalam pemulihan pascabencana yang tidak hanya berfokus pada bantuan fisik dan logistik, tetapi juga pada pemulihan mental serta kesejahteraan psikologis kelompok rentan, khususnya anak-anak. Layanan *trauma healing* yang diberikan merupakan bagian dari kebijakan TJSL yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Bersama Keluarga Besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui program BUMN Peduli 'Satu Hati untuk Sumatera' di bawah koordinasi Danantara, BNI menghadirkan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban bencana.

Kegiatan *trauma healing* menjadi salah satu *quick impact* dari rangkaian program BNI Berbagi yang dilaksanakan di Posko Relawan BUMN Desa Leuser. Dengan melibatkan fasilitator berpengalaman dalam pendampingan anak di wilayah bencana, kegiatan ini dirancang sebagai ruang aman agar anak-anak dapat kembali bermain, berinteraksi, dan mengekspresikan perasaan secara positif.

Pascabencana: Renovasi Rumah

BNI memberikan dukungan pemulihan hunian melalui perbaikan rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur (NTT). Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi hunian yang layak, aman, dan sehat, sekaligus mendukung pemulihan kualitas hidup masyarakat pada fase rehabilitasi pascabencana.

Pascabencana: Hunian Danantara di Aceh

BNI menyatakan dukungan terhadap target pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara Indonesia dalam penyediaan 15.000 Hunian Danantara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghadirkan hunian yang layak dan bermartabat bagi korban bencana sebagai wujud nyata kehadiran negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi BNI dalam pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahap pertama, dari total 600 unit Huntara yang dibangun di wilayah tersebut, BNI berkontribusi sekitar 20% atau sebanyak 120 unit hunian. Selain unit hunian, kawasan Hunian Danantara juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, antara lain taman bermain, jaringan Wi-Fi, musala, fasilitas umum, serta kamar mandi dan sanitasi.



Employee Volunteering Program

Sejak tahun 2023, BNI menjalankan *Employee Volunteering Program* (EVP) sebagai wadah partisipasi aktif karyawan dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang terintegrasi dalam kerangka BNI Berbagi. Program ini menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) TJSL Kementerian BUMN, sekaligus mencerminkan komitmen BNI dalam mendorong keterlibatan sukarela karyawan (BNI Hi Movers) untuk berkontribusi melalui waktu, tenaga, dan pemikiran. Melalui EVP, BNI tidak hanya menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat *employee engagement*, loyalitas, kolaborasi lintas unit, serta pengembangan kepemimpinan empatik insan BNI sebagai bagian dari pembangunan modal insani dan modal sosial perusahaan.



Pelaksanaan EVP mencakup beragam kegiatan sosial dan lingkungan, antara lain penanaman pohon, perayaan hari besar keagamaan, revitalisasi rumah ibadah, serta aksi kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah operasional BNI. Program ini dirancang tidak sekadar berorientasi pada aktivitas, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip tata kelola sosial yang baik dan agenda TPB.

Pada tahun 2026, EVP diperluas fungsinya dengan berpartisipasi aktif dalam Relawan Bakti BUMN (RBB) *Batch* VII yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pada 17–19 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program serentak di 10 lokasi yang melibatkan 160 pegawai BUMN. Sebagai tuan rumah, BNI mengerahkan 6 relawan yang berkolaborasi dengan 10 relawan lintas BUMN untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial lintas sektor.

BNI juga mengerahkan relawan untuk terlibat langsung dalam penanganan bencana dan pemulihan awal masyarakat terdampak di Aceh. Keterlibatan relawan BNI merupakan bagian dari aksi bersama Keluarga Besar BUMN melalui program BUMN Peduli "Satu Hati untuk Sumatera" di bawah koordinasi Danantara Indonesia. Relawan BNI diberangkatkan bersama ratusan relawan dari 11 BUMN dan difokuskan untuk memperkuat kegiatan kemanusiaan di wilayah terdampak, khususnya Aceh Utara dan Aceh Tenggara sebagai titik posko utama penanganan bencana. Sebagai bentuk dukungan operasional, BNI menyalurkan bantuan logistik melalui 5 unit truk yang membawa perlengkapan kebersihan, sarana pendukung sanitasi, serta peralatan penunjang seperti tangki air, pompa air, genset, dan perlengkapan keselamatan relawan. Relawan BNI berasal dari berbagai unit kerja di wilayah Sumatra, termasuk Kantor Pusat, BNI Wilayah 01 Medan, Wilayah 02 Padang, Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Universitas Sumatra Utara, dan Kantor Cabang yang mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas insan BNI dalam merespons kondisi darurat kemanusiaan.

Bantuan Filantropi

Melalui BNI Berbagi, BNI menjalankan tanggung jawab sosial dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan filantropi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan sosial masyarakat. Di bidang kesehatan, BNI memberikan bantuan kursi roda pasien sebanyak 30 unit, serta menyediakan sarana air bersih dan sanitasi di 78 daerah terdampak di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam mendukung ketahanan pangan, BNI menyalurkan 291.860 paket pangan ke korban bencana sebanyak 22.600 paket pangan, dan sisanya untuk kegiatan sosial lainnya. BNI juga mendukung pembangunan dan renovasi sarana ibadah lintas agama, dengan total 146 sarana ibadah menerima bantuan sepanjang 2026. Di bidang pendidikan, BNI menyalurkan bantuan ke 127 sekolah dan institusi pendidikan, termasuk dukungan fasilitas belajar dan teknologi.

Sejalan dengan program prioritas pemerintah, BNI turut berkontribusi dalam percepatan penurunan *stunting* melalui pemberian paket pangan bagi balita serta ibu hamil dan menyusui, penyediaan makan siang bergizi, serta pelatihan kader Posyandu di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Nageko. Upaya ini mencerminkan komitmen BNI dalam memperkuat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Pengukuran Dampak Investasi Sosial [413-1]

BNI berupaya menciptakan dampak dan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui berbagai program investasi sosial yang dijalankan di bawah payung program BNI Berbagi. Setiap intervensi dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong penguatan kapasitas, kemandirian, dan ketahanan sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas dan peningkatan kualitas program, BNI secara konsisten melakukan evaluasi dan pengukuran dampak atas pelaksanaan Program Bakti BNI. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, ruang pengembangan, serta efektivitas program dalam menciptakan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Selain pengukuran dampak berbasis hasil (*outcome-based impact measurement*), BNI juga menerapkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai instrumen evaluasi untuk menangkap tingkat kepuasan, persepsi, dan pengalaman penerima manfaat terhadap pelaksanaan program. Pengukuran IKM memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pendekatan pendampingan yang dilakukan.

Hasil pengukuran dampak dan IKM menjadi dasar dalam proses perbaikan berkelanjutan, sekaligus menjadi rujukan strategis dalam penyempurnaan desain program, penguatan tata kelola pelaksanaan, serta replikasi program ke wilayah lain agar semakin tepat sasaran, inklusif, dan berdampak jangka panjang.

Pada tahun 2026, BNI kembali melaksanakan pengukuran dampak program TJSL dengan menggunakan metode *social return on investment* (SROI) dan IKM. Proses pengukuran tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak independen terhadap 3 program TJSL terpilih, yaitu:

Nama Program	Nilai SROI*	IKM	
		Nilai IKM	Kategori Kepuasan
Program Desa Wisata Lembah Asri Serang, Purbalingga, Jawa Tengah	2,43	87,20%	Baik
Program Desa Wisata Ponggok, Klaten, Jawa Tengah	2,52	82,25%	Baik
Program Rumah BUMN Ngawi	5,35	92,56%	Sangat Baik

Keterangan:
*) Sebagai contoh, nilai SROI sebesar 2,43 berarti setiap Rp1 investasi yang dikeluarkan BNI menghasilkan nilai manfaat sosial sebesar Rp2,43 bagi para pemangku kepentingan.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Program Masyarakat dan Lingkungan Hidup [413-1]

Sepanjang tahun 2026, BNI tidak mencatat adanya pengaduan maupun insiden yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat adat di wilayah sekitar operasional perusahaan. Pada periode yang sama, BNI juga tidak menerima keluhan dari masyarakat umum terkait dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi ini mencerminkan komitmen BNI dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan komunitas lokal serta memastikan seluruh kegiatan operasional dijalankan secara bertanggung jawab.

Aspek Lingkungan: Menjaga Daya Dukung Lingkungan untuk Keberlanjutan [GRI 3-3, 413-2]

Pilar Lingkungan berfokus pada upaya menjaga dan memperkuat daya dukung lingkungan sebagai prasyarat utama keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat. BNI menyadari bahwa degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan meningkatnya risiko bencana alam memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi lokal.

Melalui program TJSL, BNI mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, adaptif, dan berbasis kearifan lokal, termasuk perlindungan ekosistem, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko lingkungan. Pendekatan ini diarahkan tidak hanya pada pemulihan lingkungan, tetapi juga pada pencegahan dan penguatan ketahanan ekosistem. Dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, BNI berkomitmen untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini dan mendatang.



Partisipasi *Earth Hour*

BNI berpartisipasi dalam kegiatan *earth hour* guna menekan dampak perubahan iklim melalui kampanye hemat energi "Sejenak Tanpa Cahaya Demi Kelestarian Semesta". Kegiatan tersebut rutin dilakukan BNI selama 16 tahun sejak 2010. Dilakukan pemadaman listrik di seluruh gedung-gedung kantor BNI, mulai dari Kantor Pusat, cabang dan sentra kredit, hingga seluruh kantor cabang luar negeri pada pukul 20.30-21.30 pada 22 Maret 2026. Penghematan energi itu tetap dapat dilakukan tanpa menggenggu pelayanan terhadap nasabah karena seluruh mesin ATM tetap berfungsi. Nasabah tetap dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah melalui berbagai kanal digital yang tersedia.

Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati 304-4

Kegiatan usaha BNI tidak secara langsung berdampak pada lingkungan hidup. Lokasi kantor BNI berada jauh dari kawasan lindung dan/atau wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga kegiatan operasional BNI tidak menimbulkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Namun demikian, sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, BNI merealisasikan biaya lingkungan sebesar Rp7,4 miliar selama tahun 2026 untuk mendukung pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan daya dukung ekosistem secara berkelanjutan. 304-3, 304-4

BNI melaksanakan inisiatif pelestarian keanekaragaman hayati melalui upaya perlindungan terhadap flora dan fauna, yang dijalankan sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018. Upaya tersebut mencakup perlindungan terhadap spesies tumbuhan dan satwa endemik Indonesia, termasuk di antaranya Orang Utan Kalimantan.

Orang Utan Kalimantan merupakan satwa langka yang berstatus *critically endangered* atau sangat terancam punah berdasarkan daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN). Orang Utan Kalimantan juga dikategorikan sebagai *umbrella species*, yaitu yaitu satwa dengan wilayah jelajah yang luas sehingga keberadaannya berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian konservasi spesies lainnya. Perlindungan terhadap Orang Utan Kalimantan tidak hanya berdampak pada kelangsungan populasi satwa tersebut, tetapi juga memberikan manfaat ekologis yang lebih luas.

Konservasi Orang Utan Kalimantan *(Pongo pygmaeus)* 304-4

BNI berperan aktif dalam mendukung upaya rehabilitasi Orang Utan Kalimantan melalui kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Pada tahun 2026, BNI berkontribusi dalam rehabilitasi 4 individu Orang Utan Kalimantan yang dilakukan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah, serta pemulihan lahan kritis seluas 8 hektare di kawasan Bambora Lestari.



Di lokasi rehabilitasi tersebut, BNI mendukung proses pemulihan ekosistem hutan melalui kegiatan reboisasi, perawatan lahan, serta pengelolaan risiko kebakaran guna mengembalikan fungsi kawasan sebagai habitat alami. Upaya ini ditujukan untuk menyediakan ruang pembelajaran, area suaka, serta sumber pakan yang memadai bagi orang utan. Selain pemulihan habitat, BNI juga memberikan dukungan terhadap aspek kesehatan satwa dengan penyediaan vitamin, pembelajaran terkait persiapan pakan alami, serta bantuan perbaikan infrastruktur di area konservasi.

BNI Berbagi juga berperan dalam melindungi *endangered species conservation* yang menjadi endemik Indonesia di mana salah satunya adalah Orang Utan Kalimantan (*pongo pygmaeus*). Menyadari pentingnya keberlangsungan orang utan sebagai *umbrella species* dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati, sejak tahun 2019, BNI secara konsisten mendukung konservasi orang utan di Indonesia melalui kerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur dan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), dengan fokus pada rehabilitasi dan konservasi lahan kritis yang menjadi ekosistem orang utan. Tahun ini, BNI melakukan rehabilitasi 4 individu orang utan dan penanaman di area 5 hektare lahan kritis. Langkah berkelanjutan ini dilakukan sejak beberapa tahun lalu di mana sebanyak dua Orang Utan Kalimantan dan penanaman pohon di area 4 hektare lahan juga telah dilakukan.



Rehabilitasi Hutan Mangrove (G4-3)

Pada tahun 2026, BNI melanjutkan dukungan terhadap kegiatan penghijauan dan rehabilitasi lahan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu program yang terus dijalankan adalah konservasi hutan mangrove di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Teluk Pangpang yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

BNI bersama masyarakat melanjutkan rangkaian kegiatan konservasi mangrove yang mencakup pengadaan bibit, penanaman, serta pemeliharaan mangrove. Hingga akhir 2026, program ini telah mencatat progres berupa penanaman mangrove seluas 60 hektare dengan jumlah bibit tertanam sebanyak kurang lebih 160.000 pohon, serta tingkat keberlangsungan hidup tanaman mencapai 98% yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pada 2026, fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pemeliharaan tanaman, peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan mangrove, serta pengawasan berkelanjutan untuk memastikan manfaat ekologis dan sosial dapat tercapai secara optimal. Upaya rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan *agroforestry*, yang mengintegrasikan fungsi ekologis mangrove dengan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah dan udara, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap potensi bencana alam, seperti banjir rob, abrasi, dan dampak perubahan iklim.

Melalui program rehabilitasi mangrove ini, BNI tidak hanya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan kesadaran lingkungan, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah operasional perusahaan.



Reforestasi Pesisir (334-1)

BNI juga melaksanakan penanaman 60.000 bibit pohon cemara laut di Pantai Tiris, Indramayu, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 BNI. Inisiatif ini dirancang untuk mendukung konservasi ekosistem pesisir melalui peningkatan tutupan vegetasi yang berperan dalam penyerapan karbon, perlindungan kawasan pantai dari abrasi, serta penguatan ketahanan lingkungan. Kegiatan ini melibatkan komunitas lokal, pelajar, dan pegawai BNI sebagai bentuk partisipasi kolaboratif dalam pelestarian lingkungan dan penciptaan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekosistem pesisir.

Bersama Masyarakat Mengelola Sampah

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, BNI mendukung program pengelolaan sampah melalui penyediaan 16 unit motor sampah di berbagai wilayah untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah di tingkat komunitas. Selain itu, BNI juga melaksanakan program pengelolaan sampah di tiga sekolah di Provinsi Bali melalui penyediaan mesin pencacah sampah, komposter, tempat sampah terpilah, serta pelaksanaan edukasi daur ulang sampah yang dilengkapi dengan literasi keuangan.

Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dan pendidikan, mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah sejak dini, serta menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Verifikasi Pihak Independen

Independent Assurance Statement

The 2025 Sustainability Report of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Number	: 02/000-TSE/II/2026/SRAI
Assurance Type	: Type 1 and Type 2 for the specific topic of Data Security and Cyber Security, and Green Portfolio Management.
Assurance Level	: Moderate
Reporting Standards	: GRI Universal Standard 2021 Consolidated, GRI Financial Services Sector Supplement, Sustainability Accounting Standard Board (SASB) Financial Sector Commercial Banking, Sustainability Banking Assessment (SUSBA), Early adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) S1: General Requirements for Disclosure of Financial Information Related to Sustainability; and IFRS S2: Climate-Related Disclosures, and ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) regarding Resilience Sustainability
Reporting Regulation	: Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) Number 51/POJK.03/2017 and SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021

Dear stakeholders,

PT Sejahtera Rambah Asia or "SRAI" is issuing an **Independent Assurance Statement** ("the Statement") of **the 2025 Sustainability Report** ("the Report") of **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** ("the Company"). The Company is a state-owned bank listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). The Report presents the commitment and efforts of the Company in managing its sustainability performance for the reporting period of **January 1st to December 31st, 2025**. As agreed with Management, SRAI's responsibility is to make an assessment based on the data and content of the Report for the year.

Intended User and Purpose

The purpose of the Statement is to present our opinion including the findings and recommendations based on the results of assurance work to the Company's stakeholders. The assurer team in accordance with specific procedures and a specific scope of work carried out the assessment. Except for the areas covered in the scope of the assurance, we encourage all NOT to solely interpret the Statement as the basis to conclude the Company's overall sustainability performance.

Responsibilities

Our obligations to the Management involve assessing the Report's content, generating findings, and recommendations, and issuing a Statement. Additionally, we are tasked with establishing conclusions and recommendations according to agreed-upon standards, methods, and approaches. Consequently, SRAI's evaluation is solely based on the most recent editorial and data received as of February 3rd, 2026, regarding the final draft. SRAI's responsibility lies solely in providing assurance work, distinct from an audit, in accordance with the Non-Disclosure Agreement, the Assurance Engagement Agreement, Representation Letter, and Subsequent Event Testing. Management bears the sole responsibility for presenting data, information, and disclosures within the Report. Therefore, any parties relying on the Report and Statement must assume and manage their own risk.

Independence, Impartiality, and Competency

SRAI confirms NO relationships between the assurer team and the clients that can influence their independence and impartiality to conduct the assessment and generate the Statements. The assurer

team is mandated to follow a particular assurance protocol and professional ethical code of conduct to ensure their objectivity and integrity. We carried out a pre-engagement assessment before the assurance work was taken to verify the risks of engagement as well as the independence and impartiality of the team. The assuror team members have knowledge of ISO 26000, AA1000 AccountAbility standards and principles, and also have experience in sustainability report assessment based on various reporting regulations.

Type and Level of Assurance Service

1. **Type 1 assurance** on the Report content.
2. **Type 2** on Data Security and Cyber Security, and Green Portfolio Management.
3. **A moderate level of assurance** to the procedure on the Report content and evidence, where the risks of information and conclusions of the Report being error is reduced, but not to very low, but not zero.

Scope and Limitation of Assurance Service

1. Data and information in the Report for the period of **January 1st to December 31st, 2025.**
2. Material topics presented in the Report: **Data Security and Cyber Security, Economic Performance, Green Portfolio Management,** and **Climate Resilience.**
3. Evaluation of publicly disclosed information, system, and process of the Company to ensure adherence of the Report content to the reporting principles.
4. SRAI does NOT include financial data, information, and figures in the Report content. We assumed that the Company, independent parties, or other parties associated with the Company have verified and/or audited financial statements, data, and information.
5. Adherence to the following reporting principles, standards, and regulations:
   a) Regulation of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.51/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institution, Listed, and Public Companies (POJK 51) with reference to OJK Circular Letter (SEOJK) 2022 No.16/SEOJK.04/2021
   b) Consolidated set of GRI Sustainability Reporting Standards 2021 (GRI Universal Standards).
   c) GRI G4 Financial Disclosure (GRI G4-FS) issued by the Global Reporting Initiative.
   d) Sustainability Accounting Standard Board – Commercial Banks.
   e) Sustainable Banking Assessment (SUSBA) World Wide Fund for Nature (WWF).
   f) ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) regarding Resilience Sustainability.
   g) Early adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) S1: General Requirements for Disclosure of Financial Information Related to Sustainability; and IFRS S2: Climate-Related Disclosures.

Exclusion

1. The expression of opinion, belief, expectation, advertisement, and also forward-looking statements, including future planning of the Company as specified in the Report content.
2. Analysis or assessment against regulations, principles, standards, guidelines, and indicators other than those indicated in the Statement.
3. Topics, data, and information outside the reporting period, or in the public domain not covered in the reporting period.
4. Financial performance data and information as presented in the Company's financial statements and documents, other than those mentioned in the Report.

Methodology and Source Disclosure

1. Form an Assuror Team whose members are capable in sustainability report development and assurance.

2. Perform the pre-engagement phase to ensure the independence and impartiality of the Assuror Team.
3. Hold a kick-off meeting and initial analysis of the Report draft based on the SRAI Protocol on Assurance Analysis refers to the standards, principles, and indicators of AA1000AS v3, AA1000APS (2018), and standards/regulations used in the Report.
4. Discuss online the results of the analysis with the Management and data contributors.
5. Verify evidence and trace data and information as covered in the Report.
6. Conducted the On-Site Engagement (OSE) through direct interviews with both internal and external stakeholders.
7. The Company incorporated our recommendations in the draft Report and released the final Report content.
8. Prepare the Statement and send it to AA1000 Accountability for review to get approval before submitting it to the Company.
9. Prepare a Management Letter detailing all aspects seen, recorded, and observed during the assurance work to the Management of the Company for further improvement of sustainability processes.

Adherence to AA1000AP (2018) and GRI Universal Standards

Inclusivity – The Company has systematically involved internal and external stakeholders in determining material topics through Focus Group Discussions (FGDs) and the distribution of questionnaires. Stakeholder concerns have been the focus of the Company and have been addressed in the report on the approach taken. In determining material topics, the Company also evaluates the effectiveness of stakeholder engagement by involving each division to identify risks and opportunities in each topic.

Materiality – In determining materiality levels, the Company uses the Double Materiality Approach (DMA), taking into account impact materiality and financial materiality. The Company has considered short-term, medium-term, and long-term perspectives in materiality. However, in subsequent reporting, it is expected that the Company will be able to determine material topics at the time of budget preparation, rather than at the time of report preparation, to accommodate interests in budgeting, action, and reporting, as well as to present in detail the topics of concern.

Responsiveness – The Company has responded to the needs, issues, concerns, and expectations of stakeholders. This is done through intensive communication conducted regularly once a year. These responses are discussed at board meetings, and the results are then communicated to all unit heads for follow-up or response. In developing responses to important topics, these have been incorporated into the Company's plans, and performance is monitored through Key Performance Indicators (KPIs) from the relevant divisions. To support this, the Company has a feedback channel that can be accessed by all internal and external stakeholders. The Company also provides contact numbers that can be accessed by domestic and foreign customers.

Impact – The Company has measured, assessed, and managed its impacts appropriately in accordance with materiality. In explaining each topic, the Company has identified every impact arising from the performance of each material topic, as well as mapping and evaluating the level of materiality of the impact (positive and negative) and the level of financial materiality (risks and opportunities).

Statement of Use: "In Accordance to the GRI Standards" – We evaluated the Report content in adherence to the GRI Universal Standards principles, disclosures, and requirements for reporting. The

Company has referred to the nine requirements: apply the reporting principles, report the disclosures in GRI 2: General Disclosures 2021, determine material topics, report the disclosures in GRI 3: Material Topics 2021, report disclosures from the GRI Topic Standards for each material topic, provide reasons for omission for disclosures and requirements that the organization cannot comply with, publish a GRI content index, provide a statement of use, and notify GRI.

On Site Engagement: On-Site Engagement (OSE) constitutes one of our procedures performed to assess the Company's adherence to the AA1000 Principles (Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact), based on a sample of material topics and significant stakeholders. Based on the OSE performed, we conclude that the Company has implemented the process in a generally sufficient and appropriate manner, covering the aspects of Inclusivity, Materiality, Responsiveness, and Impact as identified, mapped, and applied in its engagement with stakeholders.

GRI Standards Principles – As the assurance work was taken, the report content sufficiently indicates its adherence to the Reporting principles (accuracy, balance, clarity, comparability, completeness, sustainability context, timeliness, and verifiability). The Management provided sufficient support during the assurance work by submitting evidence/documents as requested.

Type 2 Assurance – SRAI verifies the topic of **Data Security and Cyber Security**, the Company has implemented monitoring using existing procedures, reinforced by a Cybersecurity Intelligence Platform that helps protect the Company's information systems. The Company reports each incident to the board of directors on a regular basis. In identifying information system vulnerabilities, the Company has created a risk register for each period in collaboration with consultants who assist in reviewing the risk register. The Company is expected to collaborate with external parties to examine the resilience of the Company's information systems. Regarding **Green Portfolio Management**, the Company has established and implemented a green portfolio management framework through coordinated roles across ESG, risk, and business units. The framework is supported by documented SOPs, risk acceptance criteria, structured debtor assessment, and regular monitoring mechanisms. Our examination results indicates that these processes are operating effectively to support credit quality, ESG compliance, and ongoing oversight of green portfolio debtors in accordance with the Bank's policies and applicable regulations.

Recommendation

1. To determine material topics can be done at the budget planning stage to ensure more effective selection in the budget, activity plans, and reporting.
2. To conduct the Double Materiality Approach (DMA) best practice by analysing all issues raised (not only material topics). This aims to produce clear mapping results and highlight the significance of the material issues raised.

The assurance provider,

Jakarta, February 6th 2026

Lim Hendra
Assurance Director
PT Sejahtera Rimbah Asia
(SRAI)

Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2025 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk GRI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa kami telah memeriksa dan menyetujui Laporan Keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2026 dan menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2026 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2026

Dewan Komisaris

Omar Ejawaldy Anwar
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Tedi Bharata
Wakil Komisaris Utama

Vera Febyanthy
Komisaris Independen

Didik Junaedi Rachbini
Komisaris Independen

Danny Hutabarat
Komisaris

Febria Nathan Kaserita*
Komisaris

* Belum efektif

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keberlanjutan 2025 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak sebagai Direksi maupun Anggota Sub Komite ESG PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyatakan bahwa kami telah memeriksa dan menyetujui Laporan Keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2026 dan menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2026 telah dimuat secara lengkap, dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Keberlanjutan dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Februari 2026

Direksi

Putrama Wahju Setyaman
Direktur Utama

Alexandra Askandar
Wakil Direktur Utama

Hussain Paolo Kartadjoemena
Direktur Finance & Strategy

Corina Leyla Kernalies
Direktur Consumer Banking

David Pirzada
Direktur Risk Management

Ronny Venir
Direktur Operations

Jato Presetio
Direktur Information Technology

Agung Prabowo
Direktur Corporate Banking

Muhammad Iqbal
Direktur Commercial Banking

Rian Erjana Kasian
Direktur Network & Retail Funding

Abu Dantuse Sudradjat
Direktur Treasury & International Banking

Eko Satyo Nugroho
Direktur Kelembagaan

Munadi Herlambang
Direktur Human Capital & Compliance

Referensi POJK No. 51, Indeks Standar GRI, SASB, SUSBA, ACGS

POJK No. 51

No Indeks	Pengungkapan	Halaman
	Strategi Keberlanjutan	
A.1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan	38-40
	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan	
B.1	Aspek Ekonomi	10
B.2	Aspek Lingkungan Hidup	12
B.3	Aspek Sosial	11
	Profil Perusahaan	
C.1	Visi, Misi, dan Nilai Keberlanjutan	23
C.2	Alamat Perusahaan	24
C.3	Skala Usaha	26
C.4	Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan	26
C.5	Keanggotaan pada Asosiasi	30
C.6	Perubahan Emiten dan Perusahaan Publik yang Bersifat Signifikan	24
	Penjelasan Direksi	
D.1	Penjelasan Direksi	18-23
	Tata Kelola Keberlanjutan	
E.1	Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan	31-34
E.2	Pengembangan Kompetensi terkait Keuangan Berkelanjutan	100-103, 107-109
E.3	Penilaian Risiko atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan	35-36
E.4	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan	156-158
E.5	Permasalahan terhadap Penerapan Keuangan Berkelanjutan	42
	Kinerja Keberlanjutan	
F.1	Kegiatan Membangun Budaya Keberlanjutan	31
	Kinerja Ekonomi	
F.2	Perbandingan Target dan Kinerja Produksi, Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi, Pendapatan dan Laba Rugi	59
F.3	Perbandingan Target dan Kinerja Portofolio, Target Pembiayaan, atau Investasi pada Instrumen Keuangan atau Proyek yang Sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan	62-71
	Kinerja Lingkungan Hidup	
	Aspek Umum	
F.4	Biaya Lingkungan Hidup	157
	Aspek Material	
F.5	Penggunaan Material yang Ramah Lingkungan	88

No Indeks	Pengungkapan	Halaman
	Aspek Energi	
F.6	Jumlah dan Intensitas Energi yang Digunakan	91
F.7	Upaya dan Pencapaian Efisiensi Energi dan Penggunaan Energi Terbarukan	91
	Aspek Air	
F.8	Penggunaan Air	94
	Aspek Keanekaragaman Hayati	
F.9	Dampak dari Wilayah Operasional yang Dekat atau Berada di Daerah Konservasi atau Memiliki Keanekaragaman Hayati	167
F.10	Usaha Konservasi Keanekaragaman Hayati	167-169
	Aspek Emisi	
F.11	Jumlah dan Intensitas Emisi yang Dihasilkan Berdasarkan Jenisnya	93
F.12	Upaya dan Pencapaian Pengurangan Emisi yang Dilakukan	92
	Aspek Limbah dan Efluen	
F.13	Jumlah Limbah dan Efluen yang Dihasilkan Berdasarkan Jenis	93-94
F.14	Mekanisme Pengelolaan Limbah dan Efluen	93-94
F.15	Tumpahan yang Terjadi (jika ada)	Tidak relevan bagi bisnis perbankan.
	Aspek Pengaduan terkait Lingkungan Hidup	
F.16	Jumlah dan Materi Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diterima dan Diselesaikan	Tidak relevan bagi bisnis perbankan.
	Kinerja Sosial	
F.17	Komitmen untuk Memberikan Layanan atas Produk dan/atau Jasa yang Setara kepada Konsumen	154
	Aspek Ketenagakerjaan	
F.18	Kesetaraan Kesempatan Bekerja	112-115, 153-154
F.19	Tenaga Kerja Anak dan Tenaga Kerja Paksa	112
F.20	Upah Minimum Regional	113-115
F.21	Lingkungan Bekerja yang Layak dan Aman	120-122
F.22	Pelatihan dan Pengembangan Kemampuan Pegawai	100-110
	Aspek Masyarakat	
F.23	Dampak Operasi terhadap Masyarakat Sekitar	162-165, 169
F.24	Pengaduan Masyarakat	165
F.25	Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)	162-169
	Tanggung Jawab Pengembangan Produk/Jasa Berkelanjutan	
F.26	Inovasi dan Pengembangan Produk/Jasa Keuangan Berkelanjutan	146-151
F.27	Produk/Jasa yang Sudah Dievaluasi Keamanannya bagi Pelanggan	152
F.28	Dampak Produk/Jasa	152, 162-166
F.29	Jumlah Produk yang Ditarik Kembali	152
F.30	Survei Kepuasan Pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan	136-137

No Indeks	Pengungkapan	Halaman
	Lain-lain	
G.1	Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen (jika ada)	51, 190-193
G.2	Lembar Umpan Balik	211
G.3	Tanggapan terhadap Umpan Balik Laporan Keberlanjutan Tahun Sebelumnya	56
G4	Daftar Pengungkapan Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	196-209

Standar GRI

Pernyataan penggunaan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah melaporkan sesuai dengan Standar GRI untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2025
GRI 1 yang digunakan	GRI 1: Landasan 2021
Standar Sektor GRI yang berlaku	-

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
		Pengungkapan Umum					
GRI 2: Pengungkapan Umum 2021	2-1	Detail organisasi	24				
	2-2	Entitas yang termasuk dalam pelaporan keberlanjutan	50				
	2-3	Periode pelaporan, frekuensi, dan kontak	50				
	2-4	Pernyataan ulang informasi	26, 51				
	2-5	Jaminan eksternal	51, 190-193				
	2-6	Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya	160				
	2-7	Karyawan	27-29				
	2-8	Pekerja yang bukan karyawan	29				
	2-9	Struktur dan komposisi tata kelola	31-32				
	2-10	Nominasi dan pemilihan badan tata kelola tertinggi	43				
	2-11	Ketua badan tata kelola tertinggi	43				
	2-12	Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi pengelolaan dampak	43-44				
	2-13	Pendelegasian tanggung jawab untuk mengelola dampak keberlanjutan	33-34				
	2-14	Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan	18-23				
	2-15	Konflik kepentingan	35, 43				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
	2-16	Komunikasi hal-hal penting	33, 35-38, 46-47				
	2-17	Pengetahuan kolektif dari badan tata kelola tertinggi	101-103, 107-109				
	2-18	Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi	43				
	2-19	Kebijakan remunerasi	43				
	2-20	Proses untuk menentukan remunerasi	43, 113-115				
	2-21	Rasio kompensasi total tahunan		Batasan Kerahasiaan	Perusahaan belum dapat menyampaikan data karena data bersifat rahasia		
	2-22	Pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan	18-23				
	2-23	Komitmen kebijakan	38-50, 134				
	2-24	Menanamkan komitmen kebijakan	38-50				
	2-25	Proses untuk memulihkan dampak negatif	35-38, 107-109				
	2-26	Mekanisme pemberian umpan balik/saran dan kekhawatiran	35-38				
	2-27	Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan	31, 47, 50				
	2-28	Asosiasi keanggotaan	29-30				
	2-29	Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan	158-158				
	2-30	Perjanjian kerja bersama	113				
Topik Material							
GRI 3: Topik Material	3-1	Proses penentuan topik material	51-54				
	3-2	Daftar topik material	51-54				
	3-3	Manajemen topik material	58, 61, 72, 90, 123				
Topik Material: Kinerja Ekonomi dan Pengelolaan Portofolio Hijau							
GRI 3: Topik Material	3-3	Manajemen topik material	58				
GRI 201: Kinerja Ekonomi 2016	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan	59-60				
	201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim	84-88				
	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya	117				
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah	60				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Topik Material: Ketahanan Iklim							
GRI 3: Topik Material	3-3	Manajemen topik material	72, 90				
GRI 302: Energi 2016	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi	91				
	302-2	Konsumsi energi di luar organisasi	91				
	302-3	Intensitas energi	91				
	302-4	Pengurangan konsumsi energi	91				
GRI 305: Emisi 2016	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung	92				
	305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung	92				
	305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya	87-88, 92				
	305-4	Intensitas emisi GRK	92				
	305-5	Pengurangan emisi GRK	91-92				
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)	92				
	305-7	Nitrogen oksida (NOx), sulfur oksida (SOx), dan emisi udara signifikan lainnya	92				
Topik Material: Keamanan Data dan Keamanan Siber							
GRI 3: Topik Material	3-3	Manajemen topik material	123				
GRI 418: Privasi Pelanggan 2016	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan	129				
Topik-Topik di Luar Topik Material							
Keberadaan Pasar							
GRI 202: Keberadaan Pasar 2016	202-1	Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional	154				
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat	38				
Dampak Ekonomi Tidak Langsung							
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 2016	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan	173-177, 184				
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan	173-177, 184				
Praktik Pengadaan							
GRI 204: Praktik Pengadaan 2016	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal	159				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
		Antikorupsi					
GRI 205: Antikorupsi 2016	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi	46-47				
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi	48				
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	49-50				
		Pajak					
GRI 207: Pajak 2019	207-1	Pendekatan terhadap pajak	50				
	207-2	Tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak	50				
	207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak	50				
		Air dan Effluen					
GRI 303: Air dan Effluen 2018	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama	94				
	303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air	94				
	303-3	Pengambilan air	94				
	303-4	Pembuangan air	94				
	303-5	Konsumsi air	94				
		Keanekaragaman Hayati					
GRI 304: Keanekaragaman Hayati 2016	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung	187				
	304-2	Dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati	187				
	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi	187-189				
	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi	187-188				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Limbah							
GRI 306: Limbah 2020	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah	93, 147				
	306-2	Manajemen dampak signifikan terkait limbah	93, 147				
	306-3	Timbulan limbah	93				
	306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir	93-94, 149				
	306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir	93				
Penilaian Lingkungan Pemasok							
GRI 308: Penilaian Lingkungan Pemasok 2016	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan	159				
	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	159				
Kepegawaian							
GRI 401: Kepegawaian 2016	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan	97-99				
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu	113-115				
	401-3	Cuti melahirkan	113-115, 154				
Kesehatan dan Keselamatan Kerja							
GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2018	403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	120-121				
	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden	121				
	403-3	Layanan kesehatan kerja	120-121				
	403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja	120-121				
	403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja	120-121				
	403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja	120-121				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
	403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis	120-121				
	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja	120-121				
	403-9	Kecelakaan kerja	121				
	403-10	Penyakit akibat kerja	121				
		Pelatihan dan Pendidikan					
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan 2016	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan	109-110				
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan	107-109, 140				
	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier	111				
		Keanekaragaman dan Peluang Setara					
GRI 405: Keanekaragaman dan Peluang Setara 2016	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan	28, 112-115, 154				
		Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif					
GRI 407: Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 2016	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko	113				
		Pekerja anak					
GRI 408: Pekerja anak 2016	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak	112				
		Kerja Paksa atau Wajib Kerja					
GRI 409: Kerja Paksa atau Wajib Kerja 2016	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja	112				
		Masyarakat Adat					
GRI 411: Hak Masyarakat Adat 2016	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat	103				

Standar GRI	Indikator	Pengungkapan	Hal.	Pengecualian			No. Standar Sektor GRI
				Persyaratan yang Dikecualikan	Alasan	Penjelasan	
Masyarakat Setempat							
GRI 413: Masyarakat Setempat 2016	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak, dan program pengembangan	173-185, 189				
	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat	173-185, 189				
Penilaian Sosial Pemasok							
GRI 414: Penilaian Sosial Pemasok 2016	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial	159				
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil	159				
Kebijakan Publik							
GRI 415: Kebijakan Publik 2016	415-1	Kontribusi politik	155				

Standar GRI G4 Suplemen Sektor Layanan Keuangan 2013

Indikator	Pengungkapan	Halaman
FS1	Kebijakan dengan komponen lingkungan dan sosial tertentu yang diterapkan pada lini bisnis	75-82
FS2	Prosedur untuk menilai dan menyaring risiko lingkungan dan sosial di lini bisnis	75-82
FS3	Proses untuk memantau implementasi dan kepatuhan klien dengan persyaratan lingkungan dan sosial termasuk dalam perjanjian atau transaksi	75-84
FS4	Proses untuk meningkatkan kompetensi staf untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedur lingkungan dan sosial sebagaimana diterapkan pada lini bisnis	107-109
FS5	Interaksi dengan klien/investee/mitra usaha mengenai risiko dan peluang lingkungan dan sosial	181-182
FS6	Persentase portofolio untuk lini bisnis berdasarkan wilayah tertentu, ukuran (misal: mikro/SME/besar) dan menurut sektor	62
FS7	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat sosial khusus untuk setiap lini bisnis yang dirinci berdasarkan tujuan	64-69
FS8	Nilai moneter produk dan layanan yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan spesifik untuk setiap lini bisnis yang dirinci berdasarkan tujuan	62-65, 83
FS9	Cakupan dan frekuensi audit serta prosedur penilaian risiko	83-84
FS10	Kemitraan yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan atau sosial	75-82
FS11	Persentase aktiva yang terjadi pada lingkungan positif dan negatif atau sosial	74-83
FS12	Kebijakan pemberian suara diterapkan pada masalah lingkungan atau sosial	Tidak berlaku bagi BUMN.
FS13	Jalur akses di daerah berpenduduk rendah atau kurang beruntung secara ekonomi berdasarkan jenis	162-170
FS14	Inisiatif untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan untuk orang-orang yang kurang beruntung	162-170
FS15	Kebijakan untuk desain yang adil dan penjualan produk dan layanan keuangan	152, 154
FS16	Inisiatif untuk meningkatkan literasi keuangan berdasarkan jenis penerima manfaat	162-170

Sustainability Accounting Standard Board (SASB)

Indikator	Pengungkapan	Halaman
	Metrik Aktivitas	
FN-CB-000.A	(1) Jumlah dan (2) nilai rekening giro dan tabungan menurut segmen: (a) pribadi dan (b) usaha kecil	26
FN-CB-000.B	(1) Jumlah dan (2) nilai pinjaman menurut segmen: (a) pribadi dan (b) usaha kecil	62
	Keamanan Data	
FN-CB-230a.1	(1) Jumlah pelanggaran data (2) persentase informasi identifikasi pribadi (3) jumlah rekening yang terpengaruh	123
FN-CB-230a.2	Pendekatan untuk menangani risiko keamanan data	123-136
	Inklusi Keuangan dan Capacity Building	
FN-CB-240a.1	(1) Jumlah dan (2) total pinjaman yang memenuhi syarat untuk program promosi usaha kecil dan pengembangan masyarakat	64-68
FN-CB-240a.2	(1) Jumlah dan (2) total pinjaman jatuh tempo dan non-akrual yang memenuhi syarat untuk mempromosikan usaha kecil dan pengembangan masyarakat	64-68
FN-CB-240a.3	Jumlah rekening yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau yang menghadapi keterbatasan akses	162- 170
FN-CB-240a.4	Jumlah peserta literasi keuangan untuk nasabah yang tidak memiliki rekening bank, atau kurang terlayani	162- 170
	Inkorporasi Tata Kelola, Sosial, dan Lingkungan di Analisis Kredit	
FN-CB-410a.2	Pendekatan untuk memasukkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam analisis kredit	37, 73-82
	Emisi yang Dibiayai	
FN-CB-410b.1	Emisi bruto absolut yang dibiayai, dipilah berdasarkan (1) Cakupan 1, (2) Cakupan 2, dan (3) Cakupan 3	85, 87-88, 92
FN-CB-410b.2	Eksposur bruto untuk setiap industri berdasarkan jenis aset	87-88
FN-CB-410b.3	Persentase paparan bruto yang termasuk dalam perhitungan emisi yang dibiayai	87-88
FN-CB-410b.4	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi yang dibiayai	87-88
	Etika Bisnis	
FN-CB-510a.2	Deskripsi kebijakan dan prosedur whistleblowing	49
	Sistem Manajemen Risiko	
FN-CB-550a.1	Skor Global Systemically Important Bank (G-SIB), berdasarkan kategori	Tidak diaplikasikan.
FN-CB-550a.2	Deskripsi pendekatan untuk memasukkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam analisis kredit ke dalam perencanaan kecukupan modal, strategi perusahaan jangka panjang, dan aktivitas bisnis lainnya	35-38, 74-82

Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Level 1

B. Keberlanjutan dan Ketanggunan

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.1	**Pengungkapan yang terkait dengan keberlanjutan harus konsisten, sebanding, dan dapat diandalkan, serta mencakup informasi material retrospektif serta berwawasan ke depan sehingga akan dianggap penting oleh investor dalam membuat keputusan investasi atau pemungutan suara.**	
Informasi terkait Keberlanjutan Material harus ditentukan		
B.1.1	Apakah Perseroan mengidentifikasi melaporkan topik ESG yang material terhadap strategi organisasi?	51-54
B.1.2	Apakah Perseroan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai suatu isu?	51-54, 71-87
B.1.3	Apakah Perseroan mengadopsi kerangka pelaporan atau standar keberlanjutan yang diakui secara internasional (yaitu GRI, Pelaporan Terpadu, SASB, Standar Pengungkapan Keberlanjutan IFRS)?	50
Jika sebuah Perseroan menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan secara publik, kerangka pengungkapan tersebut harus memastikan diungkapkannya secara berkala metrik yang andal dan mudah diakses.		
B.1.4	Apakah Perseroan mengungkapkan target keberlanjutan kuantitatif?	14-17, 57, 60-61, 63-64, 71, 187
B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pencapaian kinerja terkait keberlanjutan dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya?	14-17, 61, 63-64, 187
B.1.6	Apakah Perseroan menegaskan bahwa Laporan/Pelaporan Keberlanjutannya ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan?	50-51, 194-195
B.2	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memfasilitasi dialog antara Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan agar dapat bertukar pandangan tentang masalah keberlanjutan.**	
B.2.1	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	51, 156-158
B.2.2	Apakah Perseroan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan umpan balik tentang masalah keberlanjutan yang penting bagi bisnis Perseroan?	51, 156-158
B.3	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa Direksi telah cukup mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika menjalankan fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang terkait dengan iklim.**	
Direksi harus menilai apakah struktur modal Perseroan telah sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait untuk memastikan ketahanan Perseroan terhadap berbagai kondisi.		
B.3.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Direksi melakukan tinjauan tahunan untuk melihat apakah struktur modal dan utang Perseroan sesuai dengan tujuan strategis dan selera risiko terkait?	72-73

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
B.4	**Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang atau melalui kesepakatan bersama dan mendorong kerja sama aktif antara Perseroan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan Perseroan yang sehat secara finansial.**	
Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang membahas:		
B.4.1	Adanya upaya Perseroan serta ruang lingkupnya dalam memenuhi kesejahteraan pelanggan?	123-145
B.4.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?	159
B.4.3	Upaya Perseroan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau sejalan dengan upaya mempromosikan pembangunan berkelanjutan?	159
B.4.4	Upaya Perseroan untuk berinteraksi dengan masyarakat tempat mereka beroperasi?	160-164, 169
B.4.5	Program dan prosedur antikorupsi Perseroan?	46-47
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi?	83, 141
B.4.7	Apakah Perseroan memiliki laporan/bagian terpisah yang membahas upaya-upayanya dalam isu lingkungan/ekonomi dan sosial?	Ya
B.5	**Jika kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan mesti memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.**	
B.5.1	Apakah Perseroan menyediakan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyuarakan keprihatinan dan/atau keluhan mereka atas kemungkinan pelanggaran hak-hak mereka?	137-138
B.6	**Mekanisme untuk partisipasi karyawan mesti diperbolehkan untuk dikembangkan.**	
B.6.1	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawannya?	120-122
B.6.2	Apakah Perseroan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik mengenai program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya?	100-110
B.6.3	Apakah Perseroan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang memperhitungkan kinerja Perseroan selain pengukuran finansial jangka pendek?	114-116
B.7	**Para pemangku kepentingan, termasuk karyawan perorangan dan badan perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengomunikasikan keprihatinan mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada Dewan, sementara hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan hanya karena mereka melakukan hal tersebut.**	
B.7.1	Apakah Perseroan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai dugaan perilaku ilegal dan tidak etis dan memberikan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau laporan tahunan?	49
B.7.2	Apakah Perseroan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/orang yang mengungkapkan dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan pembalasan?	49

Level 2 - Bonus

No.	Prinsip dan Rekomendasi	Halaman
(B) B.1		
(B) B.1.1	Apakah Perseroan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	72-88
(B) B.1.2	Apakah Perseroan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya diverifikasi secara eksternal?	Ya, 51, 190-193
(B) B.1.3	Apakah Perseroan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana Perseroan menanggapi masalah ESG para pemangku kepentingan?	156-158
(B) B.1.4	Apakah Perseroan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	31-34
(B) B.1.5	Apakah Perseroan mengungkapkan pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	31-34
(B) B.1.6	Apakah Perseroan mengungkapkan hubungan antara remunerasi Direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	Batasan kerahasiaan
(B) B.1.7	Apakah Sistem Pengungkapan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Perseroan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	Ya, 49

Lembar Umpan Balik

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menerbitkan Laporan Keberlanjutan untuk memberikan gambaran atas kinerja keberlanjutan dan penerapan keuangan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. Kami mengharapkan masukan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu/Saudara setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini.

PROFIL ANDA

Nama (bila berkenan) :
Institusi/Perusahaan :
Surel :
Telp/Hp :

GOLONGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- ◯ Pemerintah/OJK
- ◯ Pemegang saham/investor
- ◯ Nasabah
- ◯ Pegawai
- ◯ Pemasok
- ◯ Organisasi bisnis
- ◯ Media
- ◯ Serikat Pekerja
- ◯ Masyarakat
- ◯ Lain-lain .....

Mohon pilih jawaban berikut yang paling sesuai dengan pertanyaan di bawah.

	Ya	Tidak
1. Laporan ini mudah dimengerti.	( )	( )
2. Laporan ini bermanfaat bagi Anda.	( )	( )
3. Laporan ini sudah memaparkan kinerja keberlanjutan secara jelas. Laporan ini sudah mengungkapkan topik-topik material yang relevan bagi Perseroan.	( )	( )

Saran lainnya untuk meningkatkan informasi dalam laporan ini .....

Terima kasih atas partisipasi Anda.

Kami mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan kemajuan laporan ini di tahun yang akan datang. Pengembalian formulir dan hal lain terkait Laporan Keberlanjutan dapat disampaikan kepada:

Divisi Environmental Social & Governance
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Gma BNI, Lt.20
Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta 10220 Indonesia
Telepon : (62-21) 572 8644
Surel : esg@bni.co.id

Danantara Indonesia

BNI



LAPORAN OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN

JUNI 2025

Daftar Isi

01 Pendahuluan

02 Ringkasan Kerangka Kerja & Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan BNI

03 Alokasi Dana Hasil Penerbitan

04 Pelaporan Dampak

01 | Pendahuluan

Sebagai salah satu bank yang memiliki peran strategis dalam mendorong keuangan berkelanjutan di Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) terus memperkuat komitmennya untuk menjadi katalis dalam transformasi menuju ekonomi hijau. BNI menyadari bahwa pergeseran menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, tetapi juga merupakan strategi bisnis jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perusahaan. Melalui pendekatan ini, BNI menggerakkan seluruh lini organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan praktik keuangan yang bertanggung jawab dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.

Transformasi menuju ekonomi hijau tercermin melalui komitmen BNI dalam penyaluran pembiayaan ke proyek-proyek hijau yang mendukung transisi energi, efisiensi sumber daya, dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan upaya pembiayaan hijau tersebut, BNI juga memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Sebagai bagian dari komitmen ini, BNI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) pertama pada Juni 2022 dalam denominasi rupiah sebesar Rp5 triliun. Penerbitan green bond ini merupakan langkah konkret dalam mendukung pengembangan proyek-proyek hijau yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon di Indonesia.

Dana dari green bond tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai inisiatif yang selaras dengan prinsip lingkungan dan mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau. Melalui komitmen yang konsisten, BNI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi aktif dalam menciptakan ekosistem keuangan hijau nasional.



02 | Kerangka Obligasi Berwawasan Lingkungan dan Penerbitan

A. Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan

Sebelum Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan pada bulan Juni 2022, BNI telah mengembangkan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan dan melibatkan Sustainalytics untuk memberikan Opini Pihak Kedua (SPO). BNI telah menyelaraskan kerangka Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, Green Bond Principles 2021 (GBP) yang diterbitkan International Capital Market Association (ICMA) dan ASEAN Green Bond Standards 2018. Berikut merupakan ringkasan kerangka kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan BNI:

Penggunaan Hasil

Dana yang diperoleh dari Obligasi Berwawasan Lingkungan akan digunakan khusus untuk membiayai atau membiayai Kembali aset-aset yang terkait langsung dengan "Proyek Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Syarat" sesuai dengan Prinsip-prinsip Obligasi Berwawasan lingkungan.

Proyek Berwawasan lingkungan yang Memenuhi Syarat harus sesuai dengan sekurang-kurangnya satu dari kategori berikut ini :

1. Energi Terbarukan
2. Efisiensi Energi
3. Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah
4. Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan
5. Konservasi keanekaragaman Hayati Darat dan Air
6. Transportasi Ramah Lingkungan
7. Pengolahan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan
8. Adaptasi Perubahan Iklim
9. Gedung Berwawasan Lingkungan
10. Pertanian Berkelanjutan

Proses Evaluasi & Seleksi Proyek



BNI telah membentuk Sub Komite ESG yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memilih proyek yang sesuai dengan kriteria Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan



Debitur harus memenuhi syarat untuk menjadi debitur BNI, sebagaimana yang ditentukan oleh unit usaha dan penilaian risiko kredit yang dilakukan oleh unit risiko



Debitur memenuhi kriteria Risk Acceptance Criteria (RAC) berdasarkan penilaian Manajemen Risiko Bank

B. Manajemen Dana yang Diperoleh



Penerimaan Dana Masuk

Divisi Treasury dan Divisi Corporate Planning and Performance Management BNI akan bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana yang akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat berdasarkan penilaian Sub Komite ESG.

Pelacakan

Bank akan melacak dan melaporkan penarikan dana yang digunakan untuk pembiayaan dan pembiayaan kembali terhadap proyek yang memenuhi syarat.

Dana yang Belum Dialokasikan

Dana yang belum dialokasikan akan disimpan sementara dalam bentuk tunai atau dengan setara kas.

C. Pelaporan

Pelaporan Alokasi

BNI akan menerbitkan Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan setiap tahun, dimulai paling lambat satu tahun setelah dana hasil penerbitan pertama diterima. Laporan ini disusun untuk memberikan transparansi kepada investor dan regulator terkait implementasi Kerangka Kerja yang telah ditetapkan.

Pelaporan Dampak

BNI akan menerbitkan dampak lingkungan dan/atau sosial dari aset yang memenuhi syarat yang dibiayai dari Obligasi Berwawasan Lingkungan yang diterbitkan. Adapun, indikator dampak positif kuantitatif dalam laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan BNI meliputi indikator-indikator sebagai berikut :

No.	Dampak Lingkungan	Indikator
1.	Energi Terbarukan	• Estimasi pembangkitan energi terbarukan per tahun dalam MWh/GWh (listrik) dan GJ/TJ (energi lainnya) • Estimasi emisi Gas Rumah Kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO2
2.	Transportasi Ramah Lingkungan	• Estimasi emisi gas rumah kaca per tahun yang dikurangi/dihindari dalam ton ekuivalen CO2 • Jumlah kendaraan ramah lingkungan yang diluncurkan • Estimasi kilometer dan jalur kereta/jalur khusus Bus, BRT, koridor LRT, jalur sepeda baru atau yang disempurnakan

No.	Dampak Lingkungan	Indikator
3.	Gedung Berwawasan Lingkungan	• Persentase penggunaan energi yang dikurangi/dihindari vs data awal/kode gedung setempat • Estimasi gas rumah kaca per tahun yang dikurangi/dihindari vs data awal setempat/tingkat sertifikasi awal setempat • Tingkat sertifikasi per properti
4.	Pengolahan Sampah Menjadi Energi dan Manajemen Limbah	• Estimasi Ton limbah yang dialihkan atau didaur ulang
5.	Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan	• Estimasi jumlah Hektar yang dilindungi dan/atau bersertifikat • Estimasi jumlah pohon yang ditanam dalam proyek reboisasi yang disertifikasi oleh FSC/PEFC

D. Penerbitan

Pada 21 Juni 2022, BNI menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan dengan jumlah pokok Rp 5 triliun. Surat utang ini diterbitkan dalam 2 seri yakni Seri A jumlah pokok Rp 4 triliun dengan jangka waktu 3 tahun, dan Seri B jumlah pokok Rp 1 triliun dengan jangka waktu 5 tahun.

Transaksi tersebut merupakan :

- Penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan yang pertama yang dilakukan oleh Bank di Indonesia
- Obligasi Berwawasan Lingkungan milik BNI diminati investor pada saat *bookbuilding* yaitu mencapai *oversubscribe* sebesar 3,1 kali

Ringkasan Kesepakatan	
Instrumen	Obligasi Korporasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Domestik yang memenuhi Ketentuan POJK 60/2017 tentang Obligasi Berwawasan Lingkungan
Total Emisi	• Rp. 5.000.000.000.000 (Lima Triliun Rupiah) • Seri A Tenor 3 Tahun 6,35% sebesar Rp. 4 Triliun • Seri B Tenor 5 Tahun 6,85% sebesar Rp. 1 Triliun • Average tenor 3,4 tahun dan Kupon di 6,43%
Rating	idAAA (PEFINDO)
Tanggal Jatuh Tempo	• Seri A : 21 Juni 2025 • Seri B : 21 Juni 2027
Tanggal Penyelesaian	21 Juni 2022
Penggunaan Hasil	Ekspansi bisnis, *refinancing* dan *reprofiling funding* dengan mempertimbangkan ketentuan POJK 60/2017 (minimal 70% pemanfaatan kategori KUBL)
Listing	PT Bursa Efek Indonesia
Final Orderbook	Rp. 15.300.000.000.000
Oversubscription rate	3,1x

03 | Alokasi Dana Hasil Penerbitan

Per Desember 2024, BNI telah mengalokasikan 100% dari hasil Obligasi Berwawasan Lingkungan BNI 2022. Rincian Alokasi adalah sebagai berikut:

Kategori yang Layak	Dibiayai/ Dibiayai Kembali	Jumlah yang Dialokasikan	Alokasi Hasil
Energi Terbarukan	Dibiayai	Rp. 1.915 Miliar	38,30%
	Dibiayai Kembali	Rp. 93 Miliar	1,86%
Transportasi Ramah Lingkungan	Dibiayai Kembali	Rp. 2.324 Miliar	46,48%
Gedung Berwawasan Lingkungan	Dibiayai Kembali	Rp. 305 Miliar	6,10%
Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah	Dibiayai Kembali	Rp. 83 Miliar	1,66%
Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan	Dibiayai Kembali	Rp. 280 Miliar	5,60%
Total		**Rp. 5.000 Miliar**	**100%**

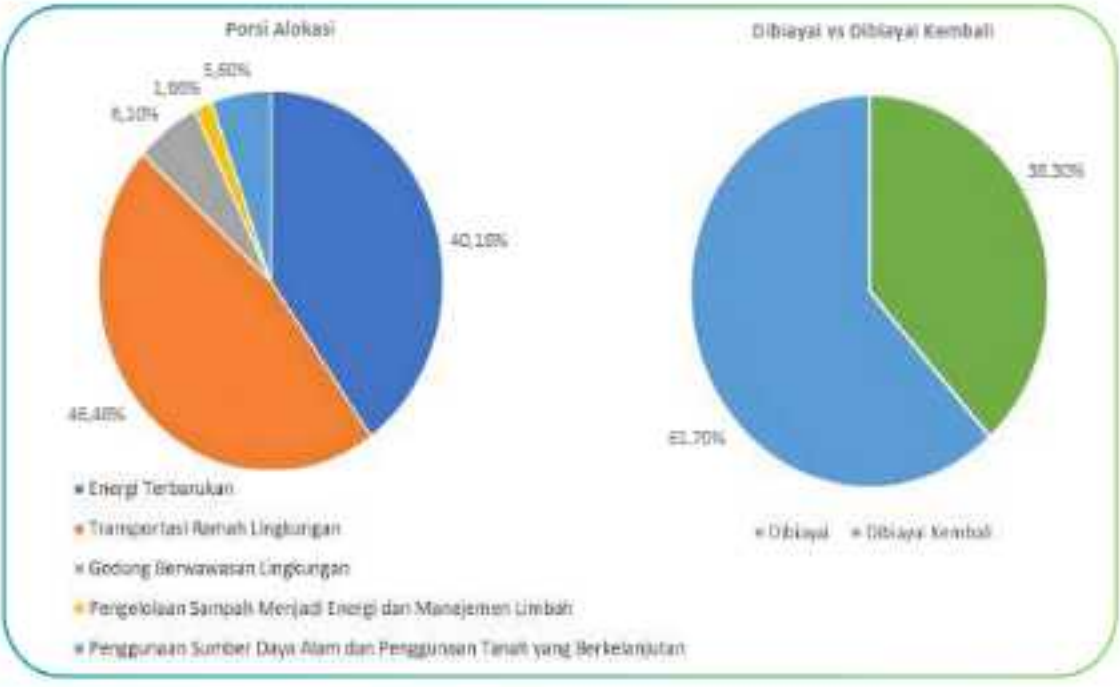

BNI telah melakukan penyaluran 100% atas dana Obligasi Berwawasan Lingkungan pada 10 kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Berdasarkan ketentuan tersebut pula, diatur bahwa minimal penyaluran dana hasil penerbitan dari Obligasi Berwawasan Lingkungan bagi pembiayaan yang dikategorikan KUBL adalah sebesar 70% dari nilai *bond* yang diterbitkan sehingga BNI telah memenuhi syarat penyaluran dana Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut. Adapun penyaluran yang sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah sebesar 100%, dimana 40,18% disalurkan kepada kategori Energi Terbarukan, Transportasi Ramah Lingkungan sebesar 46,48%, Gedung Berwawasan Lingkungan sebesar 6,08%, Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah sebesar 1,66% dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan sebesar 5,60%, dari 10 Kategori yang ada pada Kerangka Kerja Obligasi Berwawasan Lingkungan.



Energi Terbarukan

Alokasi dana Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk kategori Energi Terbarukan dilakukan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Proyek-proyek tersebut mampu memberikan kontribusi langsung dalam penyediaan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau serta peningkatan proporsi bauran energi terbarukan serta penurunan emisi GRK.

Proyek yang dibiayai memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk SGDs :



A. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) adalah proyek pembangkit yang menggunakan energi potensial dari daerah aliran sungai Cikaengan, Desa Pandeuy, Kecamatan Pandeuy, Kabupaten Garut. PLTMH tersebut berkapasitas 5,1 MW berkontribusi dalam penyediaan listrik bagi rumah tangga serta mendukung peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di daerah tersebut.



B. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dari panel surya fotovoltaik yang mampu mengubah tenaga surya menjadi listrik, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Proyek PLTS yang terhubung ke jaringan listrik ini berlokasi di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan kapasitas 25 MW dan mampu menghasilkan serta menyalurkan listrik secara langsung.



C. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) merupakan pembangkit yang memanfaatkan energi angin dan berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. PLTB ini memiliki kapasitas 70 MW dan akan disalurkan ke jaringan listrik nasional untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat.



D. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah proyek pembangkit yang menggunakan energi potensial dari sungai di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. PLTA tersebut berkapasitas 2 x 87 MW berkontribusi dalam meningkatkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sumatera Utara dan mendukung ketersediaan pasokan listrik.

Dampak Lingkungan

1.352.932 (tCO2eq/tahun)
Emisi GRK yang terhindarkan per tahun

1.477.000 (MWh/tahun)
Energi yang dihasilkan per tahun

Dampak Lainnya

113.700 Kepala Keluarga
Akses energi bersih dan terjangkau

107 Orang
Jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek

1.434 Orang
Jumlah masyarakat lokal yang dipekerjakan



Transportasi Ramah Lingkungan

Proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek adalah proyek sistem kereta jalur tunggal bertenaga listrik yang akan menghubungkan Kota Jakarta dengan beberapa kota di sekelilingnya seperti Bogor, Depok, dan Bekasi. Proyek transportasi berbasis rel ini akan diintegrasikan dengan moda transportasi yang sudah tersedia (Bis Transjakarta, kereta komuter, terminal bis, fasilitas *park and ride*, serta bandara) di beberapa titik stasiun. Proyek LRT Jabodebek memiliki total panjang jalur rel kereta 44,4 Km dan dengan jumlah penumpang sebanyak 21.055.870 orang/tahun.

Proyek yang dibiayai memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk SGDs :



Dampak Lingkungan

23.741* (tCO2eq/tahun)
Emisi GRK yang terhindarkan per tahun

341.019 GJ
Penghematan energi per tahun

Dampak Lainnya

2.295 Orang
Jumlah masyarakat lokal yang dipekerjakan

39 Orang
Jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek

Keterangan:
*Perhitungan menggunakan emission factor yang mengacu pada IPCC 2006 dan hasil perhitungan dari LRT Jabodebek

Gedung Berwawasan Lingkungan

Kategori Gedung berwawasan Lingkungan dilakukan kepada proyek pembangunan Gedung dengan standar Gold menurut Greenship atau lebih tinggi, yang dikembangkan oleh Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) atau standar lainnya yang diakui nasional atau internasional atau sertifikasi kinerja lingkungan hidup, yang terdiri dari enam kategori yaitu tepat guna lahan, efisensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber & siklus material, kualitas udara & kenyamanan udara serta manajemen lingkungan bangunan.

Gedung berwawasan lingkungan berlokasi di Kota Depok dan memiliki 5 lantai yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan serta memiliki ruang terbuka hijau dengan luas 14.132 m². Gedung tersebut telah mendapatkan sertifikat Green Mark dari BCA (Building and Construction Authority) dengan pencapaian Platinum pada tahun 2023.

Proyek yang dibiayai memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk SGDs :



Dampak Lingkungan

7.869* (tCO2eq/tahun)

Emisi GRK yang terhindarkan per tahun

Dampak Lainnya

10 Orang

Jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek

Sertifikat

Platinum Level

Keterangan:
*Perhitungan menggunakan pendekatan penelitian di Indonesia yang memperlimbangkan kWh/m2/tahun dan hasil benchmarking bangunan rotol secara global.

Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah

Alokasi hasil Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk kategori Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah digunakan untuk mendanai proyek-proyek pengolahan sampah, termasuk daur ulang menjadi bahan baku sekunder serta pengomposan anaerobik menjadi pupuk organik. Proyek-proyek ini berkontribusi pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta pengurangan timbulan sampah secara signifikan.

Berikut adalah proyek-proyek dari Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah :

- Proyek pengolahan limbah abu logam yang didaur ulang menjadi bahan baku sekunder berupa Zinc Oxide.
- Proyek pengolahan sampah kebun dan/atau sampah organik yang didaur ulang menjadi pupuk organik.

Proyek yang dibiayai memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk SGDs :



Dampak Lingkungan

249.976 (tCO2eq/tahun)
Emisi GRK yang terhindarkan per tahun

1.543.090 (Ton/tahun)
Total limbah yang didaur ulang

Dampak Lainnya

180 Orang
Jumlah masyarakat lokal yang dipekerjakan

30 Orang
Jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek

Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan

Kategori Sumber Daya Alam dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan diterapkan pada proyek konsesi hutan yang memiliki rencana pengelolaan berkelanjutan bersertifikasi FSC, yang berlokasi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Proyek ini melindungi dan memelihara spesies pohon yang mampu menangkap dan menyimpan karbon dioksida.

Proyek yang dibiayai memberikan kontribusi secara tidak langsung untuk SGDs :



Dampak Lingkungan

626.342 (tCO2eq/tahun)
Emisi GRK yang terhindarkan per tahun

55.899 Pohon
Jumlah pohon yang ditanam dalam proyek reboisasi

314.387 (Ha)
Jumlah hektar yang dilindungi dan/bersertifikat

Dampak Lainnya

408 Orang
Jumlah masyarakat lokal yang dipekerjakan

23 Orang
Jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek

LAPORAN REVIU AHLI LINGKUNGAN

Review Report by Environmental Expert

SDGs Hub Universitas Indonesia, selaku Ahli Lingkungan dipilih untuk melakukan reviu Laporan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan BNI Tahun 2025 (*Green Bond Report*) dengan disertakan beberapa data pendukung terkait penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan BNI tahun 2022 (*Green Bond 2022*) berikut kerangka kebijakan *Green Bond* tersebut. Ahli Lingkungan memiliki kompetensi pengalaman dan berijazah yang relevan dalam kegiatan berwawasan lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan (Lampiran I).

Tanggung Jawab Manajemen BNI

Tanggung jawab manajemen BNI atas penyusunan dan penyajian *Green Bond Report* 2025 tersebut sesuai dengan *Green Bond Framework* Bank BNI dan POJK No. 60 Tahun 2017.

Tanggung Jawab Ahli Lingkungan

Tanggung jawab Ahli Lingkungan adalah untuk melakukan reviu *Green Bond Report* dan beberapa dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan POJK No. 60 Tahun 2017. Reviu yang kami lakukan mencakup kesesuaian implementasi pemilihan proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("KUBL") sebagaimana tertera di dalam *Green Bond Framework* dan pada POJK 60 Tahun 2017. Meski telah terbit POJK No. 18 tahun 2023 pengganti POJK 60 Tahun 2017 tetapi Emiten yang telah melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebelum POJK 18 Tahun 2023 ini berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Penyaluran dana hasil penerbitan *Green Bond* 2022 ke proyek KUBL terpilih, sesuai *Green Bond Framework*. BNI telah melakukan penyaluran 100% atas dana penerbitan *Green Bond* 2022 berdasarkan POJK No. 60/2017. Ahli Lingkungan melakukan reviu terhadap dampak lingkungan yang tertuang dalam *Green Bond Report* 2025 dan menyesuaikan dengan data yang tersedia.

SDGs Hub Universitas Indonesia, as the Environmental Expert chosen to review the 2025 BNI Sustainable Environmentally Friendly Bonds Report (Green Bond Report) which includes several supporting data related to the issuance of BNI's 2022 Sustainable Environmentally Friendly Bonds (Green Bond 2022) and the Green Bond policy framework. Environmental Experts have relevant experience and certificate competencies in environmentally friendly and sustainable development activities (Appendix I).

Management Responsibilities

BNI management's responsibility for the preparation and presentation of the 2025 Green Bond Report is in accordance with BNI's Green Bond Framework and Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 60 of 2017.

Responsibilities of Environmental Experts

The Environmental Expert's responsibility is to review the Green Bond Report and several other supporting documents following the provisions of POJK No. 60 of 2017. The review we conducted assessed the suitability of implementing the Environmentally Friendly Business Activities ("KUBL") projects as outlined in the Green Bond Framework and POJK 60 of 2017. Even though POJK No. 18 of 2023 replaces POJK 60 of 2017, Issuers who have issued Environmentally Friendly Debt Securities before POJK 18 of 2023 comes into force still follow the provisions as regulated in POJK No. 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirements for Environmentally Friendly Debt Securities (Green Bond). Distribution of funds from the issuance of Green Bond 2022 to selected KUBL projects, in accordance with the Green Bond Framework. BNI has distributed 100% of the funds from the issuance of Green Bond 2022 based on POJK No. 60/2017. Environmental experts reviewed the environmental impacts contained in the Green Bond Report 2025 and adjusted them to the available data.

Hasil Reviu

Hasil reviu atas *Green Bond Report* 2025 terhadap penyaluran alokasi kegiatan yang didanai oleh hasil penerbitan *Green Bond* 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan proyek pada sektor KUBL dalam penyaluran dana hasil penerbitan *Green Bond* 2022 telah sesuai dengan *Green Bond Framework*, meskipun penamaan untuk satu KUBL produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi digunakan penamaan sesuai proyek yaitu pengelolaan sampah menjadi Energi dan manajemen sampah.

2) Tidak ada perubahan realisasi alokasi dana hasil penerbitan *Green Bond* 2022 untuk membiayai lima sektor KUBL yang telah disetujui. Lima KUBL tersebut adalah energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (pengelolaan sampah menjadi energi dan manajemen sampah), dan Gedung Ramah Lingkungan (halaman 7 dalam Laporan Tahunan).

3) Dana *Green Bond* ini dialokasikan 100% untuk kegiatan yang termasuk di dalam KUBL (POJK No. 60/2017). Adapun, sampai tahun ketiga penyaluran yang sesuai dengan BNI *Green Bond Framework* adalah sebesar 100%, dengan rincian yaitu energi Terbarukan sebesar 38,30% untuk proyek baru dibiayai dan 1,86% proyek dibiayai kembali, Transportasi Ramah Lingkungan sebesar 46,48%, Gedung Berwawasan Lingkungan sebesar 6,10%, Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manajemen Limbah (produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*) sebesar 1,66% dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan sebesar 5,60%.

Review Results

The results of the review of the 2025 Green Bond Report regarding the distribution of activity allocations funded by the proceeds of the 2022 Green Bond issuance are as follows:

1) The selection of projects in the KUBL sector for the distribution of funds from the 2022 Green Bond issuance follows the Green Bond Framework, although the naming of one KUBL product that can reduce resource use and produce less pollution is used according to the project, namely waste management into Energy and management rubbish.

2) There is no change in the realization of the allocation of funds from the issuance of Green Bond 2022 to finance the five approved KUBL sectors. The five sectors are renewable energy, environmentally friendly transportation, natural resource management, and sustainable land use, products that can reduce resource use and produce less pollution (waste to energy and waste management), and environmentally friendly buildings (page 7 in the Annual Report)

3) This green bond fund is allocated 100% for activities included in KUBL (POJK No. 60/2017). Meanwhile, until the third year of distribution in accordance with the BNI Green Bond Framework is 100%, with details, namely Renewable energy of 38.30% for newly financed projects and 1.86% for refinanced projects, Environmentally Friendly Transportation of 46.48%, Environmentally Conscious Buildings of 6.10%, Waste Processing into Energy and Waste Management (products that can reduce resource use and produce less pollution (eco-efficient) of 1.66% and Sustainable Use of Natural Resources and Land Use of 5.60%.

4) Pelaporan dampak dari 5 KUBL yaitu:

1. Energi Terbarukan: (1) Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) dengan kapasitas 5,1 MW di DAS Cikaengan Desa Pandeuy Kecamatan Pandeuy Kabupaten Garut, energi yang dihasilkan 22.280 MWh pertahun, memberikan dampak lingkungan dapat menghindari emisi GRK 19.384 tCO2eq/tahun, jumlah pekerja lokal sebanyak 24 orang dan yang menerima pelatihan 8 orang, dan dapat diakses 5.500 Kepala Keluarga; (2) Energi Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 25 MW di Karangasem Provinsi Bali dan dampak lingkungan dapat menghindari emisi GRK sebesar 49.747 tCO2eq/tahun, energi yang dihasilkan 57.181 MWh pertahun, 115.588 Kepala Keluarga dapat mengakses energi bersih dan terjangkau, penduduk lokal yang diperkerjakan sebanyak 120 orang dengan 34 orang jumlah pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian proyek; 3) Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 70 MW menghasilkan energi sebesar 215.372 MWh pertahun, emisi GRK yang terhindari sebesar 204.603 tCO2eq/tahun, jumlah kepala keluarga yang dapat akses energi bersih dan terjangkau sebanyak 150.000 orang, jumlah karyawan dari masyarakat lokal yang dapat diperkerjakan sebanyak 30 orang dengan seluruh pekerja lokal mendapat pelatihan terkait pengoperasian proyek; Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan kapasitas 2 x 87 MW, menghasilkan energi sebesar 1.477.000 MWh pertahun, emisi GRK yang terhindarkan sebesar 1.352.932 tCO2eq/tahun, jumlah kepala keluarga yang dapat mengakses energi bersih dan terjangkau sebanyak 113.700, jumlah masyarakat lokal yang diperkerjakan sebanyak 1.434 orang dan 107 orang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian. Secara keseluruhan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Energi Terbarukan yang dilakukan mendukung capaian SDGs Indonesia nomor 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, dan SDGs 13, tetapi yang terdapat dilaporan hanya untuk mencapai SDGs No 4, 7, 8, 12, 13. (Untuk detail Pelaporan Dampak Halaman 8-10).

4) Reporting the impact of 5 KUBLs, namely:

1. *Renewable Energy: (1) Mini Hydro Power Plant (PLTMH) with a capacity of 5.1 MW in the Cikaengan Watershed, Pandeuy Village, Pandeuy District, Garut Regency, the energy produced is 22,280 MWh per year, has an environmental impact of avoiding GHG emissions of 19,384 tCO2eq/year, the number of local workers is 24 people and 8 people receive training, and can be accessed by 5,500 Heads of Families; (2) Solar Power Plant (PLTS) with a total capacity of 25 MW in Karangasem, Bali Province and the environmental impact can avoid GHG emissions of 49.747 tCO2eq/year, the energy produced is 57,181 MWh per year, 115,588 Heads of Families can access clean and affordable energy, the number of local residents employed is 120 people with 34 workers receiving training related to project operations; 3) The Hydroelectric Power Plant (PLTB) in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi Province, with a capacity of 70 MW with a capacity of 70 MW produces energy of 215,372 MWh per year, avoided GHG emissions of 204.603 tCO2eq/year, the number of heads of families who can access clean and affordable energy is 150,000 people, the number of employees from the local community who can be employed is 30 people with all local workers receiving training related to project operations; Hydroelectric Power Plant (PLTA) in Asahan Regency, North Sumatra Province, with a capacity of 2 x 87 MW, produces energy of 1,477,000 MWh per year, avoided GHG emissions of 1.352.932 tCO2eq/year, the number of heads of families who can access clean and affordable energy is 113,700, the number of local people employed is 1,434 people and 107 people receive training related to operations. Overall, the Renewable Energy Environmentally Conscious Business Activities carried out support the achievement of Indonesia's SDGs numbers 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, and SDGs 13, but those included in the report are only to achieve SDGs No. 4, 7, 8, 12, 13. (For details on Impact Reporting, see Pages 8-10).*

2. Estimasi dampak lingkungan dari proyek Transportasi Ramah Lingkungan Light Rail Transit (LRT) yaitu 23.741 (tCO2eq/tahun) emisi GRK yang terhindarkan pertahun dengan penghematan energi sebesar 341.019 Gj (2024) yang memperkerjakan 2.295 orang karyawan dan sebanyak 39 orang pekerja yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian. Secara keseluruhan untuk KUBL Transportasi Ramah Lingkungan dapat mendukung capaian SDGs Nomor 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 dan SDGs No. 17, sedangkan yang tertulis di laporan Dampak hanya 4, 8, 9, 11, dan 13 (Halaman 11 Pelaporan Dampak).

2. *The estimated environmental impact of the Light Rail Transit (LRT) Green Transportation project is 23,741 (tCO2eq/year) avoided GHG emissions per year with energy savings of 341,019 Gj (2024), which employs 2,295 employees and 39 workers who receive training related to operations. Overall, the Green Transportation KUBL can support the achievement of SDGs Numbers 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, and SDGs No. 17, while only 4, 8, 9, 11, and 13 are written in the impact report (Page 11 Impact Reporting).*

3. Estimasi dampak lingkungan dari KUBL Gedung Berwawasan Lingkungan yang berlokasi Kota Depok yaitu terhindarinya 7.869 tCO2eq emisi gas rumah kaca pertahunnya dengan memperoleh sertifikat *Green Mark* dari *Building and Construction Authority* (BCA) dengan pencapaian Platinum. KUBL Gedung Berwawasan Lingkungan dapat mendukung capaian SDGs Nomor 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, dan SDGs No 17, sedangkan yang tertulis di pelaporan dampak hanya SDGs No. 4, 7, 11, 12, dan SDGs 13 (secara detail dapat dilihat pada Halaman 12 Pelaporan Dampak).

3. *The estimated environmental impact of the KUBL Environmentally Conscious Building, located in Depok City, is the avoidance of 7,869 tCO2eq of greenhouse gas emissions per year by obtaining a Green Mark certificate from the Building and Construction Authority (BCA) with a Platinum achievement. KUBL Environmentally Conscious Building can support the achievement of SDGs Numbers 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, and SDGs No. 17, while those written in the impact report are only SDGs No. 4, 7, 11, 12, and SDGs 13 (details can be seen on Page 12 of Impact Reporting).*

4. Estimasi dampak lingkungan dari KUBL Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Manjemen Limbah (produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (eco-efficient)) yaitu total limbah yang di daur ulang sebanyak 1.543.090 ton/tahun, dengan estimasi emisi GRK yang terhindarikan adalah 249.976 tCO2eq/tahun, dengan jumlah masyarakat lokal yang diperkerjakan sebanyak 180 orang, dan 30 orang yang menerima pelatihan berkaitan dengan pengoperasian. KUBL ini mendukung capaian SDGs nomor 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, dan SDGs 13, sedangkan yang tertulis di Pelaporan Dampak Halaman 13 hanya untuk SDGs nomor 4, 6, 8, 12, dan SDGs No. 13).

4. *Estimated environmental impact of KUBL Waste to Energy Processing and Waste Management (products that can reduce resource usage and produce less pollution (eco-efficient)), namely total recycled waste of 1,543,090 tons/year, with an estimated avoided GHG emissions of 249,976 tCO2eq/year, with the number of local people employed as many as 180 people, and 30 people who received training related to operations. This KUBL supports the achievement of SDGs numbers 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, and SDGs 13, while what is written in the Impact Reporting Page 13 is only for SDGs numbers 4, 6, 8, 12, and SDGs No. 13).*

5. Estimasi Dampak Lingkungan dari KUBL Penggunaan Sumber Daya Alam dan Penggunaan Tanah yang Berkelanjutan dengan menanam pohon sebanyak 55.899 pohon, dengan estimasi emisi GRK yang terhindarkan adalah 626.342 tCO2eq/tahun, luas area yang dilindungi dan bersertifikasi FSC (*Forest Stewardship Council*), dengan jumlah masyarakat lokal yang dipekerjakan sebanyak 408 orang dan 23 orang yang menerima pelatihan. Agar dapat diketahui lebih pasti dampak yang ditimbulkan, untuk berikutnya dapat digunakan area yang terdampak dan dampak relasionalnya. KUBL ini mendukung capaian SDGs nomor 4, 8, 13, 15 (telah sesuai dengan Laporan Dampak Halaman 14).

Indikator pada KUBL yang telah ditetapkan sebelumnya oleh BNI telah sesuai. Perhitungan emisi karbon sebagai dampak kegiatan akan lebih sempurna dengan menggunakan Faktor Emisi GRK Sistem Ketenagalistrikan dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 127.K/TL.03/MEM.S/2019, sedangkan untuk penghitungan dampak KUBL lainnya telah sesuai dengan best practices.

5. *Environmental Impact Estimation of KUBL Sustainable Use of Natural Resources and Land Use by planting 55,899 trees, with an estimated avoided GHG emissions of 626,342 tCO2eq/year, protected and FSC (Forest Stewardship Council) certified, with the number of local people employed as many as 408 people, and 23 people who received training. To better understand the impacts caused, the affected areas and their associated impacts can be used as a basis for the next step. This KUBL supports the achievement of SDGs numbers 4, 8, 13, 15 (in accordance with the Impact Report Page 14).*

The indicators in KUBL that have been previously set by BNI are appropriate. Calculation of carbon emissions as an impact of activities will be more perfect by using the GHG Emission Factor for the Electricity System from the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 127.K/TL.03/MEM.S/2019, while the calculation of other KUBL impacts is in accordance with best practices.

Jakarta, 17 Juni 2025
Jakarta, June 17th, 2025

Dr. Triarko Nurlambang, MA.

Prof. Dr. Jatna Supriatna, M.Sc

2025 Laporan Keberlanjutan

VALUE CREATION

for Greater Impacts

Grha BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220, Indonesia

E-mail : bnicall@bni.co.id
Website : bni.co.id
Solution Center : 1500 046
Tel. : 021 - 2511 946, 572 8587
Fax. : 021 - 572 8296, 572 9063

BNI
@BNI
@BNI46